

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA, SH
BUPATI BUTON

SYARIFUDIN SAAFA, ST
WAKIL BUPATI BUTON

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Kabupaten Buton

Tahun 2025-2029



Pemerintah Kabupaten Buton

SALINAN

BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BUTON TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, dan penjabaran visi, dan misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Buton untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Pajang Daerah, Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2015-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 58);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2003 Nomor 188);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 196);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH BUTON
dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dasar hukum Perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dasar hukum perencanaan pembangunan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dasar hukum perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dasar hukum perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintaah Daerah atau disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5(lima) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir peride perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II
PERUMUSAN RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD dirumuskan secara:
    a. transparan;

b. responsif;
c. efisien;
d. akuntabel;
e. partisipatif;
f. terukur;
g. berkeadilan;
h. berwawasan lingkungan; dan
i. berkelanjutan.

(2) Perumusan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memerhatikan kesesuaiannya terhadap:
a. RPJMN;
b. RPJMD Provinsi;
c. RPJPD;
d. rencana tata ruang wilayah Daerah;
e. visi, misi dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024; dan
f. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemeritah Daerah.

Pasal 3

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. panduan bagi penyelenggaraan Pembangunan Daerah jangka menengah;
b. pedoman dasar dalam:
1. penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
3. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah berdasarkan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
(4) RPJMD wajib ditaati oleh seluruh Perangkat Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

(1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Gambaran Umum Daerah;
c. Bab III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

e. Bab V : Penutup

(2) Isi dan uraian RPJMD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
VISI DAN MISI RPJMD

Pasal 5

(1) Visi RPJMD adalah "TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"

(2) Misi RPJMD adalah:
   a. meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya;
   b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat;
   c. meningkatkan pembangunan infrastrusktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
   d. meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal.

BAB V
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 6

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendaliaan dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
   c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) melakukan pemantauan terhadap pencapaian prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD setiap tahun dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati yang disertai dengan rekomendasi dan/atau sanksi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
    d. merugikan kepentingan nasional.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
    a. bencana alam;
    b. goncangan politik;
    c. krisis ekonomi;
    d. konflik sosial budaya;
    e. gangguan keamanan;
    f. pemekaran daerah; atau
    g. perubahan kebijakan nasioal.
(3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat terjadi apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dituangkan dalam RKPD periode berkenaan melalui Peraturan Bupati.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. perubahan asumsi ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaan;
    b. sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
    c. indikator, pagu indikatif dan target kinerja program Perangkat Daerah; dan
    d. struktur organisasi Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.

(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD atau RPJMD teknokratik periode berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
(3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 201

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 4/33/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai dokumen perencanaan strategis pembangunan lima tahunan di Kabupaten Buton.

Penyusunan RPJMD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Di samping itu, penyusunan dokumen ini juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029, sebagai acuan normatif dan teknokratik yang menyesuaikan dinamika pembangunan nasional dan daerah.

Dokumen ini disusun sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buton yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Buton yang Religius, Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Pembangunan Berkelanjutan".**

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 4 (empat) Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif, dan berbudaya;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal.

RPJMD ini juga disusun dengan memperhatikan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan nasional melalui RPJMN 2025–2029 (Asta Cita) serta memperhatikan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, guna memastikan keselarasan, sinergi, dan integrasi antar tingkat pemerintahan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memerlukan masukan, saran, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun akademisi. Oleh karena itu, besar harapan kami agar dokumen ini dapat menjadi dasar pijakan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buton lima tahun ke depan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I-5
1.4 Maksud dan Tujuan I-8
1.5 Sistematika Penulisan I-9

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-55
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-77
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-96
2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah..... II-109
2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu II-110
2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu II-141
2.2.3 Kerangka Pendanaan II-146
2.2.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan II-163
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah II-167
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah..... II-167
2.3.2 Isu Strategis Daerah II-179

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1
3.1.1 Visi dan Misi III-1
3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 ..... III-5
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-24
3.2.1 Tahapan Pembangunan Pembangunan Daerah III-32
3.2.2 Pengembangan Wilayah III-33
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 ..... III-71

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-30
4.2.1 Indikator Kinerja Utama IV-30
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah..... IV-32

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Kecamatan, Jumlah Pulau, dan Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Buton Tahun 2024	II	3
Tabel 2.2	Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tahun 2024	II	4
Tabel 2.3	Keadaan Iklim di Kabupaten Buton Tahun 2024	II	5
Tabel 2.4	Potensi Energi dan Sumber Daya Air di Kabupaten Buton	II	7
Tabel 2.5	Kinerja Sektor Perikanan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 ..	II	19
Tabel 2.6	Kinerja Sektor Pertanian Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 ...	II	21
Tabel 2.7	Pemetaan Potensi Obyek Saya Tarik Wisata Kabupaten Buton Dalam Desa/Kampung Wisata	II	31
Tabel 2.8	Kinerja Sektor Pariwisata Kabupaten Buton Tahun 2020-2024..	II	36
Tabel 2.9	Pemetaan Potensi Ekonomi Kreatif Pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Buton	II	38
Tabel 2.10	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2020-2024	II	40
Tabel 2.11	Daya Dukung Ketersediaan Pangan Tahun 2025.....	II	41
Tabel 2.12	Daya Dukung Ketersediaan Pangan tahun 2029	II	41
Tabel 2.13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	44
Tabel 2.14	Capaian Indikator Lingkungan Hidup Berkualitas Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	46
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	50
Tabel 2.16	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	50
Tabel 2.17	TIngkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024	II	51
Tabel 2.18	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	II	52
Tabel 2.19	Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 ...	II	53
Tabel 2.20	Proyeksi Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2025-2029	II	55
Tabel 2.21	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	56
Tabel 2.22	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut (persen) Tahun 2020-2024	II	58
Tabel 2.23	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	58
Tabel 2.24	PDRB per Kapita Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	60
Tabel 2.25	Penduduk Berumur Lima Belas Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	62
Tabel 2.26	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	65
Tabel 2.27	Indeks Kesehatan dan Usia Harapan Hidup Kabupaten Buton 2020-2024	II	66

Tabel 2.28	Penanganan Tuberkulosis di Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	68
Tabel 2.29	Capaian RIBK Kabupaten ButonTahun 2020-2024	II	70
Tabel 2.30	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten ButonTahun 2020-2024	II	70
Tabel 2.31	Perlidungan Sosial Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	72
Tabel 2.32	Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Buton Tahun 2024	II	73
Tabel 2.33	Indeks pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	77
Tabel 2.34	Pemduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2024	II	78
Tabel 2.35	Angka Ketergantungan Kabupaten Buton tahun 2020-2024	II	78
Tabel 2.36	Rasio PDRB Industri Pengelohan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	80
Tabel 2.37	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	80
Tabel 2.38	Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Buton Tahun 2021-2022	II	82
Tabel 2.39	Capaian Perekonomi Terbarukan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	85
Tabel 2.40	Capaian Perekonomian Sektor Informasi Komunikasi Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	86
Tabel 2.41	Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Buton Tahun 2020-2024.....	II	87
Tabel 2.42	Capaian Infrastruktur Kabupaten Buton Tahun 2020-2024.....	II	88
Tabel 2.43	Capaian Infrastruktur Perumahan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024.....	II	91
Tabel 2.44	Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Buton.....	II	91
Tabel 2.45	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2020-2024	II	96
Tabel 2.46	Jumlah Tindak Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	98
Tabel 2.47	Kerja Sama Daerah Tahun 2020-2024	II	99
Tabel 2.48	Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permndagri 18 Tahun 2020) Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	100
Tabel 2.49	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	107
Tabel 2.50	Skala Interval Otonomi Fiskal	II	111
Tabel 2.51	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II	111
Tabel 2.52	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024.....	II	120
Tabel 2.53	Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Buton Tahun 2020-2024.....	II	124
Tabel 2.54	Perkembangan Struktur Belanja Modal Kabupaten Buton Tahun 2020-2024.....	II	125
Tabel 2.55	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2023 (Dalam Juta)	II	128

Tabel 2.56	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	130
Tabel 2.57	Neraca Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	133
Tabel 2.58	Rincian Neraca Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	133
Tabel 2.59	Rasio Lancar Kabupaten Buton Tahun 2020-2024.....	II	137
Tabel 2.60	Rasio Hutang Kabupaten Buton Tahun 2020-2024.....	II	138
Tabel 2.61	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	139
Tabel 2.62	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	139
Tabel 2.63	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Buton Tahun 2020-2024)	II	141
Tabel 2.64	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	II	142
Tabel 2.65	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	II	144
Tabel 2.66	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	II	145
Tabel 2.67	Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Angggaran Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	145
Tabel 2.69	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Buton Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2026-2030	II	156
Tabel 2.70	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2026-2030	II	158
Tabel 2.71	Proyeksi APBD Kabupaten Buton Tahun 2026-2030	II	159
Tabel 2.72	Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Kabupaten Buton Tahun 2026-2030	II	164
Tabel 2.73	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2026-2030	II	166
Tabel 2.74	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Buton Tahun 2026-2030	II	166
Tabel 2.75	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Buton Tahun 2026-2030	II	166
Tabel 2.76	Permasalahan Perurusan Kabupaten Buton	II	175
Tabel 2.77	Relevansi Isu RPJMD Kabupaten Buton 2025-2029 dengan Isu RPJPD Kabupaten Buton 2025-2045.....	II	187
Tabel 2.78	Keterkaitan Isu KLHS RPJMD dengan Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Buton Tahun 2025-2029	II	188
Tabel 2.79	Arah Kebijakan per Tahapan dan Rekomendasi Program Tahap I Pengembangan Wilayah	II	194
Tabel 2.80	Tantangan dan Peluang Inovasi Kabupaten Buton	II	196
Tabel 2.81	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Buton	II	201
Tabel 2.82	Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Buton	II	202
Tabel 2.83	Kawasan Strategis Kabupaten Buton	II	203
Tabel 2.84	Teknik Merumuskan Isu Stratgeis RPJMD Kabupaten Buton 2025-2029	II	207

Tabel 3.1	Persandingan Visi nAsional, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Buton Tahun 2025-2029	III	2
Tabel 3.2	Leterkaitan Antara Visi RPJPD 2025-2045 dan Visi RPJMD Tahun 2025-2029	III	5
Tabel 3.3	Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030	III	6
Tabel 3.4	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025-2029	III	8
Tabel 3.5	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Buton	III	12
Tabel 3.6	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buton Tahun 2025-2029	III	24
Tabel 3.7	Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029	III	32
Tabel 3.8	Potensi dan Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Buton	III	34
Tabel 3.9	Highlight Indikasi Intervensi Nasional Terhadap Kabupaten Buton	III	35
Tabel 3.10	Highlight Indikasi Intervensi Provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap Kabupaten Buton	III	37
Tabel 3.11	Arah Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Buton Tahun 2025-2029	III	40
Tabel 3.12	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2026-2030	III	55
Tabel 3.13	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025-2029	III	72
Tabel 3.14	Program Unggulan Kepala Daerah Dalam Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buton Tahun 2025-2029	III	87
Tabel 3.15	Dukungan Program Daerah Terhadap Arahan RPJMN Tahun 2025-2029	III	95
Tabel 3.16	Dukungan Kabupaten Buton Terhadap Direktif Presiden	III	97
Tabel 3.17	Dukungan Kabupaten Buton Terhadap Arahan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029	III	98
Tabel 3.18	Dukungan Kabupaten Buton Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Nasional	III	102
Tabel 3.19	Dukungan Program Daerah Terhadap Kebijakan Kewilayahan Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029	III	103
Tabel 4.1	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2026-2030	IV	2
Tabel 4.2	Penetapan Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025-2030	IV	30
Tabel 4.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buton Tahun 2025-2030	IV	31
Tabel 4.4	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2030	IV	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I	5
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Buton	II	3
Gambar 2.2	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tahun 2024 (%)	II	4
Gambar 2.3	Potensi Perikanan Tangkap Kabupaten Buton	II	17
Gambar 2.4	Potensi Perikanan Budidaya Kabupaten Buton	II	18
Gambar 2.5	Peta Daya Dukung Pangan Tahun 2025	II	41
Gambar 2.6	Peta Daya Dukung Pangan Tahun 2025.....	II	42
Gambar 2.7	Peta Ketersediaan Air Bersih	II	43
Gambar 2.8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	44
Gambar 2.9	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum dan Listrik Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (persen)	II	44
Gambar 2.10	Persentasse Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	45
Gambar 2.11	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	48
Gambar 2.12	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 ...	II	49
Gambar 2.13	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2024 (persen)	II	50
Gambar 2.14	Distribusi Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2024	II	51
Gambar 2.15	Piramida Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2024	II	53
Gambar 2.16	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Buton Tahun 2020-2024.....	II	59
Gambar 2.17	PDRB Perkapita Atan Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	60
Gambar 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Tahun 2020-2024.....	II	61
Gambar 2.19	Rasio Gini Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	63
Gambar 2.20	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	II	64
Gambar 2.21	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	64
Gambar 2.22	Pertumbuhan IPM Kabupaten Buton Terhadap Daerah Sekitar dan Provinsi Tahun 2020-2024	II	65
Gambar 2.23	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) Tahun 2020-2024	II	67
Gambar 2.24	Persentase Anak Balita dengan Stunting Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	68
Gambar 2.25	Indeks Pendidikan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	71
Gambar 2.26	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Buton Tahun 2020-2023.....	II	72
Gambar 2.27	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Buton Tahun 2020-2024.....	II	74

Gambar 2.28	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Ibangga) Kabupaten Buton Tahun 2021- 2024	II	76
Gambar 2.29	Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Buton Tahun 2020-2023	II	77
Gambar 2.30	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah) Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	79
Gambar 2.31	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024	II	81
Gambar 2.32	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengan Kabupaten Tahun 2022-2024.....	II	81
Gambar 2.33	Perkembangan Data Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024.....	II	83
Gambar 2.34	Ratio Kewirausahaan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	83
Gambar 2.35	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	84
Gambar 2.36	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021-2024	II	84
Gambar 2.37	Indeks Infrastruktur Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	88
Gambar 2.38	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Buton Tahun 2020-2023	II	90
Gambar 2.39	Perkembangan Desa Mandiri (%) di Kabupaten Buton Tahun 2021-2024	II	92
Gambar 2.40	Ratio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%) Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	93
Gambar 2.41	Proporsi PDRB Jasa Keuangan dan Asuransi Kabupaten Buton Tahun 2020-2024.....	II	94
Gambar 2.42	Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	94
Gambar 2.43	Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	95
Gambar 2.44	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan di Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	98
Gambar 2.45	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II	113
Gambar 2.46	Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	113
Gambar 2.47	Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (dalam jutaan).....	II	115
Gambar 2.48	Rata-rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (%).....	II	116
Gambar 2.49	Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (juta rupiah).....	II	116
Gambar 2.50	Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	117
Gambar 2.51	Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (%).....	II	117
Gambar 2.52	Perkembangan Struktur Lain –Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (juta rupiah).....	II	118
Gambar 2.53	Perkembangan Belanja Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	123
Gambar 2.54	Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024.....	II	123

Gambar 2.55	Kontribusi Struktur Belanja Operasi Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	124
Gambar 2.56	Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	126
Gambar 2.57	Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II	129
Gambar 2.58	Target Komposisi PAD Kabupaten Buton dengan Kab/Kota Tahunan 2026-2030	II	150
Gambar 2.59	Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Buton Tahun 2026-2030	II	151
Gambar 2.60	Target Belanja Operasi Kabupaten Buton Tahun 2025-2030	II	154
Gambar 2.61	Permasalahan Kabupaten Buton	II	168
Gambar 2.62	Perbandingan LPE Kabupaten Buton dengan Kab/Kota se-Pulau Buton Tahun 2024	II	168
Gambar 2.63	Perbandingan IPM Kabupaten Buton dengan Kab/Kota se-Pulau Buton Tahun 2024	II	171
Gambar 2.64	Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Buton dengan Kab/Kota se-Pulau Buton Tahun 2024	II	172
Gambar 2.65	Isu Global	II	180
Gambar 2.66	Isu Nasional	II	181
Gambar 2.67	Peta Struktur Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara	II	200
Gambar 2.68	Perbandingan Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Buton	II	201
Gambar 2.69	Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Buton	II	201
Gambar 2.70	Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Buton	II	202
Gambar 2.71	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Buton	II	202
Gambar 3.1	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Buton dengan Misi RPJMN dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029	III	4
Gambar 3.2	Keterkaitan Misi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Buton	III	5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Buton merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi unggulan di berbagai sektor, seperti perikanan, kelautan, pertanian, pariwisata alam, serta industri pengolahan, khususnya aspal alam Buton. Letaknya yang berada di kawasan Teluk Buton memberikan keuntungan geografis dalam mendukung konektivitas dan pengembangan ekonomi wilayah. Kabupaten Buton dikenal sebagai daerah yang kaya akan nilai budaya dan kearifan lokal. Falsafah hidup masyarakat Buton yang dikenal dengan ungkapan "Bolimo karo somanamo lipu, bolimo lipu somanamo adati, bolimo adati somanamo agama" menjadi landasan dalam kehidupan sosial masyarakat, yaitu bahwa kecintaan kepada tanah air, adat istiadat, dan agama menjadi dasar utama dalam membangun kesejahteraan Bersama.

Pemerintah Kabupaten Buton terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembangunan diarahkan agar tetap berpijak pada potensi lokal, nilai budaya, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan dilantiknya Bapak **ALVIN AKAWIJAYA PUTRA, SH** sebagai Bupati Buton dan Bapak **SYARIFUDIN SAAFA, ST** sebagai Wakil Bupati Buton periode 2025-2030 pada tanggal 20 Pebruari 2025, maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Buton wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat enam bulan setelah pelantikan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dokumen RPJMD ini menjadi pedoman penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan, serta menjamin keterpaduan program antar sektor dan antar perangkat daerah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Buton yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing, dengan tetap menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Dalam upaya pembangunan berkelanjutan, perencanaan yang matang menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan mulai dari jangka Panjang jangka menengah hingga jangka tahunan yang saling terintegrasi. RPJMD Kabupaten Buton 2025-2029 dirancang sebagai pedoman utama untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan visi pembangunan daerah.

Dengan adanya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunan dokumen RPJMD dilakukan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berawawasan lingkungan, dan berkelanjutan melalui beberapa pendekatan yaitu:

1) *Teknokratik,* dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2) *Partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
3) *Politis,* dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD dengan memperhatikan masukan dan kesepakatan dengan DPRD; dan
4) *Atas-bawah dan bawah-atas*, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan dari para pemangku kepentingan dan *stakeholder*.
5) *Holistik-tematik*, Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Buton mengadopsi pendekatan holistik-tematik sebagai upaya memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan saling berkesinambungan antar sektor.
6) *Integratif,* Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton menerapkan pendekatan integratif yang menghubungkan seluruh aspek perencanaan pembangunan secara menyeluruh, lintas sektor, dan lintas pelaku pembangunan.
7) *Spasial,* Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Buton pendekatan spasial memiliki peranan penting untuk memastikan arah kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan nyata di setiap wilayah kecamatan, serta memperhatikan karakteristik dan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Pendekatan spasial memungkinkan perencanaan pembangunan dilakukan secara lebih merata, berbasis kawasan, dan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 memiliki beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan rancangan akhir dan (6) penetapan. Dengan ini, dokumen RPJMD Kabupaten Buton 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman utama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dengan rumusan rujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD menjadi landasan bagi OPD untuk merumuskan program, dan target kinerja yang selaras dengan visi pembangunan daerah kedalam dokumen Renstra. Dengan menjadikan RPJMD sebagai acuan, setiap OPD di Kabupaten Buton diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian prioritas pembangunan, memastikan sinergi antarsektor, stakeholder akan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam rangka menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buton.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

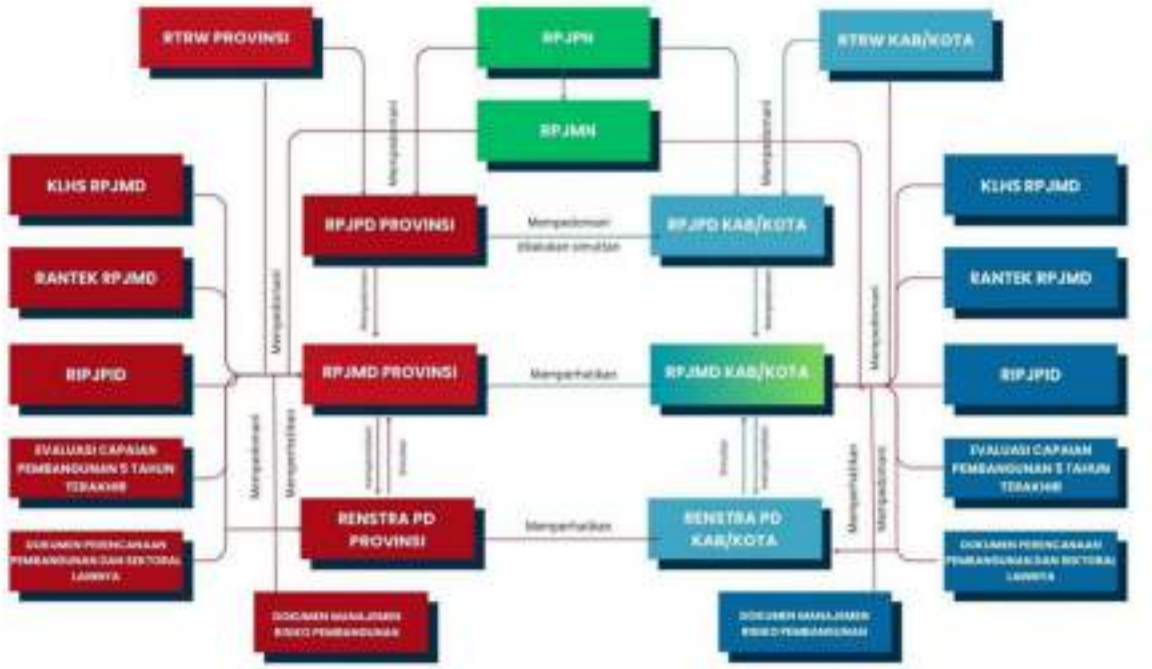
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Pajang Daerah, Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 5);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2003 Nomor 188);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 196);

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten Buton, sebagai rencana strategis lima tahunan, memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yaitu RPJMD Kabupaten Buton menjabarkan dan memedomani RPJPD Kabupaten Buton sesuai periodesasinya, selaras dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, mengacu pada RTRW Kabupaten Buton sebagai landasan spasial, mengintegrasikan rekomendasi KLHS RPJMD. Kemudian Penyusunan RPJMD harus memedomani/melanjutkan dokumen Rantek RPJMD yang telah disusun, memanfaatkan dan memedomani arahan RIPJIPD dalam pengembangan IPTEK, dan mempertimbangkan Evaluasi Capaian Pembangunan sebelumnya, mensinergikan dokumen perencanaan sektoral lainnya, serta mengadopsi Manajemen Risiko Pembangunan untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan kota secara efektif dan efisien. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan dan dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Berdasarkan penjelasan dan gambar di atas, maka berikut penjabaran hubungan antar dokumen perencanaan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Hubungan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 terletak pada sinergi antara tujuan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional. RPJMD sebagai dokumen strategis lima tahunan di tingkat daerah harus sejalan dengan arah kebijakan RPJMN, khususnya dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. RPJMN 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional memiliki agenda prioritas yang terangkum dalam Asta Cita, yang mencakup penguatan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan. RPJMD Kabupaten Buton 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap agenda nasional. Sinergi ini memastikan bahwa program pembangunan daerah tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga mendukung visi nasional dalam menciptakan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

2. Hubungan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 terletak pada keterpaduan dan sinergi kebijakan pembangunan di tingkat Kota dengan arah pembangunan Provinsi. RPJMD Kabupaten Buton sebagai panduan pembangunan daerah lima tahunan harus mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini melibatkan penyesuaian prioritas, program di Kabupaten Buton agar sesuai dengan kerangka pembangunan yang dirumuskan di tingkat provinsi. RPJMD Kabupaten Buton 2025-2029 juga perlu memastikan keterpaduan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan utama dalam pembangunan Sulawesi Tenggara. Dengan menyelaraskan kebijakan, antara Kabupaten Buton dan Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang lebih harmonis, efektif, dan inklusif, sehingga dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat di tingkat lokal maupun regional.

3. Hubungan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 bersifat strategis dan berkesinambungan. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, merupakan tahap implementasi dari arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD, terutama pada periode tahap I dalam arah kebijakan RPJPD. Dengan memastikan keselarasan ini, RPJMD dapat berfungsi sebagai langkah konkret yang strategis dalam membawa Kabupaten Buton menuju visi besar yang telah ditetapkan dalam RPJPD.

4. Hubungan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Buton

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah pada harus memiliki keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan tata ruang wilayah.

RTRW sebagai dokumen perencanaan tata ruang jangka panjang menjadi acuan utama dalam mengatur pemanfaatan ruang di Kabupaten Buton agar pembangunan yang dirancang dalam RPJMD dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan. RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 harus merujuk pada arahan RTRW dalam menetapkan lokasi dan prioritas pembangunan, baik untuk pengembangan sektor unggulan maupun untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Selain itu, RTRW juga berfungsi untuk mengintegrasikan aspek tata ruang dengan program pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD, seperti pengembangan kawasan, desa, dan infrastruktur transportasi. Dengan menyelaraskan RPJMD dengan RTRW, Kabupaten Buton dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan tidak hanya berjalan secara terencana tetapi juga sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

5. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah Kabupaten Buton.

6. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Buton harus mengimplementasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Buton harus mampu mengintegrasikan rekomendasi KLHS-RPJMD. Sehingga penyusunan RPJMD harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian rekomendasi dari KLHS dapat diakomodir dalam program pembangunan daerah.

7. Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh untuk periode lima tahun, menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan di berbagai sektor, termasuk potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai salah satu pilar kemajuan daerah. RIPJPID kemudian hadir sebagai penjabaran yang lebih spesifik dan terfokus pada upaya pemajuan IPTEK di Kabupaten Buton. RIPJPID mengidentifikasi potensi dan tantangan daerah dalam pengembangan IPTEK, merumuskan visi dan misi yang lebih spesifik di bidang IPTEK, serta menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang strategis untuk mendorong inovasi, adopsi teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang IPTEK. Dengan demikian, RIPJPID menjadi panduan operasional yang lebih detail dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD yang berkaitan dengan penguatan IPTEK. Program yang tertuang dalam RIPJPID harus selaras dan berkontribusi pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

8. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral

RPJMD harus mampu menindaklanjuti dan mengakamodir dokumen rencana sectoral pembangunan. Sehingga rekomendasi/masukan kebijakan pada berbagai bidang urusan yang memiliki dokumen perencanaan harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Dengan ini diharapkan kebijakan/perencanaan sectoral dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan RPJMD.

9. Dokumen Evaluasi Capaian Pembangunan Sebelumnya

Hasil Evaluasi Capaian Pembangunan Sebelumnya menjadi masukan penting dalam penyusunan RPJMD. Evaluasi ini mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan pembangunan pada periode sebelumnya, sehingga RPJMD dapat dirumuskan dengan lebih realistis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

10. Dokumen Manajemen Risiko Pembangunan

Dokumen manajemen risiko pembangunan membantu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan RPJMD dan merumuskan langkah-langkah mitigasinya. Integrasi manajemen risiko ke dalam RPJMD meningkatkan kepastian tercapainya target pembangunan.

1.4 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton periode 2025-2029 bertujuan sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan. RPJMD ini dirancang untuk memastikan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buton, sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal serta memperhatikan sinergi dengan kebijakan nasional dan provinsi.

b. Tujuan

1) Merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Buton yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, sehingga mampu menjadi dasar perencanaan pembangunan dalam lima tahun mendatang.
2) Menyusun strategi pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang 20 tahun.
3) Menjadi acuan dalam pengalokasian sumber daya, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
4) Memastikan keselarasan program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, sekaligus mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.
5) Menentukan indikator kinerja utama yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus sebagai alat evaluasi dalam pengendalian pembangunan.
6) Merumuskan solusi terhadap permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Buton, seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, pengembangan ekonomi, dan pembangunan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

7) Memfokuskan pembangunan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, melalui pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan,, hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Kabupaten Buton secara menyeluruh yang menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Beberapa aspek yang dijabarkan antara lain yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum. Selain itu, dalam bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah dan permasalahan dan isu strategis.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting subtansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang rumit yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan wilayah di berbagai sektor. Inti dari perencanaan ini mencakup sejumlah aspek penting yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, perencanaan memainkan peran strategis dalam merealisasikan tujuan pembangunan daerah, dengan berlandaskan pada analisis terhadap kebijakan pembangunan yang harus dikaji secara mendalam sebagai cerminan kondisi umum suatu wilayah.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Buton merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara yuridis, Kabupaten Buton sebagai daerah otonomi, resmi berdiri berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822). Sejak pemekaran Kota Baubau pada tahun 2001, ibukota Kabupaten Buton dipindahkan ke Pasarwajo. Akses menuju Pasarwajo bagi masyarakat Buton harus melalui Kota Baubau terlebih dahulu karena belum ada akses langsung dari wilayah Buton ke Pasarwajo. Kemudian pada tahun 2016 pusat pemerintahan Kabupaten Buton sebagian besar wilayahnya terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Kepulauan Sulawesi.

Pada tahun 2014, Kabupaten Buton dimekarkan kembali menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan. Kabupaten Buton sendiri terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yang terbagi lagi atas 83 (delapan puluh tiga) desa dan 12 (dua belas) kelurahan.

Dalam mengkaji gambaran umum kondisi daerah ini, analisis yang ditelaah lebih kepada data dan informasi yang mengarah pada permasalahan yang berkenaan dengan rumusan kebijakan, khususnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan pada data lengkap terkait pencapaian pembangunan secara lebih rinci dirumuskan dalam tabel pencapaian pembangunan daerah yang lebih komprehensif.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memegang peranan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, karena memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut. Penjabaran aspek geografi akan menyajikan gambaran komprehensif mengenai karakteristik wilayah Kabupaten Buton, mencakup posisi dan peran strategisnya, potensi sumber daya alam, daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup, ketahanan terhadap krisis energi dan air, kemandirian pangan, kualitas lingkungan hidup, hingga tingkat resiliensi terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim. Sedangkan aspek demografi memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Demografi tidak hanya menggambarkan jumlah penduduk, tetapi juga mencakup struktur usia, rasio jenis kelamin, persebaran penduduk, hingga dinamika migrasi. Seluruh elemen ini menjadi landasan utama dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis utamanya dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Buton baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga klimatologi wilayah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Buton.

Kabupaten Buton terdiri dari 7 kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 122.024 jiwa dan kepadatan penduduk 73,35 jiwa/Km². Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara astronomis, Kabupaten Buton terletak pada 4,960°-5,690° Lintang Selatan dan 122,670° - 123,340° Bujur Timur. Secara luas, Kabupaten Buton memiliki luas wilayah daratan sebesar 164.788 Ha atau 1.647,88 Km² atau sekitar 4,56% dari luas Provinsi Sulawesi Tenggara (36.159,71 Km²).

Apabila ditinjau berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Buton memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara dan Laut Banda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Baubau dan Selat Buton
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton Selatan dan Laut Banda

2. Geografi

Karateristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi geografis Kabupaten Buton. Karakteristik lokasi dan wilayah akan menjelaskan berbagai hal terkait potret wilayah baik dari luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, hingga penggunaan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Buton.

Gambar 2.1. Peta Administrasi
Kabupaten Buton



Sumber: RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Kabupaten Buton terdiri dari 7 Kecamatan dan 95 desa/kelurahan. Kecamatan Kapontori merupakan Kecamatan terjauh dari Ibukota Kabupaten, sedangkan Kecamatan Pasarwajo adalah Kecamatan dengan jarak terdekat dari Ibukota Kabupaten. Berikut merupakan rincian luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Buton.

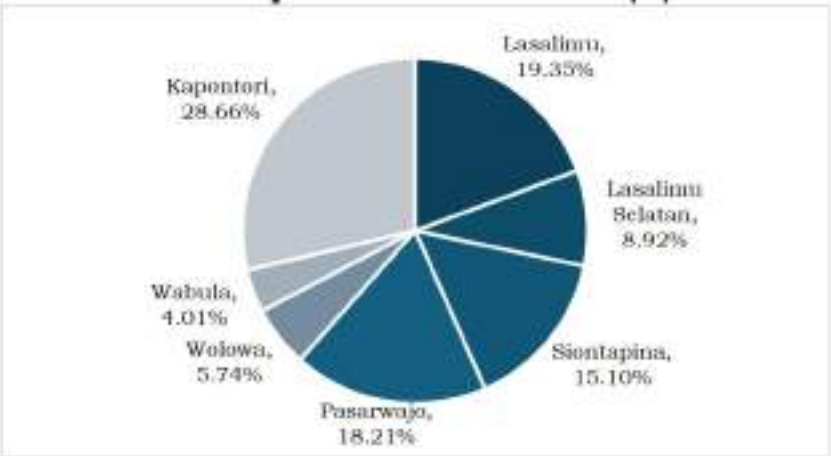
Tabel 2.1. Data Kecamatan, Jumlah Pulau, dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah Desa/Kelurahan		Jumlah Pulau
				Desa	Kelurahan	
1	Lasalimu	Kamaru	318,90	14	1	5
2	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	147,01	16	-	1
3	Siontapina	Kumbewaha	248,81	11		-
4	Pasarwajo	Pasarwajo	300,13	13	9	-
5	Wolowa	Wolowa	94,55	7	-	-
6	Wabula	Wabula	66,11	7	-	-
7	Kapontori	Watumotobe	472,36	15	2	5
	Buton		**1.647,87**	**83**	**12**	**11**

Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025

Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pasarwajo yang memiliki 22 wilayah desa/kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Wolowa, dan Kecamatan Wabula dimana masing – masing memiliki 7 kelurahan. Jika dilihat dari luasan wilayahnya, dari 1.647,87 Km^2 total luas wilayah Kabupaten Buton wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapontori dengan luas wilayah 472,36 Km^2 atau setara dengan 28,66 persen dari luas Kabupaten Buton dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Wabula dengan luas wilayah 66,11 Km^2 atau setara dengan 4,01 persen dari luas wilayah Kabupaten Buton.

Gambar 2.2. Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buton Tahun 2024 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025

3. Topografi

Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Di antara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan.

Permukaan tanah pegunungan relatif rendah, ada yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 M di atas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanah mencapai 40°.

Tabel 2.2. Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Lasalimu	0-462
2	Lasalimu Selatan	0-346
3	Siontapina	0-462
4	Pasarwajo	0-808
5	Wolowa	0-808
6	Wabula	0-577
7	Kapontori	0-808

Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025

4. Klimatologi

Kabupaten Buton merupakan wilayah dengan iklim tropis basah. Hal ini ditunjukkan oleh curah hujan yang bervariasi sepanjang tahun dengan total mencapai 2.839 mm/tahun. Kelembaban udara rata-rata tergolong tinggi, berkisar antara 75,7% hingga 89,3%. Suhu tahunan di Kabupaten Buton relatif hangat, dengan rata-rata 26,3°C hingga 28,6°C, sementara suhu maksimum dapat mencapai 33,8°C pada musim kemarau. Selain itu, perbedaan antar musim tidak terlalu terlihat, kecuali periode sedikit hujan dan banyak hujan. Curah hujan yang tinggi yang terjadi di Kabupaten Buton merupakan anugrah, karena air hujan ini memiliki fungsi utama dalam menjaga siklus air di wilayah ini. Dengan siklus air yang baik, maka berbagai manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Buton. Manfaat tersebut antara lain adalah terairinya lahan-lahan pertanian, tersimpannya cadangan air yang dapat digunakan di musim kemarau, terjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di wilayah ini, tersedianya sumber air minum, terjaganya kesuburan tanah, terjaganya kelestarian hutan dan dapat berfungsinya sarana transportasi air bagi mobilisasi manusia dan barang.

Tabel 2.3. Keadaan Iklim di Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Bulan	Rata-rata Suhu (°C)	Rata-rata Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan	Penyinaran Matahari (jam)
1	Januari	28,2	85	3,2	1.011,60	393	3,8
2	Februari	27,8	86,9	3	1.013,00	277	4,7
3	Maret	27,7	88,3	2,9	1.012,30	314	3,6
4	April	27,5	89,3	2,6	1.011,20	292	4,1
5	Mei	27,4	87,2	2,5	1.012,00	350	4,3
6	Juni	26,7	85,7	2,5	1.013,50	261	4,5
7	Juli	26,3	82,3	3,3	1.015,00	227	4,7
8	Agustus	26,7	75,7	3,3	1.009,30	51	6,4
9	September	27,5	77	3,4	1.008,10	90	5,7
10	Oktober	28,6	76,4	3,5	1.007,70	29	6,2
11	November	28,1	84,6	3	1.006,20	222	4,9
12	Desember	27,7	87,6	3,5	1.005,20	333	2,6

Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025

5. Geologi

Daerah Buton disusun oleh kelompok batuan *Mesozoikum* berumur Trias hingga Kapur Atas bahkan hingga *Paleosen* dan kelompok batuan *Kenozoikum* berumur Tersier dan Kuarter. Kelompok batuan *Mesozoikum* terdiri atas Formasi Winto, Formasi Ogena, Formasi Rumu dan Formasi Tobelo. Kelompok batuan sedimen yang termasuk batuan Kenozoikum kemudian menutupi sebagian besar P. Buton yang terdiri atas Fomasi Tondo, Formasi Sampolakosa dan Formasi Wafulaka yang diendapkan pada Miosen Awal hingga Pliosen Akhir-Plistosen (Gambar2.2). Formasi tondo dan formasi Sampolakosa merupakan tempat endapan aspal di Pulau Buton Sumber aspal yang terdapat didalam kedua formasi tersebut diduga berasal dari Formasi Winto (Trias) dan dianggap sebagai formasi pembawa bitumen padat.

Peristiwa tektonik yang terjadi pada Anjungan Tukang besi-Buton menyebabkan terjadinya struktur lipatan yang terdiri dari antiklin da nsinklin, serta struktur sesar yang terdiri dari sesarnaik, sesarnormal dan sesargeser mendatar. Umumnya struktur berarah Timur Laut-Barat Daya di Buton Selatan, kemudian berarah Utara- Selatan di

Buton Tengah, dan Utara-Barat laut hingga Selatan-Tenggara di Buton Utara. Peristiwa tektonik yang terjadi berulang-ulang menyebabkan batuan-batuan yang berumur lebih tua mengalami beberapa kali aktifitas struktur, sehingga batuan tua umumnya ditemukan dengan kemiringan lapisan yang relatif tajam.

Tektonik yang terjadi di daerah Buton dimulai sejak pra-Eosen, dimana pola tektoniknya sukar ditentukan disebabkan oleh seluruh batuannya telah mengalami beberapa kali perlipatan dan pensesaran. Gerak tektonik utama yang membentuk pola struktur hingga sekarang diperkirakan terjadi pada Eosen-Oligosen yang membentuk struktur imbrikasi berarah Timur laut-Barat Daya. Tektonik ini menyebabkan terjadinya sesar mendatar antara Buton Utara dan Buton Tengah sepanjang Bubu-Matewe yang diperkirakan berhubungan dengan sesar mendatar Palu-Koro. Kegiatan tektonik berikutnya terjadi antara Pliosen-Plistosen yang mengakibatkan terlipatnya batuan pra-Pliosen. Kegiatan tektonik terakhir terjadi sejak Plistosen dan masih berlangsung hingga saat ini. Tektonik ini mengakibatkan terangkatnya P. Buton dan P. Muna secara perlahan.

Secara litologi Kabupaten Buton cukup bervariasi, hal ini dapat dilihat dari perbedaan antara Pulau Buton, Pulau Muna dan Pulau Kabaena yang secara geografi mempunyai jarak yang relatif dekat satu dengan lainnya, namun memperlihatkan kondisi geologi yang sangat berbeda. Pulau Kabaena tersusun oleh batuan periodotit, sekis, batu gamping, rijang dan lempung merah dengan struktur geologi yang sangat rumit. Pulau Buton disusun oleh batuan klastika gunung api bersifatan desit, berumur Trias yang tertindih oleh batuan serpih, napal, lanau dan batu pasir berumur Jura yang kaya moluska dan tidak diketemukan di daratanSulawesi. Batuan lainnya yang lebih muda terdiri dari molasa berumur Miosen serta batu gamping terumbu yang berumur Kuarter. Pulau Muna diapit oleh Pulau Kabaena dan Pulau Buton tersusun oleh batu gamping terumbu dengan gerakan naik yang dapat diamati dari adanya undak-undak pesisir pantai yang sangat baik. Perbedaan kondisi geologi seperti ini dapat memberikan kesimpulan bahwa Pulau Buton bukan merupakan bagian dari Sulawesi Timur daratan (Sumantri *dkk*,1986).

6. Hidrologi

Kabupaten Buton memiliki beberapa sungai besar yang terdapat dibeberapa kecamatan. Sungai-sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sumber tenaga, irigasi dan kebutuhan rumah, seperti sungai Winto dan Tondo di Kecamatan Pasarwajo, Sungai Malaoge, Tokulo, di Kecamatan Lasalimu Selatan, dan Sungai Wolowa di Kecamatan Wolowa.

Sungai-sungai utama yang terdapat di Kabupaten Buton memiliki pola drainase Sungai yang hampir seragam yaitu pola paralel dan subparalel. Data debit air sungai hanya beberapa yang tersedia. Beberapa sungai keadaan aliran airnya tergolong cukup dan dapat dimanfaatkan untuk air irigasi dan pembangkit listrik tenaga air (Mini dan Mikro Hidro). Dengan banyaknya sungai dan anak sungai yang tersebar di Buton maka terdapat beberapa titik potensial untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) baik mikro hidro maupun pembangkit listrik mini hidro.

Sungai yang tergolong besar di Kabupaten Buton adalah sungai Winto Winning dengan debit 12,3 m^3/detik yang terdapat di Pasarwajo yang dapat membangkitkan listrik dengan perkiraan kapasitas 1.600 KW. Kemudian sungai Tondo/Kabungka (Wolowa-Siontapina) dengan debit 4,7m^3/detik dengan perkiraan kapasitas 367 KW. Untuk mengetahui potensi energi dan sumber daya air dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Potensi Energi dan Sumber Daya Air di Kabupaten Buton

No	Jenis Unsur	Cadangan (Ton, Ha)	Kandungan/ Kadar	Letak/Lokasi	Ket.
1	Thermo Dinamika (Panas Bumi)	Spekulatif Potensial (Sp)	201-400 Mwe	Kabungka Kec. Pasarwajo, Lawele Kec.Lasalimu	Belum Terukur, belum dimanfaatkan
2	Sungai Winto Winning	Kap. 1600 Kw	12,3 M3/dtk	Winning Kec. Pasarwajo	
3	Sungai Tondo	Kap.367 Kw	4,7 M3/dtk		Belum dikelola
4	Sungai Umalaoge			Ds Lasalimu Kec. Lasalimu Selatan	Belum dikelola
5	Sungai Lambusamngo, Sungai wakalambe			Ds Lambusango, Wakalambe Kec. Kapontori	Irigasi Sawah
6	7 Sumber Mata Air, 3 Mata Air Diturap,2 Mata Air selam			Kec. Pasarwajo	Sda
7	2 Sumber Mata Air, 1 Mata Air di Turap			Kec. Wolowa	Sda
8	3 Sumber Mata Air			Kec. Lasalimu Selatan	Sda
9	4 Sumber Mata Air, 1 Air terjun			Kec. Lasalimu	Sda
10	5 Sumber Mata Air, 1 mata Air Diturap			Kec. Kapontori	Sda

Sumber: RKPD Kabupaten Buton, 2024

2.1.1.2. Penggunaan Lahan

1) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang (kesesuaian lahan) bagi kawasan budidaya (khususnya pertanian, perkebunan, peruntukan lahan pesisir seperti tambak, dan lain-lain) dilakukan berdasarkan informasi sistem lahan dan unit lahan pada survey-survei sebelumnya.

Penekanan dari analisis kesesuaian lahan adalah untuk mendapatkan kesesuaian bagi pengembangan aktivitas serta komoditas yang ditetapkan. Keluaran dari analisis ini adalah berupa peluang-peluang yang meliputi kapasitas lahan yang dapat dikembangkan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan tersebut untuk masing-masing jenis aktivitas atau komoditas.

Menurut UU No 26 Tahun 2007, Permen PU No 16 Tahun 2009 dan Rancangan RTRW Kabupaten Buton 2023-2043, dalam rencana pola ruang kawasan budidaya, ruang dibedakan atas:

1) Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 53.066 hektar, yang dirinci meliputi kawasan:
   a. Hutan produksi tetap dengan luas 52.898, meliputi Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wolowa; dan
   b. Hutan produksi yang dapat di konversi (HPK), dengan luas 168 hektar meliputi Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Lasalimu.
2) Kawasan peruntukan pertanian seluas 56.185 hektar, yang dirinci meliputi kawasan :
   a. Kawasan pertanian tanaman pangan, dengan luas 2.980 hektar dan tersebar di Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan dan Kapontori;
   b. Kawasan holtikultura, dengan luas 12.086 hektar meliputi Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan dan Siotapina;

c. Kawasan perkebunan, dengan luas 41.119 hektar terdiri atas : Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wabula, Wolowa.
d. Kawasan lahan pangan berkelanjutan (KP2B) kabupaten dengan luas ± 2.363 hektar yang terdapat di seluruh kecamatan.

3) Kawasan Peruntukan Peternakan;
4) Kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan:
   a. Peruntukan perikanan tangkap , yaitu 1/3 dari luas kewenangan Provinsi 12 mil-laut (4 mil-laut) tetapi dapat meluas ke wilayah perairan di sebelah luar kewenangan kabupaten, bahkan ke sebelah luar kawasan perairan kabupaten. Kawasan laut Kab. Buton berada pada perairan Laut Flores, Laut Banda, dan Teluk Bone di sebelah barat yang relatif terbuka.
   b. Peruntukan budidaya perikanan Pada dasarnya, dengan mengacu pada kriteria pengembangan, hampir semua perairan pesisir Buton dapat dikembangkan sebagai areal budidaya rumput laut, sepanjang 665 km, dengan lebar rata-rata 100-150 meter dari garis pantai.
   c. Peruntukan kawasan pengolahan ikan dan Pelabuhan Khusus, Pelabuhan khusus perikanan, seperti PPI yang ada di Kamaru, Kecamatan Lasalimu.
5) Kawasan pertambangan dan energi dengan luas 4,352 hektar, yaitu kawasan pertambangan batubara di Kecamatan Pasarwajo dan Wolowa.
6) Kawasan peruntukan industri seluas 1.543 hektar, yang terdapat di Kecamatan Kapontori, Pasarwajo, Lasalimu dan Wabula.
7) Kawasan peruntukan pariwisata dengan luas 129 hektar dan terdapat di setiap kecamatan.
8) Kawasan permukiman dengan luas 7.004 hektar, yang dirinci meliputi kawasan:
   a. Peruntukan permukiman perkotaan dengan luas 2.248 hektar dan terdapat di setiap kecamatan; dan
   b. Peruntukan permukiman perdesaan dengan luas 4.756 hektar dan terdapat di setiap kecamatan.
9) Kawasan peruntukan lainnya

   Rencana pengembangan kawasan peruntukan Lainnya diantaranya adalah kawasan peruntukan pertahanan keamanan, dengan luas 4 hektar terdiri atas : Koramil 1413-2 di Kecamatan Pasarwajo, Koramil 1413-3 di Kecamatan Kapontori, Koramil 1413-13 di Kecamatan Lasalimu, Kepolisian Resort (Polres) Buton di Kecamatan Pasarwajo, Kepolisian Sektor (Polsek) di setiap kecamatan. Dismaping itu kawasan peruntukkan perdagangan/jasa dan kawasan peruntukan pendidikan yang akan diupayakan dengan cara:
   a. Mendorong pengembangan kawasan perdagangan/jasa, khususnya investasi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesuai potensi wilayah dan pemerataan di setiap pusat pengembangan dan daerah di belakangnya (*hinterland*);
   b. Menyediakan kawasan perdagangan/jasa sesuai dengan peruntukannya;
   c. Mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai *multiplier effect* dan daya serap tenaga kerja yang tinggi.

   Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kawasan perlindungan LP2B secara keseluruhan sebesar 2.037,4 Ha, terdiri atas :
   - Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 1.763,5 Ha.
   - Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 2.741,19 Ha.

Adapun luas lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebar di wilayah :

- Kecamatan Lasalimu Selatan dengan luas kurang lebih 268,9 Ha.
- Kecamatan Lasalimu dengan luas kurang lebih 239,27 Ha.
- Kecamatan Kapontori dengan luas 444,31 Ha.

2) Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Di Kabupaten Buton, tidak semua jenis kawasan lindung ada sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Permen PU No 16 Tahun 2009. Karena itu, yang dibahas dan direncanakan hanya yang ada (relevan).

Kawasan lindung berdasarkan Ranperda tentang RTRW Kabupaten Buton tahun 2023-2043, terdiri atas:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, merupakan hutan lindung seluas 15.246 hektar, meliputi : Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina dan Wabula;
b. Kawasan perlindungan setempat seluas 1.095 hektar, meliputi : Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wabula dan Wolowa;
c. Kawasan konservasi, merupakan kawasan suaka alam seluas 28.368 hektar, terdiri atas :
   - Cagar alam, dengan luas 812 hektar meliputi : Kecamatan Lasalimu dan Kapontori;
   - Suaka margasatwa, dengan luas 27.556 hektar meliputi : Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Pasarwajo, dan Wolowa;
d. Kawasan ekosistem mangrove seluas 155 hektar, meliputi : Kecamatan Kapontori, Lasalimu Selatan, Pasarwajo dan Wabula;

H. Potensi Pengembangan Wilayah

Pusat pertumbuhan kabupaten merupakan wilayah yang memiliki potensi atau menjadi fokus pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan rencana pengembangaan wilayah. Pusat pertumbuhan mengacu pada Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton tahun 2023-2043. Pusat pertumbuhan dalam Rancangan RTRW Kabupaten Buton diterjemahkan dalam pusat kegiatan selain itu terdapat rencana strategis kabupaten.

Pusat kegiatan merupakan rencana pusat perkotaan Kabupaten yang diklasifikasikan dalam pusat pelayanan. Daerah yang direncakan dalam pusat kegiatan merupakan pusat perekonomian secara lokal di Kabupaten Buton maupun secara Regional di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pusat kegiatan dalam Ranperda RTRW Kabupaten Buton 2023-2043 meliputi:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
   Tahapan Percepatan kawasan perkotaan untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan
   - ❖ Kecamatan Pasarwajo
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
   Tahapan percepatan pengembangan wilayah ibu kota kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
   a. Kamaru Kecamatan Lasalimu
   b. Ambuau Indah Kecamatan Lasalimu Selatan

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Tahapan pengembangan pada pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa meluputi:

a. Mataumpana Kecamatan Kapontori
b. Matanauwe Kecamatan Siotapina
c. Wolowa Kecamatan Wabula
d. Wabula Kecamatan Wabula

Selain pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dapat dilihat dari rencana kawasan strategis. Kawasan strategis merupakan wilayah penataan ruang yang memiliki prioritas karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, lingkungan dan pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi. Kabupaten Buton memiliki 2 (dua) kawasan strategis Kabupaten, yaitu :

1. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Lokasi :

a. Kawasan minapolitan di Kecamatan Pasarwajo

Rencana pengembangan terkait penetapan KSK Minapolitan di Pasarwajo dan sekitarnya:

1. Pengembangan komoditas unggulan perikanan secara optimal yang didukung minaindustri berbasis kerakyatan.
2. Pengembangan dan optimalisasi agrobisnis minapolitan didalam kawasan,
3. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana wilayah penghubung antar kawasan minapolitan.
4. Pengembangan dan optimalisasi serta penguatan desa perikanan tangkap yang secara mandiri mampu mendukung pengembangan minapolitan.
5. Pengembangan penunjang kawasan minapolitan dalam kemampuan permodalan, kelembagaan ekonomi rakyat, dan sumber daya manusia.

Berdasarkan kebijakan diatas, maka ditetapkanlah strategi penataan ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pasarwajo, meliputi:

a. Pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan secara optimal
   - Mengembangkan jenis produk olahan dengan nilai jual yang tinggi dan diminati oleh pasar regional, nasional dan internasional;
   - Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas hasil produksi
   - Mengembangan potensi pariwisata bahari untuk mendukung komoditas unggulan kawasan;

b. Pengembangan dan optimalisasi minabisnis
   - Mengembangkan koperasi usaha nelayan pada pusat kegiatan kawasan;
   - Mengembangkan kemitraan dengan perusahaan besar yang bergerak di bidang industri perikanan,
   - Menyediakan fasilitas penunjang di pusat industri kecil pengolahan yang menunjang kegiatan produksi maupun pemasaran hasil produksi.

c. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana wilayah penghubung antar kawasan minapolitan
   - Mengembangkan sistem angkutan barang
   - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana regional berupa transportasi darat dan laut;
   - Meningkatkan kondisi jalan menuju sentra produksi dan akses pengangkutan hasil produksi serta kondisi jalan yang menuju ke pusat pelayanan
   - Mengembangkan dan meningkatkan jaringan sumberdaya air, drainase, dan mengoptimalkan potensi sumber air baku;

d. Pengembangan dan optimalisasi serta penguatan desa perikanan tangkap yang secara mandiri mampu mendukung pengembangan Kawasan Minapolitan
   - Mengembangkan desa wisata;
   - Membatasi kegiatan yang dapat mempengaruhi keberadaan ikan seperti alat penangkap yang tidak ramah lingkungan.

e. Bengembangan penunjang kawasan minapolitan dalam kemampuan permodalan, kelembagaan ekonomi rakyat, dan sumber daya manusia
   - Meningkatkan kualitas SDM masyarakat yang mampu menghasilkan produksi komoditas unggulan
   - Mengembangkan dan meningkatkan pembinaan terhadap kelompok nelayan sebagai kader penggerak agribisnis;
   - Menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat

b. Kawasan strategis pertanian di Kecamatan Lasalimu Selatan

Untuk kepentingan ketahanan pangan Nasional pada umumnya dan Kabupaten Buton pada khususnya serta didasari atas potensi dan kesesuaian lahan serta teknokultur masyarakat, maka KSK Lasalimu Selatan diarahkan untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sawah yang sesuai untuk persawahan, sawah tadah hujan dan jagung terutama di wilayah lumbung pangan dengan luas lahan yang besar.

Pengembangan kawasan strategis tanaman pangan ini memerlukan kepaduselarasan dengan perencanaan dan manajemen Daerah Aliran Sungai yang dalam menyediakan air untuk irigasi.

Untuk pertumbuhan ekonomi, dalam sektor perkebunan, berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan dan teknokultur masyarakat lokal maka direncanakan pengembangan beberapa alternatif kawasan budidaya komoditas seperti: kawasan perkebunan yang sangat sesuai, potensial dan mempunyai sebaran besar untuk komoditas jambu mete, kelapa dalam, kakao, kopi, pala, cengkeh,pinang, kelapa sawit, dan karet. Untuk kawasan-kawasan perkebunan yang kurang produktif dapat diupayakan untuk dibudidayakan jenis tanaman yang mampu bertahan hidup dan cepat diproduksi seperti misalnya tanaman jenis kaliandra.

c. Kawasan ekonomi khusus Lasalimu

Kawasan ini direncanakan akan menjadi kawasan industri terpadu dengan komoditas unggulan aspal buton. Diharapkan dengan dibentuknya KEK pada kawasan ini akan membuat lingkungan menjadi lebih kondusif bagi aktifitas investasi, ekspor dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.

Kawasan Ekonomi Khusus yang direncanakan pada wilayah ini diharapkan nantinya akan mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Hal ini tidak lain karena kemudahan yang akan didapat para investor, seperti dibidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan juga di bidang non-fiskal seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan industri atau kawasan investasi lainnya.

Guna mendorong berhasilnya Kawasan Strategis Kabupaten Buton ini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus secara Nasional, maka perlu disiapkan lokasi

yang tepat dan infrastuktur yang memadai, Jjga perlu disiapkan mekanisme kerja sama antara Pemerintah-Swasta (*Public-Private Partnership*) yang baik.

KSK Lasalimu ini lokasinya cukup strategis, dapat dilalui oleh jalur perdagangan/pelayaran internasional, apalagi jika nanti ditunjang oleh program TOL LAUT yang direncanakan akan dibangun oleh pemerintah pusat. Seiring dengan hal itu, maka kebutuhan infrastruktur pada kawasan ini juga perlu direncanakan dan terus ditingkatkan.

Rencana pengembangan terkait penetapan KSK Lasalimu (Nambo dan Sekitarnya) adalah sebagai berikut:

- Penguatan sistem transportas laut, khususnya pelabuhan pelayaran internasional dan pelabuhan peti kemas;
- Penguatan sistem transportasi darat (khususnya jalan) yang merupakan jalan lintas luar Kabupaten Buton (Pasarwajo-Matanauwe-Kamaru-Kapuntori-Bau-Bau);
- Penguatan sistem transportasi darat (khususnya jalan) yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat pelayanan
- Penguatan sistem energi listrik;
- Pengembangan kawasan industri aspal terpadu;
- Penyiapan pembiayaan dan pembangunan sarana/prasarana fisik KEK lainnya termasuk pembebasan lahan jika diperlukan.
- Penyiapan kelembagaan di tingkat daerah.

2. Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
   Lokasi :
   a. Kawasan strategis Suaka Margasatwa Lambusango

      Kawasan hutan Suaka Margasatwa Lambusango merupakan Kawasan Strategis Kabupaten Buton yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi suaka alam.

      Secara geografis kawasan ini terletak antara 05°13’ - 05°24’LS dan 122°47’ - 122°56’ BT dan secara administratif masuk dalam 3 wilayah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kapontori, Lasalimu dan Pasarwajo Kabupaten Buton. Batas-batas kawasan Suaka Margasatwa Lambusango adalah sebagai berikut:

      - Sebelah utara: Kelurahan Wakangka dan Watumotobe
      - Sebelah Timur: Desa Lawele dan Hutan Produksi
      - Sebelah Selatan: Hutan Lindung dan Hutan Produksi
      - Sebelah Barat: Desa Wakalembe dan Lambusango

      Kawasan Suaka Margasatwa Lambusango terletak pada ketinggian 15-780 mdpal, dengan topografi datar hingga berbukit, mempunyai kemiringan lereng 5-30%, dengan jenis tanah mediteranian. Tipe iklim menurut Schmidt danFergusson adalah termasuk tipe C dengancurah hujan rerata tahunan sebesar 1.980 mm/tahun. Bulan terkering adalah Agustus sampai November, Suhu berkisar antara 200 hingga 300°C dengan kelembaban relatif 80%.

      Beberapa sungai bermata air di Suaka Margasatwa Lambusango ini antara lain: Sungai Kumele, Sungai Winto, Sungai Malaoge, Sungai Wahalaka, Sungai Lapipi, Sungai Lawele, Sungai Toruku dan Sungai Wakalembe. Jenis batuan pada daerah ini adalah jenis neogen dan mezoikum tidak dibedakan.

      Secara umum tipe ekosistem di dalam kawasan Suaka Margasatwa Lambusango termasuk ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Tipe ekosistem tersebut menghuni kawasan dengan topografi landai bergelombang sampai berbukit yang terletak pada ketinggian 200- 750mdpal. Lantai hujan

banyak didominasi oleh tumbuhan jenis talas-talasan, pakis hutan, rotan (Calamus sp) dan anakan pohon.

Potensi wisata yang terdapat di kawasan Suaka Margasatwa Lambusango antara lain:

1. Padang Kuku, pada kawasan ini dapat dilakukan kegiatan wisata seperti menikmati panorama alam, hiking dan camping.
2. Air Terjun, pada kawasan ini kegiatan wisata yang dapat dilakukan adalah menikmati panorama air terjun dan pemandian alam.
3. Tempat Keramat di Blok Hutan Lawele dan Blok Hutan Lakurisa disakralkan oleh penduduk setempat dapat digunakan sebagai wisata budaya dan berziarah.

b. Kawasan strategis Cagar Alam Kakenauwe

Kawasan strategis cagar alam Kakenauwe merupakan salah satu kawasan strategis Kabupaten Buton dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Berdasarkan fungsinya sebagai habitat alami yang memberikan perlindungan bagi flora dan fauna yang khas, maka usaha mempertahankan keberadaan dan kelestarian HSA sangat penting. Ancaman potensial bagi kelestarian HSA adalah kegiatan perambahan hutan, dan kegiatan pengambilan kayu. Ini berpotensi bagi berlangsungnya secara terus-menerus kerusakan DAS dan tata air yang ada.

Rencana yang terstruktur pada pusat kegiatan akan menciptakan perekonomian berkelanjutan. Hal ini dapat terwujud dengan terciptanya ruang-ruang pro investasi yang mendorong potensi sumber daya di Kabupaten Buton. Masuknya peluang investasi juga perlu diikuti dengan beberapa regulasi terkait dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Pengembangan ekonomi berkelanjutan akan menjadi jembatan menuju masyarakat sejahtera.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Perencanaan pembangunan dapat dikatakan sangat identik dengan ekonomi pembangunan. Apabila sekiranya ruang gerak ekonomi pembangunan berusaha mencari strategi pembangunan, perencanaan pembangunan merupakan alat yang ampuh untuk menerjemahkan strategi pembangunan tersebut dalam berbagai program kegiatan yang terkoordinasi. Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan ekonomi bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam rangka menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Pemerintah daerah dalam merencanakan pengembangan wilayah memerhatikan potensi wilayah, ruang serta keterkaitan dengan wilayah disekitarnya. Pengembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh pengembangan infrastruktur serta tarikan oleh pasar (Kelengkapan fasilitas) dari dalam maupun luar wilayah. Selain mendekati keramaian pengembangan wilayah juga akan memperhatikan faktor penghambat seperti kawasan bencana dan kawasan lindung.

Kabupaten Buton merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah khususnya pada sektor pertanian (perikanan, perkebunan, tanaman pangan), sektor pertambangan, dan sektor pariwisata, dan sektor industri. Potensi tersebut dapat dilihat dari kinerja kontribusi sektor pada struktur perekonomian

Kabupaten Buton (Kontribusi terhadap PDRB), potensi ketersediaan sumber daya, infrastruktur dan kebijakan pemerinah pada masing-masing sektor.

❖ **Sektor Pertambangan**

✧ Aspal Alam Buton

Potensi pertambangan dapat dilihat dari kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang mampu berkontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Buton, dan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar selama periode 5 tahun terakhir, yaitu pada angka 41,34% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Buton. Potensi pertambangan Kabupaten Buton hingga tahun 2023 masih didominasi oleh ASPAL.

Sebagaimana diketahui Pulau Buton merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang memiliki aspal alam dan telah dieksplorasi sejak seratus tahun yang silam. Potensi aspal alam di Pulau Buton dengan jumlah jumlah cadangan 2.663.648.000 M3 atau setara sekitar 3.835.653.120 ton (DESDM Prov.Sultra, 2011). Jika disetarakan dengan jumlah energi yang dapat dihasilkan sekitar tatanan geologi pulau buton sendiri, didapatkan potensi aspal (bitumen padat) di Buton setelah dilakukan studi geokimia hidrokarbon pada contoh batu aspal Fm. Cadangan deposit sekitar 662.960.267 Ton tersimpan pada hamparan seluas 376.537.850 m2 dengan kadar aspal yang terkandung dalam Asbuton bervariasai dengan kadar antara 15 persen sampai 50 persen dan yang sudah dieksplorasi baru asbuton dari deposit Kabungka dengan kadar bitumen 20 persen, dan deposit Lawele dengan kadar bitumen 35 persen. Dari eksplorasi yang dilakukan di Wilayah Lawele Kecamatan Lasalimu pada 132 titik pengeboran diperoleh hasil ketebalan asbuton berkisar antara 9 m-45 m atau ketebalan rata-rata 29,88 m dengan tebal tanah penutup 0-17 m atau rata-rata tebal tanah penutup 3,47 m pada luas daerah sebaran deposit asbuton sekitar 1,5 juta m2.

Selain itu, berdasarkan data Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Juni 2023 menunjukkan terdapat 24 izin usaha pertambangan aspal tahap kegiatan operasi produksi di Kabupaten Buton, dan saat ini industri aspal buton sudah difasilitasi sertifikasi TKDN dengan nilai TKDN produk asbuton olahan antara 78-86 persen. Dimana menurut Permenperin Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, barang dengan nilai TKDN diatas 40 persen masuk dalam kategori barang wajib pakai. Dukungan kebijakan penggunaan aspal Buton tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana ALokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.

✧ Mangan

Cadangan mangan Kabupaten Buton sekitar 2.000 Ha yang terdapat di Desa Kumbewaha Kecamatan Siontapina Sampai pada saat ini, perusahaan yang melaksanakan kegiatan eksplorasi bahan galian Mangan (Mn), yaitu PT. Malindo Baramurni. Mangan yang ada di Kabupaten Buton berupa tipe Psilomelane (Ba, H2O2 Mn3O10).

✧ Nikel

Sumber daya mineral berupa nikel seluas 16.000 Ha dengan kandungan/kadar berkisar 0,5 – 2,47% yang berada di Kecamatan Kapontori. Telah mulai dieksplorasi oleh PT. Bumi Buton Delta Mega.

✧ Batu Gamping dan Marmer

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Buton khususnya yang berada di Pulau Buton dan Pulau Muna disusun oleh batuan yang didominasi oleh batu gamping dan sebagian telah mengalami proses metamorfosa/malihan menjadi MARMER, banyak dijumpai peta Formasi WAPULAKA, Formasi SAMPOLAKOSA, Formasi TONDO, Formasi TOBELO dan Formasi RUMU, dan seluruh daratan Pulau Muna.

Khusus tentang MARMER dapat dijumpai pada Formasi OGENA, sedangkan asosiasi fosfat, gipsum dan anhidrit diperkirakan banyak berasosiasi dengan endapan batu gamping tersebut diatas. Demikian pula halnya dengan KALSIT sebagai bahan obat-obatan, kecantikan dan pasta gigi banyak dijumpai berasosiasi dengan endapan batu gamping. Cadangan Batu Gamping yang terdapat pada Kecamatan Wabula, sampai saat ini belum dilakukan esplorasi tapi merupakan perkiraan.

✧ Cekungan Minyak dan Gas Bumi

Pulau Buton dan Pulau Muna merupakan salah satu Blok Cekungan MIGAS yang ada di kaki Jazirah Tenggara Sulawesi, yang telah di ekplorasi oleh pihak PERTAMINA bekerja sama dengan South East Asia Oil dan Gas Company sejak tahun 1969. Kemudian Indonesia Gult Oil Company pada tahun 1970 juga telah melakukan pengeboran MIGAS di 3 (tiga) titik yaitu; BALE-15, BULU-15, dan SAMPOLAKOSA- 15.

Berdasarkan BUTON BLOCK BOUNDARY dapat diketahui bahwa sumur BULU–15 berlokasi di Lasalimu dan Lasalimu Selatan. Pertanyaannya mengapa sampai pada saat ini belum ada aktivitas eksploitasi, ternyata sesuai dengan penjelasan pihak PERTAMINA bahwa cekungan MIGAS yang ada di Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Muna berada pada kedalaman lebih dari 6.000 m dari permukaan tanah, sementara teknologi pengeboran MIGAS saat ini baru mencapai kedalaman kurang dari 5.000 m. Demikian maka potensi MIGAS yang terdapat di Kabupaten Buton merupakan cekungan energi masa depan menyusul kemajuan Teknologi dibidang Migas.

✧ Potensi Geothermal (Panas Bumi)

Persoalan energi listrik di seluruh Indonesia saat ini sudah mencapai tahap kritis yang sangat mengkhawatirkan, demikian pula halnya dengan power supply energi listrik di Kabupaten Buton yang sangat terbatas. Pada hakekatnya di Kabupaten Buton ternyata tersimpan di dalam perut bumi suatu potensi ENERGI LISTRIK yang dapat dibangkitkan dari energi GEOTHERMAL atau PANAS BUMI.

Pada saat ini diketahui terdapat 5 (lima) titik potensi energi panas bumi (geothermal) yaitu; Kalende, Kanale, Wonco, yang berjarak sekitar 65 km dari Kota BauBau, dan Kabungka sekitar 50 km dari Kota Baubau. Kelima lokasi tersebut diatas telah dilakukan pengamatan lapangan, dan diperoleh data manifestasi lapangan PANAS BUMI sebagai berikut:

1) Berada pada pinggiran kali, yang diduga sebagai zona patahan yang memotong reservoir panas bumi.
2) Sumber air menghasilkan bauh belerang (SO2, H2S).
3) Temperatur 40 – 75 C.
4) Mengeluarkan uap air

Jika potensi energi panas bumi ini dapat dieksploitasi, maka dapat mendukung penyediaan ENERGI LISTRIK untuk :

1) Suplai kebutuhan energi listrik untuk pertambangan aspal PT. SARANA KARYA, industri pengolahan aspal ekstraksi yang akan dilakukan oleh INVESTOR yang diperkirakan membutuhkan energi listrik sebesar ± 45 MW.

2) Dapat mensuplai kebutuhan listrik di daratan Kabupaten Buton sebesar ± 15 MW, Kabupaten Muna ± 7 MW.
3) Bisa mensuplai kebutuhan energi panas bumi untuk industri sektor pertanian (pangan, perkebunan, dan perikanan) untuk pengeringan atau pengawetan hasil pertanian dan perikanan tersebut.

Total potensi panas bumi di Kabupaten Buton (Kabungka=10 MW, Kaongke-ongke=5 MW, Kanale=5 MW, dan Kapontori=10 MW).

✧ Potensi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Salah satu persyaratan terjadinya Investor Found adalah tersedianya energi listrik. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara telah menginventarisasi potensi sungai-sungai yang dapat dikembangkan untuk PLTA di Kabupaten Buton, yaitu :

1) Sungai Winto – Winning dengan debit = 12,30 m3/detik, kapasitas = 1.600,00 KW.
2) Sungai Tondo Kabungka dengan debit = 4,68 m3/detik, kapasitas = 367,00 KW.
3) Sungai Lakaritsu dengan debit = 0,27 m3/detik, kapasitas = 17,00 KW.
4) Sungai Langkowal dengan debit = 0,28 m3/detik, kapasitas = 13.050,00 KW.

Potensi sumber daya air dan sumber daya panas bumi di atas dapat dikembangkan untuk menopang kebutuhan pasok energi listrik prioritas bagi pengembangan kawasan industri di Kabupaten Buton.

Oleh sebab itu, potensi pertambangan di Kabupaten Buton harus mampu dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian wilayah yang secara luas diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diharapkan potensi pertambangan akan mampu diwujudkan suatu proses bisnis kegiatan dari hulu ke hilir yang seluruh prosesnya dilaksanakan di wilayah Kabupaten Buton.

❖ **Sektor Perikanan**

Jika dilihat dari sudut Oceanografi, Kabupaten Buton memiliki perairan laut yang masih luas, yang diperkirakan sekitar ± 1.0581,11 km^2 (kondisi setelah pemekaran 2014) dengan panjang garis pantai ± 262.955 Km^2 dan berada di wilayah Laut Flores dan Laut Banda. Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah.

Bila ditinjau dari posisi geografis dan kondisi Kabupaten Buton yang berbatasan langsung dengan Laut Banda dan Laut Flores (WPP 714), sehingga Kabupaten Buton diyakini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar, karena sebagian masyarakat Kabupaten Buton menggantungkan penghidupannya dengan mengekstraksi sumber daya kelautan dan perikanan. Berdasarkan lokasi desa/kelurahan, terdapat 67 desa/kelurahan dari 95 desa/kelurahan di Kabupaten Buton atau sebesar 70,53%, berada di wilayah pesisir.

Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Buton tahun 2024 menunjukkan bahwa potensi perikanan tangkap Kabupaten Buton (WPP 714) sebesar 788.939 ton/tahun, dan baru dapat dimanfaatkan kurang lebih 14,67%, sehingga masih ada peluang pengembangan sebesar 85,33%. Beberapa jenis ikan hasil perairan laut Kabupaten Buton antara lain Tongkol, Layang Bonggol, Cakalang, Layang Biru, Teri, Tuna Sirip Kuning. Dimana pelagis merupakan sumber daya perikanan yang sangat penting bagi Kabupaten Buton, baik pelagis besar maupun pelagis kecil. Beberapa jenis ikan pelagis penting seperti ikan tuna, cakalang, tongkol, kembung dan layang menjadi target utama penangkapan yang dilakukan oleh nelayan di Kabupaten Buton. Disamping ikan, juga terdapat hasil laut lainnya seperti Teripang, Agar-Agar, Japing-Japing, Lola, Mutiara dan lainnya.

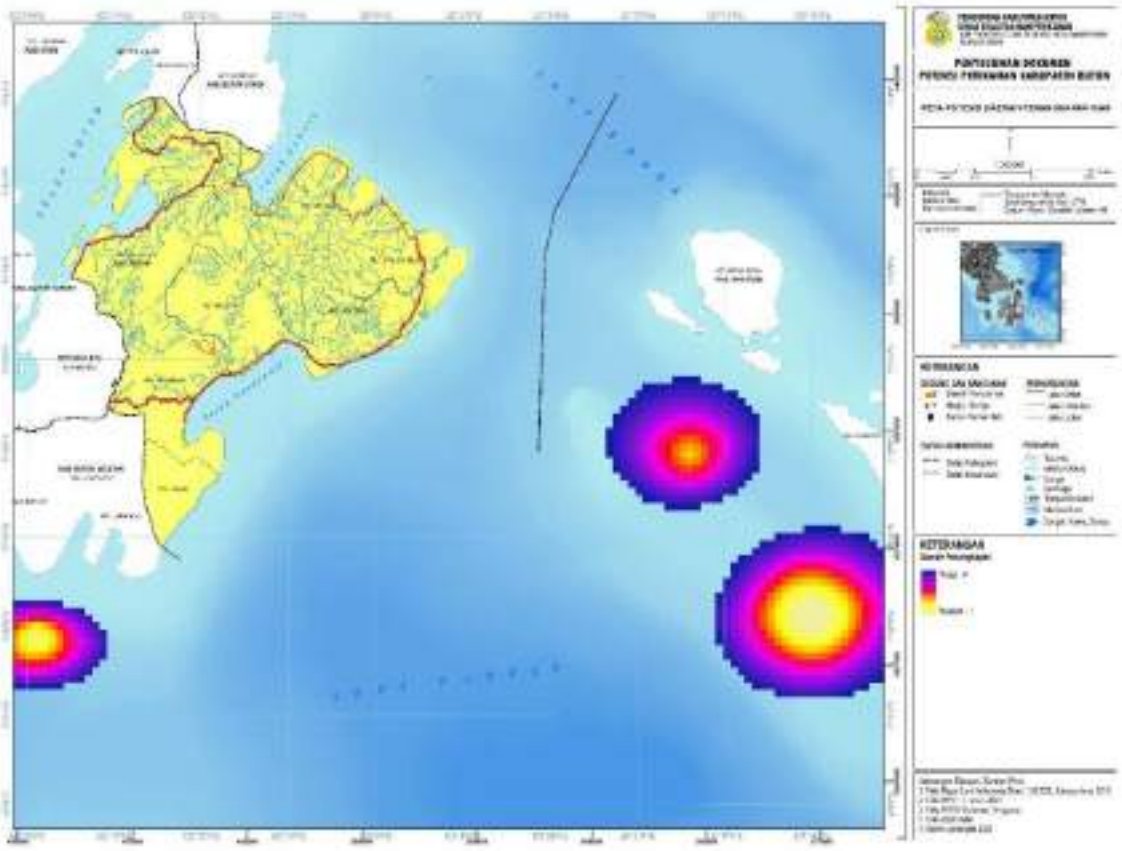
Selanjutnya potensi perikanan budidaya sebesar 356.133,3 ton/tahun dengan luas lahan budidaya 8.147 Ha, terdiri dari budidaya rumput laut sebesar 6.175 Ha, dan budidaya sistem keramba, serta budidaya lainnya sebesar 1.972 Ha. Namun demikian, potensi yang baru dimanfaaatkan sebesar ± 100 Hektar (1,23%), dengan capaian produksi selama tahun 2020-2024 sebesar 39.995 Ton, sehingga peluang pengembangan usaha dibidang perikanan budidaya masih tersedia 98,77%.

Pada sisi jumlah SDM nelayan, nelayan penuh sebanyak 5.313 orang, nelayan sambilan utama sebanyak 2.517 orang, nelayan sambilan utama sebanyak 486 orang, jumlah rumah tangga perikanan tangkap sebanyak 3.679 RTP, jumlah rumah tangga perikanan budidaya sebanyak 339 RTP, jumlah pengolah ikan sebanyak 80 orang, dan jumlah pemasar ikan sebanyak 604 orang.

Selain potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, Kabupaten Buton juga memiliki potensi pengolahan ikan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat pesisir antara lain kegiatan pengasapan/pemanggangan ikan, pengolahan ikan segar dan pelumatan daging (abon ikan) skala kecil serta beberapa jenis ikan yang menjadi komoditi olahan antara lain ikan tuna, ikan teri dan ikan pelagis lainnya.

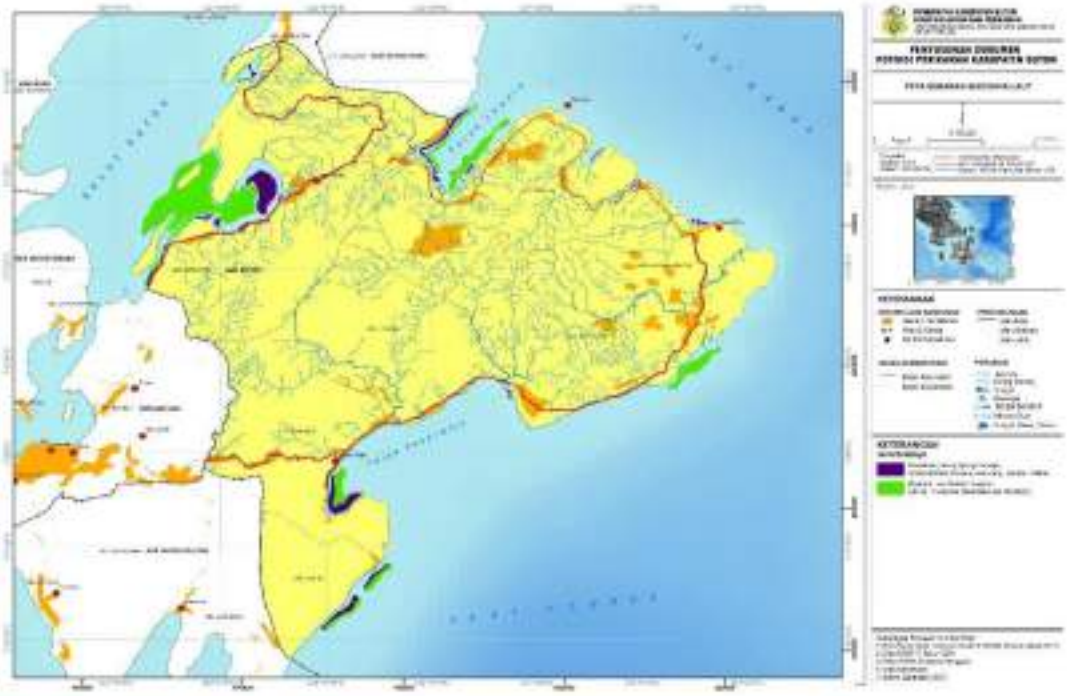
Berikut gambar potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Buton.

Gambar 2.3. Potensi Perikanan Tangkap Kabupaten Buton



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Buton, 2025

Gambar 2.4. Potensi Perikanan Budidaya Kabupaten Buton



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Buton, 2025

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Buton merupakan wilayah Maritim yang sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan, terutama perikanan tangkap, sehingga Pemerintah Kabupaten Buton mendorong Hilirisasi Sektor Perikanan yang merupakan salah satu sektor unggulan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tertera dalam RPJMD 2025-2029. Hal ini sejalan pula dengan RPJPD 2025-2045 untuk mewujudkan Kabupaten Buton sebagai kawasan industri, yang salah satunya adalah industri pengolahan sektor perikanan, melalui hilirisasi sektor perikanan, dengan pengembangan kawasan minapolitan, atau juga kawasan sentra perikanan terpadu, untuk mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, dalam mendukung ekonomi maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kepulauan Buton.

Mengingat potensi perikanan tangkap yang cukup besar tersebut, dan potensi perikanan budidaya, maka Dinas Perikanan Kabupaten Buton telah menyusun dan melaksanakan program-program untuk mendukung peningkatan hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayannya. Bentuk dari program-program tersebut diarahkan sebagai stimulan bagi peningkatan produksi dalam wujud penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Selain itu sisi pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dan manajemen sumber daya manusia kelautan dan perikanan juga dilakukan.

Hingga tahun 2024, dukungan Pemerintah Kabupaten Buton dalam pengelolaan sektor perikanan tangkap, yaitu membangun infrastruktur sektor perikanan tangkap, dimana terdapat 2 pelabuhan pendaratan ikan (PPI) di Kecamatan Lasalimu dan Pasarwajo. Namun saat ini PPI yang beroperasi hanya di Kecamatan Pasarwajo. Sarana pendukung lain produksi perikanan tangkap, yaitu : *Cold Storage* yang terletak di 3 desa wilayah Kecamatan Pasarwajo (Desa Dongkala berkapasitas 500 Ton, Desa Holimombo berkapasitas 150 Ton, dan Desa Wasaga berkapasitas 100 Ton); Pabrik Es PPI Pasarwajo; *Ice Storage* PPI Kamaru; Bangsal Pengolahan Tuna Loin di Desa Sampoabalo Kecamatan

Siotapina; Bangunan Air *Blast Freezer* (ABF) di Desa Holimombo Jaya Kecamatan Pasarwajo; Unit Pengelolaan Ikan Asap di Desa Boneatiro Kecamatan Kapontori.

Sedangkan dukungan infrastruktur sektor perikanan budidaya terdapat pabrik pengolahan rumput laut di Desa Wakalambe Kecamatan Kapontori; ditunjang sarana prasarana budidaya rumput laut yang berada di Kecamatan Kapontori, Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan dan Kecamatan Siotapina; sarana prasarana budidaya ikan seperti keramba jaring apung (KJA) HDPE aquatec yang berada di Kecamatan Kapontori, Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan dan Kecamatan Pasarwajo. Berikut capaian kinerja sektor perikanan Kabupaten Buton tahun 2020-2024 :

Tabel. 2.5. Kinerja Sektor Perikanan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produksi perikanan tangkap	Ton	26.231	26.465	28.341	26.613	19.317
Produksi perikanan budidaya	Ton	3.738	4.096	4.176	1.789	1.909
Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	105,52	107,08	114,42	92,25	64,97
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	62,56	68,77	71,21	92,46	64,96
Pendapatan nelayan	Rp.	3.120.000	2.958.000	3.050.000	3.092.000	3.073.000
Pendapatan pembudidaya	Rp.	3.065.000	2.900.000	2.947.000	3.000.000	2.169.000
Persentase peningkatan pendapatan nelayan	%	120,72	112,92	115,68	96,17	95,33
Persentase peningkatan pendapatan pembudidaya	%	126,66	117,75	117,76	92,46	64,96
Produksi olahan hasil perikanan	Ton	2.346	1.513	2.252	3.098	2.787
Persentase produksi olahan hasil perikanan	%	40,12	21,04	40,60	96,55	78,93
Nilai produksi hasil olahan perikanan	Milyar Rupiah	38,49	36,86	20,98	12,27	13,70
Konsumsi ikan	Kg/ kapita/ tahun	78,54	78,42	80,59	75,88	80,50
Persentase konsumsi ikan	%	90,36	91,07	94,12	73,97	79,70
Jumlah tenaga penyuluh terhadap jumlah nelayan	orang	3	2	2	2	2
Rasio tenaga penyuluh terhadap jumlah nelayan	Angka	0,0008	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
Rasio nelayan yang mendapat bantuan	Angka	0,41	0,50	0,59	0,27	0,32
Kawasan perikanan budidaya yang dikembangkan	Kwsn	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Jumlah kelompok nelayan	Klp	258	325	418	878	991
Jumlah pembudidaya	RTP	508	420	421	285	399
Nilai tukar nelayan	%	94,09	100,91	105,83	101,14	99,28

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Buton, 2020-2024

Berdasarkan data capaian di atas, menunjukan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya mengalami fluktuatif selama periode 2020-2024. Dimana produksi pada tahun 2020 sebesar 26.231 ton, naik menjadi 28.341 ton ditahun 2022. Namun pada tahun 2023 menurun mencapai 26.631 ton hingga tahun 2024 sebesar 19.317 ton. Salah satu

faktor penyebab menurunnya produksi adalah jumlah trip yang tidak optimal karena musim yang tidak menentu.

Demikian pula pada produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 sebesar 3.738 ton, dan terus meningkat mencapai 4.176 ton ditahun 2022. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan signifikan hanya mencapai 1.789 ton, dan kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 1.909 ton. Permasalahan utama menurunnya produksi perikanan budidaya yaitu adanya aktivitas pertambangan di wilayah Kecamatan Kapontori, sehingga berdampak pada kualitas air dan lingkungan budidaya menjadi tercemar, akibatnya sebagian besar masyarakat pembudidaya ikan maupun pembudidaya rumput laut menjadi tidak produktif dan beralih profesi. Hal ini sangat mempengaruhi produksi perikanan budidaya, karena wilayah potensi usaha perikanan budidaya terbesar di Kabupaten Buton adalah teluk Kapontori.

Meskipun Kabupaten Buton memiliki potensi perikanan yang cukup besar, namun dalam pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan. Pengelolaan perikanan secara berkelanjutan di Kabupaten Buton didukung melalui Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP), yang bertujuan untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan dengan memberikan akses dan tanggung jawab pengelolaan wilayah perairan kepada kelompok masyarakat nelayan setempat. Program ini diinisiasi oleh RARE Indonesia bersama Pemerintah Daerah, yang memberdayakan nelayan kecil untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab, memastikan kelangsungan ekosistem laut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui program ini pula diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Ekonomi Biru (*Blue Economi*) di Kabupaten Buton, dan Pemerintah Daerah juga berharap program PPAP dapat berkelanjutan di Kabupaten Buton

❖ **Sektor Pertanian**

Kabupaten Buton biasa juga disebut daerah agraris, hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Buton, 52,51 persen digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/kebun, ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan/hutan rakyat, perkebunan rakyat.

Potensi pertanian dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah maupun potensi dari ketersediaan lahan (pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) serta potensi kawasan perikanan (tangkap dan budidaya) dan infrastruktur pendukungnya. Dimana sektor pertanian merupakan sektor terbesar kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian yang memberi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Buton selama periode 5 tahun terakhir, yaitu pada angka 21,66%. Selain data kontribusi terhadap PDRB, potensi sektor pertanian dapat juga terlihat dari data tenaga kerja, dimana berdasarkan data BPS pada tahun 2024, menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha paling besar di Kabupaten Buton masih didominasi oleh sektor pertanian, yaitu sebanyak 44,45%.

Potensi sumber daya (lahan) pertanian, yang terdiri dari pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan tersebar hampir merata diseluruh kecamatan. Potensi pengembangan kawasan Pertanian Tanaman Pangan seluas 2.980 Ha meliputi Kecamatan Kapontori, Lasalimu Selatan, dan Siotapina; Potensi pengembangan kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura seluas 12.086 Ha meliputi Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, dan Siotapina; Potensi pengembangan lahan Perkebunan seluas 41.119 Ha meliputi kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wabula, dan Wolowoa; dan Potensi pengembangan Peternakan dengan

ketersediaan padang pengembalaan seluas ± 719 Ha meliputi Kecamatan Siotapina, Pasarwajo, dan Kapontori.

Potensi pertanian tersebut didukung dengan infrastruktur Sumber Daya Air dalam pengembangan kawasan pertanian (sawah), yaitu terdapat 5 bendungan, yaitu : Bendungan Kinapani di Kecamatan Lasalimu Selatan, Bendungan Lawele dan Bendungan Lasembangi di Kecamatan Lasalimu, Bendungan Wakalambe, dan Bendungan Wakangka di Kecamatan Kapontori.

Tabel. 2.6. Kinerja Sektor Pertanian Kabupaten Buton
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Tanam Komoditas Utama Tanaman Pangan						
	Padi	Ha	2.287	2.110	1538	1.829	1.829*
	Jagung	Ha	1.830	991	821	795	1.126
	Ubi Kayu	Ha	522	204	130	106,3	159
2	Luas Panen Komoditas Utama Tanaman Pangan						
	Padi	Ha	2.287	2.110	1.538	1.774	1.676
	Jagung	Ha	1.031	823	495	643	694,6
	Ubi Kayu	Ha	304	259	171	208	164
3	Jumlah Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan						
	Padi	Ton	6.419	7.578	5.852	6.430	6.041
	Jagung	Ton	2.751	2.666	1.047	1.292	1.494
	Ubi Kayu	Ton	8.544	6.587	5.779	5.791	4.210
4	Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Tanaman Pangan						
	Padi	Ton/Ha	2,8067	3,5915	3,8049	3,6246	3,6044
	Jagung	Ton/Ha	2,668	3,239	2,115	2,009	2,152
	Ubi Kayu	Ton/Ha	28,105	25,432	33,795	27,854	25,670
5	Luas Tanam Komoditas Utama Tanaman Perkebunan						
	Kakao	Ha	2.412	2.142	1.726	1.301	1.301*
	Jambu Mete	Ha	6.224	6.181	6.024	5.925	5.925*
	Kelapa Dalam	Ha	2.621	2.644	2.811	2.798	2.798*
6	Jumlah Produksi Komoditas Utama Tanaman Perkebunan						
	Kakao	Ton	346,69	446,39	170,17	40,85	40,85*
	Jambu Mete	Ton	3.020,03	331,21	460,16	1.005,03	1.005,03*
	Kelapa Dalam	Ton	1.818,35	2.376.57	2.649,33	2.993,49	2.993,49*
7	Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Tanaman Perkebunan						
	Kakao	Ton/Ha	0,27	0,46	0,3	0,12	0,12*
	Jambu Mete	Ton/Ha	0,67	0,74	0,12	0,22	0,22*
	Kelapa Dalam	Ton/Ha	1,10	1,38	1,49	1,62	1,62*
8	Jumlah Produksi Daging Ternak						
	Daging Sapi	Kg	81.472	81.592	102.546	102.546	71.547
	Daging Ayam	Kg	10.839	11.000	12.968	12.968	4.593
	Daging Ayam Ras Pedaging	Kg	21.213	24.100	25.650	25.650	2.106
9	Jumlah Populasi Ternak						
	Sapi	Ekor	12.812	13.591	13.977	5.004	5.357
	Kambing	Ekor	11.900	12.657	12.700	4.216	4.670
	Babi	Ekor	170	379	477	64	93
	Ayam Buras	Ekor	360.504	380.781	381.656	50.553	53.268
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	15.800	3.780	19.200	7.136	7.492
	Itik	Ekor	13.649	13.699	14.137	739	775
	Itik Manila	Ekor	2.443	2.032	2.470	295	309
10	Jumlah Kelompok Tani	Klpk	353	372	382	424	445
11	Jumlah penyuluh pertanian6	Orang	16	16	13	23	33

*Keterangan : * = Angka Sementara*

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buton, 2020-2024

Berikut akan diuraikan capaian kinerja sektor pertanian, terdiri atas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan :

✧ Pertanian Tanaman Pangan

Luas Panen Padi mengalami penurunan bertahap dari 2.287 ha pada tahun 2020 menjadi 1.676 ha pada tahun 2024. Penurunan Luas Panen sekitar 26,7% selama lima tahun. Walau luas panen menurun, terjadi peningkatan pada produktivitas padi, dari 2,81 ton/ha pada tahun 2020 menjadi puncaknya 3,80 ton/ha pada tahun 2022. Produktivitas padi sedikit menurun setelah itu, stabil di kisaran 3,60–3,62 ton/ha pada tahun 2023–2024. Ini menandakan adanya peningkatan efisiensi produksi, walaupun luas panen turun. Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebssar 7.578 ton, disebabkan oleh kombinasi luas panen dan produktivitas yang tinggi. Produksi paling rendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 5.852 ton, meskipun produktivitas pada tahun 2022 tertinggi, tapi luas panen paling rendah. Produksi padi cenderung stabil di kisaran 6.000–6.400 ton dalam dua tahun terakhir.

Luas Tanam Jagung memiliki perubahan yang fluktuatif dan cenderung menurun antara tahun 2020 sebesar 1.830 Ha hingga tahun 2023 sebesar 795 Ha. Namun, pada tahun 2024 Luas Tanam jagung menunjukkan kenaikan signifikan seluas 1.126 Ha. Luas Panen jagung juga mengalami penurunan drastis dari 1.031 Ha pada tahun 2020 menjadi 495 Ha pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali pada tahun 2023–2024. Produktivitas jagung tertinggi pada tahun 2021 sebesar 32,4 Ton/Ha, menunjukkan kondisi optimal saat itu. Kemudian menurun tajam pada tahun 2022–2023, lalu sedikit membaik di tahun 2024 sebesar 21,52 Ton/Ha. Penurunan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : Cuaca ekstrem, Penurunan kualitas benih atau pupuk, dan Serangan hama dan penyakit.

Produksi jagung tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2021, sejalan dengan luas panen dan produktivitas yang tinggi. Produksi terendah pada tahun 2022, meskipun luas tanam masih relatif besar. Kemudian produksi jagung mulai pulih di tahun 2024, tetapi masih belum kembali ke tingkat produksi awal. Penurunan produksi jagung dikarenakan berkurangnya luas tanam dan produktivitas, akibat adanya serangan hama ulat grayak di kebun petani meskipun secara umum terjadi kenaikan luas panen karena adanya *carry over* (luas panen yang menyeberang tahun). Disamping itu, penurunan produksi juga dikarenakan adanya peralihan komoditi menjadi tanaman perkebunanan semusim (komoditi nilam), yang secara ekonomi lebih menguntungkan petani dengan harga olahan yang tinggi.

Meskipun demikian Kabupaten Buton memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas jagung, khususnya jagung hibrida. Jagung hibrida merupakan varietas hasil persilangan yang memiliki keunggulan dari segi produktivitas, daya tahan terhadap penyakit, serta pertumbuhan tanaman yang seragam. Ketersediaan lahan, dukungan agroklimat, dan antusiasme petani menjadi modal penting dalam pengembangan komoditas ini. Luas lahan eksisting potensi pengembangan jagung hibrida di Kabupaten Buton sebesar 305 Ha dan tersebar di 7 wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Kapontori sebesar 75 Ha, Pasarwajo sebesar 51 Ha, Lasalimu dan Lasalimu Selatan masing-masing sebesar 50 Ha, Wolowa besar 30 Ha, Siotapina sebesar 25 Ha, Wabula sebesar 20 Ha, dan Kecamatan Kapontori sangat berpotensi menjaid Sentra produksi terbesar karena selain memiliki lahan yang cukup luas, juga ditunjang dengan agroklimat yang cocok untuk pengembangan jagung hibrida.

Dalam beberapa tahun terakhir, produksi jagung di Kabupaten Buton terus mengalami peningkatan meskipun masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan benih unggul dan peralihan sebagian petani ke komoditas lain seperti nilam. Beberapa kecamatan seperti Kapontori, Pasarwajo, dan Lasalimu merupakan daerah yang dikenal

sebagai sentra jagung hibrida, dengan dukungan dari pemerintah daerah dan pihak keamanan melalui program ketahanan pangan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan jagung sebagai pangan alternatif dan bahan baku industri, pengembangan jagung hibrida tidak hanya menjadi solusi ketahanan pangan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui hilirisasi produk jagung, yang akan mendorong terbentuknya industri pengolahan jagung seperti tepung jagung, pakan ternak, dan minyak jagung. Hilirisasi akan menyerap tenaga kerja lokal dan menciptakan peluang usaha baru. Dengan dukungan pemerintah daerah dan ketersediaan lahan, program ini berpotensi mendongkrak PAD serta mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan dan pakan.

Luas tanam ubi kayu mengalami penurunan drastis, dari 522 hektar pada tahun 2020 menjadi hanya 159 hektar pada tahun 2024 (turun sekitar 70%). Penurunan ini menunjukkan adanya minat petani yang menurun terhadap komoditas ubi kayu, yang dapat disebabkan oleh: Rendahnya harga jual ubi kayu di pasar, Minimnya dukungan dari sisi input produksi seperti benih unggul dan pupuk, Kurangnya jaminan pasar atau off-taker tetap. Dampaknya, produksi ubi kayu juga mengalami penurunan signifikan, dari 8.544 ton pada tahun 2020 menjadi hanya 4.210 ton di tahun 2024, meskipun terdapat fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Produktivitas ubi kayu per hektar menunjukkan fluktuasi yang tajam, dari 281,04 ton/ha pada tahun 2020 hingga puncaknya 337,93 ton/ha pada tahun 2022, namun kembali turun ke 256,69 ton/ha di tahun 2024. Ketidakstabilan ini menandakan bahwa: Teknologi budidaya belum merata diterapkan di kalangan petani, Ketersediaan sarana produksi pertanian yang tidak konsisten, Pelatihan dan penyuluhan pertanian belum menjangkau semua pelaku. Produktivitas tinggi tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan produksi, karena dibatasi oleh semakin sempitnya lahan yang ditanami.

Dalam beberapa tahun (misalnya 2023), luas panen ubi kayu seluas 208 ha bahkan melebihi luas tanam tahun berjalan seluas 106,3 ha. Hal ini mencerminkan adanya ketidakteraturan sistem penanaman dan panen, yang umum terjadi dalam tanaman tahunan seperti ubi kayu, tetapi juga bisa menjadi indikasi lemahnya sistem pencatatan dan perencanaan produksi pertanian.

✧ Pertanian Tanaman Perkebunan

Luas areal tanam jambu mete relatif stabil dari tahun 2020 hingga tahun 2023, yakni dari seluas 6.224 ha turun sedikit menjadi 5.925 ha. Produktivitas jambu mete mengalami fluktuasi tajam, dari sebesar 0,67 ton/ha pada 2020 menurun drastis menjadi hanya sebesar 0,074 ton/ha pada tahun 2021, lalu meningkat kembali hingga sebesar 0,22 ton/ha pada tahun 2023. Produksi jambu mete pun mengikuti tren produktivitas, dari sebesar 3.020 ton pada tahun 2020 yang lebih besar dari target sebesar 982 Ton, menurun drastis menjadi hanya sebesar 331 ton pada tahun 2021 yang sangat jauh dari target yang diharapkan sebesar 990 Ton, dan naik kembali menjadi sebesar 1.005 ton pada tahun 2023. Meskipun luas areal tidak banyak berubah, rendahnya produktivitas menunjukkan adanya kendala teknis. Secara umum penurunan produksi jambu mete di Kabupaten Buton adalah umur tanaman sudah tua dan tidak adanya peremajaan tanaman kembali, penerapan teknik budidaya seperti pengaturan jarak tanam, pemeliharaan tanaman, belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, kurang aktifnya kelompok tani sebagai wahana kerjasama, wadah pembelajaran dan unit usaha kelembagaan, adanya usaha lain diluar perkebunan/pertanian sehingga tidak fokus pada satu komoditi, adanya iklim yang tidak menentu serta adanya pemekaran wilayah sehingga daerah sentra produksi jambu mete berkurang.

Luas areal kakao mengalami penurunan signifikan, dari seluas 2.412 ha pada tahun 2020 menjadi hanya seluas 1.301 ha pada tahun 2023, mengindikasikan penurunan minat atau konversi lahan. Produktivitas kakao yang tidak stabil, tertinggi pada tahun tahun 2021 sebesar 0,46 ton/ha, namun menurun menjadi sebesar 0,12 ton/ha pada tahun 2023. Produksi kakao juga turun drastis, dari sebesar 446 ton yang jauh dari target yang diharapkan sebesar 653 Ton pada tahun 2021 menjadi hanya sebesar 40 ton pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan komoditas kakao di Kabupaten Buton menghadapi kemunduran yang serius, baik dari segi luas kebun maupun produktivitas.

Luas areal kelapa dalam cenderung meningkat sedikit, dari seluas 2.621 ha pada tahun 2020 menjadi seluas 2.798 ha di tahun 2023. Produktivitas kelapa menunjukkan peningkatan stabil, dari sebesar 1,10 ton/ha menjadi sebesar 1,62 ton/ha dalam periode yang sama. Produksi kelapa meningkat konsisten, dari 1.818 ton yang sangat berhasil jauh melebihi target yang diharapkan sebesar 820 Ton pada tahun 2020 menjadi hampir 3.000 ton (2.993 ton) pada tahun 2023. Kelapa dalam menjadi satu-satunya komoditas yang mengalami pertumbuhan positif dalam hal produktivitas dan produksi, menjadikannya komoditas andalan sektor perkebunan Kabupaten Buton.

Secara umum produksi dan produktivitas komoditas perkebunan di Kabupaten Buton menunjukan angka yang fluktuatif hal ini disebabkan antara lain : (i) Umumnya umur tanaman sudah tua dan tidak adanya peremajaan tanaman kembali; (ii) Kondisi iklim yang tidak menentu serta intensitas serangan hama yang cukup tinggi sehingga produksi dan produktivitas jambu mete mengalami penurunan; (iii) Penerapan teknik budidaya seperti pengaturan jarak tanam, pemeliharaan tanaman, pemupukan yang berimbang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh petani; (iv) Kurang aktifnya kelompok tani sebagai wahana kerjasama, wadah pembelajaran dan unit usaha kelembagaan, adanya usaha lain diluar perkebunan/pertanian sehingga tidak fokus pada satu komoditi; (v) Adanya iklim yang tidak menentu serta intensitas serangan hama yang cukup tinggi adanya pemekaran wilayah sehingga daerah sentra produksi jambu mete berkurang.

Kabupaten Buton juga memiliki potensi pengembangan tanaman kelapa, khususnya varietas kelapa dalam. Komoditi ini memiliki produksi yang paling tinggi dan menempati posisi strategis sebagai penopang ekonomi masyarakat, karena hampir seluruh bagian dari tanaman ini dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai jual tinggi. Tanaman ini dikenal tahan terhadap kondisi lingkungan tropis dan sangat adaptif terhadap berbagai jenis tanah, termasuk tanah-tanah yang tersebar di Kabupaten Buton, dengan luas lahan eksisting sebesar 2.798 ha, dan tingkat produksi mencapai 2.993,489 ton per tahun. kelapa dalam terbukti menjadi salah satu komoditas unggulan lokal yang memiliki produktivitas tinggi. Selain itu, terdapat potensi lahan pengembangan seluas 5.997 ha yang sangat cocok untuk budidaya kelapa, baik dari segi struktur tanah, curah hujan, maupun topografi.

Beberapa lokasi yang berpotensi pengembangan kelapa dalam, yaitu : Kecamatan Lasalimu merupakan wilayah dengan luas areal tanam tertinggi, yaitu sebesar 905 ha, dengan jumlah tanaman menghasilkan mencapai 732 ha, dan produksi mencapai 785.000 kg per tahun. Potensi ini menjadikan Lasalimu sebagai sentra utama pengembangan kelapa dalam di Kabupaten Buton, didukung oleh jumlah petani sebanyak 365 kepala keluarga dan luas areal tanam potensial yang masih bisa dikembangkan sebesar 1.391 ha. Selanjutnya, Kecamatan Lasalimu Selatan memiliki luas areal tanam sebesar 570 ha, dengan tanaman menghasilkan 311 ha dan produksi sebesar 217.700 kg per tahun. Kecamatan ini memiliki areal tanam potensial sebesar 1.531 hektar, menjadikannya sebagai wilayah strategis kedua untuk pengembangan kelapa dalam dan pengembangan

industri pengolahan kelapa. Disusul Kecamatan Kapontori, meskipun memiliki luas tanam yang lebih kecil yaitu 242 hektar, tetap menunjukkan potensi yang signifikan dengan produksi sebesar 91.000 kg per tahun dan luas areal tanam potensial sebesar 803 hektar. Kapontori juga dikenal sebagai salah satu daerah tradisional penghasil kelapa, sehingga berpotensi dikembangkan melalui pendekatan revitalisasi kebun rakyat dan hilirisasi produk kelapa seperti VCO dan arang briket.

Ketiga wilayah ini dapat menjadi prioritas lokasi pengembangan program budidaya dan hilirisasi kelapa dalam di Kabupaten Buton, baik untuk skala UMKM maupun industri menengah, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan petani, pengembangan industri olahan kelapa, dan kontribusi terhadap PAD daerah secara langsung.

Dari sisi teknis, kelapa dalam memiliki potensi produksi sebanyak 50–80 butir per pohon per tahun, dengan kepadatan tanam antara 100–160 pohon per hektare. Artinya, satu hektare kebun kelapa dapat menghasilkan hingga 20.000 butir kelapa per tahun. Bila diolah menjadi kopra, dengan rendemen sekitar 250 gram per butir, maka potensi pendapatan petani dari penjualan kopra saja dapat mencapai Rp. 35 juta per hektare per tahun. Angka ini belum termasuk nilai tambah dari produk olahan lainnya seperti minyak kelapa (VCO), arang tempurung, sabut kelapa, hingga kerajinan tangan. Dari sisi nasional, kelapa termasuk dalam komoditas strategis nasional, dan Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia. Produk turunan kelapa dalam bahkan telah diekspor ke berbagai negara, menunjukkan potensi besar pengembangan industri hilir di tingkat lokal.

✧ Pertanian Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura yang dikembangkan di Kabupaten Buton meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan biofarmaka. Saat ini, terdapat satu dari beragam komoditas hortikultura yang dikembangkan yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Buton, yaitu jeruk siam/jeruk Lasembangi di Kecamatan Lasalimu.

Jeruk siam atau keprok, yang juga dikenal sebagai Jeruk Lasembangi merupakan salah satu komoditas buah unggulan di Kabupaten Buton dengan produksi yang cukup signifikan, mencapai 4.871 kwintal pada tahun 2020 dan meskipun mengalami penurunan, produksi jeruk ini tetap stabil di kisaran 2.500 kwintal pada tahun 2023-2024. Produksi yang cukup besar ini menunjukkan bahwa jeruk Lasembangi memiliki peran penting dalam sektor pertanian lokal.

Selain sebagai komoditas pertanian, jeruk Lasembangi memiliki potensi besar sebagai objek agrowisata yang menarik. Agrowisata jeruk Lasembangi memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan pengalaman langsung di kebun jeruk, mulai dari memetik buah segar hingga belajar proses budidaya secara tradisional maupun modern. Hal ini tidak hanya menambah nilai ekonomi bagi petani, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha wisata yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Pengembangan agrowisata jeruk Lasembangi dapat memperkuat perekonomian Kabupaten Buton melalui diversifikasi sumber pendapatan masyarakat, sekaligus melestarikan budaya pertanian tradisional dan lingkungan alam sekitar kebun jeruk. Dengan pengelolaan yang tepat, jeruk Lasembangi tidak hanya menjadi komoditas hasil pertanian, tetapi juga ikon agrowisata yang mengangkat citra Kabupaten Buton sebagai daerah penghasil buah jeruk berkualitas sekaligus destinasi wisata edukatif dan rekreasi alam.

Pada sisi produksi sayur-sayuran di Kabupaten Buton selama periode 2020 hingga 2024, menunjukkan trend fluktuatif yang beragam antar jenis komoditas. Bawang daun menunjukkan tren peningkatan produksi dari 94,40 kwintal pada 2020 menjadi 167,98

kwintal pada 2024. Bawang merah mengalami penurunan produksi secara signifikan dari 423 kwintal pada 2020 menjadi hanya 63,66 kwintal pada 2024, menandakan turunnya budidaya atau hasil panen bawang merah. Komoditas seperti kubis dan buncis menunjukkan tren peningkatan. Kubis meningkat dari 188,50 kwintal pada 2020 ke 334,58 kwintal pada 2024, sementara buncis naik dari 343 kwintal menjadi 287,75 kwintal setelah beberapa fluktuasi. Sayuran seperti petsai/sawi, bayam, dan kangkung mengalami penurunan produksi secara umum selama periode ini, meskipun ada sedikit kenaikan pada beberapa tahun. Cabai besar (teropong) dan cabe keriting mengalami pertumbuhan produksi yang cukup signifikan. Cabai besar naik dari tidak tercatat pada 2020 menjadi 561,24 kwintal pada 2024, sedangkan cabai keriting meningkat dari nol menjadi 293,46 kwintal. Produksi cabai rawit menurun dari 1.323 kwintal pada 2020 menjadi 633,39 kwintal pada 2024, menunjukkan penurunan yang cukup besar namun masih menjadi salah satu sayuran dengan produksi tinggi. Faktor eksternal seperti cuaca, permintaan pasar, dan teknologi budidaya yang digunakan merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap produksi tanaman hortikultura.

Apabila dilihat dari komoditi utama tanaman horikultura, cabai sangat berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Buton. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Kabupaten Buton yang terdiri dari dataran rendah dan perbukitan dengan iklim tropis basah menjadikan daerah ini sangat cocok untuk budidaya tanaman cabai sepanjang tahun. Disamping itu pula, didukung dengan ketersediaan lahan yang cukup besar. Saat ini, Kabupaten Buton memiliki potensi lahan tanam cabai seluas 45 ha yang tersebar di 7 kecamatan. Kecamatan yang memiliki potensi lahan terbesar untuk pengembangan cabai adalah Siotapina (12 ha) dan Kapontori (11 ha), disusul oleh Pasarwajo (7 ha). Lahan-lahan ini sudah dimanfaatkan sebagian untuk budidaya cabai, dan memiliki kelompok tani aktif. Dukungan infrastruktur dasar seperti jalan tani dan akses air juga relatif memadai.

Meskipun demikian, pengelolaan dan pengembangan komoditas cabai masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : keterbatasan akses terhadap benih unggul, kurangnya teknologi budidaya dan pascapanen, serta minimnya pengembangan industri hilir. Oleh karena itu, program hilirisasi cabai menjadi salah satu strategi penting yang diusung oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buton. Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas cabai melalui pengolahan hasil panen, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pendekatan yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir, Kabupaten Buton diharapkan dapat menjadi sentra produksi dan hilirisasi cabai yang kompetitif dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tenggara.

✧ Peternakan

Secara umum populasi ternak, baik ternak besar sapi, ternak kecil kambing dan babi, maupun ternak unggas ayam ras, ayam buras petelur, itik dan itik manila selama periode 2020-2024, menunjukkan trend yang fluktuatif. Kondisi populasi tersebut, sejalan dengan produksi peternakan, khususnya produksi daging sapi, daging ayam, dan daging ayam buras.

Penurunan produksi daging dan populasi ternak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1) Masih kurangnya sarana prasarana pendukung/penunjang dalam rangka pengembangan peternakan yang dapat memenuhi kuantitas dan kualitas kebutuhan pasar domestik maupun global seperti :

a. Belum meratanya pada seluruh wilayah pengembangan ternak mengenai penyediaan/percontohan kebun hijauan makanan ternak sesuai standar anjuran teknologi.
b. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana transportasi untuk mendukung kelancaran pengangkutan saprodi peternakan dan pelayanan kesehatan hewan.
c. Kurangnya fasilitas penunjang pada minirens seperti bibit sapi unggul, penyediaan sumber air dan tempat pelayanan pakan ternak yang dapat memenuhi standar minimal.

2) Pemahaman masyarakat petani khususnya penggaduh yang belum memadai, mengenai :
a. Pemeliharaan ternak, penggemukan dan proses reproduksi yang masih mengandalkan proses alami.
b. Penjualan/pengeluaran ternak dan pemotongan hewan yang belum terkendali dengan maksimal.
c. Penjualan sapi betina produktif.

3) Masih kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan hewan yang dapat menjangkau pelayanan kesehatan hewan secara efisien dan efektif pada seluruh wilayah pengembangan peternakan di Kabupaten Buton.

Sebagian besar populasi ternak sapi yang dipotong di Kabupaten Buton merupakan ternak dari luar daerah seperti Kabupaten Muna dan Buton Utara. Sebagai daerah yang menampung ternak dan produk hasil ternak dari luar maka Kabupaten Buton rawan terhadap serangan penyakit hewan menular. Ini merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dalam pelayanan di bidang peternakan. Pada tahun 2020-2024, tidak ada kejadian kasus penyakit ternak. Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel, penyakit yang ada bukan termaksud penyakit menular serta tidak ada laporan dari petani terkait kasus bencana petani lainnya.

Budidaya ternak yang dilakukan peternak di Kabupaten Buton sebagian besar didominasi oleh jenis pemeliharaan yang tradisional/non intensif. Rendahnya penerapan *Good Farming Practices (GFP)* berpengaruh terhadap tingkat produktivitas ternak yang masih dibawah potensinya. Selain faktor pemeliharaan, mutu bibit ternak juga masih menjadi permasalahan dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hasil peternakan. Selain itu, tingginya tingkat pemotongan ternak sapi betina produktif juga menjadi salah satu persoalan yang harus diperhatikan.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan akan produk hasil peternakan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan produksi sapi yang dibudidaya di Kabupaten Buton. Saat ini pengembangbiakan ternak hanya mengandalkan sistem kawin alam. Untuk meningkatkan penerapan inseminasi buatan (IB), permasalahan yang dihadapi adalah kapasitas peralatan dan kemampuan petugas.

Pada sisi lain, Kabupaten Buton memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan bentang lahan yang luas, mulai dari perbukitan, dataran, hingga hamparan savana terbuka yang sangat potensial untuk pengembangan sektor peternakan. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi defisit produksi daging sapi yang memicu tingginya impor dari luar negeri. Kondisi ini membuka peluang bagi Kabupaten Buton untuk mengambil peran sebagai salah satu daerah penyangga produksi daging sapi nasional melalui pemanfaatan lahan-lahan terbuka dengan sistem padang penggembalaan yang dikelola secara modern dan berkelanjutan melalui konsep *"Mini Ranch Buton"*.

Melalui konsep tersebut, pemerintah daerah menginisiasi pengembangan pusat peternakan sapi potong yang terintegrasi, tidak hanya berfokus pada penggemukan, tetapi juga pemeliharaan jangka panjang dan pengembangbiakan sapi potong unggulan. Mini Ranch ini akan memadukan manajemen padang penggembalaan yang produktif dengan

pengembangan hijauan pakan ternak berkualitas, penerapan teknologi peternakan, serta sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Hal ini didukung dengan ketersediaan lahan seluas 10 hektare dari total potensi 100 hektare di Desa Labuandiri, Kecamatan Siotapina, yang telah disiapkan dan akan difungsikan secara optimal untuk pengembangan *mini ranch*, meliputi : area kandang dan penggemukan, padang penggembalaan sapi dan kuda, gudang pakan, instalasi air, kebun hijauan pakan ternak, zona edukasi dan pelatihan, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Pengembangan Mini Ranch Buton diharapkan menjadi motor penggerak hilirisasi sektor peternakan di Kabupaten Buton. Dari hulu, penyediaan bibit sapi unggul dan padang penggembalaan produktif akan memastikan pasokan bahan baku yang berkelanjutan. Pada tahap pengolahan, sapi akan dikelola untuk menghasilkan daging segar dan produk olahan yang siap dipasarkan. Sementara di hilir, limbah ternak akan dimanfaatkan menjadi pupuk organik dan biogas, sehingga menciptakan nilai tambah yang signifikan. Seluruh proses ini akan memperkuat rantai nilai peternakan, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah di sektor pengolahan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan pengelolaan yang profesional dan dukungan lintas sektor, Mini Ranch Buton bukan hanya akan menjadi pusat produksi sapi potong, tetapi juga simbol kemandirian pangan dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

❖ **Sektor Pariwisata**

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang dapat berkonribusi dalam pembangunan ekonomi daerah. Letak geografis Kabupaten Buton yang sangat strategis, berdekatan dengan Kabupaten Wakatobi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, dan jarak tempuh yang tidak membuhkan waktu lama, karena telah tersedia sarana moda transportasi, serta potensi pariwisata dan kekayaan budaya yang sangat beragam, menjadikan Kabupaten Buton sangat berpotensi sebagai salah satu daerah penyangga pengembangan pariwisata di Pulau Buton, khususnya Kabupaten Wakatobi. Disamping itu, terletak di jalur Wallacea yang kaya akan flora dan fauna, Buton memiliki potensi beragam ekosistem, sehingga menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekoturism. Pengembangan pariwisata Kabupaten Buton sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Propinsi Sulawesi Tenggara sektor pariwisata, yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029, yaitu Pengembangan Pariwisata Pulau Buton, melalui pengembangan kawasan pariwisata pendukung pariwisata prioritas di Wakatobi.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Buton Tahun 2021-2026, menunjukan bahwa pembangunan destinasi pariwisata daerah (DPD), terdiri dari 2 (dua) destinasi pariwisata daerah, 3 (tiga) kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), dan 4 (empat) kawasan strategis pengembangan pariwisata daerah (KPPD). Perwilayahan DPD terdiri dari : DPD Teluk Pasarwajo dan sekitarnya dengan tematik Pengembangan destinasi unggulan budaya bahari dan ritual adat, dan DPD Teluk Kapontori dan sekitarnya dengan tema Minat khusus wisata alam, petualangan, sejarah dan agrowisata. Perwilayahan KSPD, terdiri dari : KSPD Pasarwajo dan sekitarnya, KSPD Wabula dan sekitarnya, dan KSPD Kapontori dan sekitarnya. Sedangkan perwilayahan KPPD terdiri dari : KPPD Wolowa dan sekitarnya, KPPD Siotapina dan sekitarnya, KPPD Lasalimu Selatan dan sekitarnya, dan KPPD Lasalimu dan sekitarnya.

Kabupaten Buton memiliki potensi pariwisata yang beragam dan dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori utama, yaitu wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, serta wisata minat khusus dan ekonomi kreatif. Kelima kategori

ini saling melengkapi dan membentuk identitas khas pariwisata Buton yang menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan:

1. **Wisata Bahari** – Kabupaten Buton dikenal dengan garis pantai yang panjang, pulau-pulau kecil, dan perairan laut kaya biota serta terumbu karang. Potensi ini mencakup pantai berpasir putih, spot snorkeling dan diving, ekowisata mangrove, hingga atraksi lumba-lumba. Wisata bahari menjadi unggulan utama yang mampu menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara.
2. **Wisata Alam** – Menawarkan panorama pegunungan, lembah, air terjun, dan danau alami. Selain keindahan lanskap, potensi ini mendukung aktivitas trekking, camping, fotografi, dan penelitian ekologi. Dengan karakteristik yang masih alami, wisata alam menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mencari ketenangan dan pengalaman autentik.
3. **Wisata Budaya** – Identik dengan pesta adat, tradisi, dan event budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Atraksi seperti pesta panen, ritual adat, festival budaya, dan tradisi suku Bajo menampilkan kekayaan kearifan lokal. Wisata budaya tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga edukatif serta memperkuat identitas daerah.
4. **Wisata Sejarah** – Sebagai bekas pusat Kesultanan Buton, kabupaten ini menyimpan banyak peninggalan sejarah berupa benteng, makam, meriam, baruga, dan naskah kuno. Warisan sejarah ini menjadi daya tarik rekreasi sekaligus sarana pendidikan dan penguatan identitas lokal.
5. **Wisata Minat Khusus dan Ekonomi Kreatif** – Berkembang sebagai bentuk diversifikasi produk wisata yang menjawab kebutuhan pasar spesifik. Potensi meliputi trekking, jelajah gua, ekowisata mangrove, agrowisata, hingga wisata kampung Bajo. Sementara itu, ekonomi kreatif hadir melalui kuliner khas “Letter Buton”, kopi Kaongke Ongkea, kerajinan tangan, seni pertunjukan, serta festival budaya. Sinergi keduanya memperkaya atraksi wisata dengan nilai autentik sekaligus membuka peluang usaha dan memperluas lapangan kerja.

Secara keseluruhan, kelima kategori Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) saling melengkapi dan membentuk ekosistem pariwisata yang utuh: wisata alam menghadirkan lanskap menawan, wisata bahari memperlihatkan kekayaan laut, wisata budaya meneguhkan identitas, wisata sejarah memperkuat warisan peradaban, sementara wisata minat khusus dan ekraf menjawab kebutuhan pasar spesifik. Dengan integrasi seluruh potensi ini, pengembangan pariwisata Kabupaten Buton tidak hanya diarahkan pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga menekankan keberlanjutan, pelestarian budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Dengan demikian, Kabupaten Buton memiliki daya saing untuk berkembang sebagai destinasi penyangga DPSP Wakatobi dalam kerangka pengembangan Kawasan Pariwisata Pulau Buton, bersama Kota Baubau (pusat budaya dan transportasi), Kabupaten Buton Utara (ekowisata bahari), dan Kabupaten Buton Selatan (bahari dan agroekowisata). Posisi ini memperkuat sinergi kawasan Pulau Buton sehingga dapat berkontribusi optimal pada pencapaian arah kebijakan Provinsi Sulawesi Tenggara di sektor pariwisata.

Beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten Buton dan menarik dikunjungi antara lain :

a. Suaka Margasatwa Lambusango dan cagar alam Kakenauwe Kec. Kapontori. Merupakan hutan hujan tropis yang belum tersentuh,dan menjadi rumah bagi spesies endemik seperti anoa, macaque, tersius, kuskus dan beberapa jenis burung. Saat ini sumber daya alam yang eksotis ini pengelolaannya menjadi tanggung jawab

Operation Wallacea. Pengunjung dapat mencapai hutan lindung tersebut dengan menggunakan minibus lokal selama satu setengah jam.

Potensi wisata lainnya yang terletak di Kecamatan Kapontori adalah wisata pulau pendek dan pulau panjang, pantai kapontori, pantai walinda, spot diving pulau pendek, uwe kancusu, danau biru/ndawundawuna, danau wambilau, gua liangkamoi, gua langole, gua wakole togo, gua wisata, gua wambilau, air terjun lapangan, air bendung, dan padang kuku.

b. Kawasan Pantai Koguna. Merupakan kawasan pantai yang terletak di Kecamatan Lasalimu Selatan dengan luas arealnya berada pada hutan produksi sebesar 1.071 Ha, luas APL di pesisir pantai sebesar 3,6 Ha dengan panjang pantai 9,5 km, pada kawasan ini terdapat pula obyek wisata danau udang merah seluas 0,2 Ha, batu terbelah seluas 0,3 Ha. Obyek wisata lainnya yang dapat dikunjungi di Kecamatan Lasalimu Selatan adalah permandian topa, wacu kambo, la gusi gusi, danau togomotonu, gua langalu, spot diving pantai koguna, togo matonu, dan permandian sangi wa ode.
c. Kecamatan Wabula sebagai kawasan pengembangan pariwisata memiliki berbagai potensi wisata alam dan wisata bahari. Akses menuju lokasi wisata sangat mudah dengan jarak tempuh ± 24 km dari ibukota kabupaten.

   Beberapa potensi wisata di Kecamatan Wabula adalah kawasan Kali Topa yang direncanakan akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata terpadu, Pantai Wabula, Lakongkomali/Tj. Pamali, Pantai Lahunduru, Permandian Watobura, Kampung Bajo, Pantai Wasampela, dan spot diving Wabula Wasuemba.
c. Kawasan *dive centre* Pasarwajo, yang terletak di pusat ibukota kabupaten memiliki beragam keunikan keanekaragaman hayati. Obyek wisata lainnya adalah pantai banabungi, pantai kancinaa, pantai kasosona, pantai wasaga, pantai kumbawakole/muara kali winto, gua wandingi, gua larumusu, air terjun kohau-hauna, permandian air panas wining, permandian air panas kaongke-ongkea, permandian wajo, kali winto/permandian puto
e. Obyek wisata yang juga sangat menarik untuk dikunjungi di kecamatan Wolowa yaitu air terjun kalata, air terjun wacumapu, pantai wasuni, pantai sangia wa ode, pantai kampoila/pantai pasir hitam, sokoa dan spot diving sokoa.
f. Obyek wisata di kecamatan Siotapina yaitu permandian baluwu, permandian sangia manuru, spot diving sangia manuru.
g. Berbagai potensi pariwisata tersebut juga didukung oleh potensi budaya berupa peninggalan sejarah, hal ini dapat dilihat terdapat berbagai peninggalan sejarah antara lain benteng kamaru, benteng lawalangke, benteng togomatonu di kecamatan Lasalimu, benteng ambuau, benteng kondala, benteng batukombei, benteng togo boneo, benteng kopea, benteng labuae, makam syeh salim di kecamatan Lasalimu Selatan, benteng yang terdapat di Kecamatan Siotapina, Wabula, Wolowa, dan Kapontori.
h. Dalam rangka peningkatan promosi wisata budaya Pemerintah Kabupaten Buton telah mengagendakan pelaksanaan pesta adat dibeberapa wilayah yang sarat akan nilai budaya dan rutin dilaksanakan sepanjang tahun.

Kabupaten Buton selain memiliki sejuta daya tarik pada alam laut dan hutannya, juga memiliki beragam wisata budaya dan sejarah serta tradisi yang unik dan eksotik, antara lain : benteng kamaru, benteng lawalangke, benteng togomatonu di kecamatan Lasalimu, benteng ambuau, benteng kondala, benteng batukombei, benteng togo boneo, benteng kopea, benteng labuae, makam syeh salim di kecamatan Lasalimu Selatan, benteng yang terdapat di Kecamatan Siotapina, Wabula, Wolowa, dan Kapontori, ritual pikoelaliwu, ritual maata, ritual cikaa, kandea-kandea, dhole-dhole, benteng takimpo,

benteng kantolobea, ritual adat tutura Benteng Takimpo, Benteng Keraton Lasalimu, makam Oputa Yikoo, makam Raja Muale, Badili Koholimombono, Benteng Wasuemba, dan cagar budaya yang sampai saat ini sudah ada 19 situs cagar budaya yang dilestarikan.

Dalam rangka peningkatan promosi wisata budaya Pemerintah Kabupaten Buton telah mengagendakan pelaksanaan pesta adat dibeberapa wilayah yang sarat akan nilai budaya dan rutin dilaksanakan sepanjang tahun, dan kegiatan ini akan menjadi salah satu kegiatan rutin untuk dilaksanakan dalam melestarikan nilai-nilai budaya Buton yang sarat akan nilai-nilai religius dan kearifan lokal, yang dapat mempersatukan seluruh masyarakat Kabupaten Buton.

Adapun cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Buton yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Buton meliputi:

1) Benteng Liwu Kondowa di Kecamatan Pasarwajo;
2) Benteng Holimombo di Kecamatan Pasarwajo;
3) Benteng Kambula Bulana di Kecamatan Pasarwajo;
4) Benteng Kantolobea di Kecamatan Pasarwajo;
5) Benteng Wakole di Kecamatan Pasarwajo;
6) Benteng Takimpo Lipuogena di Kecamatan Pasarwajo;
7) Benteng Wasuemba di Kecamatan Wabula;
8) Benteng Koncu Wabula di Kecamatan Wabula;
9) Benteng Wacu Kotoru di Kecamatan Wabula;
10) Benteng Liwu di Kecamatan Wabula;
11) Benteng Kumbewaha di Kecamatan Siotapina;
12) Benteng Keraton Lasalimu di Kecamatan Lasalimu Selatan;
13) Lokasi Kampung Lama Kombeli di Kecamatan Pasarwajo;
14) Badili Takimpo di Kecamatan Pasarwajo;
15) Makam Rajamulae (Sangia Igola) di Kecamatan Kapontori;
16) Badili Koholimombono di Kecamatan Wabula;
17) Badili Wasuemba di Kecamatan Wabula;
18) Badili Wabula di Kecamatan Wabula;
19) Liwuto Ampodo (Pulau Pendek) di Kecamatan Kapontori.

Secara rinci pemetaan pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.7. Pemetaan Potensi Obyek Daya Tarik Wisata Kabupaten Buton Dalam Desa/Kampung Wisata

No.	Destinasi Pariwisata Daerah (DPA)	KSPD/ KPPD	Desa Wisata		Ket. Desa/ Kampung Wisata	No.	ODTW/ Atraksi Wisata	Jenis ODTW	Ket.
			No.	Desa/ Kelurahan					
1.	DPD Teluk Pasarwajo dan Sekitarnya	KSPD Pasarwajo dan Sekitarnya	1.	Wining	Desa Wisata	1.	Wisata Tambang Aspal	Minat Khusus	Wisata Edukasi Industri/ Geologi
						2.	Permandian Air Panas Wining/Warede Rede	Alam	Sumber Mata Air Panas
						3.	Puncak Wakahada	Alam	Trekking
						4.	Air Terjun Wabalamba	Alam	Air Terjun
						5.	Air Terjun Winning	Alam	Air Terjun
						6.	Benteng Labale	Sejarah	Situs
			2.	Saragi	Kampung Wisata	1.	Pantai Swiss	Bahari	Pantai
						2.	Benteng Lapandewa/ Kawaewae	Sejarah	Situs
			3.	Wangu Angu	Desa Wisata	1.	Air Terjun La Pipi	Alam	Air Terjun
						2.	Air Terjun wala Cinggi	Alam	Air Terjun

No.	Destinasi Pariwisata Daerah (DPA)	KSPD/ KPPD	Desa Wisata		Ket. Desa/ Kampung Wisata	No.	ODTW/ Atraksi Wisata	Jenis ODTW	Ket.
			No.	Desa/ Kelurahan					
						3.	Air Terjun Singinaula	Alam	Air Terjun
						4.	Air Panas Wakabuto	Alam	Sumber Mata Air Panas
						5.	Pesta Kampung Tumbuku	Budaya	Pesta Adat
						6.	Pesta Kampung Warabolu	Budaya	Pesta Adat
						7.	Makam Ina Wa Komba	Sejarah	Struktur
			4.	Banabungi	Desa Wisata	1.	Kumele Lakua	Bahari	Kali
						2.	Dive Center Pasarwajo	Bahari	Pelayanan Diving
						3.	Kompleks Perumahan Sarana Karya	Sejarah	Kawasan
						4.	Pelabuhan Aspal	Sejarah	Struktur
						5.	Meriam Peninggalan Belanda	Sejarah	Benda
			5.	Takimpo	Kampung Wisata	1.	Pikoelaliwu/Pesta Adat Takimpo	Budaya	Pesta Adat
						2.	Permandian Ngapantoa/Permandian Pocuno Cui	Bahari	Permandian
						3.	Benteng Takimpo Lipuogena	Sejarah	Situs
						4.	Benteng Wagumangga	Sejarah	Situs
						5.	Benteng Koncu Takimpo	Sejarah	Situs
						6.	Mesjid Benteng Takimpo Lipuogena	Sejarah	Bangunan
						7.	Batu Ponu	Sejarah	Benda
						8.	Batu Pelantikan Parabela	Sejarah	Benda
						9.	Badili Takimpo	Sejarah	Benda
						10.	Bendera Suku Takimpo	Sejarah	Benda
						11.	Peluru Badili Takimpo	Sejarah	Benda
			6.	Pasarwajo	Kampung Wisata	1.	Goa Wandingi	Alam	Goa
						2.	Pantai Wajo	Bahari	Pantai
						3.	Pesta Adat Pikoelaliwu	Budaya	Pesta Adat
						4.	Letter Buton	Minat Khusus	Kuliner
			7.	Mantowu	Desa Wisata	1.	Air Terjun Wabalamba	Alam	Air Terjun
						2.	Kali Watonto	Alam	Kali
			8.	Kancina'a	Desa Wisata	1.	Air Terjun Ka Hau-Hauna	Alam	Air Terjun
						2.	Pantai Kancinaa	Bahari	Pantai
						3.	Benteng Waiyaro	Sejarah	Situs
						4.	Naskah Kuno	Sejarah	Benda
						5.	Pesta Kampung Kancinaa	Budaya	Pesta Adat
			9.	Kaongke Ongkea	Desa Wisata	1.	Air Terjun Bumbula/Air Terjun Kaongke-Ongkea	Alam	Air Terjun
						2.	Wisata Agro Kebun Kopi	Minat Khusus	Agro
						3.	Puncak Teletubies	Alam	Panorama / Spot Foto
						4.	Pesta Adat Kaongke Ongkea	Budaya	Pesta Adat
		KPPD Wolowa dan Sekitarnya	10.	Wolowa Baru	Desa Wisata	1.	Pasir Hitam	Bahari	Pantai
						2.	Air Terjun Kalata	Alam	Air Terjun
						3.	Benteng Kantolobea	Sejarah	Situs

No.	Destinasi Pariwisata Daerah (DPA)	KSPD/ KPPD	Desa Wisata		Ket. Desa/ Kampung Wisata	No.	ODTW/ Atraksi Wisata	Jenis ODTW	Ket.
			No.	Desa/ Kelurahan					
						4.	Baruga Benteng Kantolobea	Sejarah	Bangunan
						5.	Mesjid Benteng Kantolobea	Sejarah	Bangunan
						6.	Gendang Mesjid Tua Benteng Kantolobea	Sejarah	Benda
						7.	Tempat Siri Kolaki	Sejarah	Benda
						8.	Makam La Ode Monako (Kolaki)	Sejarah	Struktur
						9.	Makam Saidi Gunu	Sejarah	Struktur
						10.	Benteng Wakolouma	Sejarah	Situs
						11.	Badili Wolowa	Sejarah	Benda
						12.	Benteng Wangkaole Ole	Sejarah	Situs
			11.	Suka Maju	Desa Wisata		Daya Tarik Belum di Identifikasi		
			12.	Sumber Sari	Desa Wisata		Daya Tarik Belum di Identifikasi		
		KPPD Siotapina dan Sekitarnya	13.	Matanauwe	Desa Wisata	1.	Permandiaan Baaluwu	Alam	Permandian
			14.	Kumbewaha	Desa Wisata	1.	Jangkar Kapal Voc	Sejarah	Benda
						2.	Pesta Panen/Adat Kumbewaha	Budaya	Pesta Adat
						3.	Tuturangi Gunung Siotapina	Budaya	Tradisi Adat
			15.	Gunung Jaya	Desa Wisata	1.	Daya Tarik Belum di Identifikasi		
		KSPD Wabula dan Sekitarnya	16.	Wasuemba	Desa Wisata	1.	Pantai Lahonduru	Bahari	Pantai
						2.	Lakongkomali/Tjg. Pamali	Bahari	Spot Diving
						3.	Aquarium Alam E'E Tombuku (Ikan Purba)	Alam	Edukasi
						4.	Atraksi Tombak Ikan (Pindoko)	Budaya	Budaya
						5.	Wasuemba Happy and Nice Festival Budaya	Budaya	Event Daerah
						6.	Perahu Kuno / Lakambaebunga	Sejarah	Sejarah
						7.	Benteng Wasuemba	Sejarah	Situs
						8.	Benteng Lakong komali	Sejarah	Sejarah
						9.	Baruga Benteng Wasuemba	Sejarah	Bangunan
						10.	La Kambae Bunga	Sejarah	Struktur
						11.	Badili Wasuemba/ Senjata Tradisional	Sejarah	Benda
			17.	Wabula	Desa Wisata	1.	Permandian Kali Topa Wabula	Bahari	Bahari dan Alam
						2.	Pesta Adat Pidoano Kuri	Budaya	Event Daerah
						3.	Sentra Oleh-Oleh	Minat Khusus	Ukraf dan UMKM
						4.	Benteng Liwu Wabula	Sejarah	Struktur
						5.	Badili Wabula/Senjata Tradisional	Sejarah	Benda
			18.	Wasampela	Desa Wisata	1.	Pantai Wasampela	Bahari	Pantai
						2.	Permandian Watobura	Bahari	Permandian
2.	DPD Kapontori dan Sekitarnya	KSPD Kapontori dan Sekitarnya	19.	Wakangka	Kampung Wisata	1.	Puncak Wakangka	Minat Khusus	Kuliner
						2.	Gua Liang Kamoi	Minat Khusus	Alam
						3.	Puncak Lia Ngkamoi	Minat Khusus	Alam
						4.	Lembah Wakangka	Alam	Kuliner

No.	Destinasi Pariwisata Daerah (DPA)	KSPD/ KPPD	Desa Wisata		Ket. Desa/ Kampung Wisata	No.	ODTW/ Atraksi Wisata	Jenis ODTW	Ket.
			No.	Desa/ Kelurahan					
			20.	Lambusango Timur	Desa Wisata	1.	Puncak Padang Kuku	Minat Khusus	(Trekkning, Kemah, dll)
						2.	Suaka Margasatwa/ Hutan Lambusango	Minat Khusus	Alam
			21.	Boneatiro Barat	Desa Wisata	1.	Pulau Pendek /Liwuto Ampodo	Bahari	Pulau Wisata / Pantai / Snorkeling
						2.	Atraksi Lumba-Lumba di Teluk Ora	Bahari	Ekowisata Bahari / Atraksi Lumba-Lumba
						3.	Puncak Sajana Bonena Tobungku	Minat Khusus	Alam
						4.	Pantai Bonena Tobungku	Bahari	Pantai
			22.	Boneatiro	Desa Wisata	1.	Pulau Pendek	Bahari	Pulau Wisata / Pantai / Snorkeling
						2.	Makan Raja Mulae	Sejarah	Struktur
						3.	Danau Langkadea	Alam	Danau
						4.	Festival Pulau Pendek	Budaya	Kuliner
						5.	Oleh Khas Boneatiro Kaholeo	Minat Khusus	Alam
			23.	Watumotobe	Kampung Wisata	1.	Permandian Mata Ompana	Alam	Permandian
						2.	Air Terjun Bumbula/ Masuk Wakangka	Alam	Air Terjun
						3.	Wisata Hutan Mangrove	Bahari	Ekowisata Mangrove / Edukasi Konservasi
						4.	Uwe Wakancusu	Bahari	Mata Air
						5.	Pesta Adat Tahunan	Budaya	Event Daerah
			24.	Barangka	Desa Wisata	1.	Padang Savana	Minat Khusus	Alam
						2.	Wisata Karamba	Minat Khusus	Edukasi Budidaya Ikan Laut / Wisata Kuliner Karamba
						3.	Pulau Panjang/Liwuto Arate	Bahari	Pulau Wisata / Pantai / Snorkeling
						4.	Halal Bil Halal/Kande-Kandea	Budaya	Tradisi Adat
			25.	Tuangila	Desa Wisata	1.	Air Terjun Kandawu Ndawuna	Alam	Air Terjun
						2.	Embung Pertanian	Minat Khusus	Agro
						3.	Agro Wisata	Minat Khusus	Agro
			26.	Bukit Asri/Desa Wisata Kampung Buah	Desa Wisata	1.	Agro Wisata/ Kampung Buah	Minat Khusus	Agro
						2.	- Kebun Durian		
						3.	- Kebung Manggis		
						4.	- Kebun Salak		
						5.	- Kebun Kelengkeng		
						6.	- Kebun Jeruk		
						7.	- Kebun Sawo		
						8.	- Kebun Alpukat		
						9.	Hari Raya Gulungan	Minat Khusus	Agro
			27.	Mambulugo	Desa Wisata	1.	Agro Wisata	Minat Khusus	Agro
						2.	Hari Raya Galungan	Budaya	Pesta Adat
			28.	Kamelanta	Desa Wisata				

No.	Destinasi Pariwisata Daerah (DPA)	KSPD/ KPPD	Desa Wisata		Ket. Desa/ Kampung Wisata	No.	ODTW/ Atraksi Wisata	Jenis ODTW	Ket.
			No.	Desa/ Kelurahan					
		KPPD Lasalimu dan Sekitanya	29.	Lawele	Desa Wisata	1.	Perkampungan Bajo	Minat Khusus	Wisata Edukasi
						2.	Aspal Lawele	Minat Khusus	Wisata Edukasi
						3.	Pesta Adat Lawele	Budaya	Event Daerah
			30.	Desa Lasembangi	Desa Wisata	1.	Wisata Agro (Perkebunan Jeruk)	Minat Khusus	Agro
						2.	Air Terjun Curung Biru	Alam	Air Terjun
						3.	Pesta Syukuran Akhir Tahun/Pesta Panen Lasembangi	Budaya	Pesta Adat
						4.	Benteng Tapitapi	Sejarah	Struktur
			31.	Benteng	Desa Wisata	1.	Desa Bajo	Budaya	Budaya Suku Bajo
						2.	Hutan Mangrove	Bahari	Ekowisata Mangrove / Edukasi Konservasi
						3.	Atraksi Adat Tuturangi	Budaya	Tradisi Adat
						4.	Makam Sangia Yii Kopea	Sejarah	Struktur
			32.	Kamaru	Kampung Wisata	1.	Pantai Komearate	Bahari	Pantai
						2.	Pesta Adat Kamaru	Budaya	Pesta Adat
						3.	Benteng Tandai Bali	Sejarah	Situs
						4.	Benteng Masai	Sejarah	Situs
						5.	Benteng Kantoba	Sejarah	Situs
						6.	Benteng Girinsi	Sejarah	Situs
						7.	Baana Meja	Sejarah	Benda
			33.	Wagari	Desa Wisata	1.	Hutan Mangrove/Pantai Pasir Putih Wagari	Alam	Ekowisata Mangrove / Edukasi Konservasi
						2.	Puncak Wagari	Minat Khusus	Alam
			34.	Sribatara	Desa Wisata	1.	Hutan Mangrove	Alam	Ekowisata Mangrove / Edukasi Konservasi
						2.	Kebun Jeruk	Minat Khusus	Agro
		KPPD Lasalimu Selatan dan Sekitanya	35.	Mopaano	Desa Wisata	1.	Benteng Lasalimu	Alam	Struktur
						2.	Permandian Topa	Bahari	Pantai
						3.	Batu Terbelah	Alam	Alam
						4.	Danau Udang Merah	Alam	Alam
						5.	Pantai Kooguna	Bahari	Pantai
						6.	Spot Diving Pantai Kooguna	Bahari	Spot Diving

Sumber : Dinas Pariwata Kabupaten Buton, 2025

Berdasarkan potensi obyek daya tarik wisata diatas menunjukan bahwa Kabupaten Buton sangat kaya dengan potensi pariwisata dan wisata budaya. Namun potensi yang sangat banyak belum memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomia daerah. Hal ini tergambar dari dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, yang diukur dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum hanya mampu berkontribusi sebesar 0,12% pada tahun 2024, angka ini menunjukkan trend fluktuatif dan cenderung menurun. Demikian pula, dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Selama periode 2020 hingga 2024, komponen pajak makan dan minum mencatat kenaikan tajam dari Rp.15,4 juta pada tahun 2020 menjadi Rp.427,7 juta pada tahun 2024. Sebaliknya, komponen pajak rekreasi dan olahraga mengalami penurunan sejak tahun 2021, dan pajak hotel juga menunjukkan tren penurunan dari Rp.13 juta

pada tahun 2020, turun menjadi Rp.1,9 juta pada 2024. Berikut gambaran kinerja sektor pariwisata tahun 2020-2024 :

Tabel. 2.8. Kinerja Sektor Pariwisata Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rp	5,00	5,11	5,86	6,03	6,51
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12
3	Jumlah PAD sektor pariwisata	Rp	42.948.450	90.621.530	153.311.646	335.799.518	444.950.527
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,16	0,24	0,42	0,80	0,95
5	Tingkat hunian akomodasi	%	3.18	1.98	2.78	2.50	0.49
6	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Jam	24	5	10	0	0
7	Jumlah orang wisatawan nusantara	Orang	3.021	4.729	10.005	12.113	15.717
8	Jumlah orang wisatawan mancanegara	Orang	45	4	43	237	153
9	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	0,00	56.54	111.57	21.07	29.75
10	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0,00	-91,11%	975,00	451,16	-35,44
11	Jumlah desa wisata	Desa	25	25	25	31	35
12	Jumlah desa wisata berkembang	Desa	-	-	-	1	1
13	Persentase desa wisata berkembang	%	-	-	-	3,23	2,86
14	Jumlah SDM pariwisata	Orang	647	647	647	800	800
15	Jumlah SDM pariwisata yang mendapat pelatihan	Orang	167	482	723	80	80
16	Persentase SDM penunjang layanan kepariwisataan	%	25,81	74,50	111,75	10	10
18	Jumlah destinasi wisata unggulan daerah	Des-tinasi	10	10	10	25	25
19	Persentase destinasi wisata ungulan daerah yang tertata	%	60	79	100	48,39	48,39

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Buton, 2020-2024

Berdasarkan tabel capaian beberapa indikator di atas, memberikan gambaran belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Buton. Pada indikator jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara menunjukkan trend fluktuatif, dan cenderung menurun. Dimana jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2020 sebanyak 49.347 orang, menurun hingga 15.717 orang di tahun 2024. Angka capaian tahun 2024 mengalami koreksi, yang semula tercatat 358.136 orang menjadi 15.717 orang karena adanya perbedaan metode perhitungan. Data 358.136 orang bersumber dari BPS dengan metode MPD (mobile positioning data), sedangkan angka 15.717 orang bersumber dari Dinas Pariwisata

Kabupaten Buton, dengan metode perhitungan sesuai data yang diambil dari desa wisata. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Buton, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dari 45 orang tahun 2020, turun menjadi 4 orang pada tahun 2021 karena pandemi covid-19, kemudian meningkat menjadi 620 orang pada tahun 2022, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 sebanyak 237 orang, hingga 153 orang pada tahun 2024.

Pada capaian Desa Wisata, terlihat capaian yang positif. Dimana dalam menunjang sektor pariwisata daerah, selama kurun waktu 2020-2024 telah banyak terbentuk desa wisata yang menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 20 desa wisata pada tahun 2020 meningkat menjadi 35 desa wisata di tahun 2024, yaitu : Desa Wasuemba, Wasampela, Wabula di Kecamatan Wabula; Desa Banabungi, Winning, Waangu-angu, Saragi, Wakaokili, Kaongkeongkea, Mantowu di Kecamatan Pasarwajo;, Desa Lawele, Lasembani, Benteng di Kecamatan Lasalimu; Desa Lambusango Timur, Boneatiro Barat, Boneatiro, Wakangka, Mambulugo, Watumotobe, Barangka, Tuangila, Bukit Asri di Kecamatan Kapontori; Desa Suka Maju, Wolowa Baru, Gunung Jaya di Kecamatan Wolowa; Desa Kumbewaha, Sumber Sari di Kecamatan Siotapina; Desa Mopaano Kecamatan Lasalimu Selatan; Desa Kamaru, Wagari, Sribatara di Kecamatan Lasalimu. Namun demikian, sebagian besar desa wisata yang terbentuk masih belum aktif secara fungsional, disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah aksesibilitas dan infsratruktur yang belum memadai pada desa wisata.

Pada pengembangan pariwisata, SDM pariwisata memegang peranan penting. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan. SDM yang kompeten, terlatih, dan memahami prinsip pelayanan wisata menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas
destinasi, memperkuat kelembagaan lokal, dan menciptakan pengalaman wisata yang memuaskan bagi pengunjung. Berdasarkan data pada tabel kinerja sektor pariwisata tahun 2020-2024 menunjukan, jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Buton mengalami peningkatan, dari 15 kelompok di tahun 2020 menjadi 35 kelompok di tahun 2024.

Selain potensi daya tarik wisata alam dan budaya, pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Buton juga diperkuat oleh keberadaan ekonomi kreatif yang berakar pada kearifan lokal masyarakat. Produk-produk unggulan seperti tenun khas Buton, kuliner tradisional, kriya, seni pertunjukan, hingga festival budaya menjadi bagian integral dari pengalaman wisata yang otentik. Kehadiran subsektor ekonomi kreatif ini tidak hanya menambah keragaman atraksi serta memperpanjang lama tinggal (length of stay) wisatawan, tetapi juga berfungsi sebagai sumber pendapatan alternatif yang mampu meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Kehadiran ekonomi kreatif tidak hanya berfungsi sebagai elemen pendukung atraksi wisata, tetapi juga memperkaya keragaman pengalaman wisatawan dan memperpanjang lama tinggal *(length of stay)* di destinasi. Lebih dari itu, ekonomi kreatif berperan sebagai sumber pendapatan alternatif yang mampu memperkuat struktur ekonomi masyarakat desa sekaligus meningkatkan kemandirian komunitas lokal. Oleh karena itu, dalam kerangka pemetaan Desa Wisata, selain menampilkan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) utama, perlu pula diidentifikasi potensi ekonomi kreatif yang dapat diintegrasikan secara sinergis dengan kegiatan pariwisata. Integrasi ini akan memperkuat daya saing destinasi, memperluas peluang usaha, serta memastikan manfaat pembangunan pariwisata lebih merata bagi masyarakat.

Tabel 2.9. Pemetaan Potensi Ekonomi Kreatif Pada Kawasan-Kawasan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Buton

DPD/KSPD/KPPD	Kategori Ekraf	Potensi Ekraf	Peluang Pengembangan
DPD Pasarwajo/KSPD Pasarwajo dan Sekitarnya	Kuliner	Gule, roti, kue, kopi, pengolahan hasil laut, tahu dan tempe	Wisata kuliner dan gastronomy trail, modernisasi umkm, pusat kuliner daerah / *food hub*, produk experience (*experiential tourism*) dan akses pasar dan logistik
	Kriya	Mebel, kerajinan kayu, anyaman tradisional, dan Tenun Tradisonal	Upgrading produk dan desain, branding dan label lokal, sentra produksi dan inkubasi dan digitalisasi dan penjualan
	Fashion	Produksi pakaian jadi danjahitan komersial, tenun tradisional Buton Aksesori dan *merchandise* berbasis motif lokal	pelatihan desain dan branding fesyen lokal untuk meningkatkan daya saing dan membangun identitas “buton style”
KPPD Wolowa dan Sekitarnya	Kriya	Anyaman Nentu (unik khas lokal/kerajinan anyaman berbasis serat lokal)	diversifikasi produk danupgrading desain , peningkatan kualitas danfinishing, penguatan rantai nilai danskala produksi, branding danstorytelling lokal, akses pasar dan saluran penjualan dan pengalaman wisata *(creative/ experiential tourism)*
	Kuliner (Gastronomi Tradisional)	Nasi Bambu Wolowa	positioning danbranding, experience development, penguatan umkm, diversifikasi produk, promosi dankanal pemasaran dan integrasi pariwisata
KPPD Siotapina dan Sekitarnya	Kuliner	Pengolahan hasil laut, minyak kelapa (Kopra/Virgin coconut oil, kue tradisional, kerupuk ikan	modernisasi kapasitas produksi, penguatan klaster danumkm, branding produk khas, diversifikasi danpengembangan produk, perluasan kanal pemasaran digital dan lntegrasi pariwisata
	Kriya	Anyaman (rotan, pandan, ketak/nentu)	inovasi desain kriya, pemasaran digital, serta pengembangan produk sebagai oleh-oleh khas daerah
KSPD Wabula dan Sekitarnya	Kuliner	Minyak kelapa, hasil laut olahan	ekspansi pasar, inovasi produk, penguatan umkm dan integrasi dengan wisata bahari
	Kriya	Tenun tradisional, anyaman pandan, anyaman bambu	Penguatan tenun sebagai identitas budaya lokal, serta pengembangan anyaman untuk souvenir wisata danpasar ekspor
DPD Kapontori/KSPD Kapontori dan Sekitarnya	Kuliner	Pengasapan ikan, dan Olahan-Olah Hasil Laut	Peningkatan kualitas, diversifikasi produk olahan, dan pemasaran kuliner untuk mendukung wisata bahari
	Kriya	Anyaman (nyiru, nentu, rotan), keranjang, meubel	Diversifikasi produk kriya bernilai seni tinggi, pengembangan kriya kreatif, dan perluasan pasar regional
	Agroindustri	Kopra, jambu mete	Pengembangan agroindustri mete dan kopra sebagai produk olahan unggulan dan oleh-oleh khas
KPPD Lasalimu dan Sekitarnya	Kuliner	Tepung ubi, keripik pisang/ubi, olahan jambu mete, kopra	Peningkatan skala UMKM kuliner, branding oleh-oleh khas, serta ekspansi pasar lokal danregional
	Kriya	Anyaman bambu, anyaman nyiru, tikar	Penguatan pasar souvenir dandekorasi lokal melalui inovasi desain dan promosi digital
	Industri Kreatif	Meubel	Ekspansi pasar regional, pengembangan industri kreatif dan bahan bangunan lokal
KPPD Lasalimu Selatan dan Sekitarnya	Kuliner	Keripik jagung/ubi, olahan pisang, tahu dan tempe, roti dankue, kerupuk dan peyek	Pengembangan oleh-oleh kuliner khas, diversifikasi produk modern, dan integrasi dengan pasar wisata
	Kriya	Anyaman rotan dan bambu, meubel	Peningkatan nilai seni dan kreativitas kriya, serta pengembangan pasar souvenir dan ekspor

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Buton, 2024

Pemetaan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Buton menunjukkan bahwa setiap kecamatan memiliki keunggulan komparatif yang saling melengkapi. Kecamatan Pasarwajo, sebagai sentra kegiatan ekonomi kreatif kabupaten, berkembang sebagai

sentra kuliner dan fashion lokal serta berperan sebagai hub pemasaran produk ekonomi kreatif dari kecamatan lain. Kecamatan Wolowa dan Siotapina menonjol pada subsektor kriya berbasis anyaman, seperti nentu, rotan, dan pandan, sementara Kecamatan Wabula memiliki keunggulan pada tenun tradisional serta pengembangan wisata budaya yang terintegrasi dengan destinasi unggulan. Pemanfaatan potensi ini secara strategis mendukung penguatan branding pariwisata lokal dan diversifikasi produk unggulan berbasis kearifan budaya masyarakat.

Kecamatan Kapontori memiliki kombinasi keunggulan pada subsektor kriya berbasis rotan, kuliner ikan asap, serta agroindustri berbasis kopra dan jambu mete. Sementara itu, Kecamatan Lasalimu dan Lasalimu Selatan berkembang sebagai pusat kuliner olahan (ubi, pisang, jagung), kriya mebel, serta industri kreatif berbasis bahan bangunan yang mendukung kebutuhan lokal sekaligus memperluas akses pasar regional. Pemanfaatan potensi ini secara sinergis berkontribusi pada penguatan ekonomi kreatif, diversifikasi produk unggulan, dan peningkatan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal

Dari pemetaan tersebut, terlihat bahwa pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) di Kabupaten Buton tidak bersifat sektoral semata, melainkan berbasis kewilayahan dengan fokus pada klasterisasi sesuai potensi lokal. Strategi pengembangan ekraf ke depan diarahkan pada:

1. Integrasi ekraf dengan desa wisata dan destinasi unggulan, sehingga produk kuliner, kriya, dan fashion lokal dapat menjadi bagian langsung dari pengalaman wisata yang holistik dan autentik.
2. Modernisasi UMKM ekraf, melalui peningkatan kapasitas produksi, inovasi desain, standardisasi mutu, serta penguatan akses pasar digital, untuk meningkatkan daya saing produk di tingkat regional maupun global.
3. Branding ekraf Buton sebagai identitas budaya dan produk khas daerah, khususnya pada tenun tradisional, anyaman Nentu, dan kuliner lokal, guna memperkuat citra destinasi dan pengalaman wisata berbasis kearifan lokal.
4. Pengembangan klaster ekraf berbasis wilayah, di mana setiap kecamatan berperan sebagai simpul produksi dan pemasaran sesuai spesialisasi, mendukung efisiensi rantai nilai dan keterpaduan ekosistem pariwisata.

Dengan pendekatan tersebut, pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Buton dapat dilakukan secara terarah, berbasis pada kekuatan lokal, sekaligus mampu menjawab tantangan pasar pariwisata dan ekonomi kreatif baik di tingkat regional maupun global, sejalan dengan tren pariwisata masa kini yang menekankan pengalaman wisata autentik, keterlibatan komunitas lokal, dan keberlanjutan.

Secara umum dalam upaya pengembangan sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan daerah, diperlukan intervensi kebijakan program melalui pola kolaborasi kemitraan pengembangan pariwisata, dan menciptakan sinergitas pembangunan pariwisata secara berjenjang dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, desa/kelurahan. Sehingga sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD dan pembangunan ekonomi daerah.

❖ **Sektor Industri**

Potensi pengembangan industri di Kabupaten Buton didukung dengan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya lahan yang masih tersedia dan mendukung, serta infrastruktur yang baik khususnya yang berkaitan dengan industri pengolahan hasil tambang dan hasil perikanan. Potensi sumber daya alam disektor pertambangan dna perikanan harus mampu dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor industri khususnya industri pengolahan sehingga dapat didorong pengembangan kegiatan hulu hilir di Kabupaten Buton.

Secara umum kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Buton selama periode 5 tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan, meski ditahun 2024 sedikit mengalami perlambatan pada angka 2,06%, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan 0,44 point menjadi 2,50%.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton Tahun 2021-2041, Secara Spasial, Industri Pengolahan di Kabupaten Buton terletak di Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Pasarwajo dan Wabula, dengan potensi sektor industri yang dapat dikembangkan, yaitu industri pengolahan aspal, industri pertambangan, industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan hasil hutan. Hal ini sejalan dengan RPJPD Kabupaten Buton 2025-2045 mewujudkan Kabupaten Buton sebagai kawasan industri yang berdaya saing, maju, berbudaya dan berkelanjutan, dan selaras pula dengan konsep hilirisasi sektor perikanan dan pertanian yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Buton 2025-2029.

Selain data kontribusi sektor industri, potensi pada sektor ini didukung pula dengan sumber daya manusia, yang berdasarkan data BPS tahun 2023, tercatat jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama (industri pengolahan/manufaktur) sebesar 15% dan menjadi yang ketiga terbanyak menyerap tenaga kerja setelah sektor pertanian 43,6% dan sektor jasa sebesar 41,4%. Gambaran kontribusi PDRB sektor strategis Kabupaten Buton selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.10. Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	20,17	19,96	20,66	20,71	21,66
Pertambangan danPenggalian	38,76	38,74	38,74	39,35	34,55
Industri Pengolahan	2,48	2,52	2,51	2,13	2,50
Penyediaan Akomodasi danMakan Minum	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha , 2020-2024
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara*

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Analisis Daya Dukung Penyediaan Pangan

Pertumbuhan kegiatan ekonomi dan laju pembangunan diberbagai sektor dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, mempunyai dampak terhadap daya dukung penyediaan pangan. Dampak terhadap lingkungan dapat diindikasikan dengan penurunan kualitas daya dukung penyediaan pangan dari pemanfaatan sumber daya alam yang semakin meningkat dari akibat semakin meningkatnya aktivitas dari berbagai kegiatan manusia. Sedangkan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk berjalan mengikuti kapasitas penyediaan pangan yang memiliki keterbatasan.

Daya dukung penyediaan pangan dianalisis berdasarkan Pedoman Teknis Pemodelan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan (Arsad, F., 2022). Data yang digunakan dalam perhitungan ketersediaan pangan adalah Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data produksi bahan pangan tiap kabupaten. Pendekatan penghitungan ketersediaan jasa lingkungan penyedia pangan kabupaten adalah diasumsikan sama dengan total ketersediaan beras di wilayah tersebut.

Analisis daya dukung ketersediaan pangan Kabupaten Buton dilakukan dengan mengacu data BPS Tahun 2022 mengenai produksi beras sebesar 8.801.000 kg/tahun

(BPS, 2022). Perhitungan sebaran ketersediaan pangan setiap grid menggunakan Indeks Jasa Lingkungan Penyedia Pangan dengan parameter Peta Ekoregion berdasarkan SK 1271 Kementerian Lingkungan Hidup serta peta penutupan lahan tahun 2023. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa pada tahun 2025 di Kabupaten Buton masih terdapat 1 (satu) kecamatan yang surplus, yaitu: Kecamatan Kapontori. Sedangkan pada tahun 2029 semua kecamatan mengalami defisit.

Tabel 2.11. Daya Dukung Ketersediaan Pangan Tahun 2025

Kecamatan	Penduduk Tahun 2025 (Jiwa)	Kebutuhan Pangan 2025 (kg/tahun)	Ketersediaan Pangan (kg/tahun)	Belum Terlampaui (ha)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (ha)	Terlampaui (%)
Kapontori	7.717	1.228.682,04	1.367.041,60	138.359,56	89,06%	5.124,83	10,94
Lasalimu	15.175	1.052.402,81	952.765,76	-99.637,05	24,76%	6.682,89	21,25
Lasalimu Selatan	18.780	1.302.366,65	455.095,51	-847.271,14	6.365,71	8.747,41	57,88
Pasarwajo	54.793	3.799.915,51	847.051,92	-2.952.863,59	6.548,45	23.821,97	78,44
Siotapina	20.155	1.397.720,26	742.197,94	-655.522,32	8.906,51	15.979,12	64,21
Wabula	8.194	568.238,59	180.621,03	-387.617,56	3.497,80	3.218,65	47,92
Wolowa	8.200	568.658,41	246.762,05	-321.896,36	1.328,06	7.761,20	85,39
Total	143.014	9.917.984,26	4.791.535,79	-5.126.448,47	93.112,69	71.336,07	43,38

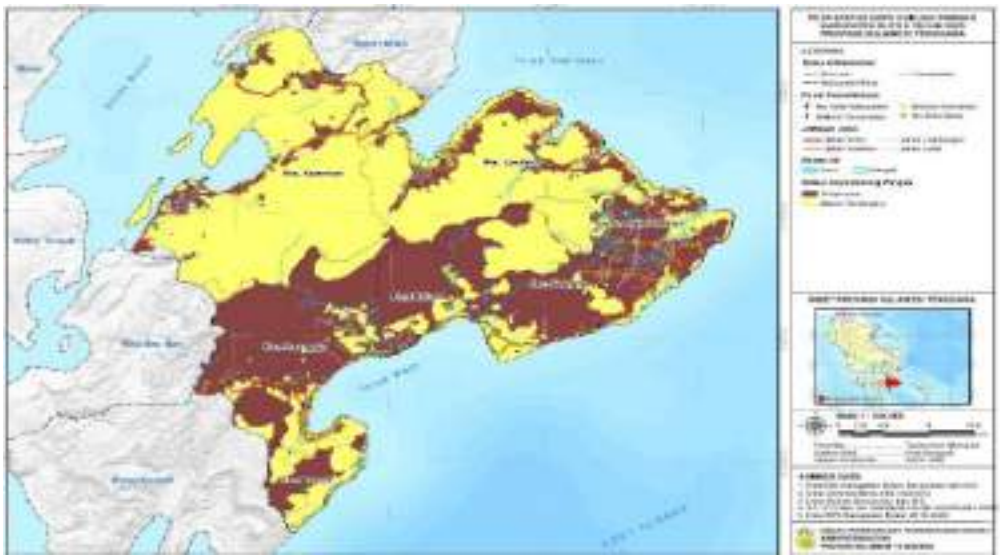
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029

Tabel 2.12. Daya Dukung Ketersediaan Pangan Tahun 2029

Kecamatan	Penduduk Tahun 2025 (Jiwa)	Kebutuhan Pangan 2025 (kg/tahun)	Ketersediaan Pangan (kg/tahun)	Belum Terlampaui (ha)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (ha)	Terlampaui (%)
Kapontori	20.014	1.387.961,20	1.367.041,60	-20.919,61	41.657,64	5.174,33	11,05
Lasalimu	17.788	1.233.588,68	952.765,76	-280.822,92	24.759,02	6.682,89	21,25
Lasalimu Selatan	21.427	1.485.957,34	455.095,51	-1.030.861,83	4.376,71	10.736,41	71,04
Pasarwajo	61.987	4.298.795,79	847.051,92	-3.451.743,87	6.487,56	23.882,86	78,64
Siotapina	24.970	1.731.667,34	742.197,94	-989.469,40	8.904,26	15.981,37	64,22
Wabula	10.006	693.930,91	180.621,03	-513.309,88	3.497,80	3.218,65	47,92
Wolowa	10.093	699.946,21	246.762,05	-453.184,16	1.319,06	7.770,20	85,49
Grand Total	166.285	11.531.847,47	4.791.535,79	-6.740.311,67	91.002,05	73.446,71	44,66

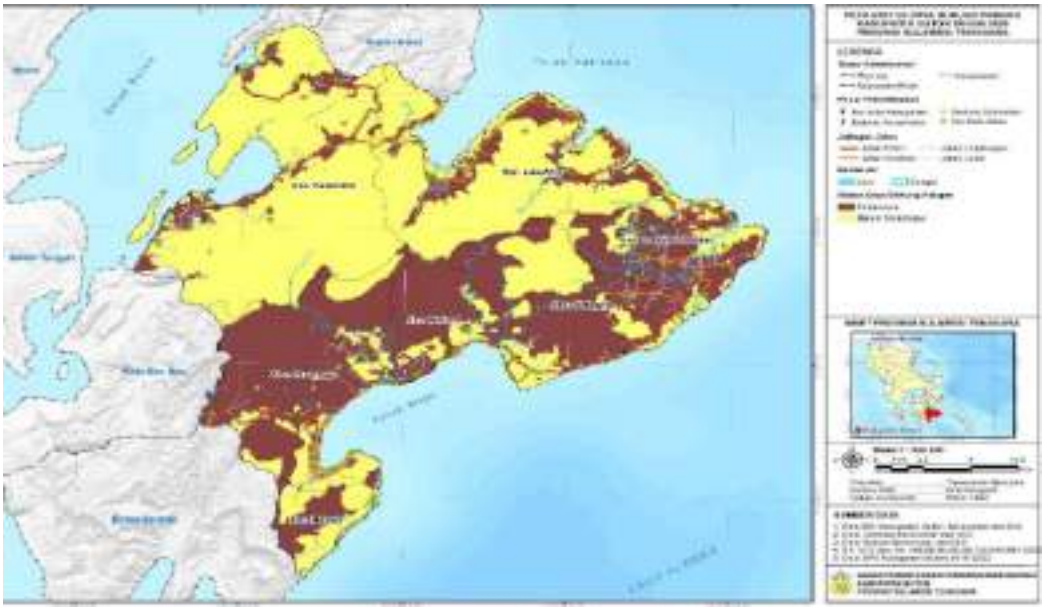
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029

Gambar 2.5. Peta Daya Dukung Pangan Tahun 2025



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029

Gambar 2.6. Peta Daya Dukung Pangan Tahun 2029



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029

B. Analisis Daya Dukung Penyediaan Air Bersih

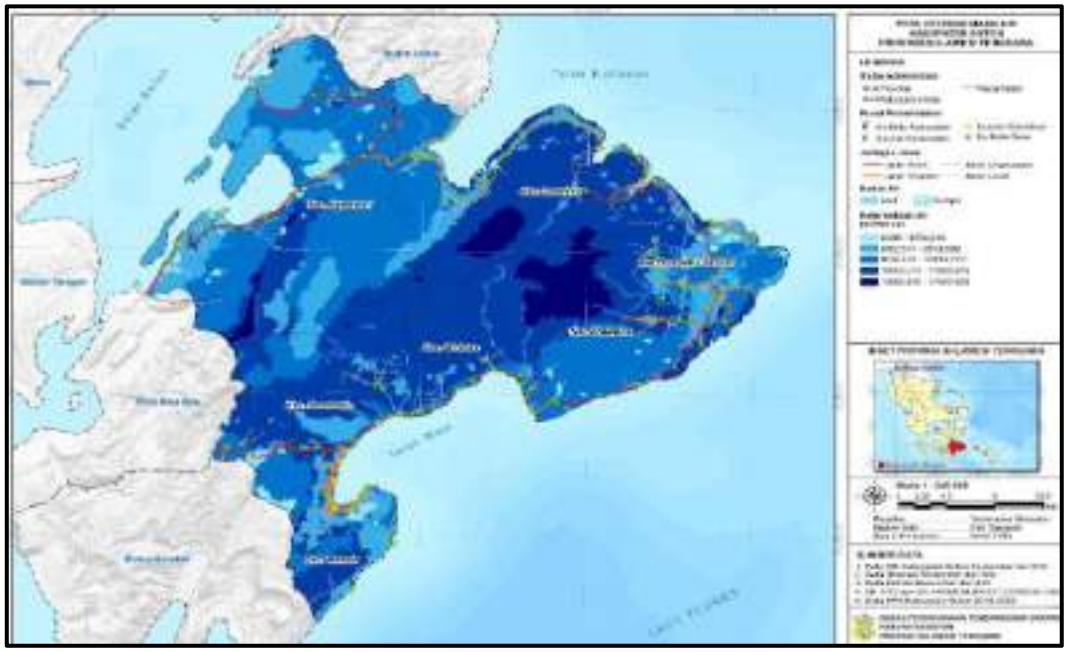
Perhitungan daya dukung air di suatu wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di wilayah tersebut. Dengan cara ini, dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah belum terlampaui atau sudah terlampaui. Jika belum terlampaui menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan sudah terlampaui menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekurangan air yang semakin besar pada masa datang, seperti perbaikan infrastruktur, penggunaan teknologi efisien air, pengelolaan tata air yang baik, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghematan air. Jika ketersediaan air dari sumber utama mengalami kekurangan, dapat dipertimbangkan untuk mencari sumber air alternatif seperti pengumpulan air hujan, atau pengolahan air limbah yang lebih baik untuk menghasilkan air yang dapat digunakan. Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan tata air yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian daerah aliran sungai sangat penting. Hal ini meliputi perlindungan dan rehabilitasi sumber daya air, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan air. Sektor pertanian dan industri menjadi penyumbang terbesar terhadap konsumsi air perlu diperkenalkan teknik irigasi yang efisien dan teknologi produksi yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi tekanan pada sumber daya air.

Analisis daya dukung ketersediaan air dan kebutuhan air dihitung menggunakan sumber daya air yang berasal dari air permukaan yang diperoleh dari data curah hujan. Secara kuantitatif perhitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) perhitungan ketersedian air, (2) perhitungan kebutuhan air, (3) perhitungan ambang batas penduduk, dan (4) penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Hasil perhitungan potensi ketersediaan air di Kabupaten Buton sebesar 822.814.045,28 m^3/tahun. Ketersediaan air bersih tinggi terdapat di kecamatan Kapontori, Lasalimu dan Pasarwajo.

Hasil analisis daya dukung ketersediaan air bersih di Kabupaten Buton menunjukkan bahwa nilai ambang batas ketersediaan air bersih tahun 2025 pada semua kecamatan berkisar 31.562.943,41-206.481.451,33 dan nilai ambang batas ketersediaan air bersih tahun 2029 berkisar 31.406.350,74206.283.012,97. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Buton memiliki kemampuan penyediaan air bersih yang belum terlampaui. Semua wilayah kecamatan berada pada daerah kemampuan penyediaan air bersih yang belum terlampaui.

Gambar 2.7. Peta Ketersediaan Air Bersih



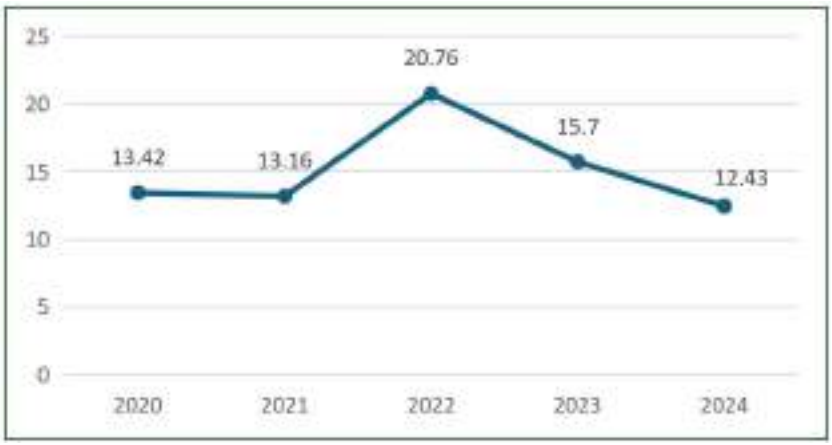
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan pangan di daerah merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan dan mengakses pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduknya dalam jangka waktu tertentu. Ketahanan pangan daerah penting karena berhubungan langsung dengan kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial ekonomi suatu komunitas atau wilayah. Pemerintah daerah dan lembaga terkait seringkali bekerja sama untuk memastikan ketahanan pangan melalui berbagai program dan kebijakan, seperti pengembangan pertanian lokal, peningkatan infrastruktur distribusi, dan pendidikan gizi.

Salah satu indikator yang mendekati dalam melihat ketahanan pangan daerah adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*). Adapun Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Buton secara umum mengalami peningkatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mencukupi ketersediaan pangan, akses pangan dan juga peningkatan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan yang bergizi dan layak.

Gambar 2.8. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Pada tahun 2024, angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan mencapai 12,43 persen, menurun dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang mencapai 20,76 persen pada 2022 dan 15,7 persen pada tahun 2023. Menurunnya angka prevalensi ketidakcukupan pangan Kabupaten Buton menandakan berhasilnya pemerintah dalam distribusi dan akses wilayah dari daerah produsen, produksi pangan daerah yang cukup beragam dan mencukupi kebutuhan penduduk.

Dalam kehidupan sehari-hari, air minum dan listrik bukan sekadar fasilitas penunjang, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar yang esensial bagi setiap rumah tangga. Ketersediaan dan akses terhadap dua sumber daya ini menentukan kualitas hidup, kesehatan, produktivitas, dan bahkan masa depan anggota keluarga. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan rumah tangga yang berkelanjutan, air minum yang layak dan listrik yang andal merupakan fondasi utama yang tidak bisa diabaikan.

Adapun persentase rumah tangga pengguna air minum mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2020 sebesar 87,00 persen dan meningkat menjadi 96,88 pada tahun 2023. Berbanding terbalik dengan persentase rumah tangga pengguna air minum, rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Buton mengalami penurunan. Meskipun begitu, secara jumlah terjadi kenaikan jumlah pengguna listrik. Penurunan ini dikarenakan, pertumbuhan jumlah rumah tangga lebih tinggi dibandingkan kenaikan jumlah pengguna listrik.

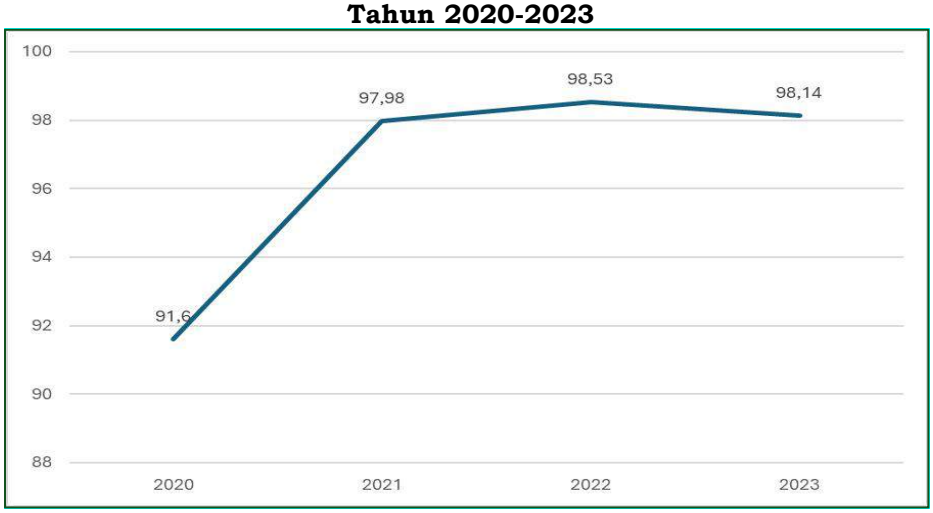
Gambar 2.9. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum dan Listrik Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (persen)



Sumber: Dinas PUPR, Dinas PERKIM Kabupaten Buton, 2020-2024

Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Buton menunjukkan tren peningkatan jumlah Rumah Tangga (RT) pengguna listrik, dari 19.189 RT pada tahun 2020 menjadi 21.254 RT pada tahun 2024. Namun demikian, persentase rumah tangga pengguna listrik mengalami fluktuasi, dengan penurunan dari 87,85% pada tahun 2020 menjadi 83,99% di tahun 2022, sebelum kembali meningkat ke angka 86,34% pada tahun 2024. Sementara itu, persentase rumah tangga pengguna air minum menunjukkan kestabilan relatif dengan kecenderungan peningkatan, dari 83,60% di tahun 2020 menjadi 86,07% pada tahun 2024. Data ini mencerminkan adanya kemajuan dalam perluasan akses infrastruktur dasar, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga proporsi cakupan seiring pertumbuhan jumlah rumah tangga

Gambar 2.10. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Buton Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Provinsi Sultra, Tahun 2025

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten/Kota menunjukkan tren yang semakin membaik pada periode 2020–2023. Pada tahun 2020, capaian akses tercatat sebesar 91,6 persen, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 97,98 persen pada 2021. Peningkatan tersebut berlanjut hingga mencapai 98,53 persen pada tahun 2022 sebagai capaian tertinggi dalam periode ini. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 98,14 persen, meskipun angka tersebut tetap menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Hal ini menggambarkan kemajuan yang sangat positif dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

2.1.1.5. Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pemeliharaan lingkungan disebabkan karena pada umumnya menganggap bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas dan secara cuma-cuma.

Kewenangan pemerintah daerah urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat

hukum adat (MHA), penghargaan ingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kabupaten Buton tahun 2024 sebesar 79,90 poin, dengan capaian indeks kualitas air (62,30 poin), indeks kualitas udara (94,99 poin), dan indeks kualitas tutupan lahan (81,89 poin),

Untuk indikator kinerja persampahan, ditunjukkan dengan indikator persentase penanganan sampah menunjukkan peningkatan yang pada tahun 2018 sebesar 29,91 persen menjadi 42,83 persen pada tahun 2022. Dalam pengendalian status mutu air, pemerintah Kabupaten Buton berupaya mengendalikan kualitas air melalui pemantauan terhadap seluruh kawasan sumber mata air. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan kinerja yang sudah tercapai sejak tahun 2016 sampai 2022 tercapai sebesar 100 persen.

Tabel 2.13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	NA	91,89	91,89	94,73	94,99
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	NA	35,94	39,29	55,00	62,50
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	NA	80,92	80,92	82,13	81,89
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	NA	68,45	70,04	77,03	79,90

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Buton, 2025-2029

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Buton menunjukkan capaian yang cukup positif dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Salah satu indikator utama yaitu rumah tangga dengan akses sanitasi aman mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2020, persentasenya tercatat sebesar 94,5 persen, kemudian terus meningkat hingga mencapai 99,39 persen pada tahun 2023. Meski mengalami penurun ditahun 2024 menjadi 81,22, namun secara umum hal ini mencerminkan peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan aman sehingga mampu meningkatkan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, pengelolaan sampah juga menunjukkan progress positif meskipun belum optimal. Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah meningkat dari 31,13 persen pada tahun 2020 menjadi 44,84 persen pada tahun 2024. Peningkatan serupa juga terjadi pada persentase penanganan sampah, yang mencapai 48,33 persen di tahun 2024, naik dari 35,6 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.14. Capaian Indikator Lingkungan Hidup Berkualitas Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	80,39	83,40	83,64	84,73	85,50
2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%)	94,5	95,6	95,86	99,39	81,22
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	31,13	35,6	42,83	43,01	44,84
4	Persentase Penanganan Sampah	35,6	42,83	44,66	46,50	48,33

Sumber: Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton, 2020-2024

2.1.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Buton merupakan daerah yang dikategorikan wilayah rawan bencana yang diakibatkan perubahan iklim sebagai salah satu dampak dari tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terjadi baik secara alami ataupun atas campur tangan aktivitas manusia. Dampak lain dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan. Upaya Pemerintah Kabupaten Buton dalam rangka mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu adanya sasaran visi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui penurunan intensitas emisi GRK di dalam RPJPD Kabupaten Buton yang termuat di dalam indikator utama Pembangunan (45 indikator), yaitu penurunan emisi GRK. Adapun data capaian penurunan emisi GRK belum tersedia, namun demikian Pemerintah Kabupaten Buton tetap berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dan telah memuat target penurunan intensitas emisi GRK dan penurunan emisi GRK dalam indikator kinerja daerah (IKD).

Selain itu, wilayah Kabupaten Buton yang sebagian besar berada diwilayah pesisir, menjadikan Kabupaten Buton sebagai daerah rawan bencana alam seperti tanah longsor, gelombang pasang, dan bajir. Berdasarkan hasil analisis peta menunjukkan wilayah berpotensi longsor di Kabupaten Buton dibagi kedalam empat kelas, yakni (1) wilayah bahaya longsor I atau sangat tinggi, (2) wilayah bahaya longsor II atau tinggi, (3) wialayah bahaya longsor III atau sedang, dan (4) wilayah dengan potensi longsor rendah.

Wilayah potensi longsor kategori 2 di Kabupaten Buton relatif kecil yaitu di bagian tengah pulau, sedangkan wilayah zona 3 (sedang) merupakan wilayah paling sedikit, sepanjang patahan yang membatasi antara landform perbukitan di bagian tengah dengan dataran di sepanjang pesisir. Berdasarkan peta tersebut maka umumnya wilayah Kabupaten Buton berada dalam zona relative aman dari segi tanah longsor, meskipun daerah-daerah dengan kemiringan di atas 45% tetap memiliki resiko longsor. Kemiringan yang besar merupakan daerah yang potensial terhadap terjadinya gerakan tanah/batuan. Wilayah ini dijumpai di Desa Ambuau Indah Kecamatan Lasalimu Selatan, Desa Wakaokili Kecamatan Pasarwajo, dan Desa Lambusango Kecamatan Kapontori.

Sementara itu, Kawasan berpotensi banjir di Kabupaten Buton terdapat di Desa Ambuau Indah Kecamatan Lasalimu Selatan, Kinapani Makmur dan Desa Mataompana di Kecamatan Kapontori. Sedangkan kawasan rawan gelombang pasang terutama disepanjang pesisir terdapat di Desa Banabungi, Kelurahan Wasaga, Kancinaa, Kelurahan Kahulungaya Kecamatan Pasarwajo; Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan, Desa Sampuabalo Kecamatan Siotapina, Desa Wasuemba, Wabula, Wasampela dan Holimombo di Kecamatan Wabula. Selain itu terdapat pula dataran yang berpotensi banjir seperti daerah dataran Kapontori, dan dataran Kecamatan Lasalimu.

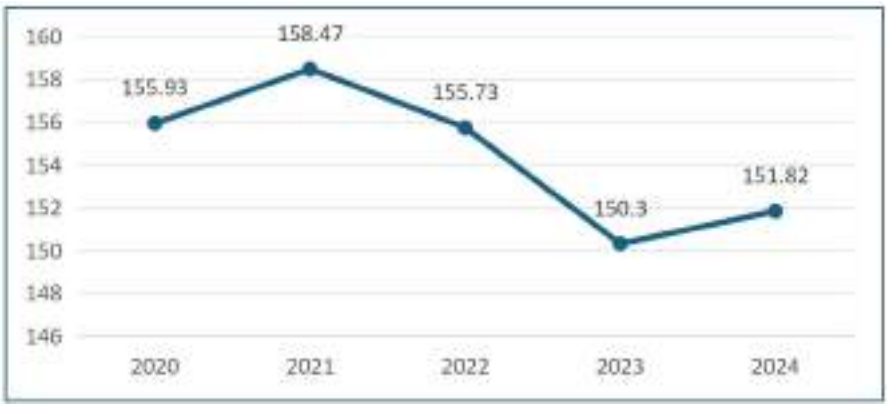
Dalam melihat wilayah rawan bencana, terlebih dahulu dilakukan analisis umum terkait risiko bencana secara umum di Kabupaten Buton. Dari sisi indikator kinerja kebencanaan yang memiliki cakupan lebih luas, maka Indeks Risiko Bencana dapat menjadi salah satu indikator yang menggambarkan perkembangan kebencanaan daerah. Indeks Risiko Bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya menjadi bencana, dimana dalam penghitungannya memperhatikan faktor *hazard* (bahaya), *vulnerability* (kerentanan) dam *capacity* (kapasitas). Bahaya dihitung berdasarkan probabilitas fenomena alam, kerentanan dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan, sedangkan kapasitas dihitung berdasarkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menangani bencana. Semakin tinggi tingkat kerentanan dan bahaya daerah dan semakin rendahnya kapasitas membuat semakin tingginya risiko terhadap bencana.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah sepanjang kurun waktu 4 tahun terakhir mulai tahun 2020 hingga 2024, tercatat terdapat 91 bencana

yang terjadi di Kabupaten Buton. Jenis bencana yang sering terjadi adalah banjir (27 kejadian), kekeringan (20 kejadian), angin kencang (12 kejadian), gelombang pasang (6 kejadian), kebakaran rumah dan putting beliung masing-masing (5 kejadian), kebakaran padang rumput (3 kejadian), abrasi, tanah longsor, bencana sosial, gempa bumi, banjir luapan kali masing-masing 1 kejadian. Dampak dari kejadian bencana yang sering terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Buton cukup beragam, seperti pada bencana banjir terdapat kurang lebih 500 rumah penduduk terdampak banjir selama tahun 2020-2024, bencana angin kencang dan puting beliung menimpa 11 rumah penduduk, dan bencana kekeringan akibat cuaca ekstrem elnino yang meningkatkan suhu panas bumi, megakibatkan sumber mata air menjadi berkurang dan mengancam kebutuhan air bersih masyarakat.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Buton berada pada kategori Tinggi dengan pola peningkatan, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 151,82 yang sebelumnya menurun pada angka 150,3. ditahun 2023.

Gambar 2.11. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

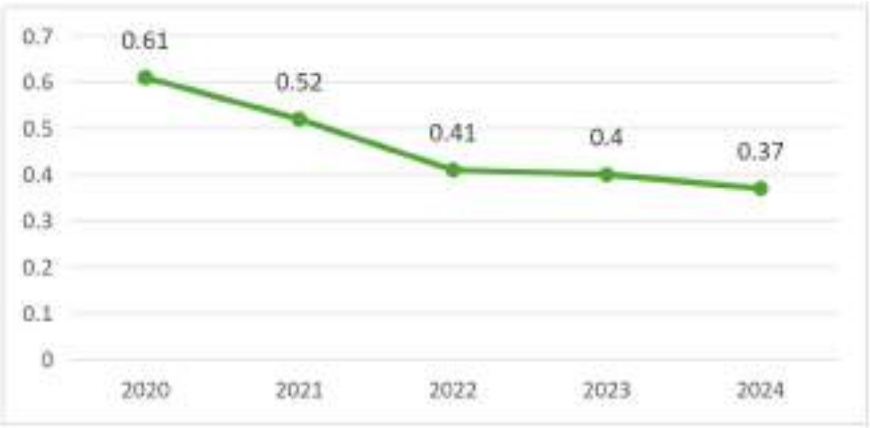


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton, 2020-2024

Sedangkan **Indeks ketahanan daerah (IKD**) Kabupaten Buton tetap fokus dalam upaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana tersebut yang dapat terjadi setiap saat dan dapat berdampak besar yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka harus terus melakukan Mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Berdasarkan penilaian kapasitas secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten Buton dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks ketahann derah cenderung meurun selama 5 tahun terakhir. Dimana pd tahun 2020 Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,61, dan pada tahun 2024 menjadi 0,37, nilai ini menunjukkan Tingkat Kapasitas Daerah Rendah. Merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Buton masih perlu meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Berikut capaian kinerja Indeks ketahanan daerah Kabupaten Buton tahun 2020-2024.

Gambar 2.12. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton, 2020-2024

Penanggulan kebencanaan di Kabupaten Buton yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu : 1) Sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi daerah rawan bencana, 2) Pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan, 3) Pembuatan tanggul penahan tebing, 4) Bantuan sarana air bersih, 5) Penyusunan dokumen kajian resiko bencana (RPB), 6) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB).

2.1.1.1 Demografi

Analisis aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Buton akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

A. Kependudukan

Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan, selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan masalah pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan bila disertai dengan kualitas yang baik dan tinggi, sebaliknya jika memiliki kualitas yang rendah maka penduduk akan menjadi beban pembangunan. Kabupaten Buton memiliki jumlah penduduk yang semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi.

Indikator perkembangan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui kebutuhan dasar penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Buton selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 122.024 jiwa.

Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Penduduk /Tahun (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lasalimu	12.869	12.597	12.850	13.235	13.363
2	Lasalimu Selatan	15.748	15.429	15.716	15.939	16.077
3	Siotapina	16.628	15.977	16.399	16.769	16.900
4	Pasarwajo	45.518	45.323	46.107	45.959	46.485
5	Wolowa	6.514	6.312	6.462	6.793	6.923
6	Wabula	6.523	6.345	6.494	6.813	6.791
7	Kapontori	15.168	15.057	15.325	15.365	15.485
	Jumlah	118.968	117.040	119.353	120.873	122.024

Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025

Selanjutnya pada Laju pertumbuhan penduduk pertahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat laju pertumbuhan menurut kecamatan selama tahun 2020-2024 :

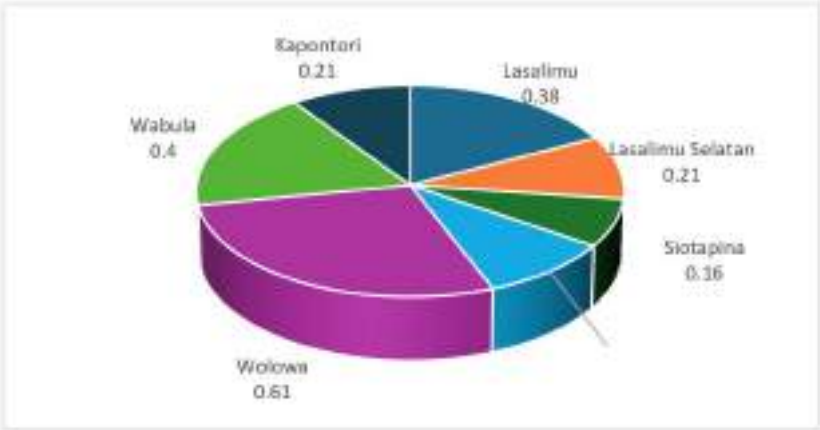
Tabel 2.16. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
1	2020	115.207	1,96
2	2021	117.040	2,13
3	2022	119.353	2,04
4	2023	120.873	0,81
5	2024	122.024	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025

Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah metode geometrik. Pada gambar dibawah ini dapat dilihat bahwa tahun 2024, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Wolowa sebesar 0,61 persen dan terendah sebesar 0,16 persen adalah Kecamatan Siotapina.

Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2024 (persen)

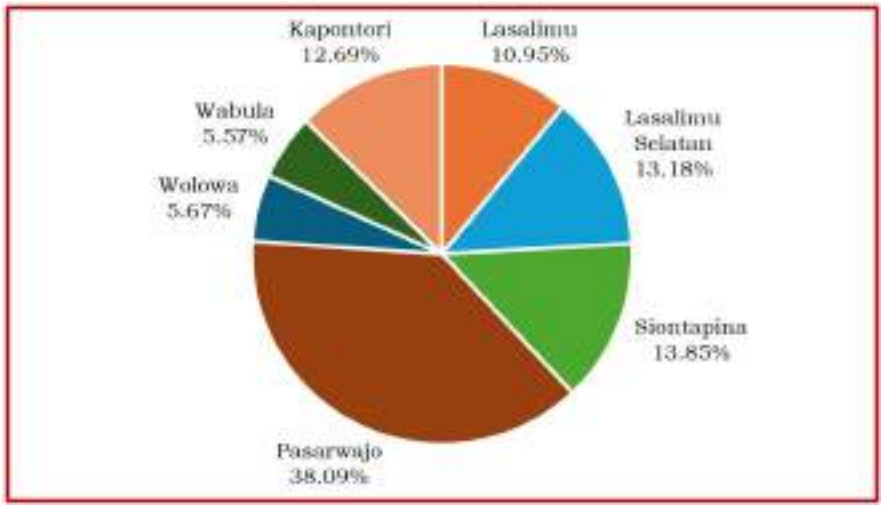


Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2025

Selanjutnya Penyebaran penduduk dari 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Buton tidak merata seperti tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pasarwajo sebanyak 46.485 jiwa atau sebanyak 38,02

persen sedangkan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Wabula sebanyak 6.791 jiwa dengan persentase sebesar 5,67 persen.

Gambar 2.14. Distribusi Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2024



Sumber: Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2025

Penyebaran penduduk merupakan distribusi penduduk terhadap penggunaan lahan yang berkaitan langsung dengan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk menunjukkan banyaknya penduduk yang bermukim dalam suatu kawasan/wilayah dengan luasan tertentu (km2). Konsentrasi penduduk dengan kepadatan tertinggi umumnya berada di wilayah ibukota kabupaten sedangkan kepadatan terendah berada pada wilayah dengan luasan yang tinggi namun memiliki jumlah penduduk yang rendah. Adapun sebaran populasi penduduk Kabupaten Buton ditampilkan pada gambar berikut:

Tabel 2.17. Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km2				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lasalimu	38,78	39,41	40,20	41,50	41,81
2	Lasalimu Selatan	103,42	104,95	106,90	108,42	109,36
3	Siotapina	62,79	64,21	65,91	67,40	67,92
4	Pasarwajo	148,60	150,59	153,19	153,13	154,45
5	Wolowa	65,45	66,76	68,34	71,85	73,22
6	Wabula	95,33	97,21	99,49	103,06	104,04
7	Kapontori	31,48	31,92	32,48	32,53	32,88
	Jumlah	69,91	71,02	72,42	73,35	-

Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Pasarwajo merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dengan rata-rata 154,45 jiwa/km^{2,} , sedangkan Kecamatan Kapontori merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah dengan rata-rata 32,88 jiwa/km^2. Wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi seperti Kecamatan Pasarwajo perlu mendapatkan afirmasi kebijakan pengembangan program yang terkait penyediaan infrastruktur pelayanan, yang juga diikuti dengan pengembangan adaptif

program penekanan jumlah penduduk serta pola penataan ruang yang baik. Sementara wilayah dengan tingkatan kepadatan yang rendah dapat menjadi lokus pengembangan industri besar yang memerlukan skala ruang yang luas.

B. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Buton pada tahun 2024 sebanyak 60,874 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 61,150 jiwa. Dimana rasio laki-laki dan perempuan di Kabupaten Buton adalah 99,55, hal ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding sekitar 99 penduduk laki-laki.

Tabel 2.18. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
1	2024	60,874	61,150	122.024	99,55
2	2023	61.053	59.820	120.873	102,06
3	2022	60.241	59.655	119.896	100,98
4	2021	60.366	58.925	117.040	102,45
5	2020	60.304	58.664	118.968	102,80

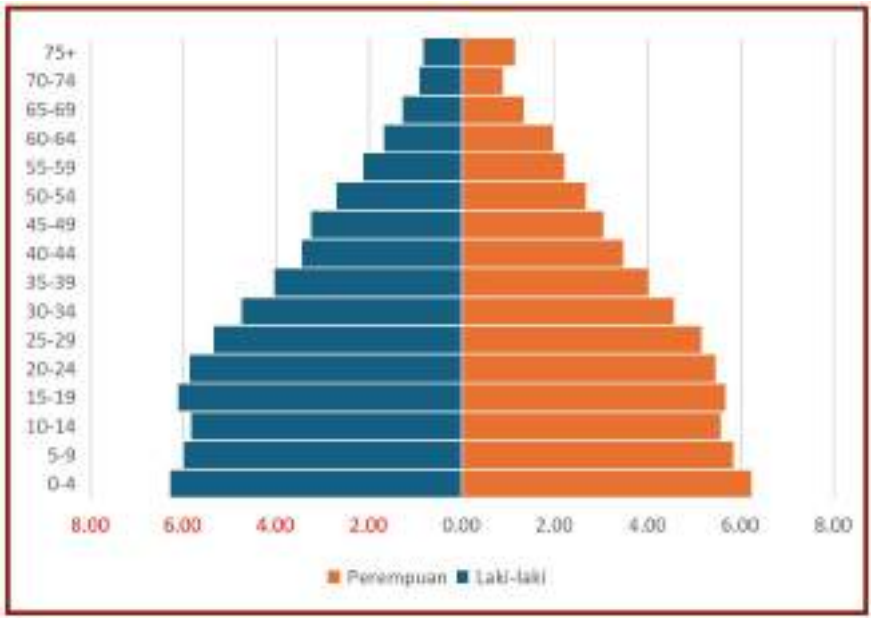
Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka, 2025

C. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa penduduk dengan kelompok usia muda antara usia 0-14 tahun masih mendominasi dibandingkan kelompok umur lainnya di Kabupaten Buton pada tahun 2024. Hal ini terlihat dari piramida penduduk yang mengembang di bagian bawah, mencerminkan dominasi penduduk usia muda di wilayah ini. Sebaliknya, jumlah penduduk semakin berkurang pada kelompok usia tua.

Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk usia 0-14 tahun mencapai 36.529 jiwa (10.654 jiwa untuk 0-4 tahun, 12.927 jiwa untuk 5-9 tahun, dan 12.948 jiwa untuk 10-14 tahun). Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) sebanyak 6.853 jiwa (2.638 jiwa untuk 65-69 tahun, 1.750 jiwa untuk 70-74 tahun, dan 2.465 jiwa untuk 75 tahun ke atas). Komposisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung jumlah penduduk nonproduktif yang cukup besar, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah lanjut usia. Hal ini menjadi perhatian penting karena semakin besar proporsi penduduk nonproduktif, semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh masyarakat usia produktif dan pemerintah dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Gambar 2.15 Piramida Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2024



Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka, 2025 (diolah)

D. Struktur Penduduk Menurut Agama

Struktur penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Mayoritas penduduk di Kabupaten Buton memeluk agama Islam. Pemeluk agama Protestan menurun dari 230 jiwa pada 2023 menjadi 220 jiwa pada 2024. Pemeluk agama Katholik meningkat sedikit dari 147 jiwa menjadi 161 jiwa, dan pemeluk agama Hindu naik dari 1.494 jiwa menjadi 1.510 jiwa. Data untuk agama Budha dan Lainnya tidak tersedia untuk tahun 2024.

Tabel 2.19. Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Islam	117.013	117.356	117.729	119.000	182.443
2.	Protestan	286	261	245	230	220
3.	Katholik	113	134	138	147	161
4.	Hindu	1.556	1.540	1.538	1.494	1510
5.	Budha	-	-	-	2	-
6.	Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025

E. Keberadaan Masyarakat Adat

Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara, Indonesia, dikenal dengan keberagaman budaya dan kehadiran masyarakat adat yang memiliki warisan budaya dan tradisi yang kaya. Masyarakat adat di Buton umumnya terikat oleh nilai-nilai dan aturan adat yang diwariskan turun-temurun, serta memiliki kearifan lokal yang berperan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa suku adat utama di Kabupaten Buton adalah:

1. **Suku Buton:**

   Bahasa dan Sastra: Bahasa daerah utama adalah Bahasa Wolio, yang memiliki sastra klasik yang kaya, termasuk syair dan prosa. Syair La Galigo adalah salah satu karya sastra epik yang terkenal di kawasan ini.

   Sistem Sosial: Suku Buton memiliki sistem sosial yang kompleks dengan kelas-kelas sosial yang dikenal sebagai "Kapita" dan "Bonto". Struktur ini memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik mereka.

   Tarian dan Musik: Tarian tradisional seperti Tari Mangaru dan Tari Lumense merupakan bagian dari ekspresi budaya mereka, sering dipentaskan pada upacara adat dan festival.

   Kerajinan Tangan: Suku Buton terkenal dengan tenunan kain tradisional yang disebut "Sarung Buton," yang memiliki motif dan warna yang khas.

2. **Suku Cia-Cia:**

   Bahasa: Bahasa Cia-Cia adalah bahasa lokal yang juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks budaya.

   Tradisi dan Ritual: Suku Cia-Cia memiliki berbagai upacara adat yang terkait dengan siklus hidup, seperti upacara pernikahan dan upacara adat lainnya yang menandai peristiwa penting dalam kehidupan.

   Kesenian: Seni musik dan tari, seperti Tari Saman dan Tari Balumpa, merupakan bagian integral dari budaya suku Cia-Cia.

3. **Suku Muna:**

   Kesenian dan Budaya: Suku Muna dikenal dengan seni tari seperti Tari Kanjiduka dan musik tradisional yang menggunakan alat musik seperti gambus dan gendang.

   Kepercayaan dan Upacara: Mereka memiliki berbagai ritual dan upacara adat yang terkait dengan kepercayaan lokal, yang sering kali berhubungan dengan siklus pertanian dan perikanan.

4. **Suku Kumbewaha:**

   Budaya Maritim: Suku ini dikenal dengan keterampilan mereka dalam bidang maritim, termasuk perikanan dan pembuatan perahu tradisional.

   Kerajinan: Pembuatan tenunan dan kerajinan kayu juga merupakan bagian dari budaya mereka.

Masyarakat adat di Buton memiliki struktur sosial dan hukum adat yang khas, yang mengatur hubungan antarindividu dan komunitas serta hubungan dengan alam sekitar. Hukum adat ini sering kali mencakup aturan tentang kepemilikan tanah, penggunaan sumber daya alam, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, Masyarakat adat Buton dikenal dengan berbagai kesenian tradisional, termasuk tarian, musik, dan kerajinan tangan. Tradisi ini tidak hanya merupakan bagian dari identitas budaya mereka tetapi juga berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan nilai-nilai dan sejarah komunitas.

Masyarakat adat di Buton memiliki praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang sering kali diatur oleh pengetahuan tradisional dan sistem kepercayaan mereka. Ini termasuk praktik-praktik pertanian, perikanan, dan pengelolaan hutan yang selaras dengan ekosistem lokal. Keberadaan masyarakat adat juga menjadi faktor penting dalam pembangunan daerah, termasuk dalam pelestarian lingkungan dan promosi pariwisata budaya. Kerjasama antara masyarakat adat dan pemerintah setempat bisa membantu dalam melestarikan warisan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan komunitas.

2. Proyeksi Demografi Kabupaten Buton

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu wilayah akan berubah dari waktu ke waktu, berdasarkan tren demografis yang ada pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan upaya untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan khususnya dalam hal perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

Proyeksi penduduk di Kabupaten Buton mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun terakhir pembangunan jangka menengah periode 2025-2029 mencapai jumlah penduduk sebanyak 131,09 ribu jiwa. Kenaikan ini tentu saja menyebabkan kenaikan kepadatan penduduk hingga mencapai 7-8 jiwa/km^2. Dari sisi jenis kelamin, terlihat adanya penurunan rasio jenis kelamin hingga mencapai di bawah 100 yang mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk laki-laki lebih lambat dibandingkan kenaikan jumlah penduduk perempuan. Meskipun begitu, jumlah penduduk masih didominasi oleh laki-laki dengan rasio jenis kelamin 101,4 pada tahun 2029 yang memperlihatkan bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat 101-102 penduduk laki-laki.

Pada indikator rasio ketergantungan mengalami penurunan dimana pada tahun 2029 mencapai 52,47. Kondisi ini mengindikasikan penurunan rasio penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Secara umum, seluruh kelompok umur mengalami kenaikan dimana penduduk usia muda sebanyak 36,71 ribu jiwa, penduduk usia produktif sebanyak 85,98 ribu jiwa dan penduduk usia tua sebanyak 8,40 ribu jiwa pada tahun 2029.

Tabel 2.20. Proyeksi Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2025-2029

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	123,85	125,65	127,47	129,29	131,09
Laki-laki	62,50	63,38	64,26	65,14	66,01
Perempuan	61,35	62,27	63,21	64,15	65,08
Rasio Jenis Kelamin	101,9	101,8	101,7	101,5	101,4
Kepadatan Penduduk	7,52	7,62	7,74	7,85	7,96
Rasio Ketergantungan	53,50	53,01	52,76	52,60	52,47
Kelompok Umur (Ribu Jiwa)					
0–14	36,09	36,13	36,28	36,49	36,71
15–64	80,73	82,13	83,44	84,74	85,98
65+	7,10	7,41	7,74	8,08	8,40

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Buton, 2024 (diolah)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan hingga kondisi modal sosial masyarakat. Berikut penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Buton utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari

pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Buton. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Buton antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, income per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

Perekonomian Kabupaten Buton menunjukkan tren naik turun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,74 persen, menandakan pemulihan yang cukup kuat. Namun, pada tahun 2023 terjadi perlambatan dengan angka pertumbuhan turun menjadi 3,03 persen. Meski demikian, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 3,20 persen. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam beberapa sektor, meskipun masih terdapat tantangan dalam mempertahankan momentum pertumbuhan yang lebih tinggi. Olehnya itu diperlukan kebijakan kegiatan ekonomi lanjutan bukan lagi kegiatan ekonomi dasar, melalui langkah-langkah strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi, yaitu : menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dengan menggali potensi sektor-sektor unggulan daerah, meningkatkan kapasitas produksi melalui optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana produksi, dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah sehingga diharapkan dapat mencapai target nasional yang telah ditetapkan. Berikut perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton menurut lapangan usaha tahun 2020-2024.

Tabel 2.21. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,79	3,34	11,08	3,6	2,83
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,24	0,01	4,05	2,12	-5,73
C	Industri Pengolahan	-2,53	3,43	6,69	-12,01	16,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,21	7,93	6,44	5,23	8,31
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,72	1,88	1,05	8,99	-0,01
F	Konstruksi	-2,97	6,71	-5,91	-6,13	17,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,37	7,98	12,78	8,45	6,86

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
H	Transportasi dan Pergudangan	-2,54	2,76	6,65	-0,69	9,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,13	1,71	11,88	0,68	5,16
J	Informasi dan Komunikasi	9,38	2,97	9,4	3,99	10,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,92	8,22	2,85	6,95	-5,43
L	Real Estate	0,98	0,99	2,76	3,09	2,5
M,N	Jasa Perusahaan	-2,34	0,42	8,53	7,9	5,46
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,52	0,79	-0,53	6,38	23,41
P	Jasa Pendidikan	4,25	3,93	6,08	3,46	4,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,67	7,02	3,13	0,21	5,65
R, S, T, U	Jasa Lainnya	-0,66	2,41	6,68	9,14	1,2
PDRB		**-0,49**	**2,62**	**5,74**	**3,03**	**3,20**

Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2021-2025

Jika dilihat dari laju pertumbuhan sektor pada lima sektor terbesar dalam perekonomian menunjukkan dinamika yang menarik dari tahun 2020 hingga 2024. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan yang relatif stabil pada awalnya, dengan sedikit kontraksi pada 2022. Namun, sektor ini melonjak signifikan pada 2023 (6,38%) dan 2024 (23,41%), menunjukkan adanya peningkatan besar dalam belanja pemerintah dan kebijakan kesejahteraan sosial. Sektor Konstruksi mengalami fluktuasi tajam, dengan kontraksi di 2020, 2022, dan 2023 akibat hambatan investasi yang terpengaruh pasca pandemi dan kenaikan harga bahan baku. Namun, pada 2024, sektor ini mengalami lonjakan pertumbuhan hingga 17,93%, yang kemungkinan besar dipicu oleh mulai membaiknya perekonomian dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Industri Pengolahan juga mengalami pola serupa, dengan pemulihan dari kontraksi pandemi pada 2020 ke pertumbuhan positif pada 2021 dan 2022. Namun, pada 2023 terjadi penurunan drastis sebesar -12,01%, yang mungkin disebabkan oleh gangguan rantai pasokan dan menurunnya produksi perikanan akibat cuaca yang kurang mendukung sehingga mempengaruhi pola produksi di industri pengolahan khususnya untuk industri pengolahan makanan dan minuman. Meskipun demikian, sektor ini bangkit kembali pada 2024 dengan pertumbuhan 16,88%, menandakan pemulihan kuat dalam kapasitas produksi. Sektor Informasi dan Komunikasi menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil, dengan laju pertumbuhan tinggi selama lima tahun terakhir. Sektor ini mendapatkan dorongan besar pada 2020 karena digitalisasi akibat pandemi, dan meskipun sempat melambat pada 2021 dan 2023, pertumbuhannya kembali meningkat menjadi 10,73% pada 2024.

Terakhir, sektor Transportasi dan Pergudangan juga mengalami dampak besar akibat pandemi, dengan kontraksi di 2020. Seiring pemulihan mobilitas dan aktivitas ekonomi, sektor ini mulai tumbuh positif pada 2021 dan 2022. Meski mengalami sedikit perlambatan pada 2023 (-0,69%), sektor ini kembali mencatatkan pertumbuhan kuat sebesar 9,71% pada 2024, yang mencerminkan peningkatan aktivitas logistik dan transportasi. Secara keseluruhan, lima sektor ini mengalami berbagai tantangan dan pemulihan dalam lima tahun terakhir, dengan 2024 menjadi tahun pemulihan dan pertumbuhan signifikan bagi hampir semua sektor.

Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan sisi pengeluaran sejalan dengan LPE berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha. Adapun pertumbuhan ekonomi menurut jenis pengeluaran tertinggi adalah pengeluaran konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan sebesar 42,14 persen dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 12,06 persen.

Tabel 2.22. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,08	0,47	3,76	4,95	6,59
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-4,53	0,24	5,63	6,91	9,73
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-5,42	2,96	-1,50	5,06	42,14
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,30	3,99	-1,99	1,26	12,06
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
LPE	**-0,49**	**2,62**	**5,74**	**3,03**	**3,20**

Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025
**angka sementara ** angka sangat sementara*

B. Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan. BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran ini disebut sebagai Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 (tiga) indikator kemiskinan yang digunakan yaitu:

1. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2.23. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis kemiskinan (Rp)
2024	122.024	14,41	13,99	313.831
2023	120.873	14,15	13,77	302.183
2022	119.353	13,61	13,27	279.627
2021	117.040	14,25	13,92	270.212
2020	115.207	13,68	13,21	262.541

Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025

Kondisi persentase penduduk miskin di Kabupaten Buton mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 13,21 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 13,68 ribu jiwa. Angka ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 13,92 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 14,25 ribu jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan menjadi 13,27 persen, disertai penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 13,61 ribu jiwa.

Namun, pada tahun 2023 tingkat kemiskinan kembali meningkat menjadi 13,77 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 14,15 ribu jiwa. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana persentase penduduk miskin mencapai 13,99 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 14,41 ribu jiwa.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Adapun kondisi indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Buton cukup fluktuatif dimana sempat menurun hingga 1,25 pada tahun 2022 namun meningkat kembali di 2023 menjadi 1,93. Adapun capaian pada tahun 2024, indeks kedalaman kemiskinan kembali menurun menjadi 1,68.

Gambar 2.16 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Buton Tahun 2020–2024



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2025

Jika P1 digunakan untuk melihat seberapa dalam rata-rata penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, maka indeks keparahan kemiskinan (P2) dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan dikalangan penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan memiliki pola yang serupa dengan indeks kedalaman kemiskinan dimana pada tahun 2022 sempat menurun hingga mencapai 0,24 dan meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 0,37 sebelum akhirnya menurun kembali di tahun 2024 menjadi sebesar 0,35.

C. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pada tahun 2024, PDRB Per Kapita (ADHB) mencapai 43,41 juta per tahun per penduduk, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 42,11 juta per tahun per penduduk. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dalam nilai nominal yang terus berlangsung dari tahun ke tahun.

Sementara itu, PDRB Per Kapita (ADHK) juga mengalami pertumbuhan dari 25,80 juta per tahun per penduduk menjadi 26,23 juta per tahun per penduduk yang mencerminkan peningkatan dalam output ekonomi dengan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB Per Kapita (ADHK) juga diikuti dengan pertumbuhan

tahunan yang positif, dimana tingkat pertumbuhan PDRB Per Kapita (ADHK) pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,66%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 1,49%.

Pertumbuhan yang terjadi dalam PDRB per kapita ini memperlihatkan tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, meskipun dengan variasi yang relatif kecil dalam persentase pertumbuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, angka pertumbuhan menunjukkan pemulihan yang cukup konsisten, dengan laju pertumbuhan yang terus meningkat setelah mengalami perlambatan di periode sebelumnya.Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2.24. PDRB per Kapita Kabupaten Buton
Tahun 2020-2024

Uraian		Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
	- ADHB	3.816,73	4.036,29	4.591,95	5.062,66	5.297,27
	- ADHK	2,774,41	2.847,09	3.010,49	3.101,74	3.200,92
2	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
	- ADHB	33,26	34,62	38,78	42,11	43,41
	- ADHK	24,18	24,42	25,42	25,80	26,23
3	Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	-11,69	0,99	4,10	1,49	1,66
4	Jumlah Penduduk (orang)	114.746	116.604	118.413	120.211	122.029
5	Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)	12,70	1,62	1,55	1,52	1,51

Sumber: PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha, 2025

Gambar 2.17. PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)
Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha, 2025

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merujuk pada kondisi di mana seseorang yang mampu bekerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Orang-orang yang berada dalam kondisi ini disebut sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi dalam berbagai tingkat dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kompetensi kerja, terbatasnya lapangan usaha, hingga keterampilan yang tidak sesuai dengan pasar kerja. Pengangguran memiliki dampak negatif tidak hanya pada individu-individu yang terkena dampaknya tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah dan berbagai lembaga dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah pengangguran, termasuk menyediakan pelatihan keterampilan, memberikan dukungan untuk pencarian pekerjaan, dan menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja.

Adapun pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton secara umum mengalami penurunan, meskipun pada tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,78 persen, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 2,99 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, angka pengangguran kembali meningkat menjadi 2,95 persen setelah sebelumnya mencapai 2,48 persen pada tahun 2023. Pencapaian ini tentu harus juga dilihat dari kualitas tenaga kerja agar kebijakan ketenagakerjaan mampu lebih relevan dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif.

Gambar 2.18. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025

Salah satu penyumbang tingginya tingkat pengggangguran terbuka di Kabupaten Buton adalah masih tingginya jumlah pekerja keluarga/tidak dibayar. Dimana berdasarkan data penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu terakhir menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Buton selama 5 tahun terakhir menunjukan trend yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Tercatat pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 11.221 orang atau 19,33% dari total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada status pekerjaan tertentu. Angka ini meningkat dari tahun 2023 sebesar 9.629 orang atau 17,06%. Hal ini menjadi indikasi masalah struktural dalam pasar tenaga kerja yang dapat berkontribusi pada pengangguran terbuka. Meskipun pekerja keluarga mungkin tidak terhitung sebagai pengangguran terbuka, keberadaan mereka menunjukkan bahwa ada keterbatasan lapangan kerja formal atau kesulitan akses ke pekerjaan yang layak. menyebabkan mereka mencari pekerjaan yang lebih baik dan berkontribusi pada pengangguran terbuka.

Ketergantungan pada pekerjaan keluarga/tidak dibayar dapat menghambat mobilitas sosial ekonomi dan membuat individu sulit keluar dari kemiskinan. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya Pertumbuhan Ekonomi yang lambat atau tidak inklusif dapat mengurangi penciptaan lapangan kerja formal, mendorong individu untuk mencari pekerjaan di sektor informal atau keluarga, Kurangnya pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dapat membuat individu sulit mendapatkan pekerjaan formal dan terpaksa bekerja di sektor informal, dan Kebijakan yang tidak mendukung pengembangan sektor formal atau tidak memberikan perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja informal yang semakin memperburuk masalah tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Buton, antara lain melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar kerja maupun sesuai potensi unggulan daerah, penciptaan lapangan kerja formal yang layak melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, perlindungan sosial yang memadai

bagi pekerja informal dan keluarga mereka termasuk jaminan kesehatan melalui BPJS ketenagakerjaan, dan bantuan sosial, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak pekerja dan pentingnya pekerjaan yang layak. Dengan mengatasi akar penyebab tingginya pekerja keluarga/tidak dibayar dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk pekerjaan formal, diharapkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Buton dapat ditekan.

Berikut data penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu terakhir menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Buton :

Tabel 2.25. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

Status Pekerjaan Utama	Penduduk yang Bekerja (Tahun)									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah (Org)	%	Jumlah (Org)	%	Jumlah (Org)	%	Jumlah (Org)	%	Jumlah (Org)	%
Formal	**16.593**	**38,12**	**4.782**	**34,13**	**13.385**	**25,24**	**15.735**	**27,86**	**22.645**	**39,01**
Buruh/Karyawan/ Pegawai	15.249	35,03	13.408	30,96	10.943	20,64	14564	25,78	21.557	37,14
Berusaha dibantu pekerja tetap	1.344	3,09	1.374	3,17	2.442	4,61	1171	2,07	1.088	1,87
Informal	**26.935**	**61,88**	**28.531**	**65,87**	**39.638**	**74,76**	**40.748**	**72,14**	**35.397**	**60,99**
Pekerja bebas	1.037	2,38	3.154	7,28	2.078	3,92	1765	3,12	908	1,56
Pekerja keluarga/tidak dibayar	6.193	14,23	5.355	12,36	13.573	25,60	9.629	17,05	11.221	19,33
Berusaha sendiri	10.442	23,99	11.744	27,11	16.211	30,57	18.495	32,74	15.684	27,02
Berusaha dibantu pekerja tidak tetap	9.263	21,28	8.278	19,11	7.776	14,67	10859	19,23	7.584	13,07
Jumlah	**43.528**	**100**	**43.313**	**100**	**53.023**	**100**	**56.483**	**100**	**58.042**	**100**

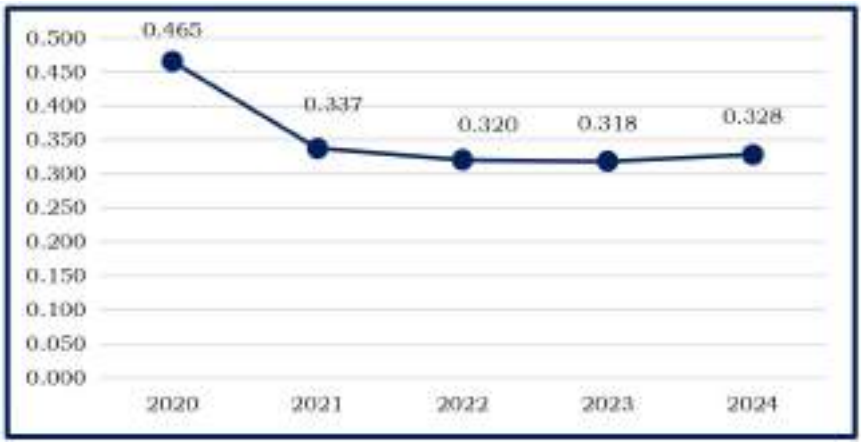
Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka, 2025

E. Rasio Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Buton adalah sulitnya kondisi geografis wilayah. Selain itu, walaupun pemerataan cukup baik, namun dari segi kualitas masih perlu banyak perbaikan.

Secara umum, terjadi penurunan Rasio Gini dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Buton. Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 0,465 dan terus menurun hingga mencapai 0,318 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan menjadi 0,328. Capaian ini menjadikan Kabupaten Buton tetap berada dalam kategori ketimpangan sedang, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dari para pemangku kepentingan untuk memastikan pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan di masyarakat.

Gambar 2.19 Rasio Gini Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021-2025

F. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia, salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kurun waktu lima tahun antara 2020 hingga 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buton menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 66,78, dan mengalami kenaikan secara bertahap setiap tahunnya. Pada 2021, IPM meningkat menjadi 67,12, naik 0,34 poin, kemudian melonjak lebih besar pada 2022 menjadi 68,05, dengan kenaikan 0,93 poin. Meskipun ada sedikit pelambatan pada 2023, di mana IPM hanya naik 0,91 poin menjadi 68,96, namun pada 2024 IPM kembali meningkat menjadi 69,72, dengan tambahan 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan IPM yang konsisten ini menunjukkan adanya kemajuan di berbagai dimensi pembangunan, meskipun masih berada dalam kategori "sedang." Meskipun ada pelambatan dalam laju kenaikan IPM pada beberapa tahun terakhir, tren keseluruhan menggambarkan keberhasilan upaya pembangunan manusia, meski tantangan untuk mencapai kategori "tinggi" (IPM ≥ 70) masih perlu diupayakan lebih optimal.

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disajikan pada tahun 2024 merupakan hasil penyesuaian berdasarkan Sensus Penduduk *Long Form* (SP LF) 2020, yang memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Buton dan kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Buton tercatat sebesar 69,72, yang menunjukkan tren kenaikan yang stabil dalam lima tahun terakhir meskipun dengan sedikit pelambatan pada tahun 2024. IPM Kabupaten Buton ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 66,78. Namun, meskipun ada kemajuan, IPM Kabupaten Buton masih berada dalam kategori "sedang" dan lebih rendah dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya di provinsi ini.

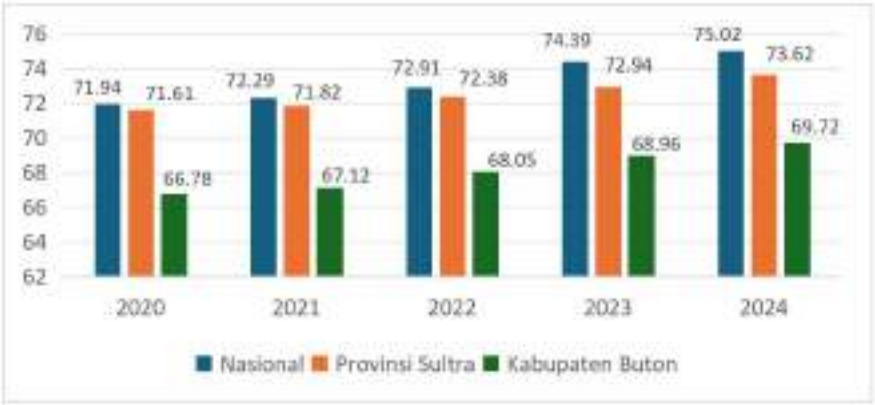
Gambar 2.20. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka, 2025
**2020-2023 menggunakan UHH Hasil Long Form SP2020*

Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 73,62 serta rata-rata nasional yang sudah menembus angka 75,02 pada tahun 2024. Selisih IPM Kabupaten Buton dengan capaian provinsi sebesar 3,9 poin dan dengan capaian nasional sebesar 5,3 poin mengindikasikan masih adanya kesenjangan yang perlu dipersempit. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya pembangunan manusia di Kabupaten Buton telah menunjukkan hasil positif, namun tetap diperlukan langkah-langkah yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat agar dapat mengejar ketertinggalan sekaligus mendekatkan diri pada standar pembangunan manusia di tingkat provinsi maupun nasional.

Gambar 2.21. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024



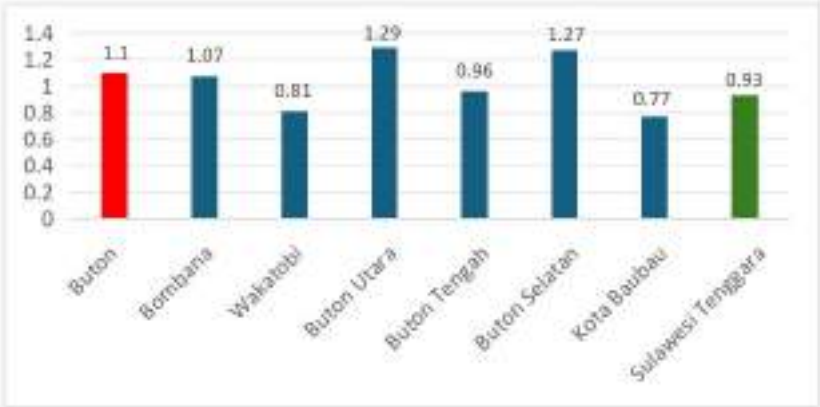
Sumber: BPS Nasional, BPS Prov. Sulawesi Tenggara, BPS Kabupaten Buton, 2025

Jika melihat dari sisi pertumbuhan IPM tahun 2024, Kabupaten Buton mencatatkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1,10, yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,93. Hal ini menunjukkan bahwa Buton memiliki kinerja pembangunan manusia yang relatif baik di tingkat provinsi. Dibandingkan dengan daerah sekitarnya, Buton juga menunjukkan performa yang lebih unggul. Misalnya, Kota Baubau, yang merupakan pusat ekonomi dan transportasi di wilayah kepulauan, hanya mencatatkan pertumbuhan IPM sebesar 0,77, jauh lebih rendah dari Buton. Sementara itu, Buton Tengah, yang merupakan daerah hasil pemekaran, mencatatkan pertumbuhan IPM sebesar 0,96, yang juga masih berada

di bawah Buton. Data ini mengindikasikan bahwa Buton memiliki keunggulan yang konsisten dalam pembangunan manusia, meskipun berada di tengah-tengah daerah pemekaran dan pusat aktivitas wilayah kepulauan.

Namun, terdapat daerah lain seperti Buton Selatan yang mencatatkan pertumbuhan IPM lebih tinggi, yaitu sebesar 1,27, menjadikannya yang tertinggi di antara wilayah kepulauan sekitar Buton. Hal ini menunjukkan bahwa Buton Selatan memiliki kemajuan signifikan dalam pembangunan manusia, yang mungkin didorong oleh kebijakan pembangunan atau potensi lokal yang lebih optimal. Di sisi lain, Wakatobi, yang merupakan destinasi wisata internasional, hanya mencatatkan pertumbuhan IPM sebesar 0,81, jauh lebih rendah dibandingkan Buton.

Gambar 2.22. Pertumbuhan IPM Kabupaten Buton Terhadap Daerah Sekitar dan Provinsi Tahun 2024



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton, 2024

Kenaikan IPM Kabupaten Buton merupakan hasil dari peningkatan indeks komposit penyusun IPM yang terlihat dari beberapa indikator utama. Pada tahun 2024, angka rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 8,63 tahun, sedangkan harapan lama sekolah mencapai 13,89 tahun. Di sektor kesehatan, usia harapan hidup juga mengalami kenaikan menjadi 70,47 tahun. Sementara itu, dari sisi ekonomi, pengeluaran per kapita yang disesuaikan meningkat menjadi 8.401 ribu rupiah per kapita per tahun. Meskipun pengeluaran per kapita menunjukan trend peningkatan, namun secara keseluruhan, pengeluaran per kapita di Kabupaten Buton menggambarkan bahwa daerah ini masih memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan tren positif ini, diharapkan pembangunan manusia di Kabupaten Buton terus mengalami peningkatan yang signifikan, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.26. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
IPM	**-**	**66,78**	**67,12**	**68,05**	**68,96**	**69,72**
Indeks Pendidikan	-	63,9	64,6	66,05	66,85	67,35
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,71	7,92	8,25	8,49	8,63
Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	13,75	13,76	13,87	13,88	13,89
Indeks Kesehatan	-	76,97	77,20	77,31	77,48	77,65
Usia Harapan Hidup	Tahun	70,03	70,18	70,25	70,36	70,47
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rp/ Org/Tahun	7.307	7.324	7.594	7.995	8.401

Sumber: BPS Provinsi Sulwesi Tenggara, 2021-2025, diolah
**2020-2024 menggunakan UHH Hasil Long Form SP2020*

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Gambaran capaian kesehatan semua, antara lain diukur dari indikator usia harapan hidup, kesehatan ibu dan anak, penanganan tuberkolosis. Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Dari indikator usia harapan hidup, terlihat bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Buton terus mengalami peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2020, usia harapan hidup tercatat sebesar 70,03 tahun dan meningkat menjadi 70,47 tahun pada tahun 2024. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk hidup hingga usia 70–71 tahun. Kenaikan ini berjalan seiring dengan peningkatan Indeks Kesehatan yang juga menunjukkan tren positif, yaitu dari 76,97 pada tahun 2020 menjadi 77,65 pada tahun 2024. Perbaikan tersebut mencerminkan adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan, gizi masyarakat, serta akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Buton.

Dari indikator usia harapan hidup, terlihat bahwa derajat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan secara simultan, dimana usia harapan hidup masyarakat pada tahun 2020 sebesar 68,25 tahun meningkat hingga menjadi 70,47 tahun di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2024 akan memiliki harapan untuk hidup hingga berusia 70-71 tahun. Kenaikan ini berbanding lurus dengan pencapaian Indeks Kesehatan yang terus meningkat hingga mencapai 77,65 pada tahun 2024.

Tabel 2.27. Indeks Kesehatan dan Usia Harapan Hidup Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kesehatan	-	76,97	77,20	77,31	77,48	77,65
Usia Harapan Hidup	Tahun	70,03	70,18	70,25	70,36	70,47

Sumber: BPS Provinsi Sulwesi Tenggara, 2021-2025, diolah
**2020-2024 menggunakan UHH Hasil Long Form SP2020*

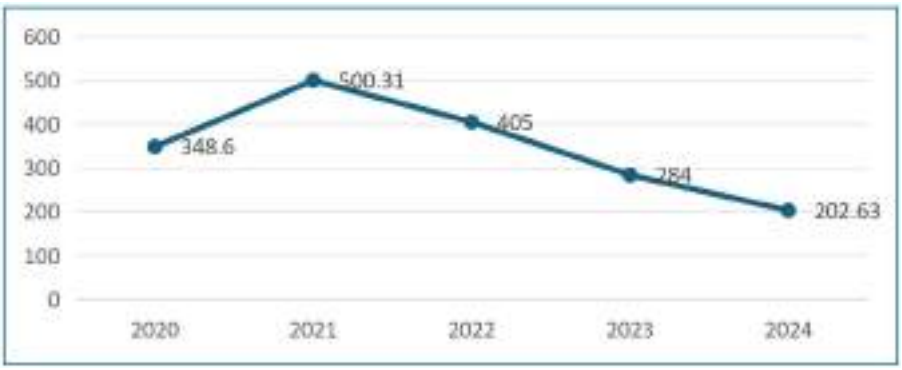
Angka Kematian Ibu. dalam waktu lima tahun terakhir menunjukkan trend berfluktuatif, di tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan dan terjadi penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2022 sampai 2024. Namun bila dibandingkan dengan target RPJMN, yaitu Angka kematian Ibu sebesar 183/100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Buton belum tercapai. Angka yang menurun tersebut cenderung terpaut jarak yang cukup jauh dengan target. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan terus berupaya untuk dapat mencapai target yang ditetapkan secara nasional, melalui peningkatan pelayanan ANC *(Ante Natal Care*), INC (*Intra Natal Care*), PNC (*Peri Natal Care*), peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar.

Pencapaian angka kematian ibu di Kabupaten Buton selama kurun waktu 2020-2024 menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2020, angka kematian ibu tercatat sebesar 348,6 per 100.000 kelahiran hidup, menurun menjadi 202,63 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Berdasarkan hasil pencatatan kesehatan keluarga pada Dinas Kesehatan ditahun 2023 dan 2024 menunjukan jumlah kasus kematian ibu ditahun 2024 sebanyak 4 kasus, menurun dari jumlah kasus kematian ibu ditahun 2023 sebanyak 6 kasus. Berdasaarkan penyebabnya sebagian besar kematian ibu pada

tahun 2024 terkait Perdarahan (1 Kasus), gangguan hipertensi (2 kasus) dan penyebab lainnya (1 kasus).

Kasus AKI yang masih terjadi di sebagian kecamatan disebabkan berbagai hal, di antaranya kondisi wilayah yang terpencil, sarana transportasi dan fasilitas kesehatan yang masih terbatas menyebabkan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan yang ada relatif sulit dan jauh. Semua kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kontak masyarakat terutama ibu hamil dengan tenaga kesehatan (bidan, dokter), dan cenderung melahirkan dengan bantuan tenaga non kesehatan, sehingga terjadi kelainan pada kehamilan menjadi tidak terdeteksi sejak dini, hal ini menjadi masalah serius bila terjadi komplikasi kehamilan atau kondisi persalinan yang membutuhkan rujukan. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya peningkatan layanan kesehatan yang merata diseluruh wilayah, antara lain melalui peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan, distribusi tenaga kesehatan yang merata diseluruh wilayah, peningkatan dan penguatan sarana prasarana kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.23. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buton, 2020-2024

Prevalensi stunting. Prevalensi balita stunting di Kabupaten Buton tahun 2024 21,32 persen, tercatat masih cukup tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 16,79 persen. Perkembangan kasus Stunting di Kabupaten Buton, hasil SSGI tahun 2022 menunjuk angka prevalensi stunting di Kabupaten Buton sebesar 32,60 persen atau turun 0,4 persen jika dibandingkan hasil SSGI tahun 2021 yang tercatat sebesar 33,00 persen, namun hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 mencatat prevalensi stunting Kabupaten Buton kembali naik menjadi 37,20 persen, dan di tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 28,80 persen atau turun 8,4 persen. Merujuk pada sumber data lainnya yakni E-PPGBM yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, mencatat prevalensi stunting Kabupaten Buton di tahun 2020-2024 berturut-turut sebesar 22,31 persen, 21,30 persen, 19,22 persen, 16,79 persen, 21,32 persen. Terdapat Gab yang cukup besar, perbedaan tersebut karena ada perbedaaan metodologi perolehan kedua data tersebut, dimana data SSGI dan SKI merupakan data yang diperoleh dari hasil survey, sedangkan E-PPGBM merupakan data yang diperoleh berdasarkan *by name by address*.

Mengacu capaian prevalensi stunting tersebut, pemerintah daerah terus berupaya untuk menurunkan tingkat prevalensi stunting melalui intervensi kebijakan lintas sektor, dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder di daerah, antara lain melakukan Intervensi dimulai sejak masa kehamilan, dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, pemeriksaan kehamilan rutin, dan edukasi mengenai pola makan sehat. Setelah bayi lahir, penting untuk memastikan pemberian ASI eksklusif

selama enam bulan pertama, diikuti dengan MP-ASI yang bergizi seimbang, serta pemantauan pertumbuhan secara berkala.

Gambar 2.24. Persentase Anak Balita Dengan Stunting Di Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buton, 2020-2024

Penanganan Tuberkolosis. Penanganan tuberkolosis diukur dari indikator capaian cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkolosis, dan angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis yang menunjukkan kinerja positif. Meskipun demikian, capaian tersebut masih harus dioptimalkan dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi mengingat penyakit tersebut merupakan salah satu penyakit menular yang cukup berbahaya, karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, bahkan kematian jika tidak mendapat penanganan atau pengobatan serius. Adapun capaian indikator penanganan tuberkolosis di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28. Penanganan Tuberkulosis Di Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	47,07	52,76	69,69	64,64	58,61
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	94,00	95,18	93,83	86,98	75,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buton, 2020-2023

Pengendalian Penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan tubuh, sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Upaya pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit HIV/AIDS disamping ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan juga diarahkan pada upaya pencegahan melalui penemuan penderita secara dini sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat.

Standar pelayanan minimal bidang kesehatan untuk penyakit HIV/AIDS adalah bahwa seluruh penderita HIV/AIDS harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Tata laksana penderita HIV/AIDS meliputi Voluntary Counseling Testing (VCT) yaitu tes konseling secara sukarela, perawatan orang sakit dengan HIV/AIDS, Pengobatan Anti retroviral (ARV), pengobatan infeksi oportunistik, dan rujukan kasus spesifik.

Jumlah kasus HIV di Kabupaten Buton dari tahun 2021-2024 cenderung meningkat. Dimana pada tahun 2021 terjadi 11 kasus penyakit HIV/AIDS, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 14 kasus, kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 13 kasus, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 24 kasus penderita HIVAIDS yang tersebar dibeberapa kecamatan yang penduduknya mempunyai mobilitas tinggi ke luar daerah.

Jika dilihat berdasarkan proporsi penderita HIV menurut jenis kelamin pada tahun 2024, kasus HIV lebih banyak diderita oleh laki-laki yaitu sebanyak 15 orang (62,5%) dibandingkan perempuan sebanyak 9 orang (37,5%). Hal ini lebih disebabkan karena mobilitas laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan sehingga risiko untuk terinfeksi HIV lebih besar. Kondisi ini juga terjadi ditahun 2022 dan 2023, dimana lebih banyak HIV diderita oleh laki-laki dibandingkan Perempuan. Jika dilihat dari jumlah kasus baru AIDS di Kabupaten Buton, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 24 kasus yang terbagi pada kelompok usia 20-24 tahun sebanyak 2 orang, kelompok umur ≥ 50 tahun sebanyak 3 orang dan tertinggi pada kelompok usia 25-49 tahun sebanyak 19 orang. Berdasarkan gambaran kondisi ini, maka peningkatan sistem PWS menjadi hal yang wajib dilaksanakan agar kasus-kasus tersebut dapat diminimalisir.

Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasit Incidence). Malaria sebagai salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Program eliminasi malaria di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, yang terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2030. Penyebaran malaria disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: perubahan lingkungan yang tidak terkendali dapat menimbulkan tempat perindukan nyamuk malaria, mobilitas penduduk yang tinggi dari dan ke daerah endemic, perilaku masyarakat yang memungkinkan terjadinya penularan, terbatasnya akses pelayananGambar 6.20 di atas menunjukkan bahwa *Annual Parasite Incidence* (API) Kabupaten Buton pada tahun 2022 sampai tahun 2024, mulai dari tahun 2022 dan 2023 angka kesakitan (Annual Parasite Incidence) per sebesar 0,2 per 1.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2024 sebesar 0,1 per 1.000 penduduk.

Penyakit Malaria hingga saat ini, masih menjadi masalah di Kabupaten Buton. Dimana ada sebanyak 15 kasus positif malaria yang terdiri dari 12 laki-laki dan 3 perempuan. Angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 16 kasus positif dan pada tahun 2022 sebanyak 21 kasus positif malaria. Pada Persentase Konfirmasi laboratorium pada suspek Malaria di Kabupaten Buton dari tahun 2021-2024 cenderung menetap stabil dengan persentase konfirmasi laboratorium sebesar 100%. Demikian pula persentase pengobatan standar kasus Malaria positif Kabupaten Buton dari tahun 2021-2023 tetap 100% mendapat pengobatan standar. Sedangkan pada tahun 2024 sebesar 93,3%.

Rencana Induk Bidang Kesehatan. Sebagai upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan, Kabupaten Buton menyusun Rencana Induk Bina Konstruksi (RIBK) sebagai pedoman strategis dalam pengelolaan kegiatan konstruksi di daerah. RIBK mencakup analisis kebutuhan, prioritas pembangunan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari 11 indikator RIBK, terdapat 2 indikator belum tersedia data capaian, dikarenakan kedua indikator tersebut baru terlaksana pada tahun 2025, sehingga pengukuran kinerjanya akan dilakukan pada tahun 2025. Berikut disajikan tabel RIBK Kabupaten Buton yang memuat sasaran, program, dan indikator keberhasilan dalam jangka waktu perencanaan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.29. Capaian RIBK Kabupaten Buton
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Data				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Usia Harapan Hidup	%	70,03	70,18	70,25	70,36	70,47
2	Total Fertility Rate (angka kelahiran total)*	%	NA	NA	2,83	2,66	2,76
3	Jumlah kematian ibu	Org	8	10	9	6	4
4	Jumlah kematian balita	Org	87	36	31	48	53
5	Prevalensi stunting (SSGI)	%	NA	33,00	32,60	37,20	28,80
	Prevalensi stunting (e-PPGBM))	%	22,31	21,32	19,22	16,79	21,32
6	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	NA	NA	NA	NA	NA
7	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	91,00	84,00	99,89	81,40	49,70
8	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	85,00	73,89	98,00	96,00	92,00
9	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	NA	95,18	93,83	86,98	83,33
10	Persentase hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	40,30	17,30	41,30	15,50	32,70
11	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buton, Dinas BKKBD Kab. Buton (*), 2020-2024

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi yang paling penting dan strategis bagi masyarakat dan daerah. Pendidikan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi individu, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Sumber daya manusia yang terdidik lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar, serta lebih produktif dalam pekerjaan mereka.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan. Peningkatan rata-rata lama sekolah terjadi di Kabupaten Buton dimana pada tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,71 tahun dan meningkat menjadi 8,63 tahun. Capaian ini mengindikasikan bahwa masyarakat berumur 25 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah hingga mengenyam pendidikan SMP kelas tiga (selama 8,63 tahun).

Tabel 2.30. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

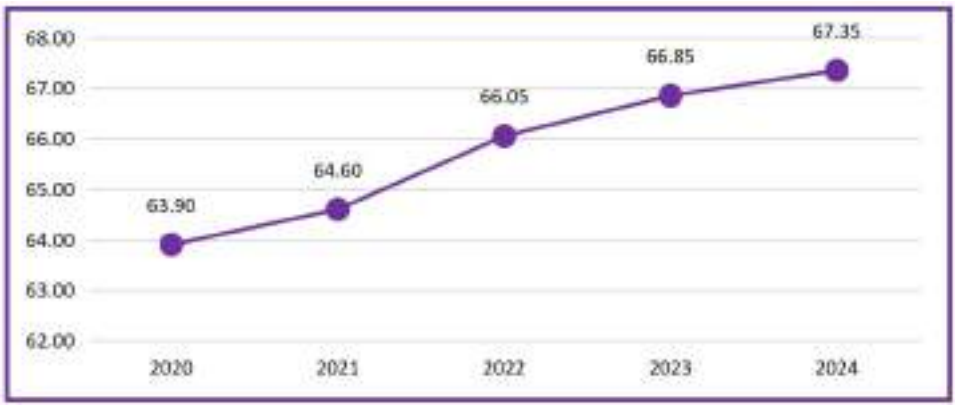
Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,71	7,92	8,25	8,49	8,63
Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	13,75	13,76	13,87	13,88	13,89

Sumber: BPS Provinsi Sulwesi Tenggara, 2021-2025 (diolah)

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton jauh di atas rata-rata lama sekolah dimana pada tahun 2024 memiliki capaian 13,89 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang memasuki usia sekolah (7 tahun) memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan hingga 13-14 tahun lamanya. Capaian pendidikan ini tentu menjadi rapor positif bagi pembangunan SDM di Kabupaten Buton melalui peningkatan pendidikan masyarakat.

Indeks Pendidikan. Indeks pendidikan merupakan formulasi dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Analisis terhadap Indeks Pendidikan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024 seiring dengan meningkatnya capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dengan nilai yang meningkat dari 63,90 pada tahun 2020 menjadi 67,35 pada tahun 2024.

Gambar 2.25. Indeks Pendidikan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sulwesi Tenggara, 2021-2024, diolah

Pembangunan literasi masyarakat merupakan proses strategis untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi di tengah komunitas. Literasi menjadi fondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta mendukung kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi. Di Kabupaten Buton, capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menunjukkan tren peningkatan signifikan, yakni dari 9,68 pada tahun 2022 menjadi 16,27 di tahun 2023, dan melonjak tajam menjadi 62,71 pada tahun 2024. Lompatan ini mencerminkan hasil dari berbagai upaya terintegrasi seperti pemanfaatan teknologi digital, penyelenggaraan kegiatan literasi, serta kolaborasi lintas sektor yang mendukung terciptanya ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah. Meskipun demikian, upaya peningkatan literasi tetap perlu dilanjutkan secara konsisten untuk mencapai indeks yang lebih optimal.

Selain itu pula, pendidikan yang berkualitas dan merata juga tergambar dari proporsi penduduk Kabupaten Buton yang berusia 15 tahun ke atas dan memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Dimana semakin tinggi capaiannya menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Selama periode 2020 hingga 2023, proporsi penduduk Kabupaten Buton yang berusia 15 tahun ke atas dan memiliki kualifikasi pendidikan tinggi menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, proporsi tersebut tercatat sebesar 35,48 persen, yang kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 33,93

persen. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 40,17 persen, menandakan adanya peningkatan partisipasi atau lulusan pendidikan tinggi dalam kelompok usia tersebut.

Pada tahun 2023, proporsi tersebut kembali menurun menjadi 35,81 persen, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Fluktuasi ini dapat mencerminkan dinamika dalam akses pendidikan, jumlah lulusan, serta mobilitas penduduk usia produktif yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi. Kualitas angkatan kerja juga tercermin dari kualifikasi penduduk berusia lima belas tahun ke atas ini, sehingga terlihat kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Buton.

Gambar 2.26. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Di Kabupaten Buton Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021-2024 (diolah)

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial melalui perlindungan sosial. Sebanyak 8.948 KK mendapatkan bantuan sosial pada tahun 2024, sehingga persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat menjadi 76,48 persen.

Tabel 2.31. Perlindungan Sosial Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Capaian Tahun					
		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahtraan sosial (PPKS)	Orang	125	308	361	615	523
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	KK	7.154	7.665	8.783	8.739	8.948
3.	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	94	120	100	100
4.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	%	13,68	47	54,32	73,22	76,48
5.	Persentase penyandangcacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	2,21	2,57	9,45	1,44	4,53
6.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan provinsi	%	0	21.51	23.90	26.30	

Sumber : Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton. 2020-2024

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan pemberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka menengah daerah tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

Arah pembangunan ini menjelaskan tentang penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa.

Keberadaan sarana ibadah sebagai tempat pengabdian umat kepada dang pencipta serta sebagai sarana pembinaan umat beragama merupakan hal yang sangat penting. Jumlah sarana ibadah di Kabupaten Buton sudah cukup memadai seperti yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.32. Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Bangunan Tempat Ibadah	Tahun 2024		
		Jumlah (unit)	Jumlah penduduk (Jiwa)	Rasio
1.	Masjid dan Mushola	138	122.024	1,13
2.	Gereja	6	122.024	0,08
3.	Pura	10	122.024	0,06
4.	Vihara	-	122.024	0,00
5.	Kelenteng	-	122.024	0,00
6.	Lain-Lain (Mushola)	52	122.024	0,43
Jumlah		204	122.024	

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka, 2025

Rasio tempat ibadah Kabupaten Buton pada tahun 2024 terbanyak adalah mesjid yakni rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa rasio tempat ibadah terhadap per 1000 penduduk sebesar 1,13 artinya setiap 1 mesjid melayani 1,000 penduduk, sedangkan rasio terhadap gereja sebesar 0,08 artinya setiap 0,08 gereja melayani 1.000 penduduk.

Kerukunan umat beragama merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan berkeadaban. Di tengah keragaman keyakinan, suku, dan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Buton, terciptanya suasana saling menghormati dan menghargai antarumat beragama menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan daerah. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama yang terus menunjukkan tren positif, dari angka 82 pada tahun 2020, meningkat menjadi 84,33 pada tahun 2021, kemudian mencapai 87 pada tahun 2022 dan 2023, serta kembali meningkat menjadi 87,7 pada tahun 2024. Kenaikan ini menjadi indikator bahwa Kabupaten Buton secara konsisten mengupayakan penguatan dialog lintas iman, pendidikan karakter, serta penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi. Ke depan, kerukunan ini harus terus dirawat dan dijaga oleh semua pihak, tidak hanya oleh pemerintah dan tokoh agama, tetapi juga oleh setiap individu masyarakat.

Gambar 2.27. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton, 2020-2024

Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki kekayaan budaya sangat beragam dan berakar kuat pada warisan Kesultanan Buton. Keberagaman budaya ini tercermin dalam keberadaan berbagai etnis, tradisi, adat istiadat, bahasa, seni, teknologi tradisional, dan situs cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah. Secara etnografis, masyarakat Buton terdiri dari suku Buton, Muna, Bugis, Jawa, Bali, dan etnis lainnya yang telah berakulturasi secara harmonis, dengan Lembaga Adat Kesultanan Buton (LAKB) menjadi simbol pemersatu yang masih dijunjung tinggi. Tradisi lisan seperti cerita rakyat *Togo Motonu*, epos *Lakilaponto*, serta syair-syair *Kabhanti* terus dilestarikan meski menghadapi tantangan penurunan penutur muda. Nilai-nilai adat istiadat juga tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti ritual *Posuo* bagi anak perempuan yang memasuki usia remaja, *Kariaa* sebagai upacara pernikahan adat, hingga *Kande-kandea* sebagai pesta adat kampung yang memperkuat solidaritas sosial.

Lebih dari itu, Kabupaten Buton memiliki kekayaan ritus dan pengetahuan tradisional yang erat kaitannya dengan kesehatan dan spiritualitas lokal, seperti *Dhole-dhole* untuk kekebalan anak, *Posipo* untuk ibu hamil, serta *Piagoa* sebagai ritual tolak bala. Dalam ranah seni budaya, Buton dikenal dengan ragam tari seperti *Ngibi*, *Potimbe*, dan *Batanda*, serta musik tradisional *Gambusu*, *Latotou*, dan *Kabhanti*, yang menggambarkan ekspresi budaya masyarakat yang dinamis dan religius. Bahasa daerah juga menjadi unsur penting, dengan Wolio sebagai bahasa istana yang masih digunakan dalam kegiatan adat, disertai eksistensi bahasa Cia-cia, Kumbewaha, dan Lasalimu di komunitas lokal. Semua ini diperkuat oleh ragam teknologi tradisional seperti alat tenun *Pimoorua*, perahu *koli-koli*, serta kerajinan khas seperti *kombu*, *balase*, dan *kasangkola*, yang masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat.

Dari sisi material budaya, Kabupaten Buton memiliki lebih dari 19 situs cagar budaya yang telah ditetapkan dan puluhan lainnya yang masih dalam proses registrasi. Beberapa diantaranya adalah Benteng Takimpo, Benteng Wasuemba, Kampung Lama Kombeli, dan Makam Rajamulae, yang menjadi simbol kekuatan sejarah dan identitas lokal. Hingga tahun 2024, tercatat 10 situs budaya telah diusulkan melalui Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk penetapan resmi. Selain itu, Kabupaten Buton juga telah mengidentifikasi sepuluh Obyek Pemajuan Kebudayaan sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2017, yaitu: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Pemerintah Kabupaten Buton secara aktif telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai bagian dari strategi pelestarian dan pemajuan kebudayaan berbasis komunitas. PPKD ini menjadi pijakan penting dalam mendukung

pembangunan berbasis budaya yang berkelanjutan dan berperspektif lokal, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan kebudayaan di tingkat provinsi dan nasional. Dengan potensi budaya yang besar dan beragam, Kabupaten Buton memiliki peluang besar menjadikan kebudayaan sebagai fondasi identitas daerah sekaligus motor penggerak dalam pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata budaya yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan inklusi sosial adalah konsep-konsep penting yang saling terkait dan berperan dalam pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarga, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Kesetaraan gender adalah pemahaman bahwa setiap orang, terlepas dari jenis kelaminnya, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Inklusi sosial adalah upaya untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat, termasuk kelompok yang seringkali terpinggirkan, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan layanan publik. Terkait dengan itu dapat digambarkan dengan beberapa aspek sebagai berikut.

A. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan aspek krusial dalam pembangunan suatu negara atau daerah. Hal ini karena anak-anak merupakan aset masa depan yang akan menentukan arah perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk mengetahui gambaran capaian perlindungan anak di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota digunakan Indeks Perlindungan Anak (IPA). Indeks Perlindungan Anak (IPA) disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak Hak Anak (KHA) dengan mengaplikasikan empat klaster pemenuhan hak anak (Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) dan satu klaster perlindungan khusus anak (Klaster V : Perlindungan Khusus) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maupun perlindungan khusus anak.

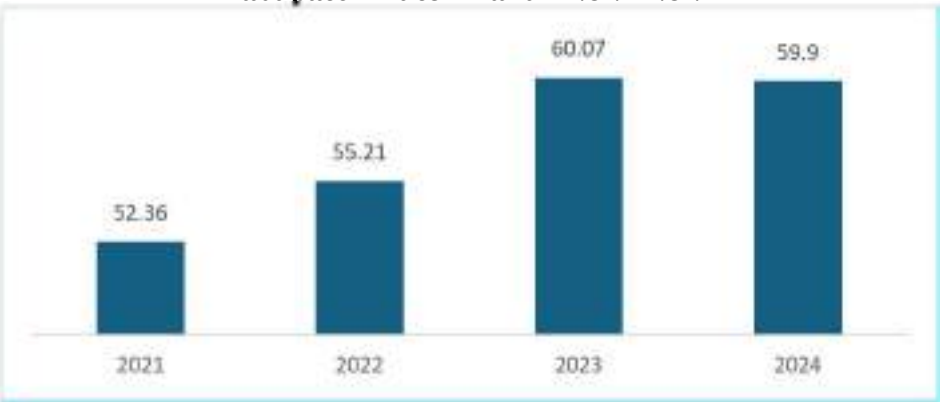
Adapun capaian Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Buton pada tahun 2022 mencapai 52,25, dan meningkat sebesar 0,08 point menjadi 52,22 pada tahun 2023. Capaian ini masih belum optimal sehingga perlu adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program perlindungan anak untuk memastikan efektivitas dan menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.

B. Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Buton menunjukkan tren positif selama periode 2021–2024, dari 52,36 menjadi 59,9, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023 yang mencapai 60,07. Capaian ini mencerminkan penguatan kualitas ketahanan keluarga, baik dari aspek kemandirian, ketangguhan, maupun keharmonisan, yang tidak lepas dari implementasi berbagai program peningkatan kualitas keluarga. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024, capaian tersebut tetap

mengindikasikan bahwa Kabupaten Buton telah berhasil menjaga stabilitas pembangunan keluarga. Namun demikian, tantangan seperti pemerataan layanan di wilayah terpencil, literasi keluarga, dan kolaborasi lintas sektor masih perlu diatasi melalui pendekatan berbasis data dan nilai kearifan lokal agar pembangunan keluarga yang berkualitas dapat terus berkelanjutan.

Gambar 2.28. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Ibangga) Kabupaten Buton Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2025

C. Pembangunan Gender

Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di suatu wilayah dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Di Kabupaten Buton, IPG menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 80,18 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 82,07 pada tahun 2023 dan tetap berada pada angka yang sama di tahun 2024. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pengurangan kesenjangan gender di berbagai aspek pembangunan.

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang mengukur partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, juga menunjukkan perkembangan meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, IDG tercatat sebesar 71,41 dan menurun menjadi 68,21 pada 2021. Namun demikian, angka ini kembali meningkat menjadi 70,51 pada 2022 dan sedikit menurun menjadi 70,37 pada tahun 2023. Data untuk tahun 2024 belum tersedia, namun tren yang ada menunjukkan adanya konsistensi dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam partisipasi pembangunan Kabupaten Buton, khususnya dalam aspek kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Nilai IKG yang semakin kecil mengindikasian bahwa ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan gender semakin membaik. Pada tahun 2020, IKG berada pada angka 0,576 dan terus menurun setiap tahunnya hingga mencapai 0,469 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan menurunnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta akses terhadap pasar tenaga kerja.

Tabel 2.33. Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

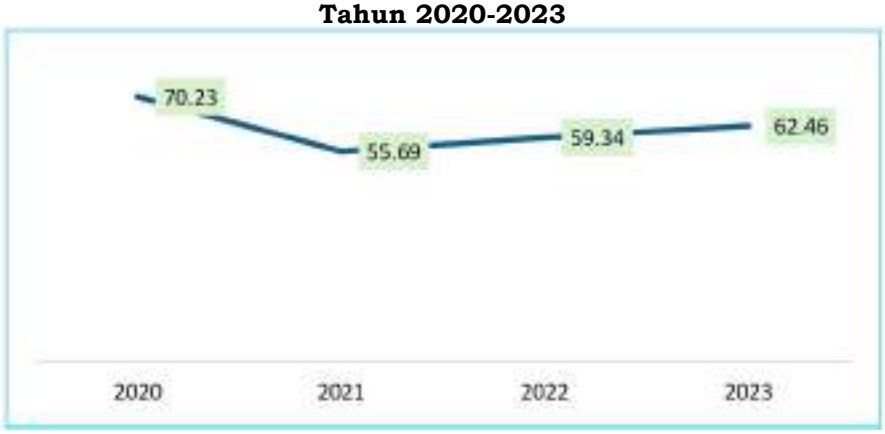
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	80,18	80,69	81,46	82,07	82,07
Indeks Pemberdayaan Gender	71,41	68,21	70,51	70,37	76,77
Indeks Ketimpangan Gender	0,576	0,571	0,541	0,528	0,469

Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025

D. Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda merupakan proses strategis untuk mengembangkan potensi, keterampilan, dan kapasitas generasi muda agar mampu berperan aktif dalam kemajuan masyarakat. Sebagai kelompok usia produktif yang berada pada rentang 15 hingga 30 tahun, pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya daerah. Di Kabupaten Buton, pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. IPP tercatat sebesar 70,23 pada tahun 2020, namun menurun tajam menjadi 55,69 di tahun 2021. Meski demikian, indeks ini mulai menunjukkan perbaikan dengan naik menjadi 59,34 di tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 62,46 pada tahun 2023. Meskipun terjadi tren positif, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan nilai pada awal periode, yang mengindikasikan perlunya penguatan program kepemudaan secara lebih terarah. Peningkatan IPP ke depan dapat ditempuh melalui perluasan akses pendidikan dan pelatihan vokasional, pemberdayaan ekonomi kreatif pemuda, peningkatan literasi digital, serta penciptaan ruang partisipasi dalam pembangunan lokal yang inklusif.

Gambar 2.29 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Buton Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Buton, 2020-2023

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Daya saing ini melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana daerah tersebut dapat mengembangkan keunggulan kompetitif dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun dalam melihat daya saing daerah, terdapat indikator Indeks Daya Saing Daerah yang merupakan alat ukur untuk menilai dan membandingkan kemampuan suatu daerah dalam bersaing dengan daerah lain dalam berbagai aspek yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjabaran terkait daya saing daerah Kabupaten Buton:

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk bekerja adalah dengan melihat tingkat pendidikan yang ditamatkan. Dilihat dari faktor tersebut, tingkat pendidikan penduduk bekerja di Kabupaten Buton pada tahun 2024 didominasi tenaga kerja yang masih memiliki ijazah SD ke bawah dan ijazah SMA/SMK/MA. Hal ini juga dapat menggambarkan bahwa penduduk dengan pendidikan rendah lebih mudah masuk ke pasar kerja dikarenakan kebanyakan mereka cenderung tidak memilih-milih jenis pekerjaan dan bersedia masuk ke pasar kerja informal dibanding mereka yang berpendidikan menengah atau berpendidikan tinggi.

Tabel 2.34. Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2024

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Total
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah		
1.	SD/MI	19.337	302	19.639	7.819	27.458
2.	SMP/MTs	8.278	-	8.278	7.906	16.184
3.	SMA/SMK/MA	19.225	1.222	20.447	9.295	29.742
4.	Perguruan Tinggi	11.202	240	11.442	1.518	12.960
	Jumlah	58.042	1.764	59.806	26.538	86.344

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka, 2025

B. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan adalah indikator demografis yang menunjukkan beban ekonomi yang ditanggung oleh populasi usia produktif (15-64 tahun) untuk mendukung populasi usia tidak produktif, yaitu anak-anak (usia 0-14 tahun) dan orang tua (usia 65 tahun ke atas). Angka ini memberikan gambaran tentang bagaimana struktur umur suatu populasi mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Angka ketergantungan Kabupaten Buton pada tahun 2024 yaitu sebesar 53,88, yang berarti 100 orang usia produktif menanggung setidaknya 53-54 orang non-produktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Buton belum memasuki jendela bonus demografi. Namun, jika melihat tren angka ketergantungan yang sempat menurun setiap tahunnya, maka terdapat potensi bahwa Kabupaten Buton akan memasuki jendela bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan.

Bonus demografi adalah periode ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dalam suatu daerah mencapai puncaknya, sementara proporsi penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lansia) berada pada tingkat yang lebih rendah. Ini menciptakan potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, karena lebih banyak orang berada dalam usia kerja dan dapat berkontribusi pada ekonomi. Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal, diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat.

Tabel 2.35. Angka Ketergantungan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

Tahun	Umur 0-14 Tahun (ribu jiwa)	Umur		% Usia Produktif	% Usia Tidak Produktif	Rasio Beban Tanggungan
		15-64 Tahun (ribu jiwa)	>65 Tahun (ribu jiwa)			
2020	35,93	73,13	5,76	63,69	36,31	57,01
2021	35,88	74,74	5,99	64,09	35,91	56,02
2022	35,87	76,32	6,24	64,44	35,56	55,18
2023	35,89	77,82	6,51	64,73	35,27	54,48
2024	35,94	79,31	6,79	64,99	35,01	53,88

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, 2021-2025, diolah

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Arah pembangunan dalam rangka mewujudkan Iptek dan inovasi di Kabupaten Buton menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka menengah maupun panjang. Terkait dengan itu dapat digambarkan dengan beberapa aspek sebagai berikut.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto dapat digunakan sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan sekaligus sebagai barometer untuk mengukur hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja pembangunan perekonomian di wilayah tersebut.

Gambar 2.30. Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah) Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka, 2025

PDRB Kabupaten Buton mengalami peningkatan yang cukup progresif dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020 PDRB Buton mencapai hampir 3,82 trilyun rupiah dan pada tahun 2024 mencapai besaran lebih dari 5,29 trilyun rupiah. Capaian ini membuka peluang terhadap perwujudan perkembangan perekonomian makro secara merata dimana secara umum, pendapatan masyarakat diharapkan meningkat dari adanya geliat positif aktivitas perekonomian daerah.

PDRB industri pengolahan. Dalam rangka perwujudan akselerasi pembangunan ekonomi di daerah adalah dengan menciptakan kinerja ekonomi berbasis hilirisasi, khususnya pada hilirisasi potensi unggulan daerah. Hilirisasi merupakan suatu proses pengolahan suatu barang untuk meningkatkan nilai tambah sehingga lebih bernilai jual. Tujuan akhir dari hilirisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana terjadi kenaikan produktivitas tenaga kerja. Namun pada prosesnya, rasio PDRB industri pengolahan yang memperlihatkan adanya penurunan daya saing sektor tersebut dalam struktur ekonomi Kabupaten Buton masih belum optimal.

Tabel 2.36. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Pengolahan	2,48	2,52	2,50	2,06	2,5

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka, 2025

PDRB Makan dan Minum. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terdiri dari Penyediaan Akomodasi baik berbintang maupun tidak berbintang serta penyediaan makan minum termasuk diantaranya restoran/rumah makan dan warung makan. Kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum Kabupaten Buton masih sangat rendah, yakni hanya berkisar antara 0,13 persen pada tahun 2020 hingga 2022, dan menurun menjadi 0,12 persen pada tahun 2023 dan 2024 terhadap struktur ekonomi wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi sektor pariwisata belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Tabel 2.37. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka, 2025

B. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Kabupaten Buton pada tahun 2024 sebesar 3,38, menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan guna mendorong daya saing wilayah secara lebih optimal. Beberapa pilar masih menunjukkan nilai indeks yang relatif rendah, seperti pilar kapabilitas inovasi dengan nilai 2,25, sistem keuangan dengan nilai 2,77, serta pasar tenaga kerja dengan nilai 3,02. Nilai-nilai ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih pada aspek inovasi dan penguatan sektor keuangan. Di sisi lain, terdapat pula pilar-pilar yang menunjukkan kinerja yang cukup baik, mencerminkan potensi daya saing daerah yang bisa terus dikembangkan. Pilar dengan nilai tertinggi adalah pilar keterampilan dengan nilai 4,16, disusul dinamisme bisnis sebesar 4,09, dan institusi dengan nilai 3,94. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kapasitas SDM dan kelembagaan, Kabupaten Buton memiliki pondasi yang cukup kuat untuk menopang pembangunan berdaya saing di masa depan.

Gambar 2.31. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024



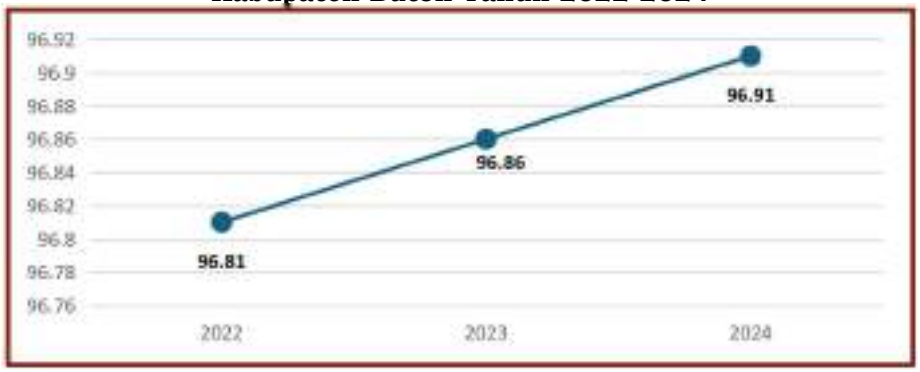
Sumber: BRIN, Tahun 2024

C. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Buton menunjukkan tren yang stabil dan positif selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, persentase pertumbuhan IKM tercatat sebesar 96,81 persen, dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 96,86 persen di tahun 2023. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2024, di mana persentase pertumbuhan IKM mencapai 96,91 persen. Kestabilan angka ini mencerminkan ketahanan serta konsistensi sektor IKM dalam berkontribusi terhadap perekonomian daerah, meskipun tantangan global dan domestik terus berkembang.

Pertumbuhan yang tinggi ini juga menjadi indikator kuat bahwa sektor IKM merupakan salah satu pilar utama dalam memperkuat struktur ekonomi lokal, sekaligus menjadi wadah produktivitas dan kewirausahaan masyarakat. Dengan mendorong pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan penguatan kapasitas pelaku usaha, sektor IKM diharapkan terus berkembang secara berkelanjutan dan mampu menjadi penggerak transformasi ekonomi daerah yang inklusif.

Gambar 2.32. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Kabupaten Buton Tahun 2022-2024



Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025

Pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Buton menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada akhir tahun 2022, perkembangan di Kabupaten Buton menunjukkan peningkatan, khususnya pada kategori usaha mikro. Dari total 7 (tujuh) kecamatan yang ada, jumlah usaha mikro meningkat dari 3.594 unit pada tahun 2021

menjadi 3.878 unit pada tahun 2022, atau mengalami peningkatan sebesar 284 unit. Sementara itu, jumlah usaha kecil dan usaha menengah tidak mengalami perubahan, masing-masing tetap sebanyak 776 dan 96 unit. Peningkatan usaha mikro terbesar terjadi di Kecamatan Pasarwajo dengan penambahan 166 unit usaha, disusul Kecamatan Lasalimu sebanyak 57 unit, dan Kapontori sebanyak 19 unit. Kenaikan yang terjadi di hampir seluruh kecamatan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan semakin tumbuh, khususnya pada skala usaha mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Stabilnya jumlah usaha kecil dan menengah menandakan adanya kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan pembinaan agar pelaku usaha mikro dapat naik kelas. Secara umum, data ini mencerminkan penguatan struktur ekonomi lokal Kabupaten Buton melalui pertumbuhan UMKM yang merata di berbagai wilayah kecamatan.

Tabel 2.38. Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Buton Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Peningkatan 2022		
		Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Pasar-wajo	1,619	450	36	1785	450	36	166	0	0
2	Sio-tapina	613	36	46	625	36	46	12	0	0
3	Lasa-limu	266	70	2	323	70	2	57	0	0
4	Lasa-limu S.	213	71	7	218	71	7	5	0	0
5	Wolowa	172	42	2	189	42	2	17	0	0
6	Wabula	615	29	1	623	29	1	8	0	0
7	Kapon-tori	96	78	2	115	78	2	19	0	0
	Jumlah	3,594	776	96	3878	776	96	284	0	0

Sumber: Dinas Koperasi, UKM Kab. Buton, 2021-2022

Peningkatan UMKM juga diikuti dengan peningkatan pelaku usaha UMKM yang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 4.310 unit UMKM, yang kemudian meningkat menjadi 4.466 unit pada 2021, 4.750 unit pada 2022, dan melonjak signifikan menjadi 5.824 unit pada 2023. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan jumlah UMKM mencapai 5.876 unit. Pertumbuhan ini mencerminkan semakin kuatnya peran UMKM sebagai penggerak utama ekonomi lokal, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewirausahaan. Berikut trend perkembangan pelaku usaha di Kabupaten Buton selama tahun 2020-20224.

Gambar 2.33. Perkembangan Data Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

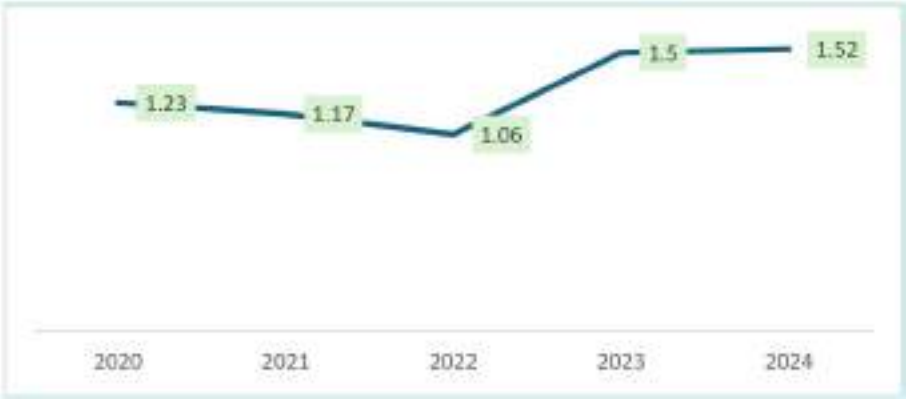


Sumber: Dinas Koperasi, UKM Kab. Buton, 2020-2024

D. Rasio Kewirasusahaan

Rasio kewirausahaan Kabupaten Buton dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2020, rasio kewirausahaan tercatat sebesar 1,23 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 1,17 di tahun 2021, kemudian turun lebih lanjut ke titik terendah sebesar 1,06 pada tahun 2022. Namun, sejak tahun 2023, tren ini berbalik arah dengan peningkatan tajam mencapai 1,50, dan kembali naik tipis menjadi 1,52 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan mulai pulihnya iklim usaha mikro dan kecil setelah tekanan pandemi, serta meningkatnya dukungan pemerintah daerah melalui program pelatihan, permodalan, dan pendampingan UMKM. Meski angka rasio tersebut masih berada di bawah standar ideal nasional (2%), progres ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buton memiliki potensi kewirausahaan yang cukup menjanjikan dan perlu terus didorong sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Gambar 2.34. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



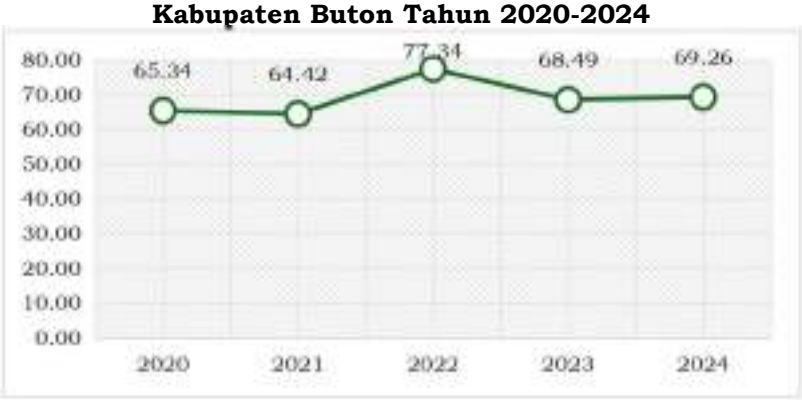
Sumber: Dinas Koperasi, UKM Kab. Buton, 2020-2024

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang didalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan

namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Adapun capaian secara umum, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Buton mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2024 mencapai 69,26 jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 65,34. Namun, pada tahun 2024 ini masih lebih rendah jika dibandingkan tahun 2022 yang sempat mencapai angka 77,34. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian untuk pemerintah setempat agar memberikan kebijakan-kebijakan tertentu yang dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Gambar 2.35. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Piusat Statistik Kabupaten Buton, 2025

F. Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan salah satu kunci untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat, inovasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Adapun pencapaian inovasi di Kabupaten Buton secara umum meningkat hingga pada tahun 2024 memiliki capaian sebesar 44,29 dengan kategori Inovatif.

Gambar 2.36. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021-2024



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan prinsip ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Buton terus diintegrasikan dalam pembangunan ekonomi daerah guna mendorong pertumbuhan yang selaras dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan ini tercermin dalam penguatan sektor-sektor ekonomi yang berbasis sumber daya alam, khususnya pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Buton menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup dinamis sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, sektor ini mengalami kontraksi sebesar -0,79 persen, namun mulai pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 3,34 persen, lalu melonjak tajam menjadi 11,08 persen pada 2022. Meskipun terjadi perlambatan di tahun-tahun berikutnya, sektor ini tetap mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,60 persen pada 2023 dan 2,83 persen pada 2024, mencerminkan ketahanan sektor primer dalam menopang perekonomian daerah.

Dari sisi kontribusi terhadap struktur PDRB, sektor ini masih memegang peran strategis. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB tercatat sebesar 20,17 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 19,96 persen di tahun 2021 dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 20,87 persen. Kontribusi sektor ini mulai meningkat kembali menjadi 21,66 persen pada tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian tetap menjadi pilar strategis perekonomian Kabupaten Buton, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun nasional, serta mendukung keberlanjutan pembangunan berbasis sumber daya lokal.

Pada pengembangan ekonomi biru yang fokus pada pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir juga terus diperkuat. Target Indeks Ekonomi Biru yang ditetapkan sebesar 49,72 menjadi indikator bahwa Kabupaten Buton menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan sumber daya kelautan secara inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencapai 10,66% pada tahun 2021, meningkat menjadi 12,11% pada 2022, dan meskipun sedikit menurun ke angka 11,80% pada tahun 2023, tetap menunjukkan peran penting sektor ini dalam struktur ekonomi daerah. Capaian tersebut mencerminkan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan tulang punggung ekonomi biru di Buton, dengan potensi besar untuk dikembangkan melalui penguatan infrastruktur pelabuhan, modernisasi sarana tangkap, serta pengelolaan kawasan konservasi laut dan budidaya berkelanjutan.

Peningkatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan di Kabupaten Buton didukung dengan peningkatan yang cukup signifikan pada kontribusi seluruh sektor PDRB selain pertambangan dan penggalian dimana pada tahun 2020 sebesar 61,24 persen dan meningkat cukup signifikan menjadi 65,45 persen pada tahun 2024. Menurunnya kategori pertambangan dan penggalian tentu menjadi progress positif bagi penerapan ekonomi hijau dan biru dalam pembangunan karena perekonomian daerah menjadi lebih terbaharukan. Meskipun demikian, harapannya kondisi ini tidak membuat gejolak perekonomian yang signifikan bagi iklim ekonomi di Kabupaten Buton secara umum.

Secara keseluruhan, Kabupaten Buton berada dalam lintasan yang tepat untuk mengintegrasikan agenda hijau dan biru dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adaptif, dan berwawasan lingkungan.

Tabel 2.39. Capaian Perekonomian Terbaharukan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	-0,79	3,34	11,08	3,60	2,83
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	20,17	19,96	20,87	20,71	21,66
Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian	61,24	61,26	61,26	60,65	65,45

Sumber: PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024

Dalam konteks ini, penerapan ekonomi hijau dan biru turut memberikan dampak positif terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Buton. Banyak pelaku UMKM yang bergerak dalam sektor pertanian organik, perikanan tangkap ramah lingkungan, pengolahan hasil laut berbasis kearifan lokal, serta ekowisata mulai menunjukkan peningkatan produktivitas dan jangkauan pasar. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan peluang usaha yang lebih luas di sektor-sektor ramah lingkungan. Keberadaan UMKM ini berperan penting dalam menstimulasi perekonomian lokal, mengurangi ketimpangan, serta secara tidak langsung membantu menekan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Buton.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital memainkan peran penting dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat daya saing global. Dengan mengadopsi teknologi digital, proses administrasi pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Di sektor ekonomi, digitalisasi membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang melalui e-commerce, fintech, dan inovasi teknologi lainnya. Infrastruktur digital yang kuat juga mendukung peningkatan konektivitas antarwilayah, sehingga mempercepat distribusi informasi, barang, dan jasa. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan berkualitas, baik melalui platform pembelajaran daring maupun sistem telemedicine. Pembangunan yang berbasis digital juga mendorong keberlanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam serta menciptakan solusi ramah lingkungan.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikembangkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU) dengan nama *ICT Development Index* (ICT-DI). Indeks Pembangunan TIK merupakan ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Adapun pencapaian pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Buton diukur dengan indikator Tingkat Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir hingga mencapai 79,75 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan semakin adaptifnya masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Tabel 2.40. Capaian Perekonomian Sektor Informasi Komunikasi Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi	67,27	78,00	78,18	78,96	79,75
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Informasi Komunikasi (%)	9,38	2,97	9,40	3,99	10,73
Kontribusi PDRB Kategori Informasi Komunikasi (%)	0,29	0,28	0,28	0,26	0,28

Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025

Adapun pencapaian ekonomi pada sektor informasi dan komunikasi yang menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan transformasi digital di Kabupaten Buton, masih menunjukkan kinerja yang belum optimal dari sisi kontribusi terhadap PDRB. Pada tahun 2024, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 0,28 persen, angka yang relatif stagnan

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan bahkan sempat menurun menjadi 0,26 persen pada 2023. Meskipun kontribusinya masih terbatas, pertumbuhan ekonomi sektor informasi dan komunikasi menunjukkan tren yang positif dan menjanjikan. Setelah mencatat pertumbuhan sebesar 9,38 persen pada 2020, sektor ini terus tumbuh dengan capaian 2,97 persen pada 2021, 9,40 persen di 2022, 3,99 persen pada 2023, dan kembali melonjak menjadi 10,73 persen di tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi keseluruhan daerah.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

. Integrasi ekonomi domestik dan global dalam pembangunan daerah menjadi pendorong penting bagi peningkatan produktivitas ekonomi lokal yang terhubung dengan rantai pasok nasional maupun internasional. Arah kebijakan ini tercermin melalui indikator-indikator utama seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Net Ekspor Barang dan Jasa, yang terlihat dalam struktur dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran.

Di Kabupaten Buton, capaian pembangunan dalam hal investasi fisik melalui PMTB menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup stabil pasca pandemi COVID-19. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -0,99 persen akibat perlambatan investasi selama masa pandemi, PMTB berhasil tumbuh secara berkelanjutan dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar 0,48 persen di 2021, 5,09 persen di 2022, 5,30 persen di 2023, dan meningkat menjadi 5,57 persen pada tahun 2024.

Namun demikian, kontribusi PMTB terhadap struktur PDRB Kabupaten Buton cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Dari yang sebelumnya sebesar 37,07 persen di tahun 2020, sempat turun ke angka terendah 32,51 persen di tahun 2023, dan kembali naik menjadi 35,84 persen pada 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika investasi barang modal seperti bangunan, infrastruktur, serta mesin dan peralatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Net Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Buton masih menunjukkan angka negatif selama periode 2020–2024, yang berarti nilai impor barang dan jasa lebih tinggi dibandingkan ekspor. Pada tahun 2024, kontribusi net ekspor bahkan tercatat sebesar -11,91 persen terhadap struktur PDRB, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya -0,95 persen. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam penguatan kapasitas produksi lokal dan daya saing daerah dalam pasar domestik maupun global.

Tabel 2.41. Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

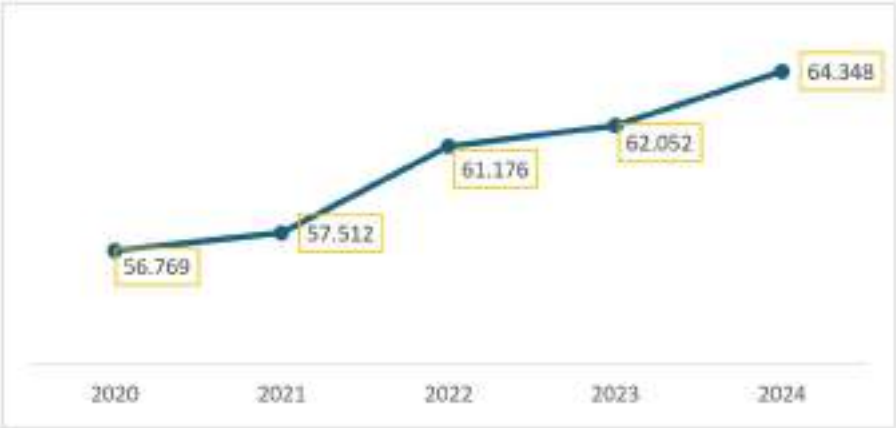
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,99	0,48	5,09	5,30	5,57
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	37,07	37,50	34,00	32,51	35,84
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-10,46	-8,64	-0,95	-1,62	-11,91

Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, menjadi salah satu strategi utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Buton. Pembangunan kawasan perkotaan diarahkan untuk menjadi pusat jasa dan perdagangan yang maju, inklusif, dan berkelanjutan, sementara perdesaan didorong untuk tumbuh mandiri melalui optimalisasi potensi lokal. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan wilayah ini tercermin dalam peningkatan Indeks Infrastruktur Kabupaten Buton yang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Indeks ini naik dari 56,769 pada tahun 2020 menjadi 57,512 pada 2021, kemudian meningkat lagi menjadi 61,176 pada 2022, dan terus mengalami peningkatan menjadi 62,052 di tahun 2023 da menjadi 64,348 di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan hasil dari investasi infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya, yang menjadi fondasi penting dalam mendukung konektivitas wilayah, akses layanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton.

Gambar 2.37. Indeks Infrastruktur Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PUPR, Dinas PERKIM Kabupaten Buton, 2020-2024

Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Wilayah Kabupaten Buton sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan bidang-bidang lainnya. Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, drainase dan lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas. Di Kabupaten Buton terjadi peningkatan kualitas poros jalan kabupaten dengan capaian jalan dalam kondisi baik sebesar 47,04 persen dan panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar 53,08 pada tahun 2024. Selain itu, terdapat pula beberapa capaian indikator infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan daya saing daerah seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.42. Capaian Infrastruktur Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan kabupaten	Km	482,27	482,27	482,27	482,27	482,27
2	Panjang jalan kondisi baik	Km	171,98	176,015	186,879	203,985	219,765
3	Panjang jalan kondisi sedang	Km	30,69	36,581	34,385	32,115	29,16
4	Panjang jalan rusak ringan	Km	69,75	143,735	62,67	54,07,	17,6
5	Panjang jalan rusak berat	Km	209,85	125,939	198,32	192,1	215,75

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
6	Persentase jalan kondisi mantap	%	42,02	44,08	45,89	48,96	51,62
7	Persentase jalan kondisi tidak mantap	%	57,98	55,92	54,11	51,04	48,38
8	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	35,66	36,50	38,75	42,30	45,57
9	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	M/org	4,05	4,04	4,02	4,00	3,96
10	Tingkat kemantapan jaringan jalan	%	42,02	44,08	45,89	48,96	51,62
11	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	M/org	4,05	4,04	4,02	4,00	3,96
12	Panjang jalan provinsi :	Km	NA	41,7	41,55	41,55	NA
	Panjang jalan kondisi baik	Km	NA	30,7	39,15	38,55	NA
13	Panjang jalan kondisi sedang	Km	NA	8,4	0	3	NA
14	Panjang jalan rusak ringan	Km	NA	1,6	2,4	0	NA
15	Panjang jalan rusak berat	Km	NA	1	0	0	NA
16	Panjang jalan nasional :	Km	NA	NA	206,5	206,5	206,5
17	Panjang jalan kondisi baik	Km	NA	NA	62,94	38,20	55,82
18	Panjang jalan kondisi sedang	Km	NA	NA	134,28	162,33	147,03
19	Panjang jalan rusak ringan	Km	NA	NA	9,02	5,9	3,6
20	Panjang jalan rusak berat	Km	NA	NA	0,2	0	0
21	Panjang jembatan	M	666	666	666	666	666
22	Lebar jembatan	M	480,230	480,230	480,230	480,230	480,230
23	Jumlah jembatan	Buah	86	86	86	86	86
24	Jumlah jembatan kondisi baik berdasarkan konstruksi bangunan atas	Buah	5	5	5	5	5
25	Jumlah jembatan kondisi kerusakan kecil berdasarkan konstruksi bangunan atas	Buah	79	79	79	5	5
26	Jumlah jembatan kondisi rusah ringan berdasarkan konstruksi bangunan atas		2	2	2	5	5
27	Jumlah jembatan berdasarkan konstruksi bangunan atas yang butuh pemantauan	Buah	10	10	10	5	5
28	Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum SPAM	RT	22.787	22.890	22.985	23.250	24.422
29	Persentase RT pengguna air minum	%	83,6	83,14	82,65	82,77	86,07
30	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	94,5	95,6	95,86	99,39	81,22
31	Jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi aman	RT	21.911	22.961	23.261	23.803	24.260
32	Jumlah RT yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	RT	21.911	22.961	23.261	23.803	24.260
33	Rumah tangga dengan sanitasi aman	%	80,39	83,4	83,64	84,74	85,50
34	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	80,39	83,4	83,64	84,74	85,50
35	Jumlah total RT	RT	27.257	27.532	27.810	28,091	28.375
36	Panjang drainase	M	6.015,12	6.015,12	6.015,12	6.015,12	6.015,12
37	Drainase kondisi baik	M	3.289,85	4.192,12	4.728,12	4.963,12	5.112,85
38	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	54,69	69,69	78,60	82,51	85
39	Luas irigasi kabupaten	Ha	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
40	Jaringan irigasi primer	M	5,456.7	5,456.7	5,456.7	5,456.7	5,456.7
41	Jaringan sekunder	M	29,342	29,342	29,342	29,342	29,342
42	Jaringan tersier	M	18,120.3	18,120.3	18,120.3	18,120.3	18,120.3
43	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	46,90	47,00	60,00	36,00	42,28
44	Rasio panjang irigasi persawahan dalam kondisi baik	Ha	889	869	903	784	790
45	Jumlah sertifikasi tenaga konstruksi	Org	-	105	50	31	0
46	Jumlah sosialisasi informasi jasa konstruksi	Keg.	1	1	1	1	1
47	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	56	30	9	13	8
48	Jumlah pelabuhan rakyat	Unit	20	20	20	20	20
49	Jumlah pelabuhan penyebrangan	Unit	1	1	1	1	1
50	Jumlah pelabuhan lokal	Unit	1	1	1	1	1
51	Jumlah pelabuhan regional	Unit	1	1	1	1	1
52	Jumlah pelabuhan transmigrasi	Unit	1	1	1	1	1
53	Jumlah pelabuhan khusus	Unit	2	2	2	2	2
54	Jumlah pelabuhan study	Unit	1	1	1	1	1
55	Jumlah terminal type B	Unit	-	-	1	1	1

Sumber: Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, 2020-2024

Perumahan layak huni merujuk pada hunian yang memenuhi standar tertentu untuk memastikan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keberlanjutan bagi penghuninya. Standar perumahan layak huni biasanya mencakup berbagai aspek fisik, sosial, dan lingkungan sehingga masyarakat dapat beraktivitas secara optimal. Namun pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buton, belum seluruh masyarakat mampu memiliki akses terhadap hunian layak dimana pada tahun 2024 sebesar 70,26 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak. Selain itu pula di Kabupaten Buton masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten sebesar 79,59 Ha dari total luasan kawasan kumuh Kabupaten Buton sesuai SK Bupati tahun 2022 sebesar 227,04 Ha, dan yang baru tertangani sampai tahun 2024 sebesar 5,34%. Meski belum optimal, capaian ini layak diapresiasi karena peningkatan hunian layak di Kabupaten Buton cukup tinggi pada empat tahun terakhir.

Gambar 2.38. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perumahan danPermukiman Kab.. Buton, 2020-2024

Tabel 2.43. Capaian Infrastruktur Perumahan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah	Unit	22.937	24.869	24.869	24.869	24.869
2	Jumlah rumah layak huni	Unit	13.842	15.111	17.205	17.402	17.506
3	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	8.001	7.826	7.664	7.467	7.397
4	Persentase rumah layak huni	%	63,37	65,88	69,18	69,97	70,26
5	Persentase rumah tidak layak huni	%	36,63	34,12	30,82	30,03	28,99
6	Jumlah rumah	Unit	22.937	24.869	24.869	24.869	24.869
7	Backlog Rumah	Unit	5.642	4.816	3.506	3.506	3.485

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Buton, 2020- 2024

Tabel 2.44. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Buton

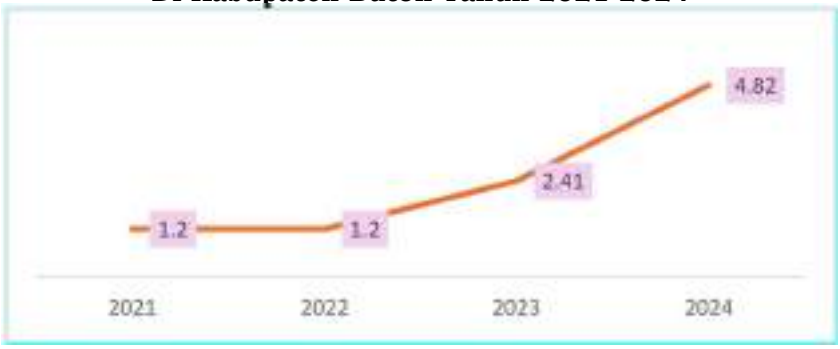
No.	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Kel/ Desa	Kec.	Kekumuhan		Prioritas
					Nilai	Tingkat	
1	Barangka	4,71	Barangka	Kapontori	65	Kumuh Sedang	Prioritas 2
2	Boneatiro	11,85	Boneatiro	Kapontori	64	Kumuh Sedang	Prioritas 2
			Boneatiro Barat	Kapontori			
3	Wakangka	6,14	Kel. Wakangka	Kapontori	65	Kumuh Sedang	Prioritas 5
4	Watumotobe	6,84	Kel. Watumotobe	Kapontori	64	Kumuh Sedang	Prioritas 2
5	Bonelalo	4,3	Bonelalo	Kapontori	69	Kumuh Sedang	Prioritas 5
6	Kamaru	9,7	Kel. Kamaru	Lasalimu	67	Kumuh Sedang	Prioritas 2
7	Lasembangi	2,01	Lasembangi	Lasalimu	42	Kumuh Ringan	Prioritas 6
8	Lawele	6,71	Lawele	Lasalimu	43	Kumuh Ringan	Prioritas 6
9	Talaga Baru	4,17	Talaga Baru	Lasalimu	87	Kumuh Berat	Prioritas 4
10	Kabawakole	10,5	Kabawakole	Pasarwajo	55	Kumuh Sedang	Prioritas 5
			Kancinaa	Pasarwajo			
11	Bahari Makmur	4,98	Bahari Makmur	Siotapina	87	Kumuh Berat	Prioritas 3
12	Kumbewaha	3,43	Kumbewaha	Siotapina	69	Kumuh Sedang	Prioritas 2
13	Bajo Bahari	4,48	Bajo Bahari	Wabula	83	Kumuh Berat	Prioritas1
14	Wabula	10,13	Wabula	Wabula	49	Kumuh Sedang	Prioritas 2
			Wabula 1	Wabula			
15	Wasampela	4,24	Wasampela	Wabula	77	Kumuh Berat	Prioritas 7
16	Balimu	5,26	Balimu	Lasalimu Selatan	83	Kumuh Berat	Prioritas 4
17	Wolowa	4,27	Wolowa	Wolowa	69	Kumuh Berat	Prioritas 2
18	Dawanawajo I	34,13	Saragi	Pasarwajo	90	Kumuh Berat	Prioritas 1
			Wakoko	Pasarwajo			
19	Dawanawajo II	21,2	Pasarwajo	Pasarwajo	90	Kumuh Berat	Prioritas 2
			Kambulabulana	Pasarwajo			
20	Dawanawajo III	20,89	Takimpo	Pasarwajo	66	Kumuh Sedang	Prioritas 2
			Kombeli	Pasarwajo			
			Awainulu	Pasarwajo			
			Laburunci	Pasarwajo			
21	Dawanawajo IV	10,29	Wagola	Pasarwajo	66	Kumuh Sedang	Prioritas 2
22	Dawanawajo V	28,46	Dongkala	Pasarwajo	66	Kumuh Sedang	Prioritas 2
			Kondowa	Pasarwajo			
23	Wagari	1,79	Wagari	Lasalimu	43	Kumuh Ringan	Prioritas 6
24	Wasuamba	3,08	Wasuamba	Lasalimu	69	Kumuh Sedang	Prioritas 2
25	Benteng (Ds. Bajo)	1,53	Benteng	Lasalimu	95	Kumuh Berat	Prioritas 1

No.	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Kel/ Desa	Kec.	Kekumuhan		Prioritas
26	Benteng (Ds. Lapuli)	1,95	Benteng	Lasalimu	57	Kumuh Sedang	Prioritas 5
	Total Luas Kumuh	227,04					
	Total Luas Kumuh Kewenangan Kabupaten	79,59					
	Total Luas Kumuh Kewenangan Provinsi	42,77					
	Total Luas Kumuh Kewenangan Pusat	104,68					

Sumber : SK Bupati Buton Nomor 377 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh Kab. Buton

Desa Mandiri adalah desa yang memiliki ketersediaan dan akses yang memadai terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, transportasi, pelayanan umum, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Di Kabupaten Buton, peningkatan jumlah Desa Mandiri menunjukkan tren yang positif meskipun masih memerlukan percepatan. Pada tahun 2021 dan 2022, persentase Desa Mandiri masih stagnan di angka 1,2%, kemudian meningkat menjadi 2,41% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, lonjakan signifikan terjadi dengan capaian persentase mencapai 4,82%, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas tata kelola desa dan penyediaan layanan dasar. Meskipun angka ini masih relatif rendah dibandingkan total 83 desa yang ada, progres tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan dan pembangunan desa mulai menunjukkan hasil. Ke depan, diperlukan langkah-langkah strategis dan terpadu untuk mendorong lebih banyak desa menuju status mandiri melalui penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan akses infrastruktur dasar, dan integrasi program pembangunan berbasis potensi lokal.

Gambar 2.39 Perkembangan Desa Mandiri (%)
Di Kabupaten Buton Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton, 2024

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan. Stabilitas ekonomi makro juga merupakan fondasi utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan wilayah. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, ditandai oleh inflasi yang terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, serta defisit fiskal dan neraca perdagangan yang terkelola dengan baik, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Stabilitas ini menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Adapun capaian rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Buton masih belum optimal dimana pada tahun 2024 hanya mencapai 1,54 persen. Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 1,24, namun rasio pajak ini meningkat kembali di tahun 2023 dan tahun 2024. Belum optimalnya pajak daerah ini mengindikasikan rendahnya kepatuhan pajak, lemahnya sistem administrasi perpajakan, atau tingginya tingkat ekonomi informal yang belum terjangkau oleh sistem perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kebijakan perpajakan dengan cara memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan, serta memberikan insentif bagi sektor-sektor produktif agar tetap tumbuh tanpa terbebani pajak yang berlebihan.

Gambar 2.40. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)
Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Buton, BPKAD Kab. Buton, 2024

Stabilitas ekonomi makro daerah juga dapat dilihat dari capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dari suatu daerah. Dimana IKAD adalah sebuah alat ukur yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memetakan kondisi inklusi keuangan di berbagai daerah di Indonesia. IKAD bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai akses keuangan, termasuk penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman sektor jasa keuangan di setiap daerah. Pengurukuran IKAD memiliki tujuan untuk memetakan kondisi inklusi keuangan yang dapat membantu mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki akses keuangan terbatas dan kelompok masyarakat yang belum terjangkau keuangan formal, sehungga dengan memahami kondisi akses keuangan disetiap daerah, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Sulawesi Tenggara menunjukan capaian IKAD Kabupaten Buton tahun 2024 baru mencapai 5,84. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya inklusi keuangan di Kabupaten Buton, sehingga diperlukan akselerasi kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Buton dan upaya-upaya yang lebih intensif, seperti peningkatan literasi keuangan, perluasan jangkauan layanan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong inklusi keuangan yang lebih merata di Kabupaten Buton.

Pada pengukuran inklusi keuangan, Kabupaten Buton juga melihat dari sisi capaian Kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi terhadap PDRB Kabupaten Buton selama periode 2020 hingga 2024 cenderung fkuktuatif dengan capaian tahun terakhir menurun. Pada tahun 2020, proporsi PDRB dari sektor ini tercatat sebesar 0,66 persen dan meningkat menjadi 0,72 persen pada tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2023 sempat mengalami kenaikan menjadi 0,73 persen dan menurun menjadi 0,68 persen pada tahun 2024.

Meskipun sektor jasa keuangan belum menjadi sektor dominan dalam struktur perekonomian daerah, perannya tetap penting dalam mendukung aktivitas ekonomi,

khususnya dalam hal intermediasi keuangan dan pembiayaan usaha. Peningkatan daya saing sektor ini ke depan perlu didorong melalui perluasan akses layanan keuangan dan literasi keuangan masyarakat. Berikut gambaran capaian proporsi PDRB jasa keuangan dna asuransi Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 :

Gambar 2.41. Proporsi PDRB Jasa keuangan dan Asuransi Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025

Selain itu, Stabilitas maksro daerah juga diukur dari tingkat Inflasi. Inflasi yang tinggi merupakan salah satu fenomena dalam perekonomian yang dapat menekan daya beli masyarakat dan menurunkan pendapatan rill masyarakat. Inflasi dapat di lihat dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang tinggi merupakan salah satu fenomena dalam perekonomian yang dapat menekan daya beli masyarakat dan menurunkan pendapatan rill masyarakat.

Inflasi di Kabupaten Buton (pendekatan Kota Baubau) tahun 2020 mencapai nilai tertinggi sebesar 1.73 persen. Angka inflasi tersebut bahkan lebih tinggi dari inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara (0.45 persen). Pada tahun 2021, Inflasi mengalami penurunan menjadi sebesar 0,08 persen, lebih rendah dari inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,28 persen, sedangkan pada akhir Desember 2022 inflasi Kota Baubau meningkat 8,65 persen, lebih tinggi dari capaian provinsi sebesar 7,59 persen akibat adanya kemahalan harga-harga barang yang disebabkan karena kurangnya produksi serta rantai distribusi yang terganggu, dan pada Desember 2023 terjadi inflasi kota Baubau (yoy) sebesar 2,48 persen lebih rendah dari inflasi provinsi pada Desember 2023 sebesar 2,58 persen. Selanjutnya pada Desember 2024, inflasi kota Baubau (yoy) menurun pada angka 2,07 atau turun 0,41 point. Berikut gambaran laju inflasi Kota Bubau dan provini Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024.

Gambar 2.42. Pergerakan Laju Inflasi Tahunan Kota Baubau dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Prop. Sultra Tahun 2025

Kabupaten Buton hingga saat ini belum ditetapkan sebagai daerah perhitungan inflasi resmi oleh BPS, sehingga data inflasi bulanan tidak tersedia. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Buton bersama BPS sejak November 2022 menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai instrumen alternatif untuk membaca arah pergerakan harga.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) merupakan indikator statistik yang digunakan untuk memantau pergerakan harga barang kebutuhan pokok dan penting di pasar. Berbeda dengan inflasi, yang dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) pada wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS), IPH digunakan bagi daerah yang belum menjadi kota sampel inflasi. Indeks Perkembangan Harga (IPH) merupakan indikator statistik yang digunakan untuk memantau pergerakan harga barang kebutuhan pokok dan penting di pasar. Berbeda dengan inflasi, yang dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) pada wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS), IPH digunakan bagi daerah yang belum menjadi kota sampel inflasi.

Dengan demikian, meskipun tidak memiliki data inflasi resmi, analisis IPH mampu memberikan gambaran yang cukup representatif tentang dinamika harga di Kabupaten Buton. Hasil analisa IPH ini menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi daerah, termasuk operasi pasar, penguatan cadangan pangan, serta koordinasi distribusi lintas wilayah untuk menjaga daya beli masyarakat. Gambaran pergerakan IPH Bulanan Kabupaten Buton tahun 2022-2025 disajikan pada grafik berikut ini:

Gambar 2.43. Pergerakan Laju IPH Tahunan Kabupaten Buton Tahun 2022-2024



	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
2024	0.072	-2.615	3.300	-3.210	-1.880	1.190	-2.380	-1.610	-0.690	0.300	1.310	-0.250
2023	-0.954	1.398	-1.715	-0.921	1.514	0.598	0.322	-0.512	-0.995	0.846	2.356	1.477
2022											0.235	0.070

Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2024

Merujuk grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 Pergerakan IPH menunjukkan pola musiman dengan fluktuasi tajam menjelang Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, serta akhir tahun. Lonjakan terjadi pada bulan Februari (1,39), Mei (1,51), Juni (0,59), Oktober (0,85), November (2,36), dan Desember (1,47). Puncak IPH tercatat di bulan November (2,36) yang dipengaruhi oleh kombinasi Natal, Tahun Baru, serta pesta adat lokal yang meningkatkan permintaan pangan dan jasa transportasi. Sementara itu, deflasi terjadi pada bulan Maret, April, dan September. Hal ini mengindikasikan bahwa perayaan keagamaan dan pesta adat menjadi faktor dominan dalam memengaruhi dinamika IPH Kabupaten Buton.

Sedang IPH tahun 2024 lebih berfluktuasi dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Maret (3,30) bertepatan dengan Ramadan, diikuti kenaikan signifikan pada bulan Juni (1,19) menjelang Idul Adha. Sebaliknya, deflasi tajam terlihat di bulan Februari (–2,61), April (–3,21), Mei (–1,88), Juli (–2,38), dan Agustus (–1,61). Kondisi ini menunjukkan pasokan pangan relatif terkendali setelah momen keagamaan, sementara permintaan melonjak tinggi saat memasuki Ramadan dan Idul Adha. Di akhir tahun, November (1,31) kembali menunjukkan peningkatan harga karena faktor Natal dan pesta adat lokal. Pola ini menegaskan tingginya sensitivitas IPH terhadap momentum keagamaan besar.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Buton dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut analisis data dan informasi yang menginterpretasikan aspek pelayanan umum pada pembangunan Kabupaten Buton.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 telah mengalami peningkatan yang signifikan, yang ditandai dengan peningkatan capaian indeks Reformasi Birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Buton. Berdasarkan capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Buton telah mencapai Predikat "CC" dengan kategori "CUKUP" dengan capaian Nilai sebesar 54,60 poin dimana pada angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 48,12. Capaian nilai Reformasi Birokrasi tersebut disadari oleh Pemerintah Kabupaten Buton masih harus terus melakukan perbaikan disegala bidang, namun dengan predikat yang telah dicapai saat ini juga Pemerintah Kabupaten Buton telah menunjukan upaya tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

Tabel 2.45. Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Reformasi Hukum	Indeks SAKIP	Indeks SPBE	Indeks Pelayanan Publik	Survei Penilaian Integritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Level Maturitas SPIP
2020	N/A	58,25	NA	NA	N/A	48,12	NA
2021	N/A	58,30	NA	2,49	N/A	48,63	NA
2022	56,72	61,80	1,65	3,04	67,70	52,18	II
2023	76,25	63,15	1,80	3,13	62,89	53,39	II
2024	N/A	N/A	1,94	3,21	N/A	54,60	II

Sumber: : Inspektorat, Dinas Kominfo, Bagian Hukum,Bagian Organisasi danTata Laksana Setda Kab. Buton, 2024

Dalam rangka mewujudkan transformasi digital yang mendukung peningkatan kinerja birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Buton melalui Peraturan Daerah Nomor 16

Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilakukan secara bertahap. Namun demikian, implementasinya hingga tahun 2024 belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya komitmen pimpinan daerah dalam menjadikan SPBE sebagai prioritas, serta perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang belum optimal. Tercatat, capaian indeks SPBE Kabupaten Buton meningkat secara bertahap dari 1,65 pada tahun 2022; 1,80 pada 2023; dan mencapai 1,94 pada tahun 2024.

Dari sisi pelayanan publik, capaian indikator Indeks Pelayanan Publik juga menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 2,49 pada tahun 2021, menjadi 3,04 pada 2022, lalu naik menjadi 3,13 pada 2023, dan mencapai 3,21 pada 2024.

Dari sisi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, pencapaian Kabupaten Butin cukup baik dimana terjadi peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang naik dari 58,25 pada 2020 menjadi 63,15 pada 2023. Selain itu, Indeks Reformasi Hukum yang tercatat sebesar 76,25 pada 2023 menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya pembenahan sistem hukum dan regulasi di tingkat daerah. Secara keseluruhan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, capaian indikator-indikator tata kelola pemerintahan menunjukkan tren yang positif dan perlu terus didorong melalui kebijakan yang konsisten dan terintegrasi.

Ketercapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Buton merupakan gambaran dari implementasi nyata di lapangan bahwa tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa di Kabupaten Buton masih terdapat kelemahan dalam hal perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan tata kelola yang dilakukan belum merata pada seluruh pemerintah daerah sehingga masih terjadi beberapa ketimpangan antara yang sudah menerapkan reformasi birokrasi secara komprehensif dengan yang masih stagnan dalam pelaksanaan reformasi birokrasinya.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Dalam pelaksanaan pembangunan, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Sedangkan pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.

Kondusivitas wilayah diperlukan untuk menjamin ketentraman masyarakat dan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Buton. Penanganan kasus kriminalitas menjadi prasyarat terciptanya suasana yang kondusif, di samping juga penyelesaian potensi konflik dalam masyarakat. Semakin jelasnya regulasi pemerintah pusat dalam penanganan konflik sosial pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat, kebijakan pemerintah yang telah memperhatikan analisis dampak lingkungan dan sosial, dan kesadaran masyarakat dalam upaya cegah dini dan deteksi dini menjadi faktor pendukung keberhasilan capaian.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penyelesaian penanganan kejadian kriminalitas adalah dengan meningkatkan kegiatan preventif berupa kegiatan monitoring, penjagaan dan patroli di lokasi dan waktu rawan terjadinya kriminalitas serta sosialisasi kepada masyarakat untuk menggerakkan siskamling di lingkungannya. Selain itu,

Pemerintah Kabupaten Buton juga meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat keamanan dan penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian kriminalitas.

Berdasarkan data Kabupaten Buton, jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 234 kasus dengan jumlah penduduk 115.207 jiwa, menghasilkan crime rate sebesar 203. Pada tahun 2021 tidak tersedia data jumlah kejahatan, meskipun jumlah penduduk meningkat menjadi 117.040 jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah kejahatan yang dilaporkan menurun menjadi 153 kasus dengan penduduk 119.353 jiwa sehingga crime rate turun cukup signifikan menjadi 128. Tren ini berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah kasus yang sama yaitu 153, namun jumlah penduduk bertambah menjadi 120.873 jiwa sehingga crime rate kembali sedikit menurun menjadi 127. Secara umum, data menunjukkan adanya penurunan tingkat kejahatan per jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga 2023, meskipun jumlah penduduk terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.46. Jumlah Tindak Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kejahatan yang Dialporkan	Jumlah Penduduk	Crime Rate
2020	234	115.207	203
2021	-	117.040	-
2022	153	119.353	128
2023	153	120.873	127

Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2025

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Tingkat penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Buton mengalami tren penurunan khususnya pada tahun terakhir. Pada tahun 2020 hingga 2021, penegakan Perda dan Perkada mencapai tingkat yang optimal dengan capaian 100 persen. Tren penurunan mulai signifikan pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 88,88 persen, dan terus menurun menjadi 70,00 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam memastikan seluruh produk hukum daerah dapat ditegakkan secara konsisten. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi antara lain adalah keterbatasan sumber daya pengawasan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum daerah, peningkatan kualitas regulasi, serta strategi yang adaptif dalam implementasi Perda dan Perkada agar efektivitas hukum daerah dapat terjaga dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Gambar 2.44. Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan Di Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: Satpol PP Kabupaten Buton, Tahun 2024

2.1.4.4 Kerja Sama daerah

Kerja sama daerah merupakan upaya strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buton untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan memperluas jangkauan pelayanan publik. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Kabupaten Buton aktif membangun kolaborasi baik antar daerah, dengan pihak ketiga, maupun dengan lembaga di luar negeri. Kerja sama ini mencakup berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pengembangan pariwisata, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai daerah kepulauan dengan potensi kelautan dan pariwisata yang besar, Kabupaten Buton menjalin sinergi dengan daerah-daerah sekitar untuk pengembangan kawasan strategis regional. Selain itu, Pemerintah Daerah juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan organisasi non-pemerintah guna memperkuat inovasi dan tata kelola pembangunan. Melalui semangat kolaborasi yang berkelanjutan, kerja sama daerah diharapkan menjadi katalis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Buton. Kerjasama daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47. Kerja Sama Daerah
Tahun 2020-2024

2020		2021		2022		2023		2024	
Mitra Kerja Sama	**Judul PKS**	**Mitra Kerja Sama**	**Judul PKS**	**Mitra Kerja Sama**	**Judul PKS**	**Mitra Kerja Sama**	**Judul KESBER**	**Mitra Kerja Sama**	**Judul KESBER**
PT. PLN (Persero)	Pemungutan dan penye-toran Pajak penerangan jalan dan pembayaran rek. Listrik Peme-rintah	PT. Bank Rakyat Indo-nesia (Persero Tbk. Cabang Baubau)	Penempatan Uang Daerah	Universitas Insan Cita Indo-nesia (UICI)	Bantuan Biaya Pendi-dikan Peme-rintah Kabu-paten Buton	UNHALUKe ndari	Pening-katan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengem-bangan Ilmu Penge-tahuan dan teknologi melalui Pendi-dikan, Pelati-han, Pene-litian dan Pengab-dian kepada Masya-rakat	PT. Bank Pembangun an Daerah Sulawesi Tenggara	
Universitas Muhammadiy ah Buton	Pelaksanaan ujian tes psikologi calon anggota direksi perusahaan daerah mainawa buton	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang BauBau	Penempatan Uang Daerah	Batam Tourism Polytechn	Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Buton	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembanga n Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Pelatihan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	PT. Bank Pembangun an Daerah Sulawesi Tenggara	

2020		2021		2022		2023		2024	
Mitra Kerja Sama	**Judul PKS**	**Mitra Kerja Sama**	**Judul PKS**	**Mitra Kerja Sama**	**Judul PKS**	**Mitra Kerja Sama**	**Judul KESBER**	**Mitra Kerja Sama**	**Judul KESBER**
Kepolisian Resor Buton	Pelayanan terpadu terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Batam Tourism Polytechnic	Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Buton					Polite-knik Kesehatan Kemenkes Kendari	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Pendayagunaan Lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari
								Yayasan Pendidikan Kepulauan Buton	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
								Universitas Terbuka	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kelembagaan
								PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Baubau	Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pemerintah Kabupaten Buton

Sumber: Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Buton, Tahun 2020-2024

2.1.4.5 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanakan program pembangunan setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Buton dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48. Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	92,92	54,88	87,65	74,45	95,15
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	86.03	86.08	88.42	87.78	92,76
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	64.24	62.35	74.14	69.68	87,37

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	3,16	0,58	89,81	59,53	19,80
b) Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%					
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	NA	NA	0.10	0.27	0.88
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	74.84	64.40	63.26	65.51	45,95
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	61.61	60.33	66.23	72.24	62,66
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	96.73	97.92	97.56	NA	94,17
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	1.10	28.12	43.57	194.58	74,511
7	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	35.62	17.13	27.81	30.06	41,43
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	35.62	28.52	1.92	47.57	20,80
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	19.16	22.23	48.82	50.02	72,45
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	40.35	17.30	13.26	34.57	100,00
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	52.19	16.41	10.76	30.20	100.00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	61.36	76.69	82.71	103.73	100.00
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	98.42	98.95	65.78	97.54	79.92
I4	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	5.69	10.72	31,86	80.77	92.32
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	NA	NA	NA	NA	NA
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74	72.60	75,00	65,50	66,00
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	83,60	83,14	82,85	82,77	86,07
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	80,39	83,40	83,64	84,73	85,50
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	56,00	30,00	9,00	13,00	8,00
7	Tingkat Kemantapan Jalan	%	42,02	44,08	45,89	48,96	51,62

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kabupaten/kota						
8	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	NA	21,00	10,00	6,00	NA
9	Jumlah sertifikasi tenaga konstruksi	Orang	0	105	0	31	0
10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	0	0	0
d) Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	NA	NA	100	100	85,83
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0,01	0,78	0,89	1,15	3,93
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	39.59	30.82	29.94	29.75	30,59
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	50,74	54,08	58,39	61,58	64,95
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	36.59	45.45	NA	100	100
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	114.29	NA	77.77	70
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	NA	NA	2,790	63	100
4	Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	94,56	NA	NA	7,806	0,05
5	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		NA	NA	2.790	893	NA
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	NA	NA	2,790	NA	100
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	NA	10	40	86.67	14,29
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	NA	32	25	29	45
f) Sosial							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti (Indikator SPM)	%	NA	NA	11.13	98.48	56,72
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	NA	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	225	40	NA	NA	NA
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	%	NA	14.91	27	0.28	75,11
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	NA	NA	NA	5.26	654,38
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	50	NA	5.00	75.00	85,71

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	45.48	172.14	40.27	49.67	42,69
g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	38.72	40.34	0.13	2.05	0,25
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0.10	0.01	0.1	0.04	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0.02	10.15	3.37	0.05	8,18
h) Pangan							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	51.54	0.38	NA	0.30	57,29
i) Pertanahan							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	NA	57.50	NA	NA	NA
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	NA	NA	NA
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	NA	NA	NA	NA	NA
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanab Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	NA	NA	NA	NA	NA
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	NA	NA	NA	NA	NA
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	NA	NA	NA
j) Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	-	NA	68.450	70.04	77.03	79.9
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	31,12	35,60	42.82	43.01	43.15
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	73.71	63.09	93.40	31.82	52.17
k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Presentase kepemilikan KTP elektronik	%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Perekaman KTP Elektronik		100.44	99.30	98.27	98.73	97.15
3	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	32.46	30.10	44.06	55.67	61.05
4	kepemilikan akta kelahiran	%	94.94	103.59	97.15	98.12	98.49266
5	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	%	16.22	NA	13.15	100	13.157895
l) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	5.41	0.53	NA	75.00	100
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	%	NA	0.59	100	40.00	51.28
m) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	NA	NA	NA	NA	34.20	2.76
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	72.29	48.73	NA	66.54	100

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	92.11	72.52	NA	55.67	15.07
n) Perhubungan							
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	Rasio	24,67	24,67	22,54	22,54	20,51
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten		0.12	0.14	116.7	NA	NA
3	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	%	NA	NA	NA	NA	18.5
o) Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	NA	15.56	20	15.56	17.78
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	NA	50	46.67	24.44	24.44
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	NA	72,88	84.66	84.69	79.83
p) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	NA	NA	NA	NA	10.53
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha		30.16	33.14	3.878		0
3	Presentase peningkatan UMKM	%	NA	NA	NA	NA	NA
q) Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	-0,90	82	-0,22	-0,59	O,24
r) Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.20	0.24	4.63	9	10.94
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	NA	44.69	2.75	5.92	10.71
3	Peningkatan prestasi olahraga	Orang	NA	Nasional 7 Mendali	Provinsi 139 mendali	NA	NA
s) Statistik							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	28.95	NA	24.44	NA	24.44
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	28.95	NA	24.44	NA	24.44
t) Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	NA	NA	NA	22.22	2.22
u) Kebudayaan							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	NA	100	2,25	3,29	20
v) Perpustakaan							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	NA	NA	NA	NA	64.92
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	NA	NA	64,86	16.27	62.71
w) Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	NA	NA	NA	50	50
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	NA	NA	NA	NA	NA

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pilihan							
a) Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	26.231	26.465	28.341	26.613	19.317
b) Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	94.45	-91.11	975	451,16	-35.44
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	0,00	56,54	111,57	21,07	29.75
3	Tingkat hunian akomodasi	%	3,18	1,98	2,78	2,50	0,49
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0.13	0,13	0,13	0,12	0.12
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,16	0,24	0,42	0,80	0,95
c) Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	393	4112	553	516,034	502.57
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0	0	0	0	0
d) Kehutanan		Kewenangan Provinsi					
e) Energi dan Sumber Daya Mineral		Kewenangan Provinsi					
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota						
f) Perdagangan							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	10.94	10.94	6.44	41.40	23.57
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	NA	NA	36.69	NA	NA
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	7.34	5.10	39.50	18.46	73.43
g) Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	20.17	7.19	11.27	3.02	18.94
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	NA	NA	NA	NA	NA
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	100	92.41	100	NA
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	NA	NA	100	NA
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	NA	NA	NA	NA	NA
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	70	76	95	95	100
h) Transmigrasi							
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang fasilitasi penetapannya	Kwsn	1	1	1	1	1
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	SP	1	1	1	1	1
3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	SP	1	1	1	1	1

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
a) Perencanaan dan Keuangan							
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	10	0.14	14.27	0.18	14.63
2	Rasio PAD	%	187.13	NA	NA	NA	5.09
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	NA	Level 2	Level 2 (2,718)	Level 2 (2.977)	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	NA	NA	Level 2 (2.05)	Level 2 (2.140)	2
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	68.43	0.28	17.53	66.72	63.51
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	10
b) Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan clengan metode kompetitif	%	19.05	55.59	25.37	-	60.36
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	16.36	85.66	17.55	72.75	25.71
4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	%	NA	NA	0.34	NA	30.24
c) Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	522.65	2.42	538	410	83.56
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	ASN	27.96	0.51	74	15%	15.11
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	NA	NA	2	14	11.98
d) Manajemen Keuangan							
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	%	NA	-90.06	1.26	4.76	6.66
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalamAPBD	%	NA	-1.08	-17.80	30.06	43.14
3	Manajemen Aset	-	NA	Ya	Ya	Ya	2
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva	%	NA	4.03	10.17	18.55	6.23
e) Transparansi dan Partisipasi Publik							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia unluk pelayanan	%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: LPPD OPD Kabupaten Buton, 2020-2024

2.1.4.6 Standar Pelayanan Minimum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolok ukur yang ditetapkan pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara. Penerapan SPM di Kabupaten Buton dilakukan secara bertahap dan terukur, dimulai dari identifikasi cakupan pelayanan, pemenuhan sumber daya, peningkatan kapasitas aparatur, hingga penguatan koordinasi antar perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Buton juga terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan berbasis hasil, agar pelayanan dasar yang diberikan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan dan berfokus pada pelayanan yang inklusif dan merata. Dengan demikian, penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Buton bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai wujud nyata hadirnya negara dalam menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat. Capaian standar pelayanan minimal Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pendidikan							
1.	Pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	90,78	82,13	83,79	94,78	90,98
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	3,16	0,58	89,81	59,53	19,80
3.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	92,92	54,88	87,65	74,45	95,15
Urusan Kesehatan							
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	74,84	44,59	70,36	60,17	45,9
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	61,61	39,63	60,64	67,8	62,7
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	96,73	62,58	81,48	91,96	68,6
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	22,55	23,23	48,28	58,5	74,5
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1,10	0,00	22,61	38,36	41,4
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	35,62	24,16	5,93	57,44	20,8
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	19,16	17,55	42,95	52,24	72,5
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	40,35	64,78	30,54	46,02	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara pen-derita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang Mendapatkan pelayanan kesehatan	52,19	49,23	14,92	41,83	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (OGDJ)	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	61,36	68,42	68,14	82,29	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	50,70	65,00	66,18	96,6	79,9

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang Melemahkan daya tahan tubuh anusia (Human Immunodeficien cy Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5,69	100,00	32,75	78,62	92,3
Urusan Pekerjaan Umum							
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	83,60	83,14	82,65	82,77	86,07
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	80,39	83,40	83,64	84,73	85,50
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0.00	0.00	70	85	86,5
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	100
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat							
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	92,61	100,00	90,56	87,64	71,64
1.	Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Layanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dikab/kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan	13,60	13,60	13,60	43,03	13,60
2.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	26		13.00	88,33	80
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	0	100	85	90
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	0	100	100	90
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	80	100	96	88
Urusan Sosial							
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	0,00	0,00	18,38	83,08	91,33

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	0,00	0,00	0,00	83,33	85,50
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	0,00	0,00	1,39	83,08	91,63
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis ang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00	96	95,08

Sumber: Laporan SPM OPD, 2020-2024

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran kondisi keuangan daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah menjadi dasar fundamental dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dengan memahami kondisi keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang realistis, melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien, serta menilai keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Dalam mengelola keuangan daerah kita perlu memperhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8 persen di 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak the Great Depression 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspons dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral di berbagai negara untuk melawan inflasi yang tinggi menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4 persen, jauh dari perkiraan awal (Januari 2022) yang sebesar 4,4 persen. Lebih parah lagi dalam laporan WEO edisi Januari 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 3,1 persen pada 2023 dan 2024. Sedangkan

World Bank memprediksi perekonomian global tahun 2024 hanya tumbuh 2,4 persen di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir. Namun, beberapa negara masih menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif, seperti India**,** Indonesia, dan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Hal ini ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan permintaan internal yang terus meningkat.

Di tengah ekonomi global di tahun 2024 diwarnai dengan pertumbuhan yang melambat dan ketidakpastian yang tinggi. Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh dengan baik. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2% di tahun 2024, ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi yang meningkat. Konsumsi masyarakat maupun konsumsi Pemerintah, serta kebijakan sektor perumahan yang sudah digulirkan Pemerintah pada triwulan IV-2023 akan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan 2024. Sementara itu, inflasi di Indonesia diperkirakan masih tinggi di awal tahun, namun akan gradually menurun dan stabil seiring dengan kebijakan moneter Bank Indonesia serta dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2024 yang kondusif.

Adapun suku bunga Bank Indonesia diperkirakan akan naik secara bertahap untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing di tengah melambatnya ekonomi global. Meskipun begitu Indonesia perlu mewaspadai risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan.

Dalam lingkup lokal ekonomi Kabupaten Buton masih bergantung pada sektor pertanian dalam arti luas. Oleh karena itu tantangan ekonomi Kabupaten Buton adalah diversifikasi ekonomi sebagai kunci untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor khususnya ekstraktif. Untuk itu membangun infrastruktur yang memadai, seperti jalan dan infrastruktur penghubung, dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong investasi.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan Daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan Daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, berbagai metrik keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya provinsi dan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam Daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan

politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50. Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi yang ditandai dengan tren naik dari tahun 2020 (4,10%) sampai tahun 2023 (5,03%) hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah semakin baik, kemudian pada tahun 2024 mulai ada penurunan kembali menjadi 4,35%. Secara rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) DOFD Kabupaten Buton berada di 4,50% masih masuk di kategori 'Sangat Kurang'.

Fluktuasi DOFD tersebut dipengaruhi oleh belum konsistennya kekuatan/capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa meningkat maka Pemerintah Kabupaten Buton perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali dan optimalisasi sumber-sumber PAD dengan cara yang lebih inovatif. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Buton periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.51. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Buton, Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persen-tase
1	2020	32,595,800,124	794,716,335,253	4.10
2	2021	37,376,428,695	839,259,907,590	4.45
3	2022	36,389,696,537	783,918,682,315	4.64
4	2023	36,845,910,169	731,961,416,038	5.03
5	2024	37,340,158,121	858,188,165,444	4.35
	Rata-Rata	36,109,598,729	801,608,901,328	4.50

Sumber: *BKAD Kabupaten Buton, 2024 (diolah)*

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja

pelaksanaan APBD Kabupaten Buton akan dilihat dari kinerja Pendapatan Daerah, kinerja Belanja Daerah, dan kinerja Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.2.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

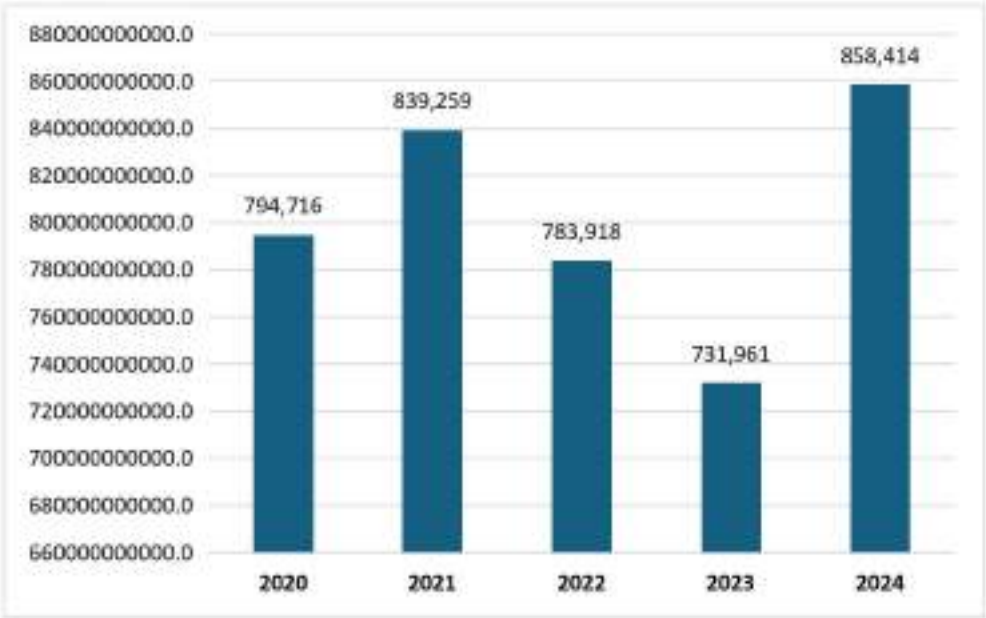
Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
(2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan Pendapatan Kabupaten Buton mengalami fluktuasi tetapi masih dalam tren yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 1,94% per tahun, di mana Pendapatan tahun 2020 mencapai Rp. 794 miliar menjadi Rp. 858 miliar di tahun 2024, yang terutama didorong oleh meningkatnya Pendapatan Transfer. Adapun capaian Pendapatan Daerah tertinggi di tahun 2024 didorong oleh meningkatnya dana transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA.

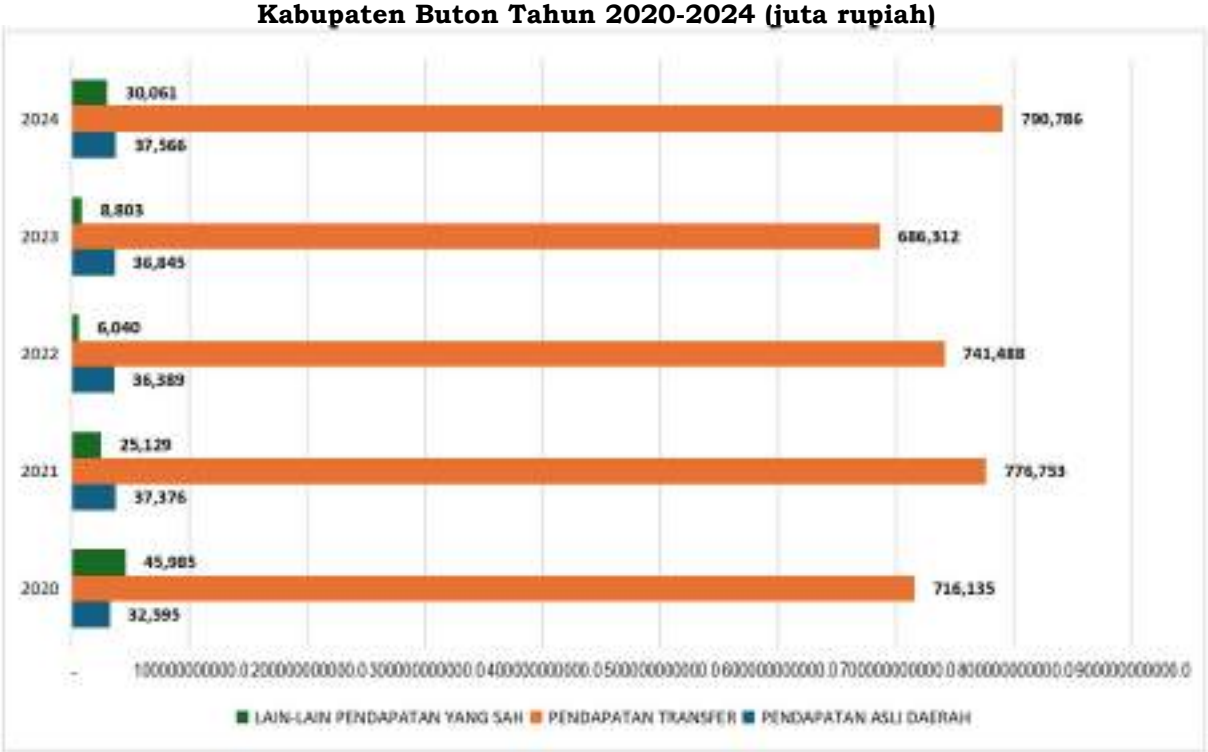
Gambar 2.45. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020–2024), terlihat bahwa Pendapatan Transfer mengalami rata-rata pertumbuhan positif dengan pertumbuhan sebesar 2,51% dari Rp 716 miliar (2020) menjadi Rp790 miliar (2024). Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami rata-rata pertumbuhan secara berurutan sebesar 3,46% dan -10,08%.

Gambar 2.46. Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Perkembangan pajak Kabupaten Buton mengalami tren kenaikan cukup signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,60% dari Rp 3,06 miliar di tahun 2020 menjadi Rp 4,58 miliar pada tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan karena berkurangnya pendapatan pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk meningkatkan PAD dari Pajak Daerah ke depan selain melalui menggenjot kembali perolehan pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), juga perlu dilakukan penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi pemungutan pajak seperti pajak properti, pajak penjualan, pajak restoran, dan sebagainya.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

Pendapatan retribusi di Kabupaten Buton mengalami tren kontraksi dengan rata-rata penurunan yang mencapai -25.34% per tahun dari Rp. 10,05 miliar (2020) menjadi Rp. 3,12 miliar (2024). Peningkatan tren tersebut didorong oleh semakin efektifnya retribusi jasa usaha yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan retribusi jasa umum dari retribusi layanan Kesehatan dan layanan kebersihan/persampahan. Untuk lebih mengoptimalkan pendapatan retribusi ke depan, selain melalui penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi sumber retribusi bisa berupa biaya layanan seperti parkir, izin usaha, atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami tren fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 13,96%

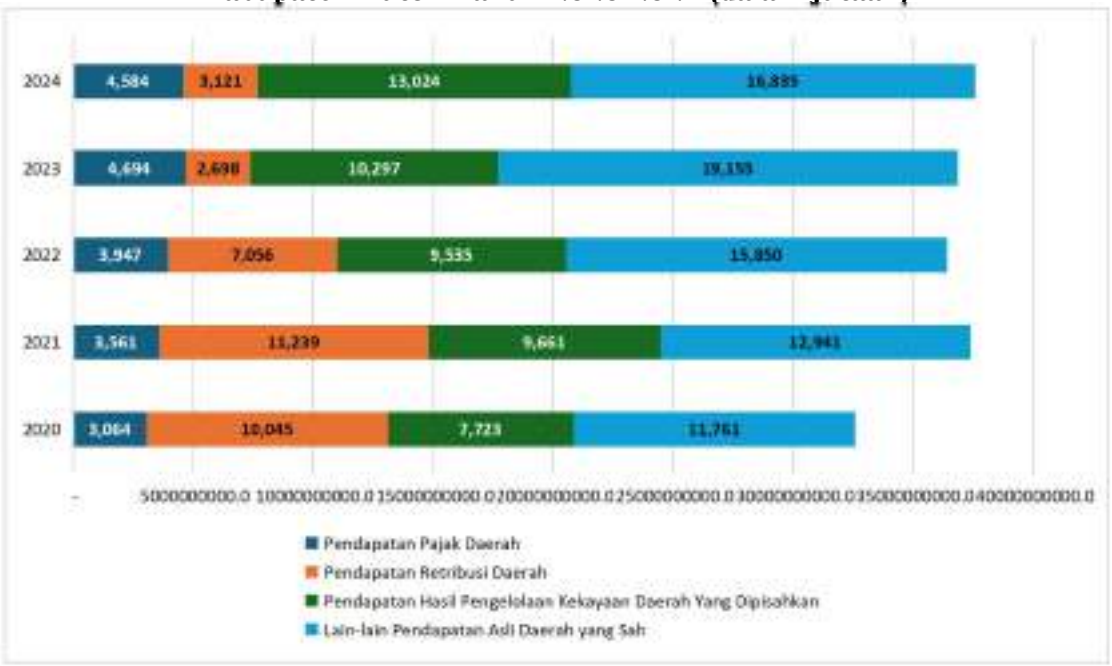
per tahun dari Rp. 7,72 (2020) menjadi Rp. 13,02 miliar (2024). Pertumbuhan ini berasal dari dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buton pada lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 9,01% dari Rp. 11,76 miliar (2020) menjadi Rp. 16,83 miliar (2024). Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 19,15 miliar karena tingginya Pendapatan BLUD dibandingkan tahun-tahun lainnya akibat Covid-19. Oleh karena itu bisa dikatakan Pendapatan BLUD merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi tinggi rendahnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Untuk meningkatkan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah maka kinerja BLUD perlu ditingkatkan.

Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:

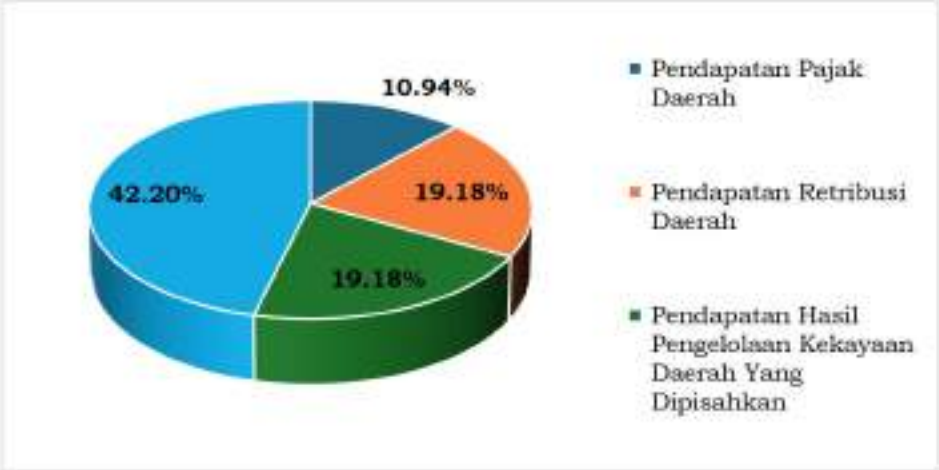
Gambar 2.47. Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)



Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Buton. Secara rata-rata, kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020–2024) mencapai 42,20% per tahun terutama dari BLUD, kemudian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kontribusinya sebesar 19,18% per tahun, berikutnya Hasil Retribusi Daerah kontribusinya sebesar 19,18% per tahun, dan terakhir Pendapatan Pajak Daerah berkontribusi rata-rata 10,94% per tahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah perlu lebih dikuatkan dengan dibarengi penggalian sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari Hasil Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang kontribusinya masih sangat rendah.

Gambar 2.48. Rata-Rata Kontribusi Komponen PAD Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (persen)



Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Gambar 2.49. Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendapatan transfer Kabupaten Buton mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,51 persen, dari Rp 716 miliar (2020) menjadi Rp 790 miliar (2024). Pendapatan transfer tertinggi diterima pada tahun 2024, karena relatif tingginya pendapatan transfer pemerintah pusat dari sumber Dana Perimbangan pada tahun tersebut dibandingkan tahun lainnya. Jika dilihat rata-rata kontribusinya, maka mayoritas Pendapatan Transfer disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat, yang mengalami peningkatan setiap tahun. Jika melihat komponen utama Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam 5 (lima) tahun terakhir, maka kontribusi utama berasal dari Dana Perimbangan, sedangkan sisanya berasal dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Gambar 2.50. Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

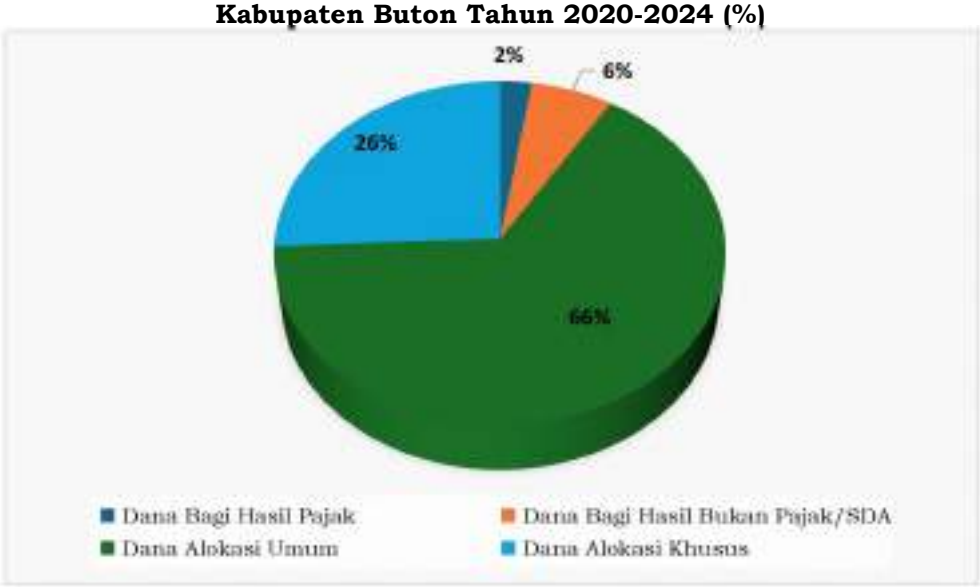


Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

Perkembangan Dana Perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,52%, dari Rp. 562 miliar di tahun 2020 menjadi Rp. 697 miliar di tahun 2024. Dari komponen pembentuk Dana Perimbangan itu sendiri, tren Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami tren relatif meningkat, di mana secara berturut-turut tren penurunannya sebesar 2,73% dan 7,29%. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) justru mengalami rata-rata tren peningkatan cukup signifikan sebesar 69,18%, dari Rp. 5,76 miliar (2020) menjadi Rp. 47,23 miliar (2024).

Meskipun mengalami penurunan, namun DAU masih menjadi salah satu kontributor terbesar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2024 sebesar 65,47%, kemudian DAK sebesar 25,70%, sementara DBH Pajak dan SDA menjadi kontributor terkecil dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,44%. dan 6,40%.

Gambar 2.51. Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (%)



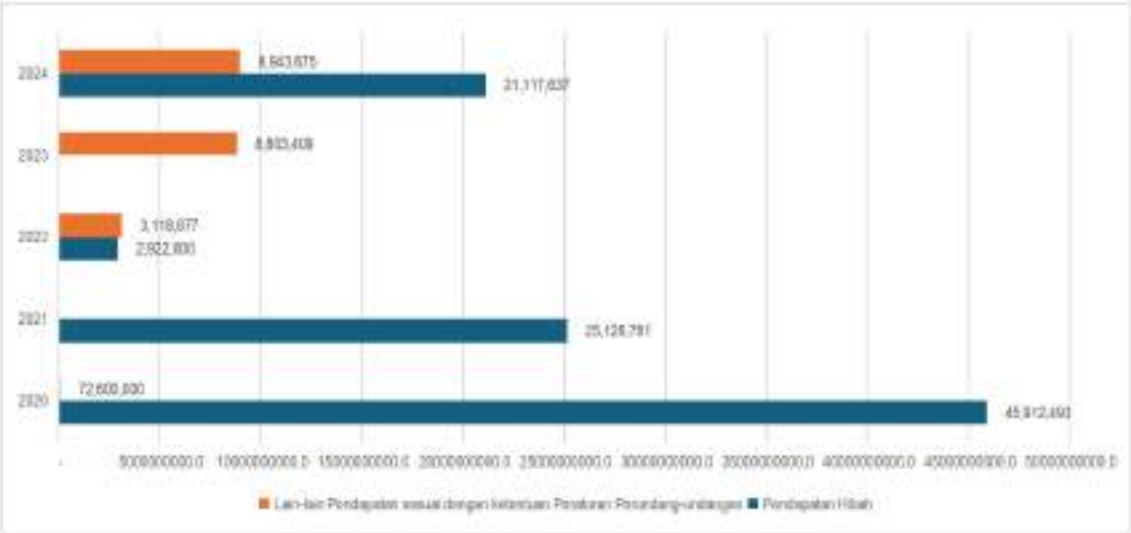
Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah, Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan penurunan yang relatif signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -10,08% per tahun, dari Rp 45,98 milir (2020) menjadi Rp 30,06 miliar (2024), Pencapaian terendah terjadi pada tahun 2022 dengan nilai Rp 6,04 miliar.

Jika dilihat lebih dalam, sebagian besar sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, yang mengalami penurunan dari Rp 45,91 miliar (2020) menjadi Rp 21,11 (2024). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa telah terjadi transisi dari Pendapatan Hibah ke Pendapatan Lainnya, yang kini menjadi penyumbang utama serta berperan besar dalam menentukan perubahan tren Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 2.52 Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

Jika dilihat dari perkembangan Pendapatan Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

a. Mendorong investasi: Pemerintah daera perlu membuat regulasi ramah lingkungan, mambangun Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan yang dapat mendukung kelancaran kegiatan investasi.
b. Memberikan insentif bagi investor: Pemerintah daerah dapat memberikan insentif, seperti keringanan pajak atau subsidi, untuk menarik investor.
c. Peningkatan efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
d. Peningkatan pengelolaan aset daerah: Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi dan pengelolaan aset daerah secara optimal. Aset-aset daerah yang tidak terpakai dapat dialihkan menjadi sumber pendapatan melalui sewa, kerjasama, atau penjualan.

e. Diversifikasi Pendapatan: Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan diluar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
f. Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
g. Pengelolaan Utang: Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.
h. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
i. Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah: Mendorong pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi tinggi di daerahnya dengan hilirisasi sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri, dan perdagangan. Hal ini dapat meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah.
j. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.

Secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**PENDAPATAN**	**794.716.335.253**	**839.259.907.590**	**783.918.682.315**	**731.961.416.038**	**858.414.241.941**	**1,95**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**32.595.800.124**	**37.376.428.695**	**36.389.696.537**	**36.845.910.169**	**37.566.234.618**	**3,61**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.064.499.732	3.561.302.180	3.947.412.418	4.694.590.215	4.584.654.176	**10,60**
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.045.684.151	11.239.150.828	7.056.261.349	2.698.601.680	3.121.718.282	**-25,34**
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.723.627.308	9.661.862.234	9.535.733.333	10.297.466.970	13.024.730.687	**13,96**
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.761.988.933	12.914.113.453	15.850.289.437	19.155.251.304	16.835.131.473	**9,38**
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**716.135.442.129**	**776.753.697.895**	**741.488.108.606**	**686.312.096.155**	**790.786.695.023**	**2,51**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**696.857.572.083**	**752.814.199.731**	**709.432.115.451**	**652.021.780.733**	**768.996.067.229**	**2,49**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**562.366.252.083**	**650.703.238.731**	**640.721.051.451**	**586.986.241.933**	**697.305.459.229**	**5,52**
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.765.838.971	10.381.898.817	8.544.635.563	8.536.607.825	47.235.639.262	69,18
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	18.988.380.345	47.086.510.383	90.336.239.286	23.881.895.000	22.309.864.000	4,11
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	400.048.470.000	394.867.827.000	394.733.209.356	411.022.449.740	445.497.391.296	2,73
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	137.563.562.767	198.367.002.531	147.106.967.246	143.545.289.368	182.262.564.671	7,29
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**		**28.222.780.000**	**5.580.336.000**		**6.213.587.000**	**-39,62**
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**134.491.320.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-100,00**
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus						
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	134.491.320.000					-100,00
1.2.1.4	**Dana Desa**		**73.888.181.000**	**63.130.728.000**	**65.035.538.800**	**65.477.021.000**	**-3,95**
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**19.277.870.046**	**23.939.498.164**	**32.055.993.155**	**34.290.315.422**	**21.790.627.794**	**3,11**
1.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil**	**19.177.870.046**	**23.939.498.164**	**22.055.993.155**	**24.290.315.422**	**21.790.627.794**	3,24
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**	**100.000.000**	**-**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**-**	**-100,00**
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	100.000.000		10.000.000.000	10.000.000.000		-100,00
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota						

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**45.985.093.000**	**25.129.781.000**	**6.040.877.172**	**8.803.409.714**	**30.061.312.300**	**-10,08**
1.3.1	**Pendapatan Hibah**	**45.912.493.000**	**25.129.781.000**	**2.922.000.000**		**21.117.637.000**	**-17,65**
1.3.2	**Pendatan Dana Darurat**						
1.3.3	**Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan**	**72.600.000**		**3.118.877.172**	**8.803.409.714**	**8.943.675.300**	**233,15**

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah).

2.2.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

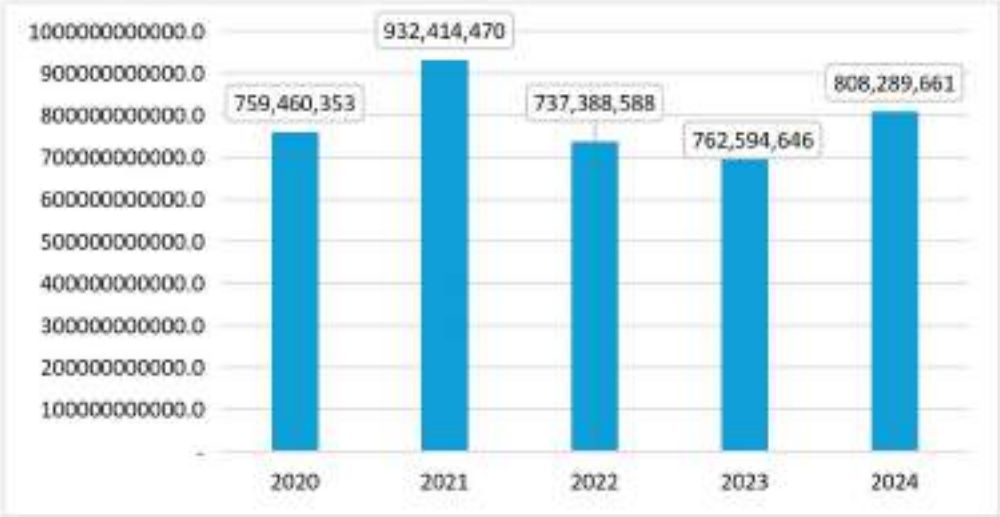
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja operasi
   Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2) Belanja modal
   Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3) Belanja tidak terduga
   Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4) Belanja transfer
   Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Buton dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) secara konsisten meningkat cukup signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,57 persen per tahun dari 759 miliar (2020) menjadi 808 miliar (2024).

Gambar 2.53. Perkembangan Belanja Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

Jika dilihat lebih rinci, semua jenis belanja daerah mengalami tren menurun yaitu Belanja Modal (21,69 persen), Belanja Tak Terduga (0,57 persen) dan Belanja Transfer (14,01 persen), Hanya komponen Belanja Operasi yang mengalami progress positif (63,46 persen). Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka terlihat bahwa rata-rata 1,57 persen Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Operasi, kemudian -2,38 persen digunakan untuk Belanja Modal, -0,80 persen digunakan untuk Belanja Transfer, dan sisanya -100 persen digunakan untuk Belanja Tak Terduga.

Gambar 2.54. Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

a. Belanja Operasi

Dalam lima tahun terakhir, Belanja Operasi Kabupaten Buton telah mengalami pertumbuhan rata-rata 4.79 persen per tahun, dari Rp. 461 miliar pada 2020 menjadi Rp. 555 miliar pada 2024. Sebagian besar Belanja Operasi dialokasikan untuk Belanja Pegawai. diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa. Jika melihat perkembangannya. proporsi Belanja Pegawai terbesar terjadi pada tahun 2024 yaitu Rp. 338 miliar. Di sisi lain, proporsi Belanja Barang dan Jasa juga mengalami peningkatan sebesar 37,91 persen. Sementara itu. Belanja Operasi lainnya (belanja bunga, hibah, dan bantuan sosial) memiliki proporsi yang relatif kecil, tidak pernah lebih dari 7 persen.

Gambar 2.55. Perkembangan Kontribusi Struktur Belanja Operasi Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

Meskipun secara proporsi Belanja Pegawai terus menurun, namun secara nominal nilainya tetap mengalami peningkatan dari Rp. 285 miliar pada 2020 menjadi Rp. 338 miliar pada 2024. Peningkatan nilai nominal ini perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu proporsi dan kualitas belanja publik yang berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Tabel 2.53. Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	**BELANJA**	**759.460.353.432**	**932.414.470.225**	**737.388.588.025**	**762.594.646.081**	**808.289.661.350**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**461.020.608.714**	**469.544.658.845**	**490.472.714.644**	**541.006.624.914**	**555.823.525.845**
2.1.1	Belanja Pegawai	285.899.731.827	264.210.789.661	268.988.876.478	301.226.414.647	338.539.374.977
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	170.204.147.193	196.138.041.021	194.961.363.662	207.634.222.631	181.971.823.004
2.1.2	Belanja Bunga	2.130.329.694	3.746.312.257	13.795.010.098	8.831.372.709	3.310.833.712
2.1.5	Belanja Hibah		5.449.515.906	12.727.464.406	23.314.614.927	32.001.494.152
2.1.7	Belanja keuangan	2.786.400.000				

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

b. Belanja Modal

Dalam lima tahun terakhir. Belanja Modal Kabupaten Buton mengalami fluktuasi dengan tren menurun rata-rata sebesar -4.38% per tahun. Pada tahun 2020. belanja modal tercatat sebesar Rp. 168 miliar dan terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp. 140 miliar pada tahun 2024. Beberapa komponen belanja modal yang mengalami tren penurunan signifikan adalah belanja tanah yang berkurang -100,00 persen, belanja aset tetap lainnya yang turun 31,96 persen, serta belanja peralatan dan mesin yang mengalami penurunan drastis sebesar -22,77 persen.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, struktur alokasi belanja modal perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam penganggaran sektor infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang mampu meningkatkan konektivitas serta efisiensi logistik, sekaligus

membuka peluang investasi dan perdagangan. Selain itu, belanja peralatan dan mesin harus diarahkan untuk mendukung produktivitas melalui penerapan teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing berbagai sektor ekonomi. Pengalokasian belanja modal secara strategis juga berpotensi mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang masih kurang berkembang. Oleh karena itu, optimalisasi belanja modal menjadi faktor penting dalam memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.54. Perkembangan Struktur Belanja Modal Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.2	**BELANJA MODAL**	**168.000.882.808**	**344.823.654.480**	**136.875.254.250**	**112.649.100.147**	**140.469.600.073**
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	4.058.369.368	1.138.415.356	-	-	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	59.306.419.066	39.165.786.356	29.850.777.482	23.569.271.273	21.095.008.144
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	58.959.814.227	112.745.639.116	66.595.503.041	48.464.026.931	79.622.840.009
2.2.4	Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan	42.253.993.619	186.078.914.822	38.103.653.735	40.232.418.943	38.013.245.920
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.422.286.528	5.694.898.830	2.325.319.992	383.383.000	733.350.000
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-	-	-	-	1.005.156.000

Sumber: BKAD Kabupaten. Buton, 2020-2024 (diolah)

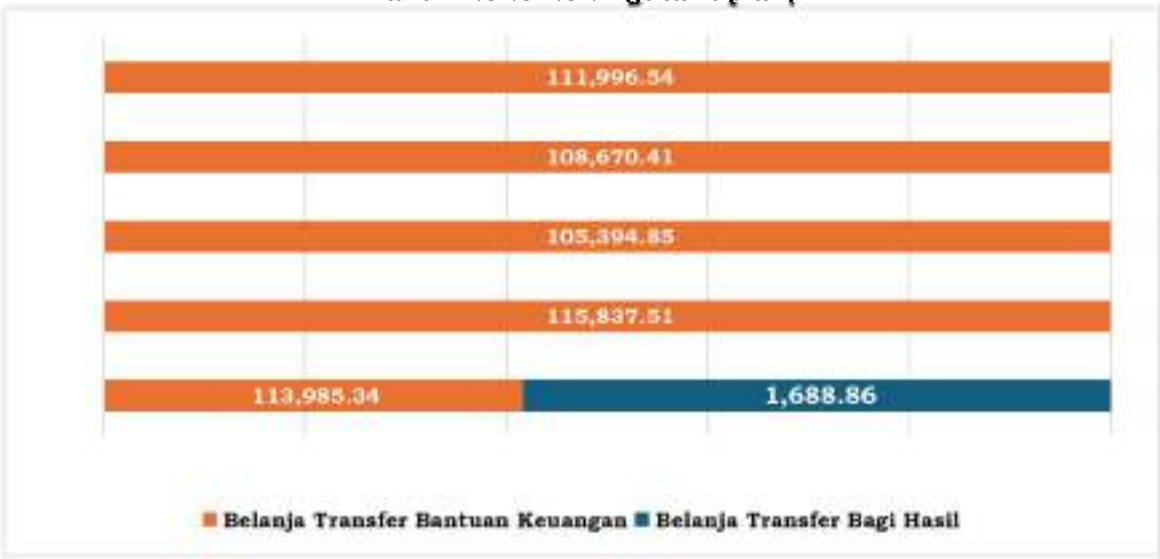
c. Belanja Tak Terduga

Dalam lima tahun terakhir, realisasi belanja tak terduga Kabupaten Buton menunjukkan tren negatif dengan rata-rata penurunan cukup signifikan sebesar -100 persen per tahun, dari Rp. 14,76 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 268 juta pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya alokasi anggaran untuk kebutuhan darurat, seperti penanganan bencana dan kejadian tak terduga lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

Dalam lima tahun terakhir, belanja transfer Kabupaten Buton mengalami penurunan yang relative kecil dengan rata-rata penurunan sebesar 0,80% per tahun, dari Rp. 115 miliar pada 2020 menjadi Rp. 111 miliar pada 2024. Penurunan ini didorong oleh belanja transfer bagi hasil yang hanya tersedia pada tahun 2020 sebesar Rp 1,68 miliar, serta belanja transfer bantuan keuangan yang menurun sebesar rata-rata 0,44 persen per tahun, dari Rp. 113 miliar pada 2020 menjadi Rp. 111 miliar pada 2024.

Gambar 2.56. Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

Dari aspek surplus/defisit belanja, dalam lima tahun terakhir defisit terjadi pada tahun 2021, dan 2023, masing-masing sebesar Rp. 35,25 miliar dan Rp. 50,12 miliar.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. Beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

1) Perencanaan Anggaran yang Cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
4) Pengelolaan Utang yang Bijaksana: Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
5) Pengembangan Pendapatan Alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
6) Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.

7) Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Secara keseluruhan Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Buton tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2023 (juta rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	**BELANJA**	**759,460.35**	**932,414.47**	**740,099.79**	**762,687.01**	**808,304.21**	**1.57**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**461,020.61**	**469,544.66**	**493,183.92**	**541,098.99**	**555,838.07**	**4.79**
2.1.1	Belanja Pegawai	285,899.73	264,210.79	268,988.88	301,226.41	338,539.37	4.32
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	170,204.15	196,138.04	194,961.36	207,634.22	181,971.79	1.69
2.1.2	Belanja Bunga	2,130.33	3,746.31	13,795.01	8,831.37	3,310.83	11.65
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	-	5,449.52	12,727.46	23,314.61	32,001.49	80.41
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	2,711.20	92.37	14.58	-84.22
2.1.7	Belanja keuangan	2,786.40	-	-	-	-	0.00
2.2	**BELANJA MODAL**	**168,000.88**	**344,823.65**	**136,875.25**	**112,649.10**	**140,469.60**	**-4.38**
2.2.1	Belanja Tanah	4,058.37	1,138.42	-	-	-	-47.04
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	59,306.42	39,165.79	29,850.78	23,569.27	21,095.01	-22.77
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	58,959.81	112,745.64	66,595.50	48,464.03	79,622.84	7.80
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	42,253.99	186,078.91	38,103.65	40,232.42	38,013.25	-2.61
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3,422.29	5,694.90	2,325.32	383.38	733.35	-31.96
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	1,005.16	0.00
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**14,764.67**	**2,208.65**	**4,645.77**	**268.51**	**-**	**-63.28**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	14,764.67	2,208.65	4,645.77	268.51	-	-63,28
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**115,674.20**	**115,837.51**	**105,394.85**	**108,670.41**	**111,996.54**	**-0.80**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**1,688.86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-100.00**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1,688.86	-	-	-	-	-100.00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0.00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	0.00
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**113,985.34**	**115,837.51**	**105,394.85**	**108,670.41**	**111,996.54**	**(0.44)**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0.00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	113,569.80	115,837.51	105,394.85	108,670.41	111,996.54	-0.35
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	415.54	-	-	-	-	-100.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	**35,255.98**	**(93,154.56)**	**43,818.89**	**(30,725.60)**	**50.110,01**	**9.19**

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

2.2.1.1.3 Pembiayaan

Dalam lima tahun terakhir. perkembangan pembiayaan netto Kabupaten Buton mengalami penurunan yang cukup signifikan. terutama akibat berkurangnya penerimaan pembiayaan dari sumber SiLPA. khususnya dari tahun 2023 ke tahun 2024. Jika dilihat lebih mendalam. SiLPA mengalami tren penurunan dari tahun 2020 sebesar Rp. 32,08 miliar hingga Rp. 21,13 pada 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya penurunan efektivitas penyerapan anggaran kegiatan di tahun 2023 yang berkontribusi terhadap berkurangnya pembiayaan netto pada tahun berikutnya.

Gambar 2.57. Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Buton tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**PENDAPATAN**					
	A. Pendapatan Asli Daerah	32.595.800.124	37.376.428.695	36.389.696.537	36.845.910.169	37.566.234.618
	B. Pendapatan Transfer	716.135.442.129	776.753.697.895	741.488.108.606	686.312.096.155	790.786.695.023
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	45.985.093.000	25.129.781.000	6.040.877.172	8.803.409.714	30.061.312.300
	JUMLAH PENDAPATAN	**794.716.335.253**	**839.259.907.590**	**783.918.682.315**	**731.961.416.038**	**858.414.241.941**
2	**BELANJA**					
	A. Belanja Operasi	461.020.608.714	469.544.658.845	493.183.919.354	541.098.991.914	555.838.101.070
	B. Belanja Modal	168.000.882.808	344.823.654.480	136.875.254.250	112.649.100.147	140.469.600.073
	C. Belanja Tak Terduga	14.764.666.604	2.208.647.000	4.645.767.903	268.510.000	-
	D. Belanja Transfer	115.674.195.306	115.837.509.900	105.394.851.228	108.670.411.020	111.996.535.432
	JUMLAH BELANJA	**759.460.353.432**	**932.414.470.225**	**740.099.792.735**	**762.687.013.081**	**808.304.236.575**
	SURPLUS / (DEFISIT)	35.255.981.821	(93.154.562.635)	43.818.889.580	(30.725.597.043)	50.110.005.366
3	**PEMBIAYAAN**					
	A. Penerimaan Pembiayaan	34,080,694,093.79	191.122.264.560,90	108.456.619.575,51	110.653.341.423,83	33.268.254.649,84
	B. Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000.00	3.136.000.000,00	41.622.167.732,51	46.633.741,32	54.406.031.533,00
	PEMBIAYAAN NETTO	32,080,694,093.79	187.986.264.560,90	66.834.451.843,51	64.019.600.111,83	(21.137.776.883,16)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	67,336,675,914.90	94.831.701.925,51	110.653.341.423,83	33.294.003.068,54	28.972.228.482,97

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Buton dari tahun 2020-2024 mengalami tren penurunan dengan rata-rata peningkatan sebesar 13,29% per tahun dari Rp. 87,42 triliun (2020) menjadi Rp. 49,42 triliun (2024). Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif adalah jumlah investasi jangka panjang 7,18% dan asset tetap 2,04% sedangkan jenis asset yang memiliki peningkatan negative adalah asset lancar (13,29%) dan jumlah property investasi (0,63%).

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Buton dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nilai kewajiban di Kabupaten Buton mengalami peningkatan signifikan dari Rp. 5,25 miliar (2020). meningkat menjadi Rp. 24,28 miliar (2024) dengan tren rata-rata pertumbuhan sebesar 46,60% per tahun.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Buton berfluktuasi dari tahun ke tahun namun secara agregat mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,45% pertahun. dimana pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.69 Triliun menjadi Rp. 1.88 Triliun di tahun 2024. Ekuitas dari tahun 2020-2021 nilainya mengalami peningkatan sampai dengan di tahun 2022. kemudian setelah itu pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga tahun 2024 juga menurun. Penurunan nilai ekuitas dapat memiliki dampak

signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas. mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan. berinvestasi dalam proyek-proyek baru. atau bahkan mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu. manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang hati-hati penting untuk memitigasi risiko penurunan nilai ekuitas. Ada beberapa strategi untuk menekan penurunan nilai ekuitas antara lain: mencegah dan menekan kerugian investasi. mencegah dan menekan penurunan nilai aset. mencegah dan menekan kerugian operasional dimana pendapatan menurun atau biaya meningkat. serta membatasi pinjaman baru atau peningkatan utang lainnya. Adapun gambaran Neraca Kabupaten Buton tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.57. Neraca Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**ASET**					
	A. Aset Lancar	87,427,645,457	109,694,144,069	126,649,373,439	53,889,088,287	49.428.470.318
	B. Investasi Jangka Panjang	50,182,545,337	68,736,514,516	67,660,695,028	67,451,708,080	66.224.524.425
	C. Aset Tetap	1,470,755,181,092	1,767,731,856,595	1,643,581,923,691	1,598,713,854,180	1.594.471.594.130
	D. Aset Lainnya	84,747,804,629	52,058,625,490	52,366,400,725	89,687,396,829	48.361.763.946
	JUMLAH ASET	**1,693,113,176,515**	**1,998,221,140,670**	**2,016,512,702,822**	**1,935,399,227,108**	**1.883.418.253.442**
2	**KEWAJIBAN**					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	3,169,367,541	12,182,645,451	50,699,750,739	58,571,291,097	24.282.282.307
	B. Kewajiban Jangka Panjang	2,088,292,250	125,887,022,927	54,406,031,533	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	**5,257,659,791**	**138,069,668,378**	**105,105,782,272**	**58,571,291,097**	**24.282.282.307**
3	**EKUITAS**					
	Equitas	1,687,855,516,723.87	1,860,151,472,292	1,911,406,920,550.35	**1,876,827,936,011**	**1.859.135.971.136**
	JUMLAH EKUITAS	**1,687,855,516,724**	**1,860,151,472,292**	**1,911,406,920,550**	**1,876,827,936,011**	**1.859.135.971.136**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1,693,113,176,515**	**1,998,221,140,670**	**2,016,512,702,822**	**1,935,399,227,108**	**1.883.418.253.442**

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

Tabel 2.58. Rincian Neraca Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi Tahun					Rata-Rata Pertum-buhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	63,736,140,658	95,078,945,709	109,167,403,892	30,351,657,791	24,370,252,710	(21.36)
Kas di Bendahara Penerimaan	52,259,224.00	353,569,700	70,597,679	25,313,974	34,400,617	(9.93)
Kas di Bendahara Pengeluaran			33,101.00			(100.00)
Kas di Bendahara Dana Kapasitas JKN	3,392,478,180.25	2,037,851,727	36,375,986.25	47,409,756	47,651,043	(65.57)
Kas di BLUD			1,411,530,601.00	2,342,048,966	1.322.352.498	(3.21)
Kas di Bendahara FKTP						
Kas di Bendahara BOS	176,297,277.00	9,109,746	4,364,972.00	68,821,880	20,.116.737	(41.48)
Kas dana BOK Puskesmas				488,136,965	3,215,009,219	558.63
Kas Lainnya	38,394,597.45	19,385,150	32,263,046.09	12,855,552	4,945,502	(40.09)
Setara Kas						
Investasi Jangka Pendek						
Piutang Pendapatan						
Piutang Pajak	5,077,412,018	5,841,951,068	6,664,227,522.00	7,275,476,047	8,246,901,801	12.89
Penyisihan Piutang Pajak	(2,918,244,926)	(3,561,530,035)	(4,031,333,378)	(4,661,987,641)	(5,227,485,120)	15.69

Uraian	Realisasi Tahun					Rata-Rata
Piutang Retribusi	1,839,136,446	2,255,800,934	3,806,756,246.00	3,944,328,246	1,529,461,640	(4.50)
Penyisihan Piutang Retribusi	(576,051,651)	(1,017,450,734)	(1,015,275,687)	(1,180,740,335)	(975,826,586)	14.08
Piutang Bunga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	2,303,191,226	2,452,432,962				(100.00)
Penyisihan Piutang Bunga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	(2,303,191,226)	(2,452,432,962)				(100.00)
Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	326,616,991	326,616,991				(100.00)
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	(326,616,991)	(326,616,991)				(100.00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	55,010,000	55,010,000				(100.00)
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(55,010,000)	(55,010,000)				(100.00)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9,661,862,234					(100.00)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	135,770,500	404,233,253				(100.00)
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah						
Piutang Lain-lain PAD yang Sah			2,596,430,625.55	2,744,106,447	2,900,287,672	5.69
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah			(2,595,222,615)	(2,744,106,447)	(2,900,287,672)	5.71
Piutang Transfer Pemerintah Pusat						
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat						
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi				21,104,366		(100.00)
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi				(105,522)		(100.00)
Piutang Transfer Antar Daerah					6.301.995.704	
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah					(31.509.979)	
Piutang Lainnya		8,154,495	55,010,000.00	52,010,000	52,010,000	85.45
Penyisihan Piutang Lainnya			(55,010,000)	(52,010,000)	(52,010,000)	(2.77)
Beban Dibayar Dimuka	76,188,752.70	147,165,471	1,342,267,178.41	83,468,615	109,103,022	9.39
Persediaan	6,736,002,146.59	8,116,957,585	9,158,954,269.95	15,071,299,626	10,461,101,509	11.63

Uraian	Realisasi Tahun					Rata-Rata
Jumlah Aset Lancar	**87,427,645,457**	**109,694,144,069**	**126,649,373,439**	**53,889,088,287**	**49.428.470.318**	**(13.29)**
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0.00
Dana Bergulir						
Penyisihan Investasi Jangka Panjang						
Jumlah Investasi Non Permanen	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**	**0.00**
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	45,182,545,337	63,736,514,516	62,660,695,028.00	62,451,708,080	61.224.524.425	7.89
Jumlah Investasi Permanen	**45,182,545,337**	**63,736,514,516**	**62,660,695,028**	**62,451,708,080**	**61.224.524.425**	**7.89**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**50,182,545,337**	**68,736,514,516**	**67,660,695,028**	**67,451,708,080**	**66.224.524.425**	**7.18**
ASET TETAP						
Tanah	151,894,027,616	177,947,746,274	130,293,160,600.25	131,843,291,050	131,948,214,450	(3.46)
Peralatan dan Mesin	317,670,234,450	354,785,186,740	382,043,229,463.93	404,622,620,598	426,608,074,427	7.65
Gedung dan Bangunan	618,077,683,893	752,912,328,588	724,813,141,814.18	781,841,666,086	839.285.528.708	7.95
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	1,034,524,123,352	1,234,003,490,449	1,298,684,901,909.83	1,338,627,039,582	1.373.340.013.399	7,34
Aset Tetap Lainnya	20,813,106,870	20,833,106,870	20,833,106,869.89	20,833,106,870	12,115,620,400	(12.65)
Konstruksi dalam Pengerjaan	79,008,089,025	95,075,944,200	93,581,474,957.00	58,491,488,231	79.062.747.444	0,02
Akumulasi Penyusutan	(751,232,084,113)	(867,825,946,526)	(1,006,667,091,924)	(1,137,545,358,237)	(1.267.888.604.698)	13,98
Jumlah Aset Tetap	**1,470,755,181,092**	**1,767,731,856,595**	**1,643,581,923,691**	**1,598,713,854,180**	**1.594.471.594.130**	**2,04**
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Jumlah Dana Cadangan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
PROPERTI INVESTASI						
Properti Investasi			143,536,907,772	144,976,405,972	146,284,726,222	**0.95**
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi			(17,282,597,833)	(19,319,226,240)	(21,352,825,599)	**11.15**
Jumlah Properti Investasi	**-**	**-**	**126,254,309,939**	**125,657,179,732**	**124,931,900,623**	**(0.53)**
ASET LAINNYA						**#DIV/0!**
Tagihan Penjualan Angsuran		4,987,536				(100.00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah						
Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
Aset Tak Berwujud	3,166,861,900.00	6,463,113,500	6,949,932,021.00	8,556,017,021	8,844,444,021	29.27
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(376,973,177)	(896,232,581)	(1,835,199,546)	(3,952,972,036)	(5,114,788,931)	91.92
Aset Lain-Lain	150,425,782,426.90	90,368,014,113	83,443,483,528.21	83,737,356,592	86.367.430.019	(12,95)
Akumulasi Penyusutan Aset	(68,467,866,521)	(43,881,257,078)	(41,172,675,892)	(41,593,281,748)	(42,735,673,163)	(11.12)

Uraian	Realisasi Tahun					Rata-Rata
Lain-lain						
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			4,980,860,614	42,940,277,000	1.000.352.000	(33,06)
Jumlah Aset Lainnya	**84,747,804,629**	**52,058,625,490**	**52,366,400,725**	**89,687,396,829**	**48.361.763.946**	**(13,09)**
JUMLAH ASET	**1,693,113,176,515**	**1,998,221,140,670**	**2,016,512,702,822**	**1,935,399,227,108**	**1.883.418.253.442**	**2,70**
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	58,894,021	2,667,160,107	69,227,853.09	42,241,815	42,499,843	(7.83)
Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bank			46,633,741,312.00	54,406,031,533		(100.00)
Pendapatan Diterima Dimuka	250,000,000.00	1,044,533,350	1,102,108,250.00	587,656,750	99,186,117	(20.64)
Utang Beban	2,055,071,077.00	1,731,240,223	1,757,408,932.00	2,536,511,963		(100.00)
Utang Belanja					23.081.747.311	
Utang Jangka Pendek Lainnya	805,402,443.00	6,739,711,771	1,137,264,392.00	998,849,036	1,058,849,036	7.08
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**3,169,367,541**	**12,182,645,451**	**50,699,750,739**	**58,571,291,097**	**24.282.282.307**	**66,37**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	2,088,292,250	125,887,022,927	54,406,031,533			(100.00)
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
Utang Dalam Negeri - Obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**2,088,292,250**	**125,887,022,927**	**54,406,031,533**	**-**	**-**	**(100.00)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**5,257,659,791**	**138,069,668,378**	**105,105,782,272**	**58,571,291,097**	**24.282.282.307**	**46,60**
EKUITAS						
EKUITAS						
Equitas	1,687,855,516,723.87	1,860,151,472,292	1,911,406,920,550.35	**1,876,827,936,011**	**1.859.135.971.136**	2,45
Sisa Kas BLUD						
Sisa Kas JKN						
JUMLAH EKUITAS	**1,687,855,516,724**	**1,860,151,472,292**	**1,911,406,920,550**	**1,876,827,936,011**	**1.859.135.971.136**	**2,45**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1,693,113,176,515**	**1,998,221,140,670**	**2,016,512,702,822**	**1,935,399,227,108**	**1.883.418.253.442**	**2,70**

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Buton periode tahun 2020-2024 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid. Ada beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun disini pendekatan yang dipakai adalah rasio lancar (current ratio). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio aset cepat atau rasio acid-test. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 telah dianggap baik.

Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Buton tahun 2020-2024 cukup berfluktuatif namun trennya semakin menurun dari nilai 16,63 (2020) menjadi 2,04 (2024). Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar di tahun 2020 nilainya 22 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang dibebankan. Sementara di tahun 2023 nilai aset lancarnya hanya 7-8 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang ada di tahun 2023, kondisi ini menunjukkan tingkat likuiditas Pemerintah Kabupaten Buton rendah karena kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan cukup rendah. Untuk itu yang perlu dilakukan pembatasan jumlah kewajiban lancarnya agar mengecil atau bahkan tidak melebihi nilai aset lancar yang ada.
Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Buton Tahun 2020-2024.

Tabel 2.59. Rasio Lancar Kabupaten Buton
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET LANCAR	87,427,645,457	109,694,144,069	126,649,373,439	53,889,088,287	49.428.470.318
KEWAJIBAN LANCAR	5,257,659,791	138,069,668,378	105,105,782,272	58,571,291,097	24.282.282.307
RASIO LANCAR	16.63	0.79	1.20	0.92	2,04

Sumber: BKAD Kabupaten . Buton, 2020-2024 (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh hutang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang mempengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a. *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari Debt to Equity Ratio (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin stabil keuangannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Buton dari tahun 2020-2024 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar **0,003** dan yang tertinggi terjadi di tahun 2021 sebesar **0,074**. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio terbaik (terendah) terjadi di tahun 2020, dimana nilai kewajiban yang ada jumlahnya sekitar **0,31%** dari total ekuitas yang ada. Sementara nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2021, dimana jumlah total kewajiban yang ada jumlahnya sekitar **0,074%** dari total ekuitas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban dalam kurun waktu 2020-2024 nilainya masih lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki, sehingga kemampuan Kabupaten Buton cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada masih baik. Namun, jika melihat data di tahun 2023 yang nilainya sudah mulai meningkat, maka pemerintah Kabupaten Buton perlu berhati-hati dalam menambah kewajibannya di masa yang akan datang.

Tabel 2.60. Rasio Hutang Kabupaten Buton
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	5,257,659,791	138,069,668,378	105,105,782,272	58,571,291,097	22,929,177,314
EKUITAS	1,687,855,516,724	1,860,151,472,292	1,911,406,920,550	1,876,827,936,011	1,852,973,878,691
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0.003	0.074	0.055	0.031	0.012

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2024 (diolah)

a) *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Atau menunjukkan proporsi total aset yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Buton dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif, di mana angka rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2021 dengan nilai rasio 0,0691 dan yang terendah (terbaik) terjadi di tahun 2020 dengan nilai rasio 0,0031. Oleh karena itu, secara keseluruhan Kabupaten Buton tidak memiliki risiko gagal bayar kewajiban yang ada. Artinya, secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada

jumlah hutang yang ada di Kabupaten Buton. Namun demikian, data pada tahun 2021 harus menjadi catatan khusus karena nilainya sudah cukup tinggi.

Tabel 2.61. Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	5,257,659,791	138,069,668,378	105,105,782,272	58,571,291,097	24.282.282.307
AKTIVA	1,693,113,176,515	1,998,221,140,670	2,016,512,702,822	1,935,399,227,108	1.883.418.253.442
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0.0031	0.0691	0.0521	0.0303	0,0129

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap *(fixed assets turn over)*

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buton menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/ penerimaan daerah.

Perkembangan rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren cukup berfluktuasi namun terus menurun. Rasio tahun 2020 mencapai 0,022 dan menurun menjadi 0,021 di tahun 2021, kemudian sempat naik lagi tahun 2022 menjadi 0,022, tetapi pada tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan menjadi 0,024. Itu artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Buton dalam memanfaatkan aset tetapnya semakin baik, di mana pada tahun 2020 dari Rp. 1,47 triliun nilai aset yang ada mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp. 32,59 miliar atau 2,22% dari nilai aset tetap, dan pada tahun 2024 kinerjanya mengalmi kenaikan lagi, di mana dengan aset senilai Rp. 1,59 triliun mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp. 37,34 miliar. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset tetap terhadap perolehan PAD cukup baik bahkan cenderung meningkat. Akan tetapi, efektivitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel 2.62 Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	32,595,800,124	37,376,428,695	36,389,696,537	36,845,910,169	37.566.234.618
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	1,470,755,181,092	1,767,731,856,595	1,643,581,923,691	1,598,713,854,180	1.594.471.594.130
TRASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0.022	0.021	0.022	0.023	0,024

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami perkembangan positif, di mana rasio dari nilai rasio 0,019 tahun 2020 menjadi 0,020 di tahun 2024. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan total aset di tahun 2020 mampu memberikan keuntungan PAD sebesar 2.22% dari nilai total aset itu sendiri. Kinerja pemanfaatan total aset di tahun 2024 semakin optimal hingga mampu menghasilkan 2.36% keuntungan dari nilai total aset yang ada.

Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 rata-rata nilai total aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin tidak optimal. Oleh sebab itu, kedepannya masih sangat perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi antara lain:

a) Pengembangan Aset Komersial: Menggunakan aset tetap seperti tanah kosong, bangunan tidak terpakai, atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan, pusat hiburan, hotel/penginapan, atau kompleks perkantoran yang dapat disewakan kepada pihak swasta. Tujuan pengembangan aset komersial ini adalah untuk peningkatan dan diversifikasi sumber pendapatan daerah.
b) Penyediaan Infrastruktur: Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol, atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai imbalan melalui pola kerja sama pemanfaatan infrastruktur.
c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian yang luas, pemerintah daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi. Pendapatan dari penjualan hak pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan. Selain itu, atas aktivitas pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan, pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat mengenakan pajak daerah, antara lain pajak mineral bukan logam dan batuan.
d) Pembangunan Properti Publik: Membangun properti publik seperti gedung perkantoran, pusat pemerintahan, atau fasilitas publik lainnya yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial. Pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah.
e) Kemitraan Publik-Privat (KPP): Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa. Adapun bentuk pemanfaatan aset dapat dilakukan melalui sewa, bangun guna serah, atau bangun serah guna. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghasilkan pendapatan yang signifikan.
f) Peningkatan Efisiensi Operasional: Memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, Dalam periode waktu tertentu, aset tetap yang dimiliki dapat mengalami kerusakan dan penurunan fungsi yang signifikan yang mengakibatkan

biaya pemeliharaan yang timbul lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Dalam kondisi ini, aset dapat dilakukan pengahapusan melalui pemindahtanganan dengan cara penjualan langsung atau lelang, dan apabila diperlukan penghapusan dapat dilakukan melalui pemusnahan. Efisiensi ini akan secara langsung berdampak pada pengurangan beban belanja daerah dan peningkatan PAD.

g) Pengembangan Wisata: Pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti pantai, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.

h) Pengelolaan Aset Digital: Pengelolaan Aset Digital: Pemerintah Kabupaten Buton dapat mengoptimalkan perputaran total aktiva dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan aset. Strategi ini berfokus pada penerapan sistem informasi yang komprehensif, memungkinkan pemantauan aset secara *real-time*, penjadwalan pemeliharaan yang prediktif, dan pengumpulan data historis yang akurat. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, sehingga aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan lebih efisien.

Tabel 2.63. Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	32,595,800,124	37,376,428,695	36,389,696,537	36,845,910,169	37.566.234.618
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	1,693,113,176,515	1,998,221,140,670	2,016,512,702,822	1,935,399,227,108	1.883.418.253.442
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0.019	0.019	0.018	0.019	0,020

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah**.**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buton 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

2.2.1.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan

mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata persentasenya sebesar 35,15%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2024 yang mencapai 39,24% yang juga capaian terakhir tahun 2024. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 40%, bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat.

Meskipun begitu, Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2020	285,899.73	761,460.35	37.55
2	2021	264,210.79	935,550.47	28.24
3	2022	268,988.88	781,721.96	34.41
4	2023	301,226.41	809,320.75	37.22
5	2024	338,539.37	862,710.24	39.24
Rata-Rata		**291,773.04**	**830,152.76**	**35.15**

Sumber: BKAD Kab. Buton, 2024 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,29% per tahun dari Rp. 423,55 miliar (2020) menjadi Rp. 540,26 miliar (2024). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya, dan belanja hibah dari Rp. 5,44 miliar (2021) menjadi Rp. 32 miliar (2024). Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah Daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali.

Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

1) Evaluasi Kebutuhan Pegawai: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi. Dalam hal Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.

2) Optimalisasi Produktivitas: Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
3) Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru: Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
4) Peningkatan Efisiensi Administrasi: Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
5) Pengendalian Tunjangan dan Insentif: Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.
6) Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan: Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65. Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Belanja Operasi Wajib dan Mengikat**	**290,816.46**	**273,406.62**	**298,222.56**	**333,464.77**	**373,866.28**	**6.48**
1.1	Belanja Pegawai	285,899.73	264,210.79	268,988.88	301,226.41	338,539.37	4.32
1.2	Belanja Bunga	2,130.33	3,746.31	13,795.01	8,831.37	3,310.83	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	-	5,449.52	12,727.46	23,314.61	32,001.49	#DIV/0!
1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	2,711.20	92.37	14.58	#DIV/0!
1.6	Belanja keuangan	2,786.40	-	-	-	-	
2	**Belanja Transfer**	**115,674.20**	**115,837.51**	**105,394.85**	**108,670.41**	**111,996.54**	**(1.12)**
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1,688.86	-	-	-	-	-
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	113,985.34	115,837.51	105,394.85	108,670.41	111,996.54	(1.12)
3	**Belanja Tak Terduga**	**14,764.67**	**2,208.65**	**4,645.77**	**268.51**	**-**	**(100.00)**
4	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2,000.00**	**3,136.00**	**41,622.17**	**46,633.74**	**54,406.03**	**128.38**
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	38,472.17	46,633.74	54,406.03	18.92
4.2	penyertaan modal daerah;	2,000.00	3,136.00	3,150.00	-	-	(100.00)
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	**423,255.32**	**394,588.77**	**449,885.34**	**489,037.43**	**540,268.85**	**6.29**

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2024 (diolah)

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2021, 2023, dan 2024, di mana defisit riil pada tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 96,29 miliar, Rp 77,35 miliar, dan Rp 4,52 miliar. Sementara pada tahun 2020 dan 2020 terjadi surplus anggaran.

Tabel 2.66. Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	794,716.34	839,259.91	783,918.68	731,961.42	858.414,24
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	759,460.35	932,414.47	740,099.79	762,687.01	808.304,24
3	Pengeluaran Pembiayaan	2,000.00	3,136.00	41,622.17	46,633.74	54.406,03
	(Defisit Riil)	33,255.98	- 96,290.56	2,196.72	- 77,359.34	- 4.296,03

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2024 (diolah)

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dan komponen penutupnya, diketahui bahwa semua defisit riil anggaran yang terjadi dapat ditutup sepenuhnya oleh SiLPA pada tahun yang bersangkutan, yaitu sebesar Rp 96,29 miliar (2021), Rp 77,36 miliar (2023), dan Rp 4,29 miliar (2024). Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman, bahkan masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target SiLPA atau komponen penutup lainnya yang ditetapkan.

Tabel 2.67. Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	31,992.40	67,323.53	94,831.70	110,653.34	33,268.81
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	**31,992.40**	**67,323.53**	**94,831.70**	**110,653.34**	**33,268.81**

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2020-2024 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Buton dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Buton.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2030. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah kedepan harus lebih mengedepankan asas efektifitas dan efisiensi.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2026 hingga 2030.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2029. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.
3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak,, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.
5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.

7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD tahun 2024 dan/atau target RKPD tahun 2025.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Buton masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Buton masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton tahun 2026-2030 diproyeksikan tumbuh ± 16.05 % per tahun dari Rp. 933 miliar (2026) menjadi Rp. 1,665,19 miliar (2030). Hal ini didasarkan pada kondisi/realisasi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh 1,95 % per tahun namun hanya didorong oleh tumbuhnya pendapatan transfer saja, sementara realisasi PAD sebesar 3,61% per tahun. Sementara komponen proyeksi pendapatan ke depan sekaligus untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis, maka berbagai kebijakan keuangan perlu difokuskan untuk menumbuhkan PAD secara berkelanjutan. Sementara untuk sumber pendapatan seperti pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah akan diproyeksikan konsisten dengan pertumbuhan 5% per tahun dari tahun dasar angka target RKPD tahun 2025.

Untuk PAD tahun 2026-2030 diproyeksikan tumbuh ± 66,18% per tahun dari Rp 77,67 miliar (2026) menjadi Rp. 135,81 miliar (2030). Dari seluruh komponen sumber PAD, baik itu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan tumbuh ± 5% per tahun.

Proyeksi pertumbuhan Pajak Daerah yang sebesar ± 5,00% per tahun dari Rp. 35,81 miliar (2026) menjadi Rp. 62,97 miliar (2030), yang terutama akan didorong oleh sumber opsen PKB dan BBNKB. Selain itu, target minimal proyeksi pertumbuhan pajak daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

1) Penilaian Properti yang Akurat: Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.
2) Peningkatan Kepatuhan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
3) Diversifikasi Sumber Pajak: Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Buton.

Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.

4) Inisiatif Peningkatan Layanan: Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
5) Kemitraan Publik-Swasta: Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.
6) Peninjauan Kembali Insentif Pajak: Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
7) Evaluasi Kebijakan Pajak: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
8) Peningkatan Pengawasan dan Transparansi: Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.

Proyeksi pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2026-2030 ditargetkan tumbuh ± 5% per tahun dari Rp. 3,79 miliar (2026) menjadi Rp. 18,25 miliar (2030). Hal ini didasarkan pada kondisi/realisasi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang berkontraksi sangat besar sebesar -25,34% per tahun. Pada umumnya, ruang Pendapatan Retribusi Daerah relatif terbatas yang merupakan imbas dari ditetapkannya Undang-undang nomor 1 tahun 2022, di mana terdapat sejumlah objek retribusi yang sudah tidak boleh dilakukan pemungutan oleh Daerah.

Untuk itu diperlukan strategi untuk memaksimalkan kembali pendapatan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

1) Analisis Potensi Sektor dan Layanan: Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan persampahan dan sebagainya.
2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.

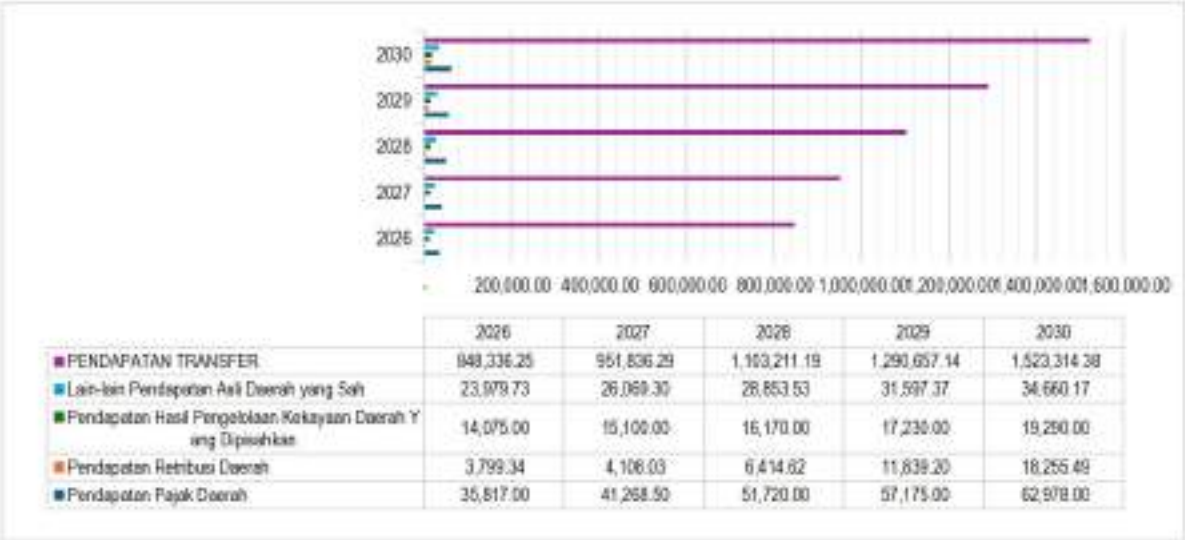
7) Diversifikasi Pendapatan: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.
8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2026-2030 diproyeksikan tumbuh ± 5% per tahun dari Rp. 14,07 miliar (2026) menjadi Rp. 19,29 miliar (2030). Target ini juga mempertimbangkan pertumbuhan masa lalu yang mencapai 13,96% per tahun. Untuk mencapai target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maka perlu didorong BUMD dan Swasta yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif melalui:

1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain.
2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik.
3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran.
4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru.
5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam.
6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran.
7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi.
8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD.
9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan.
10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurun waktu 2026-2030 ditargetkan naik ± 5% pertahun dari Rp. 23,97 miliar (2026) menjadi Rp. 34,66 miliar (2030). Target ini cukup optimis namun masih realistis jika mempertimbangkan capaian rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir (2020-2024) yang sebesar 9,38 % pertahun. Strategi umum untuk mencapai target pertumbuhan ini adalah dengan memaksimalkan dan mengefektifkan kinerja BLUD serta meningkatkan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dapat meningkatkan penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga.

Gambar 2.58. Target Komposisi PAD Kabupaten Buton Tahun 2026-2030



	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN TRANSFER	848,336.25	951,836.29	1,163,211.19	1,290,657.14	1,523,314.38
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23,979.73	26,069.30	28,853.53	31,597.37	34,660.17
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14,075.00	15,100.00	16,170.00	17,230.00	19,290.00
Pendapatan Retribusi Daerah	3,799.34	4,106.03	6,414.62	11,839.20	18,255.49
Pendapatan Pajak Daerah	35,817.00	41,268.50	51,720.00	57,175.00	62,978.00

Sumber: BKAD, BAPENDA Kabupaten Buton, 2025 (diolah)

Pendapatan Daerah Kabupaten Buton masih didominasi oleh sumber Pendapatan Transfer yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara. Untuk menjaga kualitas perencanaan keuangan daerah agar tidak terlalu dinamis baik Pendapatan Transfer maupun Lain-Lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan naik 5% pertahun dari tahun dasar anggaran RKPD tahun 2025.

Secara umum Pendapatan Transfer 2026-2030 ditargetkan tumbuh ± 15,24 % yaitu sebesar Rp 848,33 miliar (2026) dan Rp 1.523 miliar (2030). Namun, berdasarkan data yang tersedia, tidak semua komponen pembentuknya yaitu Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa dari tahun 2026-2030 tumbuh 5% per tahun seperti yang ditargetkan.

.

Gambar 2.59. Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Buton Tahun 2026-2030



Sumber: BKAD, BAPENDA Kabupaten Buton, 2025 (diolah)

Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Buton tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.68. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Buton
Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**	**858,414,241.941,13**	**933,007,320.806**	**1,045,382,117.698**	**1,213,369,342.897**	**1,415,498,700.647**	**1,665,498,047.450**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**37,566,234.618,13**	**77,671,072.933**	**86,545,830.585**	**103.158.155.823**	**117.841.564.842**	**135.183.665.714**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4,584,654.176,00	35,817,000,000	41,268,500.000	51,720,000.000	57,175,000.000	62,978,000.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3,121,718.282,00	3,799,343.235	4,108,031,485	6,414,622.172	11,839,198.162	18,255,491.201
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13,024,730.687,00	14.075.000,000	15,100,000.000	16,170,000.000	17,230,000.000	19,290,000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16,835,131.473,13	23,979,729,698	26,069,299.100	28,853,533.651	31,597,366.680	34,660,174.513
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**790,786,695.023**	**848,336,247.873**	**951,836,287.113**	**1,103,211,187.074**	**1,290,657,135.805**	**1,523,314,381.736**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**768,996,067.229**	**824,582,473.011**	**927,851,895.614**	**1,078,993,872.771**	**1,266,204,569.471**	**1,498,624,210.849**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**						
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	47.235.639.262	26,496,005.693	26,505,799.679	26,515,962.462	26,526,496.180	26,537,402.999
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	22.309.864.000	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	445.497.391.296	545.619,330.308	633.793,095.244	768.632,176.844	938.236.188.427	1.151.641,079.478
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	96.527.584.388	188.573,296.010	203.659,159.691	219.951,892.466	237.548,043.863	256.551,887.372
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah/Fiskal	6.213.587.000	-	-	-	-	-
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**		-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian		-	-	-	-	-
1.2.1.4	**Dana Desa**	**65.477.021.000**	**63.893,841.000**	**63.893,841.000**	**63.893,841.000**	**63.893,841.000**	**63.893,841.000**
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**21,790,627.794**	**23.753.774.861**	**23.984.391.499**	**24.217.314.303**	**24.452.566.335**	**24.690.170.887**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	21,117,637.000	23.753.774.861	23.984.391.499	24.217.314.303	24.452.566.335	24.690.170.887
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**		-	-	23.984,39	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	-
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**30.061.312.300**	**7.000,000.000**	**7.000,000.000**	**7.000,000.000**	**7.000,000.000**	**7.000,000.000**
1.3.1	Pendapatan Hibah	21.117.637.000	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendatan Dana Darurat		-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	8,943,675.300	7.000,000.000	7.000,000.000	7.000,000.000	7.000,000.000	7.000,000.000

Sumber: BKAD, BAPENDA Kabupaten Buton, 2025 (diolah)

b. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib di luar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Buton yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
    a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
    b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Buton
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Buton akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Buton, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan danjasa perusahaan, perdagangan, hotel dan restoran.

Belanja Daerah Kabupaten Buton dalam 5 (lima) tahun ke depan diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan ± 14,28% per tahun dari Rp. 862 miliar (2025) menjadi Rp. 1,681 miliar (2030). Target pertumbuhan Belanja Daerah ini relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu 2020-2024, yang mencapai pertumbuhan ± 1,57% per tahun karena adanya peningkatan pendapatan transfer dalam kurun waktu 2020 ke 2024.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal, khususnya yang memberikan pelayanan kepada

masyarakat dan investasi, akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan.

Gambar 2.60. Target Belanja Operasi Kabupaten Buton Tahun 2026-2030 (dalam juta)



Sumber: BKAD, BAPENDA Kabupaten Buton, 2025 (diolah)

Dengan melihat potensi semakin tertekannya ruang fiskal daerah maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

1) Pengelolaan Anggaran yang Teliti: Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area dimana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
2) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.
3) Penggunaan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
4) Kebijakan Penghematan Biaya: Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat, namun lebih mengarahkan pembiayaan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan ekonomi mandiri yang inklusif.

5) Kolaborasi dan Konsolidasi: Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis.
6) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.
7) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab, serta memastikan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar OPD menjadi syarat penting untuk menghindari tumpang tindih program dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal.
8) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus secara rutin dan teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area dimana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.
9). Sinergi Sumber Pendanaan dan Kemitraan : Keterbatasan kapasitas fiskal daerah dijawab dengan strategi diversifikasi sumber pendanaan. Optimalisasi APBD Kabupaten, sinergi dengan APBD Provinsi, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN, serta kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga donor menjadi langkah strategis untuk memperkuat ruang fiskal. Dengan pola kemitraan ini, program prioritas tidak hanya bergantung pada APBD daerah, tetapi juga memperoleh dukungan multi-level governance dan kolaborasi lintas sektor.

Secara keseluruhan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Buton tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
2	**BELANJA**	**808.304.236.575**	**945.882.821.833**	**1.058.901.393.776**	**1.227.564.582.779**	**1.430.403.702.524**	**1.681.148.299.420**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**555.838.101.070**	**610.385.310.061**	**627.287.556.794**	**648.055.474.785**	**670.875.279.685**	**695.951.780.596**
2.1.1	Belanja Pegawai	338.539.374.977	423.575.550.844	423.996.821.656	424.435.666.133	424.893.490.168	425.371.812.126
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	181.971.823.004	182,115,282.327	198,126,810.559	217,939,491.615	239.733.440.777	263.706.784.855
2.1.3	Belanja Bunga	3.310.833.712	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	0	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	32.001.494.152	4,563,746.640	5,020,121.304	5.522.133.435	6.074.346.778	6.681.781.456
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	14.575.225	54,600.000	60.060.000	66.066.000	72.672.600	79.939.860
2.2	**BELANJA MODAL**	**140,469,600.076**	**207.934.542.205**	**294.406.896.633**	**427.266.878.468**	**588.934.769.945**	**791.707.144.478**
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	21,095,008.144	41.854.987.058	64.048.222.966	96.975.110.290	107.012.574.693	141.815.169.386
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	79,622,840.009	80.419.557.263	109.371.086.440	159.632.378.503	245.111.251.996	325.555.618.560
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	38,013,245.920	84.018.207.909	118.606.991.764	167.207.526.253	231.805.741.295	316.138.398.000
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	733,350.000	66.789.975	96.845.463	140.425.922	203.617.587	295.245.501
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	1,005,156,00	1.575.000.000	2.283.750.000	3.311.437.500	4.801.584.375	7.902.713.031
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**		**2,495,960.643**	**2,745,556.708**	**3,020,112.378**	**3,322,123.616**	**3.654.335.978**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	0	2,495,960.643	2,745,556.708	3,020,112.378	3,322,123.616	3.654.335.978
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**111,996,535.432**	**125,067,008.924**	**134,461,383.641**	**149,222,117.148**	**167,271,529.277**	**189.835.038.368**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	-	-	-	-	-	-
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	-
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**111,996,535.432**	**125,067,008.924**	**134,461,383.641**	**149,222,117.148**	**167,271,529.277**	**189.835.038.368**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	111,996,535.432	125,067,008.924	134.461.383.641	149,222,117.148	167,271,529.277	189.835.038.368
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.110.005.386,13	(12,875,501.027)	(13.519.276.078)	(14.195.239.882)	(14.905.001.876)	(15.650.251.970)

Sumber: BKAD, BAPENDA Kabupaten Buton, 2025 (diolah)

c. Proyeksi Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Buton tahun 2025-2029 adalah dengan menekan dan menurunkan SiLPA sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan neto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada.

Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi Pembiayaan Daerah dan proyeksi keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.70. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**33.268.254.649,84**	**12.875.501.027**	**13.519.276.078**	**14.195.239.882**	**14.905.001.876**	**15.650.251.970**
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	33.268.808.949,84	12.875.501.027	13.519.276.078	14.195.239.882	14.905.001.876	15.650.251.970
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;		-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;		-	-	-	-	-
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.		-	-	-	-	-
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**54.406.031.533**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	54.406.031.533	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;		-	-	-	-	-
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;		-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;		-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan		-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**(21.137.776.883,16)**	**12.875.501.027**	**13.519.276.078**	**14.195.239.882**	**14.905.001.976**	**15.650.251.970**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	**28.972.228.482,97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**(0.00)**	-

Tabel 2.71. Proyeksi APBD Kabupaten Buton Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**	**858.414.241.941,13**	**933.007.320.806**	**1.045.382.117.698**	**1.213.369.342.897**	**1.415.498.700.647**	**1.665.498.047.450**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	37.566.234.618,13	**77,671,072.933**	**86,545,830.585**	**103.158.155.823**	**117.841.564.842**	**135.183.665.714**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.584.654.176	35,817,000,000	41,268,500.000	51,720,000.000	57,175,000.000	62,978,000.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3,121,718.282	3,799,343.235	4,108,031,485	6,414,622.172	11,839,198.162	18,255,491.201
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.024.730.667	14.075.000,000	15,100,000.000	16,170,000.000	17,230,000.000	19,290,000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.835.131.473,13	23,979,729,698	26,069,299.100	28,853,533.651	31,597,366.680	34,660,174.513
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**790.786.695.023**	**848,336,247.873**	**951,836,287.113**	**1,103,211,187.074**	**1,290,657,135.805**	**1,523,314,381.736**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**768.996.067.229**	**824,582,473.011**	**927,851,895.614**	**1,078,993,872.771**	**1,266,204,569.471**	**1,498,624,210.849**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**						
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	47.235.639.262	26,496,005.693	26,505,799.679	26,515,962.462	26,526,496.180	26,537,402.999
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	22.309.864.000	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	445.497.391.296	545.619,330.308	633.793,095.244	768.632,176.844	938.236.188.427	1.151.641,079.478
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	96.527.584.388	188.573,296.010	203.659,159.691	219.951,892.466	237.548,043.863	256.551,887.372
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (Fiskal)	6.213.587.000	-	-	-	-	-
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**		-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian		-	-	-	-	-
1.2.1.4	**Dana Desa**	**6.547.7021.000**	**63.893,841.000**	**63.893,841.000**	**63.893,841.000**	**63.893,841.000**	**63.893,841.000**
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**21.790.627.794**	**23.753.774.861**	**23.984.391.499**	**24.217.314.303**	**24.452.566.335**	**24.690.170.887**

No	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	21,117,637.000	23.753.774.861	23.984.391.499	24.217.314.303	24.452.566.335	24.690.170.887
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**		-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota		-	-	-	-	-
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**30.061.312.300**	**7.000,000.000**	**7.000,000.000**	**7.000,000.000**	**7.000,000.000**	**7.000,000.000**
1.3.1	Pendapatan Hibah	21.117.637.000	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendatan Dana Darurat		-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	8.943.675.300	7.000,000.000	7.000,000.000	7.000,000.000	7.000,000.000	7.000,000.000
2	**BELANJA**	**808.304.236.575**	**945,882,821.833**	**1,058,901,393.776**	**1,227,564,582.779**	**1.430.403.702.524**	**1.681.148.299.420**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**555.838.101.070**	**610.385.310.061**	**627.287.556.794**	**648.055.474.785**	**670.875.279.685**	**695.951.780.596**
2.1.1	Belanja Pegawai	338.539.374.977	423.575.550.844	423.996.821.656	424.435.666.133	424.893.490.168	425.371.812.126
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	181.971.823.004	182,115,282.327	198,126,810.559	217,939,491.615	239.733.440.777	263.706.784.855
2.1.3	Belanja Bunga	3.310.833.712	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	0	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	32.001.494.152	4,563,746.640	5,020,121.304	5.522.133.435	6.074.346.778	6.681.781.456
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	14.575.225,00	54,600.000	60.060.000	66.066.000	72.672.600	79.939.860
2.2	**BELANJA MODAL**	**140.469.600.073**	**207.934.542.205**	**294.406.896.633**	**427.266.878.468**	**588.934.769.945**	**791.707.144.478**
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	21.095.008.144	41.854.987.058	64.048.222.966	96.975.110.290	107.012.574.693	141.815.169.386
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	79.622.840.009	80.419.557.263	109.371.086.440	159.632.378.503	245.111.251.996	325.555.618.560
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.013.245.920	84.018.207.909	118.606.991.764	167.207.526.253	231.805.741.295	316.138.398.000
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	733.350.000	66.789.975	96.845.463	140.425.922	203.617.587	295.245.501

No	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	1.005.156,00	1.575.000.000	2.283.750.000	3.311.437.500	4.801.584.375	7.902.713.031
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**0**	**2,495,960.643**	**2,745,556.708**	**3,020,112.378**	**3,322,123.616**	**3.654.335.978**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	0	2,495,960.643	2,745,556.708	3,020,112.378	3,322,123.616	3.654.335.978
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**111,996,535.432**	**125.067.008.924**	**134.461.383.641**	**149.222.117.148**	**167.271.529.277**	**189.835.038.368**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	-	-	-	-	-	-
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	-
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**111,996,535.432**	**125.067.008.924**	**134.461.383.641**	**149.222.117.148**	**167.271.529.277**	**189.835.038.368**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	111,996,535.432	125.067.008.924	134.461.383.641	149.222.117.148	167.271.529.277	189.835.038.368
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	50,110,005.366,13	(12,875,501.027)	(13,519,276.078)	(14,195,239.882)	(14,905,001.876)	(15,650,251.970)
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**33.268.254.649,84**	**12.875.501.027**	**13.519.276.078**	**14.195.239.882**	**14.905.001.876**	**15.650.251.970**
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	33.268.808.949,84	12.875.501.027	13.519.276.078	14.195.239.882	14.905.001.876	15.650.251.970
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-	-

No	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;		-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;		-	-	-	-	-
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.		-	-	-	-	-
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**54.406.031.533**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	54.406.031.533	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;		-	-	-	-	-
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;		-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;		-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan		-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**(21.137.776.883,16)**	**12.875.501.027**	**13.519.276.078**	**14.195.239.882**	**14.905.001.976**	**15.650.251.970**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	**28.972.228.482,97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**(0.00)**	-

Sumber: BKAD, BAPENDA Kabupaten Buton, 2025 (diolah)

2.2.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas. Untuk itu, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal adalah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Berdasarkan analisis masing-masing pos Belanja Daerah dan Pembiayaan, diproyeksikan Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas tahun 2025-2030 akan mengalami peningkatan, dari Rp 544,82 miliar (2025) menjadi Rp 625.73 miliar (2030).

Adapun rincian proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Buton tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72. Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Kabupaten Buton Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	**Belanja Operasi**	**373.853.160.363**	**428.270.027.734**	**429.160.746.235**	**430.115.983.170**	**431.141.838908**	**432.244.995.741**
1.1	Belanja Pegawai	338.539.374.977	423.575.550.844	423.996.821.656	424.435.666.133	424.893.490.168	425.371.812.126
1.2	Belanja Bunga	3.310.833.712	-	-	-	-	
1.3	Belanja Subsidi	-	76.130.250	83.743.275	92.117.602	101.329.362	111.462.299
1.4	Belanja Hibah	32.001.494.152	4,563,746.640	5,020,121.304	5.522.133.435	6.074.346.778	6.681.781.456
1.5	Belanja Bantuan Sosial	14.575.225	54,600.000	60.060.000	66.066.000	72.672.600	79.939.860
2	**Belanja Transfer**	**111,996,535.432**	**125.067.008.924**	**134.461.383.641**	**149.222.117.148**	**167.271.529.277**	**189.835.038.368**
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	111,996,535.432	125.067.008.924	134.461.383.641	149.222.117.148	167.271.529.277	189.835.038.368
3	**Belanja Tak Terduga**	**0**	**2.495.960.643**	**2.745.556.708**	**3.020.112.378**	**3,322,123.616**	**3.654.335.978**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	0	2.495.960.643	2.745.556.708	3.020,112.378	3,322,123.616	3.654.335.978
4	**Pengeluaran Pembiayaan**	**54.406.031.533**	-	-	-	-	-
4.1.	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	54.406.031.533	-	-	-	-	-
4.2	Penyertaan modal daerah;	-	-	-	-	-	-
4.3.	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-
4.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas	**540.255.727.328**	**555.832.997.301**	**566.367.686.584**	**582.358.212.696**	**601.735.491.801**	**625.734.370.087**

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2025 (diolah)

Analisis Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Namun perlu dipahami bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sebagian besar belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dan lain-lain), bantuan sosial, dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan dengan dua metode berbeda Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil keuangan daerah dan kapasitas riil pagu belanja program/kegiatan/subkegiatan OPD.

Dari proyeksi kapasitas riil pagu OPD tersebut kemudian perlu didistribusikan berdasarkan prioritas pemanfaatannya antara lain:

a. Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
b. Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
c. Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Pembagian pendanaan untuk Program Prioritas di atas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.73. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2026-2030

No.	Uraian	Proyeksi Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	933.007.320.806	1.045.382.117.698	1.213.369.342.897	1.415.498.700.647	1.665.498.047.450
2.	Penerimaan Pembiayaan	12.875.501.027	13.519.276.078	14.195.239.882	14.905.001.876	15.650.251.970
	TOTAL PENERIMAAN					
	(***Dikurangi***):					
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	555.832.997.301	566.367.686.584	582.358.212.696	601.735.491.801	625.734.370.087
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**390.049.824.532**	**492.533.707.192**	**645.206.460.083**	**828.668.210.722**	**1.055.413.929.333**

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2025 (diolah)

Tabel 2.74. Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Buton Tahun 2026-2030

No.	Uraian	Proyeksi Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	933.007.320.806	1.045.382.117.698	1.213.369.342.897	1.415.498.700.647	1.665.498.047.450
2.	Penerimaan Pembiayaan	12.875.501.027	13.519.276.078	14.195.239.882	14.905.001.876	15.650.251.970
	TOTAL PENERIMAAN					
	(***Dikurangi***):					
3	Belanja Transfer	125.067.008.924	134.461.383.641	149.222.117.148	167.271.529.277	189.835.038.368
4	Belanja Tak Terduga	2.495.960.643	2.745.556.708	3.020.112.378	3,322,123.616	3.654.335.978
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Kapasitas Riil Pagu OPD	**818.319.852.266**	**921.694.453.427**	**1.075.322.353.253**	**1.263.132.173.246**	**1.487.658.925.074**

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2025 (diolah)

Tabel 2.75. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Buton Tahun 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan OPD	**818.319.852.266**	**921.694.453.427**	**1.075.322.353.253**	**1.263.132.173.246**	**1.487.658.925.074**
2	Prioritas I	455.149.501.830	512.646.454.996	598.094.292.879	702.554.114.759	827.435.894.126
3	Prioritas II	245.495.955.680	276.508.336.028	322.596.705.976	378.939.651.974	446.297.677.522
4	Prioritas III	117.674.394.756	132.539.662.403	154.631.354.398	181.638.406.513	213.925.353.426
	JUMLAH	**818.319.852.266**	**921.694.453.427**	**1.075.322.353.253**	**1.263.132.173.246**	**1.487.658.925.074**

Sumber: BKAD Kabupaten Buton, 2025 (diolah)

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selalu memiliki dinamika permasalahan dan isu yang selalu mengiringi. Permasalahan merupakan *gab* antara rencana dan realisasi, permasalahan dapat diartikan belum tercapainya tujuan dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam merumuskan permasalahan perlu adanya identifikasi dan analisis dari evaluasi pencapaian-pencapaian pembangunan sebelumnya, sebagai gambaran apa yang menjadi sumber/akar masalah dan bagian mana yang harus diperbaiki. Perumusan permasalahan pembangunan merupakan bagian penting dalam perencanaan. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang tepat, diharapkan akan mampu memberikan arah pijakan dalam perencanaan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga kebijakan daerah sebagai tindaklanjut, diharapkan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien. Selain permasalahan, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya antisipasi isu strategis baik berupa ancaman maupun peluang yang berdampak besar dalam pembangunan daerah.

Memahami dinamika permasalahan dan gejolak pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Buton, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu Internasional, Nasional, dan daerah serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi 8 (delapan) permasalahan yaitu:

1) Belum optimalnya transformasi ekonomi berbasis hilirisasi
2) Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi dalam peningkatan kualitas tata kelola
3) Belum optimalnya upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah
4) Masih kurangnya pembangunan SDM yang unggul
5) Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat Buton
6) Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup serta potensi kebencanaan yang tinggi
7) Adanya ancaman penurunan implementasi nilai kebudayaan dalam kegiatan bermasyarakat di kalangan generasi muda
8) Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan

Keterkaitan antara permasalahan utama dan permasalahan pokok dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

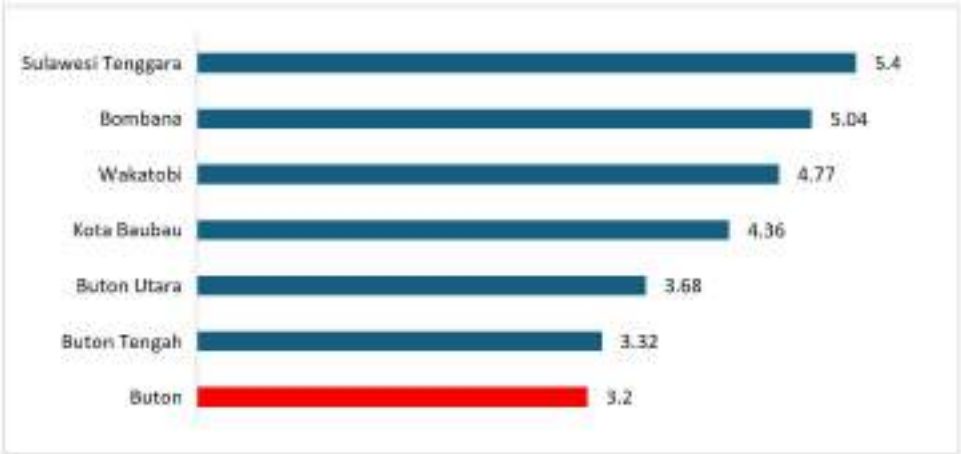
Gambar 2.61
Permasalahan Kabupaten Buton



1. Belum Optimalnya Transformasi Ekonomi Berbasis Hilirisasi

Kabupaten Buton saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan ekonomi yang memerlukan perhatian dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi daerah. Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ini adalah rendahnya LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kabupaten Buton, yang menempatkannya pada peringkat terendah di antara Kabupaten/Kota di Pulau Buton pada tahun 2024.

Gambar 2.62. Perbandingan LPE Kabupaten Buton dengan Kab/Kota se-Pulau Buton Tahun 2024



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2025

Selain itu, kontribusi PDRB Kabupaten Buton terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara hanya mencapai 2,79%, mencerminkan keterbatasan kontribusi daerah terhadap perekonomian provinsi. Meskipun demikian, Kabupaten Buton memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup besar, yang seharusnya dapat dijadikan sebagai

modal utama dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sektor pertambangan dan penggalian menjadi kontributor terbesar terhadap ekonomi Kabupaten Buton, dengan kontribusi mencapai 34,55% pada tahun 2024. Meskipun sektor ini memberikan sumbangan yang signifikan, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ekstraktif berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi daerah, yang lebih mengarah pada pemanfaatan SDA yang tidak terbarukan. Di sisi lain, sektor industri pengolahan, yang seharusnya dapat memberikan nilai tambah bagi produk lokal, justru mencatatkan kontribusi yang sangat rendah, hanya sebesar 2,5% terhadap PDRB Kabupaten Buton. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengembangan sektor pengolahan yang lebih bernilai dan memiliki daya saing yang tinggi.

Potensi SDA yang dimiliki Kabupaten Buton, terutama di sektor perikanan, pertanian, dan kelautan, masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya infrastruktur pengolahan dan pemasaran yang dapat meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Akibatnya, sebagian besar hasil alam yang diproduksi di Kabupaten Buton hanya dijual dalam bentuk mentah tanpa adanya proses hilirisasi yang dapat menambah nilai dan manfaat ekonomi yang lebih besar. Hal ini menyebabkan potensi ekonomi daerah tidak tergali secara optimal, sehingga berdampak pada terbatasnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kontribusi sektor pengolahan yang relatif rendah dan ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif, Kabupaten Buton menghadapi tantangan besar dalam menciptakan perekonomian yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, penguatan hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah perlu menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton.

2. Belum Optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Kabupaten Buton menghadapi tantangan dalam upaya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, yang tercermin dalam rendahnya skor Indeks Reformasi Birokrasi yang masih berada pada angka 54,6 dengan kategori CC pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di daerah ini belum berjalan dengan optimal. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, reformasi birokrasi diharapkan dapat memperbaiki sistem pengelolaan administrasi publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas di semua level pemerintahan. Namun, realitas menunjukkan bahwa perbaikan yang diperlukan masih sangat mendalam, dengan indikator reformasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan dan praktik di lapangan.

Selain itu, rendahnya capaian Indeks Inovasi Daerah yang hanya mencapai 44,29 pada tahun 2024 semakin memperburuk gambaran mengenai kelemahan birokrasi yang ada di Kabupaten Buton. Inovasi daerah berfungsi sebagai katalisator dalam mengoptimalkan berbagai potensi lokal dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Namun, dengan rendahnya indeks ini, Kabupaten Buton menghadapi kesulitan dalam mengembangkan kebijakan dan program yang dapat merespons perubahan dinamika sosial-ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Minimnya inovasi dalam pemerintahan juga berkontribusi pada terhambatnya pencapaian pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan efisien.

Salah satu penyebab utama dari belum optimalnya reformasi birokrasi dan inovasi di Kabupaten Buton adalah adanya hambatan struktural dalam sistem pemerintahan. Proses birokrasi yang belum sepenuhnya transparan dan efisien, serta kurangnya

integrasi antara sektor-sektor terkait, mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Hal ini juga tercermin dalam kurangnya dorongan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam memanfaatkan teknologi dan inovasi yang ada untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Selain itu, kurangnya pengawasan dan evaluasi yang sistematis terhadap kinerja aparatur juga memperburuk kualitas tata kelola yang ada.

Tantangan lain yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berkompeten dalam bidang teknologi, manajemen, dan pemerintahan publik. Tanpa adanya pelatihan yang berkesinambungan serta dukungan dalam meningkatkan kualitas SDM di lingkungan pemerintahan, proses reformasi birokrasi tidak dapat berjalan efektif. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya daya saing Kabupaten Buton dalam menerapkan kebijakan berbasis teknologi dan informasi yang dapat mempermudah pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

3. Belum optimalnya upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah

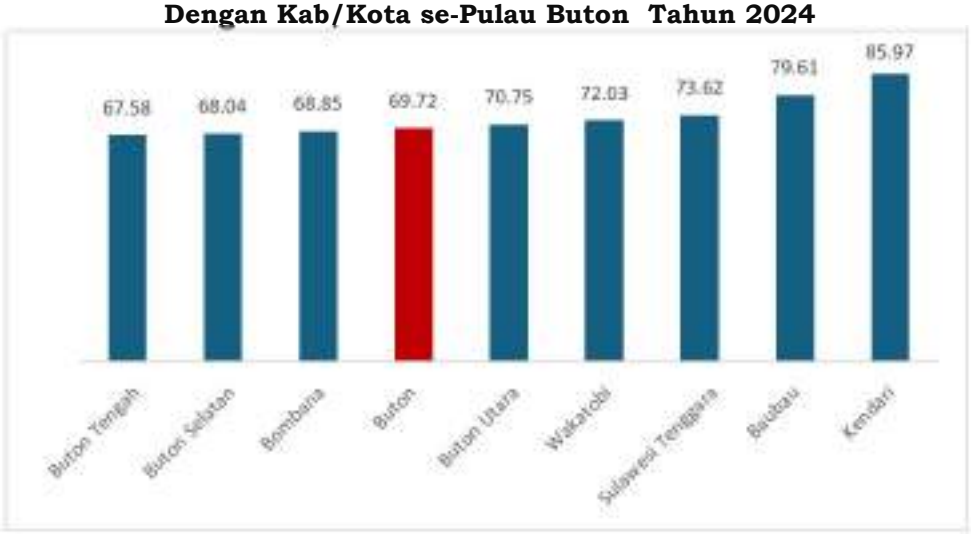
Kabupaten Buton menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, yang sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam (SDA) yang dikelola di tingkat pusat. Meskipun memiliki potensi SDA yang melimpah, seperti sektor pertambangan, kelautan, dan pertanian, pengelolaan dan pemanfaatannya sangat bergantung pada kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembatasan dalam pengambilan dan pemanfaatan SDA ini mempengaruhi fleksibilitas daerah dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menciptakan tantangan dalam memaksimalkan potensi yang ada untuk membiayai pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selain itu, rendahnya tingkat inovasi dalam mengembangkan sektor pendapatan baru juga menjadi hambatan dalam mencapai kemandirian fiskal. Kabupaten Buton masih menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan industri pengolahan lokal atau sektor pariwisata berbasis potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD. Oleh karena itu, diperlukan dorongan untuk mengembangkan inovasi yang dapat mengoptimalkan potensi lokal, menciptakan peluang ekonomi baru, dan memperkuat kapasitas daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskalnya. Tanpa adanya penguatan di sektor-sektor tersebut, Kabupaten Buton akan terus menghadapi kesulitan dalam mencapai kemandirian fiskal yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4. Masih Kurangnya Pembangunan SDM yang Unggul

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan fondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah. Namun, hingga tahun 2024, Kabupaten Buton masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek ini. Rata-rata lama sekolah (RLS) yang baru mencapai 8,63 tahun menempatkan Kabupaten Buton di peringkat ke-11 se-Sulawesi Tenggara, masih di bawah capaian provinsi. Begitu pula dengan angka harapan hidup (UHH) yang tercatat sebesar 68,67 tahun, berada di peringkat ke-14 dari seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut, dan jauh tertinggal dari capaian provinsi yang mencapai 71,67 tahun. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan hal serupa, dengan nilai 69,72 dan berada di peringkat ke-12 se-Sulawesi Tenggara

Gambar 2.63. Perbandingan IPM Kabupaten Buton Dengan Kab/Kota se-Pulau Buton Tahun 2024



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2025

Tantangan ini diperkuat oleh struktur angkatan kerja yang sebagian besar masih didominasi oleh penduduk berpendidikan dasar atau bahkan tidak menyelesaikan pendidikan formal. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kerja di Kabupaten Buton hanya menamatkan pendidikan setingkat Sekolah Dasar ke bawah, termasuk yang tidak lulus atau tidak pernah mengenyam pendidikan. Meskipun angka melek huruf Kabupaten Buton tercatat sebesar 95,88% pada tahun 2023 dan berada di peringkat ke-8 se-Sultra, capaian ini masih sedikit di bawah rata-rata provinsi, yang menandakan perlunya upaya tambahan dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat secara menyeluruh.

Untuk menghadapi persoalan ini, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam pembangunan SDM, baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan perlu didukung dengan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu, penguatan kompetensi tenaga pengajar, serta perluasan program pelatihan dan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Di sisi lain, sektor kesehatan juga perlu ditingkatkan melalui penguatan layanan dasar dan edukasi masyarakat. Dengan penguatan kapasitas SDM yang berkelanjutan, Kabupaten Buton akan memiliki fondasi yang lebih kokoh dalam mengakselerasi pembangunan daerah secara lebih inklusif dan berdaya saing.

5. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan Masyarakat Buton

Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Buton menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga permasalahan pokok yang menjadi akar dari tingginya angka kemiskinan tersebut.

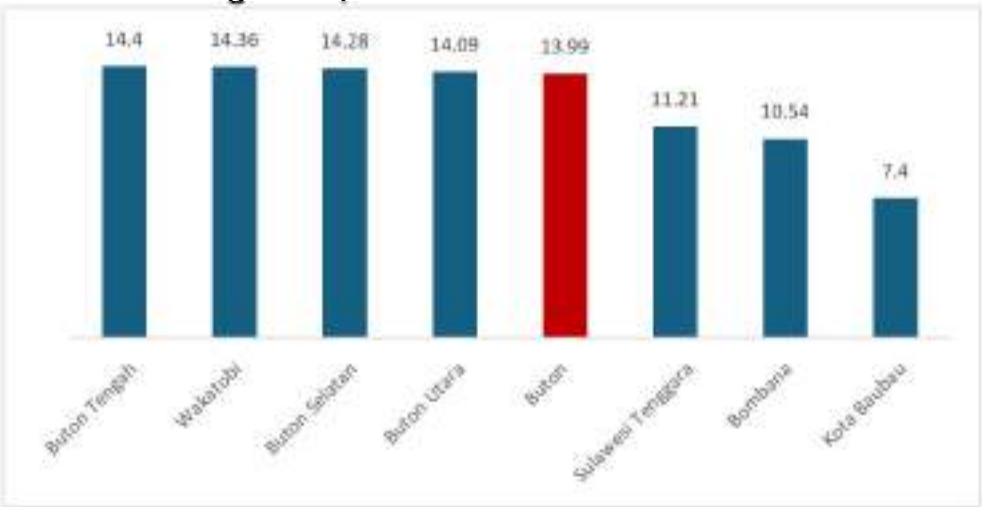
a. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya daya beli masyarakat

Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi di Kabupaten Buton menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 13,99 persen, menempatkan Kabupaten Buton pada posisi ke-6 tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian ini juga masih berada di atas rata-rata provinsi yang sebesar 11,21 persen, menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan membutuhkan perhatian lebih dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial.

Rendahnya daya beli masyarakat turut memperkuat gambaran kerentanan tersebut. Data tahun 2024 mencatat bahwa pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Buton hanya sebesar Rp. 8.401 ribu per tahun, menjadikannya yang terendah kelima di Sulawesi Tenggara. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan pendapatan rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada keterjangkauan terhadap pangan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan daya beli merupakan salah satu faktor yang memperkuat lingkaran kemiskinan di Kabupaten Buton.

Perbandingan tingkat kemiskinan antar wilayah di Pulau Buton juga memperlihatkan bahwa Kabupaten Buton menghadapi tekanan yang cukup besar dibandingkan beberapa daerah sekitarnya. Tingginya angka kemiskinan ini tidak hanya menunjukkan tantangan struktural dalam perekonomian lokal, tetapi juga menuntut intervensi yang lebih komprehensif dan berbasis bukti. Upaya pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada penguatan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, pengembangan ekonomi lokal yang inklusif, serta pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu mandiri secara ekonomi.

Gambar 2.64. Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Buton Dengan Kab/Kotase-Pulau Buton Tahun 2024



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2025

b. Ketahanan pangan yang lemah dan ketergantungan terhadap pasokan luar daerah

Ketahanan pangan di Kabupaten Buton menunjukkan kondisi yang belum stabil. Pada tahun 2024, produksi beras lokal hanya mampu memenuhi sekitar 32 persen dari kebutuhan konsumsi masyarakat di wilayah tersebut. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi sendiri ini menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, yang berisiko meningkatkan ketidakstabilan harga dan ketersediaan bahan pangan, terutama di saat terjadi gangguan logistik. Lebih jauh lagi, pada tahun 2024, tercatat ada 8 (delapan) desa atau sekitar 9,64 persen desa di Kabupaten Buton dikategorikan sebagai desa rawan pangan, menandakan adanya ketimpangan akses terhadap bahan pangan antar wilayah. Lemahnya ketahanan pangan ini memperburuk kondisi kerentanan masyarakat miskin yang bergantung pada stabilitas pasokan bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari.

c. Struktur ekonomi yang belum produktif dan dominasi sektor informal

Struktur ekonomi Kabupaten Buton masih didominasi oleh sektor informal, khususnya dari pertanian tanaman pangan dan perikanan tangkap tradisional. Sebagian besar penduduk miskin menggantungkan hidupnya pada sektor-sektor ini, yang produktivitasnya rendah dan sangat bergantung pada musim serta fluktuasi harga pasar. Pada sektor perikanan, sebagian besar hasil tangkapan dijual dalam bentuk mentah tanpa melalui proses pengolahan lanjutan yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi. Hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat tetap rendah dan tidak stabil. Minimnya pengembangan industri berbasis lokal serta kurangnya diversifikasi sumber ekonomi mempersempit peluang mobilitas sosial ekonomi masyarakat, membuat mereka sulit keluar dari jebakan kemiskinan struktural yang telah berlangsung lama.

Berdasarkan data sebaran Lapangan Usaha Kepala Rumah Tangga Miskin Kab. Buton tahun 2024, tercatat jumlah Kepala RT Miskin yang berusaha pada sektor pertanian tanaman pangan sebesar 26,39%, hortikultura sebesar 5,56%, perkebunan sebesar 6,94%, sektor perikanan sebesar 22,22%, kehutanan dan pertanian lainnya sebesar 5,56%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2,78%, sektor konstruksi sebesar 4,17%, sektor perdagangan sebesar 2,78% sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 8,33%, sektor penyedia akomodasi makan minum sebesar 4,17%, aktivitas penyewaan dan sewa guna atas aktivitas keuangan dan jasa asuransi sebesar 1,39%, PNS atau aktivitas pemerintah sebesar 1,39%, dan aktivitas jasa lainnya sebesar 5,56%. Dari data tersebut, menunjukkan Jumlah Kepala RT Miskin paling besar berusaha di sektorpertanian khususnya tanaman pangan dan sektor perikanan, sehingga dalam melakukan intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan lebih difokuskan pada kedua sektor tersebut.

6. Ancaman Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup serta Potensi Kebencanaan yang Tinggi

Ancaman degradasi lingkungan hidup dan tingginya potensi kebencanaan di Kabupaten Buton menjadi salah satu permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam arah pembangunan berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Buton pada tahun 2023 tercatat sebesar 83,45, yang masih berada dalam kategori sedang, menunjukkan adanya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Aktivitas ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor pertambangan, yang menyumbang kontribusi terbesar terhadap struktur PDRB daerah, berimplikasi pada kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, degradasi tanah, serta peningkatan risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Hal ini menandakan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Pengelolaan sampah dan limbah juga masih menjadi tantangan, di mana Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah baru mencapai 39,60% pada tahun 2023, dan persentase tempat pembuangan sampah per satuan penduduk berada pada angka 73,45%. Belum optimalnya penerapan Gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, memperburuk kondisi lingkungan dan menambah beban pada sistem pengelolaan bencana. Sementara itu, dari sisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), tercatat bahwa 22% indikator belum mencapai target dan 21% belum dilaksanakan, yang mengindikasikan perlunya penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko bencana.

Dalam konteks tersebut, Kabupaten Buton perlu mendorong transformasi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga

mengedepankan prinsip keberlanjutan. Rehabilitasi lingkungan pasca-tambang, peningkatan kualitas pengelolaan sampah, serta perlindungan kawasan hutan dan pesisir merupakan langkah krusial yang perlu diakselerasi. Selain itu, penting untuk mendorong diversifikasi ekonomi daerah ke sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan seperti pertanian berkelanjutan, perikanan tangkap dan budidaya yang bertanggung jawab, serta pengembangan ekowisata. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan kesiapsiagaan bencana akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem pembangunan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

7. Adanya ancaman penurunan implementasi nilai kebudayaan dalam kegiatan bermasyarakat di kalangan generasi muda

Ancaman terhadap penurunan implementasi nilai-nilai kebudayaan di kalangan generasi muda Kabupaten Buton menjadi isu strategis yang perlu segera mendapatkan perhatian. Berdasarkan data, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih relatif kecil, dari total 100 benda situs dan cagar budaya yang ada atau teregistrasi, baru 19 benda situs atau cagar budaya yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. Rendahnya tingkat pelestarian tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya upaya pelindungan warisan budaya, tetapi juga menunjukkan adanya potensi pudarnya identitas lokal yang selama ini menjadi bagian penting dari karakter masyarakat Buton. Minimnya pelestarian tersebut berpotensi memperlemah keterikatan generasi muda terhadap nilai-nilai tradisi, norma sosial, dan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari jati diri daerah.

Kondisi ini turut diperparah oleh indikator sosial lainnya, seperti rendahnya tingkat penyelesaian kejahatan yang hanya mencapai 48,37% di tahun 2023 menjadikan Kabupaten Buton sebagai peringkat kedua terbawah di Sulawesi Tenggara dalam hal ini. Hal ini mencerminkan belum optimalnya sistem sosial dan keamanan yang seharusnya menjadi ruang tumbuh bagi nilai-nilai budaya dan ketertiban di tengah masyarakat. Di sisi lain, turunnya persentase wirausaha muda dari 9% pada tahun 2023 menjadi 7% pada tahun 2024 juga menandakan adanya penurunan semangat inovasi dan kemandirian generasi muda, yang sesungguhnya dapat menjadi motor pelestarian budaya melalui pendekatan kreatif dan adaptif, seperti ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Upaya pelestarian nilai budaya perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui kebijakan pelindungan cagar budaya, tetapi juga melalui pendidikan karakter, revitalisasi tradisi, hingga pembinaan komunitas budaya dan ekonomi kreatif di kalangan pemuda. Pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan perlu memperkuat peran institusi pendidikan, sanggar seni, dan organisasi kepemudaan sebagai ruang pewarisan nilai-nilai budaya yang produktif. Dengan pendekatan kolaboratif, transformasi nilai budaya lokal dapat terus dijaga dan dikembangkan secara kontekstual oleh generasi muda Buton dalam kehidupan modern.

8. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan

Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Buton tercermin dari berbagai indikator fisik dan spasial, salah satunya adalah masih tingginya persentase jalan rusak berat yang mencapai 43,27% pada tahun 2024. Kondisi ini menghambat konektivitas antarwilayah serta distribusi pelayanan publik yang merata. Selain itu, hingga saat ini Kabupaten Buton belum memiliki wajah ibukota yang representatif di Pasarwajo. Sebagai pusat pemerintahan, Pasarwajo semestinya hadir sebagai wajah daerah yang mampu

mencerminkan kemajuan pembangunan, tata kota yang rapi, serta mendukung aktivitas pemerintahan dan perekonomian lokal secara terintegrasi. Ketiadaan ruang kota yang terencana secara optimal di Pasarwajo juga berdampak pada rendahnya daya tarik investasi dan citra daerah.

Di sisi lain, upaya perbaikan permukiman dan lingkungan hidup juga masih menemui tantangan. Penurunan kawasan kumuh pada tahun 2024 baru mencapai 5,34%, yang menunjukkan bahwa kualitas lingkungan permukiman belum mengalami perubahan signifikan. Bahkan, 28,99% rumah di Kabupaten Buton masih tergolong tidak layak huni pada tahun 2023, mencerminkan masih tingginya jumlah penduduk yang belum menikmati standar hunian yang memadai. Ketimpangan kualitas infrastruktur dasar ini turut mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, terutama pada wilayah-wilayah pinggiran dan pelosok desa.

Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fokus pada pemerataan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek tata ruang, estetika kawasan, dan pelayanan publik yang inklusif. Penataan Pasarwajo sebagai ibukota daerah perlu didorong agar mampu menjadi pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi, sekaligus memperkuat fungsi-fungsi strategis pemerintahan dan perekonomian. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam perencanaan infrastruktur yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan di Kabupaten Buton.

Dengan penjabaran permasalahan atas, maka beberapa akar masalah sebagai pemicu permasalahan pokok dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.76. Permasalahan Per Urusan Pemerintahan Kabupaten Buton

Urusan Pemerintahan	Permasalahan
Pendidikan	Masih minimnya akses layanan pendidikan dasar
	Masih rendahnya mutu pendidikan
	Belum optimalnya tata kelola dan manajemen berbasis data
	Masih minimnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran
Kesehatan	Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
	Tingginya Prevalensi Stunting
	Belum meratanya fasilitasi dan pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat
	Kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan belum optimal
	Belum optimalnya profesionalisme pengelolaan manajemen dan sistem informasi kesehatan
	Belum optimalnya standarisasi dan jaminan pelayanan kesehatan keluarga untuk menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu, khususnya masyarakat miskin
	Belum optimalnya pelayanan kesehatan menular dan tidak menular
	Belum optimalnya penanganan kasus KLB
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan infrastruktur yang belum merata baik infrastruktur perkotaan, infrastruktur antarwilayah, maupun infrastruktur pada kawasan-kawasan strategis
	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan publik terkait pekerjaan umum seperti air minum bersih, sanitasi, hingga drainase
	Belum optimalnya drainase terkait sumur resapan
	Ketersediaan irigasi yang belum memadai sehingga belum dapat maksimal menunjang kegiatan pertanian di daerah
	Aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau dengan baik
	Belum tertatanya representasi ibu kota Pasarwajo
	Belum optimalnya penataan ruang publik

Urusan Pemerintahan	Permasalahan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau serta penanganan kawasan kumuh
	Belum optimalnya pemenuhan dan kelayakan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman
	Pemenuhan sarana prasarana umum di kawasan permukiman masih belum optimal seperti layanan air bersih, listrik dan jalan lingkungan
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Masih adanya pelanggaran PERDA dan belum optimalnya penegakan PERDA
	Banyak desa di pesisir yang belum memiliki keamanan bencana (early warning system)
	Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana, khususnya bencana kebakaran dan non kebakaran
	Belum optimalnya sarana prasarana kebencanaan
	Belum optimalnya kajian dan perencanaan dalam mendukung pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Sosial	Pelayanan rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Belum optimalnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial PPKS
	Belum optimalnya data sasaran kemiskinan
	Belum optimalnya penanganan korban bencana daerah saat dan pasca terjadinya bencana
Tenaga Kerja	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal untuk mengurangi angka pengangguran
	Belum optimalnya penangana konflik tenaga kerja yang mampu melibatkan mediator
	Belum optimalnya sistem informasi ketenagakerjaan
	Adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kualifikasi Dunia Usaha dan Dunia Industri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih tingginya kekerasan seksual, kekerasan anak, bullying
	Masih tingginya pernikahan dini
	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan dan wadah pemberdayaan perempuan
Pangan	Masih adanya daerah rawan pangan dan belum optimalnya ketersediaan pangan
	Minimnya sarana prasarana distribusi dan penyimpanan cadangan pangan
	Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman
Pertanahan	Belum optimalnya kelengkapan administrasi pertanahan, khususnya daerah yang jauh dari pusat pemerintahan
Lingkungan Hidup	Meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim daerah
	Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat tekanan aktifitas manusia dan alih fungsi lahan
	Pengelolaan sampah yang belum optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana dan kelemahan regulasi
	Rendahnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembaruan data kependudukan
	Belum termanfaatkannya data kependudukan secara optimal baik oleh pemerintahan maupun masyarakat luas
	Adanya data anomali (data yang tidak sesuai dengan karakteristik umum) dan data ganda
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya peningkatan status desa dari Desa Maju ke Desa Mandiri
	Belum optimalnya Kegiatan Kelembagaan Desa (LKD,LAD,LED)
	Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
	Belum optimalnya Pemerintah Desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang keluarga berencana

Urusan Pemerintahan	Permasalahan
Perhubungan	Belum optimalnya layanan perhubungan, khususnya pada kawasan potensial pembangunan perekonomian
	Belum optimalnya sarana prasarana perlengkapan jalan
	Belum tersedianya Terminal tipe C
	Belum tersedianya prasarana dan sarana Pengujian Kendaraan bermotor yang tersertifikasi
	Belum optimalnya angkutan umum sebagai sarana transportasi
Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya layanan dan jangkauan jaringan telekomunikasi
	Belum optimalnya teknologi informasi untuk menunjang digitalisasi dan inovasi pemberdayaan.
	Aplikasi e-government belum optimal penggunaan dan pemanfaatannya
	Belum optimalnya implementasi kelompok informasi masyarakat
	Belum optimalnya peran perangkat daerah dalam meningkatkan literasi digital masyarakat
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Keterbatasan Sumber Daya Manusia
	Kurangnya keterbukaan informasi dan rendahnya partisipasi anggota
	Minimnya digitalisasi dan pendataan serta inovasi
	Rendahnya kapasitas usaha, terbatasnya akses pasar
	Kurangnya akses permodalan
	Rendahnya kualitas hasil usaha local
Penanaman Modal Daerah	Masih rendahnya peningkatan investasi daerah
	Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan secara tepat waktu
	Rendahnya akuntabilitas perangkat daerah
Kepemudaan dan Olahraga	Masih rendahnya daya saing kepemudaan
	Masih rendahnya daya saing keolahragaan
	Belum optimalnya pengembangan kapasitas kepramukaan
	Belum adanya sentra keolahragaan
	Belum optimalnya instrument pengukuran kinerja kepemudaan
Statistik	Minimnya ketersediaan data yang up to date sebagai bahan penyusunan perencanaan maupun monitoring evaluasi pembangunan daerah
	Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Buton
Persandian	Belum optimalnya jaringan keamanan data dan informasi pemerintahan
Kebudayaan	Pelestarian warisan budaya tak benda belum optimal
	Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan serta partisipasi seni budaya masyarakat
	Mulai terkikisnya nilai luhur kebudayaan daerah terutama daerah perkotaan
	Belum optimalnya penanaman nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat
	Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana kebudayaan dan kesenian
Perpustakaan	Masih rendahnya minat baca masyarakat
	Minimnya ketersediaan perpustakaan desa
	Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan daerah
Kearsipan	Belum optimalnya layanan dan pengelolaan kearsipan di perangkat daerah
Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan (tangkap dan budidaya)
	Rendahnya daya saing produk olahan hasil perikanan
Pariwisata	Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD Daerah
	Belum optimalnya kapasitas sektor pariwisata mencakup daya tarik wisata, kualitas SDM serta ketersediaan dan kondisi sarana prasarana
	Lemahnya promosi dan belum terbentuknya citra destinasi pariwisata daerah secara efektif
	Belum optimalnya integrasi ekonomi kreatif dalam pengembangan sektor pariwisata
	Rendahnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata
Pertanian	Belum optimalnya produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan
	Belum optimalnya infrastruktur, SDM dan mekanisasi di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan
	Rendahnya hilirisasi produk pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai upaya peningkatan nilai tambah komoditas

Urusan Pemerintahan	Permasalahan
Perdagangan	Belum optimalnya pengelolaan pasar tradisional/pasar rakyat
	Belum optimalnya pengendalian harga dan barang kebutuhan pokok
	Masih terbatasnya jaringan pemasaran produk unggulan Buton ke tingkat regional, nasional maupun internasional
	Belum optumalnya pengawasan perdagangan dan peningkatan iklim usaha perdagangan
Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri berbasis produk unggulan daerah
	Pertambangan dalam perindustrian masih mendominasi, perlu diversifikasi
	Masih kurangnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standardisasi, tersertifikasi dan ijin resmi
	Keterbatasan sarana prasarana produksi produk potensi/unggulan daerah
	Terdapat ketimpangan segmentasi pasar aspal pada beberapa perusahaan. Terdapat industri yang tidak memiliki segmentasi pasar dan dibarengi perusahan yang memiliki keterbatasan produksi.
	Diperlukan perhatian pada industri mebel
	Industri pengolahan aspal belum dikembangkan secara optimal
	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok industri kecil menengah yang belum optimal
Transmigrasi	Belum memadainya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi
	Belum optimalnya penggunaan lahan untuk pelayanan transmigrasi
Sekretariat Daerah	Belum optimalnya sinergitas kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah
	Belum optimalnya penataan organisasi dan tata kelola sebagai implementasi reformasi birokrasi
	Terdapat permasalahan wewenang yang menjadi kendala potensi daerah seperti aspal dan perikanan.
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
Sekretariat DPRD	Belum optimalnya tata kelola kesekretariatan DPRD dalam meningkatkan capaian kinerja Anggota Dewan
	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana dalam penyusunan produk hukum dan fasilitasi tugas DPRD
Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan
	Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Bappeda
	Belum optimalnya sinergitas antar perangkat daerah dan lintas sektor
Pendapatan	Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
	Belum maksimalnya penggalian potensi sebagai sumber pendapatan daerah
	Belum optimalnya sumber daya dalam mendukung peningkatan PAD
	Belum optimalnya inovasi dalam pengeloaan PAD
Keuangan Daerah	Kapasitas SDM pengelola keuangan dan asset masih terbatas serta belum merata antar bidang dan OPD
	Sistem informasi keuangan dan aset belum terintegrasi serta belum dimanfaatkan secara maksimal
	Pemanfaatan aset daerah belum optimal dan masih terdapat aset yang belum tertib legalitasnya
Kepegawaian	Pengembangan karir ASN belum sepenuhnya menggunakan penilaian kinerja
	Penempatan pegawai belum sesuai kompetensi dan kualifikasi ASN
	Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas berbasis kebutuhan
Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan kompetensi fungsional dan manajerial ASN melalui pelatihan baik lintas OPD maupun struktural
Riset dan Inovasi	Belum optimalnya pemanfaatan inovasi daerah Kabupaten Buton
	Belum maksimalnya kapabilitas inovasi daerah Kabupaten Buton
	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian
Pengawasan	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
	Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Unsur Kewilayahan (Kecamatan)	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
	Masih rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan

Urusan Pemerintahan	Permasalahan
	dan penguatan warga, khususnya kelompok rentan
	Belum optimalnya pelayanan publik, administrasi kependudukan, perijinan, hingga ketersediaan data dan informasi level kecamatan dan desa/kelurahan
	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa terutama pengelolaan APBDES
Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingginya potensi penurunan kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
	Belum optimalnya pendidikan politik yang baik di masyarakat
	Belum optimalnya penanganan konflik sosial
	Belum optimalnya pembinaan antar umat beragama, antar suku, dan organisasi kemasyarakatan lainnya

2.3.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis mencakup berbagai permasalahan yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memandang isu-isu strategis sebagai panduan utama dalam merancang program kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terstruktur, tepat, dan efisien.

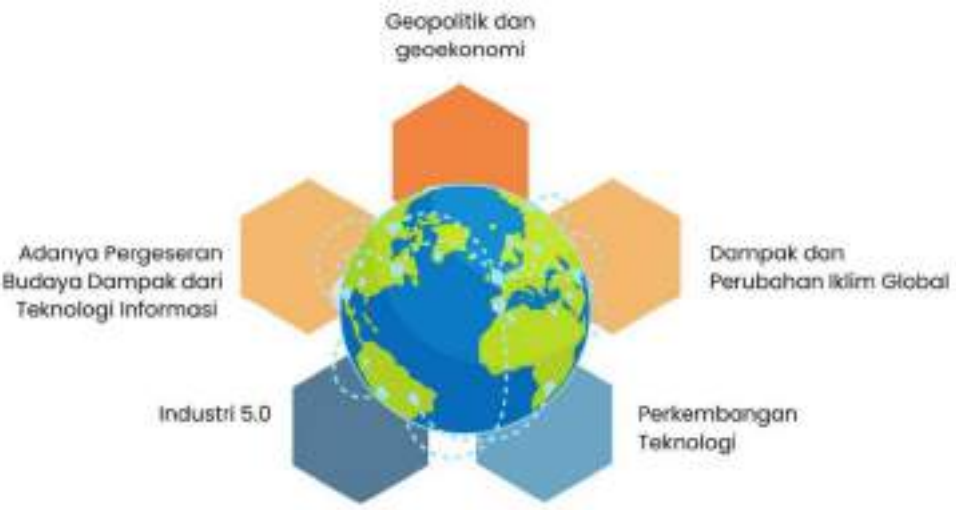
Dengan memberikan prioritas pada penanganan dan antisipasi terhadap isu-isu strategis, kita dapat menciptakan keunggulan tersendiri dalam meningkatkan peluang mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Namun, sebaliknya, jika isu-isu strategis diabaikan, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka panjang menjadi langkah awal dalam merumuskan isu strategis.

Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan demikian, kita dapat memahami kompleksitas isu-isu tersebut dan merancang strategi yang holistik untuk menghadapinya. Dengan mengakui pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

A. Telaahan Isu Strategis Internasional

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telaah terhadap isu-isu internasional menjadi langkah penting untuk memastikan sinkronisasi arah pembangunan daerah dengan dinamika global yang terus berkembang. Perubahan kondisi dunia baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, hingga lingkungan tidak hanya berdampak pada tatanan nasional, tetapi juga memengaruhi kesiapan dan arah pembangunan di tingkat daerah. Oleh karena itu, memahami isu strategis internasional bukan sekadar menyesuaikan kebijakan dengan tren global, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di tingkat global. Dalam RPJMN telah disebutkan beberapa isu global, berikut penjabaran isu global beserta peranan Kabupaten Buton terhadap isu tersebut:

Gambar 2.65. Isu Global



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks berdampak signifikan terhadap stabilitas pasokan komoditas, harga bahan pangan, dan energi di tingkat nasional hingga daerah. Kabupaten Buton, yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti perikanan, pertanian, serta potensi tambang aspal, perlu membangun ketahanan ekonomi lokal yang berdaya saing dan mandiri. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat hilirisasi sektor unggulan serta membuka akses pasar ekspor, terutama melalui penguatan infrastruktur pelabuhan dan kerja sama antarwilayah. Dalam konteks geoekonomi, Buton dapat memanfaatkan lokasinya di kawasan Teluk untuk mendukung perdagangan maritim serta pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya lokal.

2. Dampak dan Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global memberikan dampak nyata terhadap keberlangsungan ekosistem dan produktivitas sektor-sektor andalan daerah. Kabupaten Buton yang bergantung pada perikanan tangkap, pertanian lahan kering, dan kawasan pesisir, rentan terhadap kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, adaptasi perubahan iklim perlu diperkuat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, konservasi ekosistem pesisir, serta inovasi teknologi ramah lingkungan dalam pertanian dan perikanan. Intervensi kebijakan yang responsif terhadap perubahan iklim juga dapat meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup.

3. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat, khususnya teknologi digital dan otomatisasi, telah mengubah pola produksi, distribusi, dan pelayanan publik. Kabupaten Buton dapat menjadikan teknologi sebagai katalisator percepatan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, sistem informasi pertanian dan perikanan, hingga promosi pariwisata berbasis digital. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta peningkatan kapasitas SDM dalam penguasaan teknologi digital agar tidak tertinggal dari daerah lain.

4. Industri 5.0

Masuknya era Industri 5.0 yang mengedepankan kolaborasi antara manusia dan teknologi berbasis kecerdasan buatan, menuntut kesiapan daerah dalam mendesain kebijakan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Buton memiliki peluang untuk mengembangkan sektor industri pengolahan berbasis potensi lokal seperti perikanan, aspal, dan produk pertanian, yang terintegrasi dengan pendekatan smart industry. Industri 5.0 juga membuka ruang bagi UMKM lokal untuk naik kelas melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi proses bisnis, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda.

5. Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi

Teknologi informasi telah memengaruhi pola pikir, gaya hidup, serta nilai-nilai sosial masyarakat, termasuk di daerah. Kabupaten Buton menghadapi tantangan dalam menjaga jati diri budaya lokal di tengah arus globalisasi informasi yang begitu cepat. Oleh karena itu, perlu ada strategi pelestarian budaya yang adaptif, seperti digitalisasi budaya lokal, edukasi nilai-nilai kearifan lokal melalui platform digital, serta integrasi budaya dalam pengembangan sektor pariwisata. Dengan begitu, Buton tidak hanya menjaga warisan budayanya, tetapi juga menjadikannya sebagai kekuatan ekonomi kreatif yang berbasis identitas lokal.

B. Telaahan Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 2.66
Isu Nasional



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif

Resiliensi ekonomi yang kuat dan prospek perekonomian yang positif menjadi kunci penting dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Buton. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata, Buton memiliki potensi untuk memperkuat perekonomiannya di masa depan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa sektor-sektor tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di tingkat global dan domestik, termasuk ketidakpastian ekonomi yang mungkin muncul. Dalam hal ini, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, serta diversifikasi sektor ekonomi, akan memperkuat ketahanan ekonomi Kabupaten Buton. Melalui kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal yang inklusif, sektor-sektor unggulan daerah dapat berkembang dengan pesat, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian provinsi maupun nasional.

2. Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan

Kabupaten Buton, yang terletak di kawasan Teluk, memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa dan potensi lingkungan yang sangat besar. Potensi ini sangat relevan dalam mendukung sektor perikanan, pertanian, serta pariwisata yang berbasis pada alam. Namun, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan agar dapat menghindari kerusakan ekosistem yang dapat merugikan jangka panjang. Untuk itu, penting bagi Kabupaten Buton untuk terus berinovasi dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti mengembangkan metode perikanan ramah lingkungan dan budidaya pertanian yang berkelanjutan. Dengan menjaga keanekaragaman hayati dan potensi lingkungan, Buton dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mengintegrasikan pengelolaan alam dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi faktor utama dalam kemajuan Kabupaten Buton. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat akan menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan industri masa depan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Buton membutuhkan SDM yang tidak hanya memahami cara mengelola potensi alam, tetapi juga memiliki keterampilan teknis dan inovatif untuk meningkatkan produktivitas. Program-program pelatihan dan pendidikan yang mengedepankan pengembangan keterampilan praktis, terutama di sektor perikanan, pertanian, dan industri, akan membuka peluang kerja bagi masyarakat, meningkatkan taraf hidup, dan memperkuat daya saing daerah. Modal manusia yang kuat akan mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Buton.

4. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Pergeseran struktur kelas masyarakat di Kabupaten Buton menjadi isu strategis yang perlu perhatian lebih dalam penyusunan RPJMD. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, pergeseran struktur kelas ini dapat menghasilkan kesenjangan sosial yang lebih besar jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang inklusif dan pro-rakyat perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi, seperti pengembangan UMKM berbasis sektor unggulan daerah, perlu didorong untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan

pemerataan ekonomi. Dengan mengurangi kesenjangan sosial ini, Kabupaten Buton dapat membangun masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.

5. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Tata kelola yang baik dan akuntabilitas pemerintah menjadi pondasi yang sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Buton dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Meningkatkan sistem pengawasan, memperkuat kapasitas birokrasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Dalam hal ini, Kabupaten Buton harus memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki sistem informasi publik dan transparansi anggaran daerah, agar pembangunan yang dilakukan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

6. Rendahnya Produktivitas

Rendahnya produktivitas menjadi tantangan besar bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Buton, mengingat potensi sektor-sektor unggulan seperti perikanan dan pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk meningkatkan produktivitas, Buton perlu berfokus pada peningkatan efisiensi di berbagai sektor melalui penerapan teknologi dan inovasi. Penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan peningkatan teknik budidaya pertanian dapat menjadi solusi untuk memperbaiki produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi barang akan sangat penting untuk memperlancar proses produksi dan mempercepat akses pasar. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan produktivitas Kabupaten Buton dapat meningkat, memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Visi RPJMN 2025–2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", juga memberikan arah strategis bagi Kabupaten Buton, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Kabupaten Buton, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata, harus berperan aktif dalam mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan. Sebagai bagian dari Sulawesi Tenggara, Buton berpotensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengandalkan sektor tradisional, tetapi juga meningkatkan sektor industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Adapun dalam RPJMN terdapat **8 Misi atau Asta Cita** sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehtaan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam RPJMN 2025-2029 menyebutkan terdapat **17 (Tujuh Belas) Program Prioritas** sebagai berikut :

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesial peninkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga;

Disamping itu pula terdapat **8 (Delapan) Progam *Quick Wins*** sebagai berikut:

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;

6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/Polri dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
8. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

C. Telaahan Isu Strategis Regional/Daerah

1. Telaah RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2029

Dalam rangka menjamin keselarasan antara pembangunan daerah kabupaten dan provinsi, diperlukan telaah mendalam terhadap keterkaitan isu-isu strategis yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara. Telaah ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Buton tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah di tingkat provinsi. Adapun isu strategis Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

1. Inklusivitas pertumbuhan ekonomi.
2. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara.
3. Ketimpangan antarkelompok dan antarwilayah.
4. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Tenggara.
5. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
6. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur penunjang lainnya
7. Tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Mitigasi bencana menuju pembangunan keberlanjutan.

Visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara 2025–2029, yaitu "Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius," memerlukan sinergi antara berbagai daerah, termasuk Kabupaten Buton, yang memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian tersebut. Kabupaten Buton, dengan sumber daya alam melimpah di sektor maritim, pertanian, dan industri pengolahan, memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, serta mendorong integrasi sosial dan budaya di wilayah ini. Sebagai salah satu daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam, Buton dapat memperkuat peranannya dalam penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta menjadi sentra perekonomian maritim yang turut mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Adapun misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara ialah sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang rentan, mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Hal ini mencakup pemberian akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya, serta memperkuat jaring pengaman sosial di tingkat provinsi dan kabupaten. Untuk Kabupaten Buton, hal ini bisa dicapai dengan memperkuat program-program bantuan sosial, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, serta memastikan keberlanjutan sistem perlindungan sosial bagi kelompok marginal. Selain itu, penguatan sistem data dan pemantauan untuk mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan akan mendukung pencapaian misi ini dengan lebih tepat sasaran.

Misi 2: Menumbuhkan Perekonomian Melalui Konektifitas dan Penguatan Potensi Pertanian Dalam Arti Luas, Maritim serta Dunia Usaha

Misi ini berfokus pada peningkatan perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah, penguatan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, dan maritim, serta pengembangan dunia usaha. Kabupaten Buton dapat berkontribusi secara signifikan dalam hal ini dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik yang terhubung dengan pelabuhan perikanan dan fasilitas agribisnis dapat memperlancar distribusi produk unggulan daerah. Selain itu, fasilitasi usaha kecil dan menengah (UKM), peningkatan akses pasar, serta dukungan terhadap investasi akan mempercepat transformasi ekonomi daerah ini. Pemanfaatan sektor maritim yang ada di Buton, melalui penguatan sistem perikanan dan budidaya kelautan, akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal dan nasional.

Misi 3: Menguatkan Birokrasi Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas Yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal dan Religius

Misi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam setiap proses administrasi dan pelayanan publik. Di Kabupaten Buton, hal ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), memperkuat sistem pengawasan internal, dan memastikan penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Penguatan budaya lokal dan nilai-nilai religius yang kental di Buton juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter aparatur pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan berpegang pada nilai-nilai budaya dan religius, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, lebih inklusif, dan lebih responsif terhadap aspirasi serta kebutuhan masyarakat.

2. Telaah RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 untuk memastikan relevansi setiap isu dengan pembangunan jangka panjang. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Buton. Dalam hal ini, terdapat enam isu strategis yang menjadi fokus RPJPD Kabupaten Buton 2025-2045, yang memiliki relevansi dengan isu strategis RPJMD Kabupaten Buton 2925-2029:

Tabel 2.77. Relevansi Isu RPJMD Kabupaten Buton 2025-2029 Dengan Isu RPJPD Kabupaten Buton 2025-2045

Isu Strategis RPJPD 2025-2045	RPJMD Kabupaten Buton 2025-2029
Transformasi Ekonomi Berkelanjutan	Hilirisasi pengelolaan komoditas sektor unggulan (pertambangan/Asbuton, pertanian, perikanan)
	Transformasi ekonomi berkelanjutan
Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pemerintahan yang profesional dan akuntabel
Pembangunan Menuju Masyarakat yang Sehat, Cerdas dan Unggul	Mewujudkan SDM yang cerdas, sehat dan unggul
Dampak media sosial dalam mempengaruhi pemikiran generasi muda	Peningkatan pelestarian dan pengembangan budaya Buton
Akselerasi pengentasan kemiskinan struktural maupun kultural	Percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat
Stabilitas ketahanan pangan yang berkesinambungan	Percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat
	Meningkatnya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup
Pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas	Percepatan pemerataan pembangunan dan penataan wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan

Kabupaten Buton menetapkan visi "**TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI KAWASAN INDUSTRI YANG BERDAYA SAING, MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN**" sebagai panduan dalam pembangunan jangka panjang. Untuk mencapai visi tersebut, tema pembangunan 2025-2029 berfokus pada pengembangan potensi dan kekuatan daerah.

Masyarakat Buton yang kaya akan budaya perlu terus mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan lokal yang kental sebagai daya tarik pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata harus ditingkatkan untuk memanfaatkan keindahan alam dan warisan budaya yang unik. Meskipun Kabupaten Buton dikenal dengan potensi aspalnya, upaya diversifikasi ekonomi penting untuk menghindari ketergantungan pada satu sektor. Produk unggulan lokal masih perlu diidentifikasi dan dikembangkan agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Sebagai wilayah kepulauan dengan teluk yang potensial, Buton memiliki potensi besar dalam sektor maritim dan perikanan yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Pengembangan infrastruktur dan inovasi teknologi perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah yang saat ini masih kurang memadai. Selain itu, isu sosial seperti maraknya bullying harus diatasi melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Buton pada periode 2025-2029 akan difokuskan pada ”**Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan”** melalui penguatan identitas budaya, pengembangan industri pengolahan berbasis potensi unggulan daerah seperti perikanan, pertanian, pariwisata dan pertambangan, diversifikasi ekonomi, peningkatan kemandirian fiskal, serta inovasi dan inklusi sosial untuk mendukung masyarakat yang industri dan berbudaya sesuai dengan visi tahun 2045.

3. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2025–2029 memerlukan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Salah satu instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan adalah pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Proses KLHS ini dilaksanakan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yang menekankan pentingnya integrasi KLHS ke dalam dokumen RPJMD.

Proses KLHS dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan berbasis data untuk mengidentifikasi potensi dampak kebijakan dan program terhadap lingkungan hidup serta menyelaraskannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil telaah KLHS memberikan landasan strategis dalam perumusan kebijakan daerah, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam konteks Kabupaten Buton, KLHS telah mengidentifikasi enam isu strategis utama yang perlu menjadi perhatian dalam RPJMD:

1. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, pencapaian ketahanan pangan dan rendahnya pemenuhan gizi masyarakat.
2. Masih tingginya angka kemiskinan akibat akses dan kualitas yang belum memadai di sektor pendidikan.
3. Kurangnya ketertersediaan permukiman inklusif, aman, dan tangguh serta terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung akses terhadap air bersih.
4. Belum terbangunnya Infrastruktur yang Tangguh, kurangnya Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta kurangnya Inovasi.
5. Belum tercapainya kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Meningkanya alih fungsi lahan dan penurunan keanekaragaman hayati

Berbagai isu strategis yang teridentifikasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Buton mencerminkan tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.78. Keterkaitan Isu KLHS RPJMD dengan Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Buton Tahun 2025-2029

ISU PRIORITAS KLHS RPJMD	PERMASALAHAN RPJMD	ISU STRATEGIS RPJMD
Masih tingginya angka kemiskinan akibat akses dan kualitas yang belum memadai di sektor pendidikan.	Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan Masyarakat Buton	Percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat
Kurangnya ketertersediaan permukiman inklusif, aman, dan tangguh serta terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung akses terhadap air bersih	Ancaman Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup serta Potensi Kebencanaan yang Tinggi	Meningkatnya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya alih fungsi lahan dan penurunan keanekaragaman hayati		
Belum terbangunnya Infrastruktur yang Tangguh, kurangnya Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta kurangnya Inovasi	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan	Percepatan pemerataan pembangunan dan penataan wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan
Belum tercapainya kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Adanya ancaman penurunan implementasi nilai kebudayaan dalam kegiatan bermasyarakat di kalangan generasi muda	Peningkatan pelestarian dan pengembangan budaya Buton

ISU PRIORITAS KLHS RPJMD	PERMASALAHAN RPJMD	ISU STRATEGIS RPJMD
Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, pencapaian ketahanan pangan dan rendahnya pemenuhan gizi masyarakat	Masih Kurangnya Pembangunan SDM yang Unggul	Mewujudkan SDM yang cerdas, sehat dan unggul
	Belum Optimalnya Transformasi Ekonomi Berbasis Hilirisasi	Hilirisasi pengelolaan komoditas sektor unggulan (pertambangan/Asbuton, pertanian, perikanan)
		Transformasi ekonomi berkelanjutan
	Belum Optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola	Pemerintahan yang profesional dan akuntabel
	Belum optimalnya upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah	

Permasalahan seperti belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, hingga rendahnya pemenuhan gizi masyarakat, menunjukkan perlunya penguatan sektor pertanian dan perikanan lokal yang berbasis kearifan lokal. Begitu pula dengan tingginya angka kemiskinan akibat keterbatasan akses dan kualitas pendidikan, yang dapat diintervensi melalui penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis potensi daerah. Upaya ini dapat terintegrasi dengan pengembangan sektor unggulan, seperti industri pengolahan aspal Buton dan penguatan UMKM, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, terbatasnya infrastruktur dasar seperti permukiman layak, akses air bersih, dan infrastruktur tangguh, menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan yang memperhatikan prinsip keberlanjutan. Buton memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Inovasi dan teknologi menjadi kunci dalam memperkuat daya saing daerah, termasuk dalam mendorong industri inklusif dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif. Upaya pelestarian lingkungan juga perlu diperkuat untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan menjaga keanekaragaman hayati. Dengan demikian, pemanfaatan potensi lokal yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan akan menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan Kabupaten Buton ke depan.

4. Telaah RPJMD Daerah Sekitar

A. Telaahan RPJMD Kota Baubau Tahun 2025-2029

Telaah terhadap RPJMD Kota Baubau 2025–2029 menjadi penting bagi Kabupaten Buton, mengingat keterkaitan erat antara keduanya sebagai bagian dari wilayah Kepulauan Buton. Kota Baubau dalam dokumen RPJMD-nya menetapkan visi *"Baubau Kota Budaya yang Ramah, Cerdas, Sejahtera, dan Bermartabat."* Visi ini diwujudkan melalui misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan inklusif, mengembangkan kawasan potensial dan infrastruktur kota, memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, serta menata lingkungan kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Arah pembangunan tersebut tidak hanya mencerminkan kebutuhan internal Kota Baubau, melainkan juga menimbulkan dampak langsung terhadap dinamika pembangunan di Kabupaten Buton.

Sejumlah isu strategis yang diidentifikasi dalam RPJMD Kota Baubau memiliki resonansi kuat dengan konteks pembangunan Kabupaten Buton. Pertama, isu perubahan iklim dan kualitas lingkungan hidup menuntut perhatian bersama, mengingat kedua wilayah sama-sama berkarakter kepulauan dan pesisir yang rentan terhadap kenaikan

muka laut, banjir lokal, degradasi hutan, dan tekanan terhadap ekosistem laut. Sinergi dalam pengelolaan lingkungan dan adaptasi perubahan iklim menjadi kunci, terutama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menopang sektor perikanan dan pariwisata.

Kedua, transformasi digital yang menjadi agenda utama Baubau dapat menjadi peluang bagi Kabupaten Buton. Baubau diarahkan untuk mempercepat digitalisasi layanan publik dan aktivitas ekonomi. Dengan kedekatan geografis dan sosial-ekonomi, Kabupaten Buton berpotensi memanfaatkan momentum ini untuk memperluas digitalisasi di desa-desa, koperasi, dan UMKM, sehingga tercipta ekosistem digital regional yang lebih kokoh.

Ketiga, isu hilirisasi sumber daya alam dan penguatan hub maritim menempatkan Baubau sebagai simpul logistik strategis di Selat Buton. Posisi ini akan mendorong arus perdagangan, tenaga kerja, dan jasa yang meningkat di kawasan. Kabupaten Buton dapat mengambil peran sebagai penyangga dalam penyediaan bahan baku pertanian, perikanan, dan energi terbarukan yang terhubung dengan aktivitas logistik di Baubau. Dengan demikian, manfaat dari hilirisasi mineral di Sulawesi Tenggara maupun geliat perdagangan maritim dapat dirasakan bersama.

Selanjutnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga memberi peluang baru. Baubau yang relatif dekat dengan IKN berpotensi menjadi mitra logistik dan penyedia jasa pendukung. Kabupaten Buton, sebagai hinterland, akan terdorong untuk meningkatkan konektivitas dan memperkuat daya saing produk lokal agar dapat masuk dalam rantai pasok kebutuhan IKN. Proyek strategis seperti pembangunan Jembatan Tona yang menghubungkan Baubau dan Muna juga akan memberi dampak langsung bagi mobilitas barang dan orang dari dan menuju Buton.

Dalam konteks ketahanan pangan dan energi, Baubau masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah. Di sinilah Kabupaten Buton memiliki peluang strategis untuk memperkuat perannya sebagai penyedia pangan dan energi terbarukan. Dengan basis pertanian, perikanan, dan potensi energi biomassa maupun surya, Buton dapat mengisi kebutuhan regional sekaligus memperkuat kemandirian kawasan.

Isu penting lainnya adalah wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton. Rencana ini mencakup penggabungan Baubau, Buton, dan kabupaten lain di sekitarnya dalam satu provinsi baru. Baubau diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan provinsi, sementara Kabupaten Buton harus bersiap memperkuat kapasitas birokrasi, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik. Perubahan status administratif ini akan membawa arus urbanisasi, investasi, serta aktivitas ekonomi yang lebih intensif di Baubau, sekaligus membuka peluang kolaborasi pembangunan yang lebih erat dengan Kabupaten Buton.

Dengan demikian, telaah RPJMD Kota Baubau menunjukkan bahwa arah pembangunan Kabupaten Buton tidak bisa dilepaskan dari dinamika Baubau. Sinergi di bidang lingkungan, digitalisasi, konektivitas maritim, ketahanan pangan, dan kesiapan kelembagaan menjadi kunci untuk membangun kawasan Kepulauan Buton yang lebih tangguh dan berdaya saing. Kolaborasi yang erat antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton akan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat di seluruh kawasan kepulauan.

B. Telaahan RPJMD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025-2029

Telaah terhadap RPJMD Kabupaten Buton Selatan 2025–2029 penting dilakukan oleh Kabupaten Buton untuk melihat keterkaitan pembangunan regional di kawasan Kepulauan Buton. Kabupaten Buton Selatan menetapkan visi *"Buton Selatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Masyarakat yang Sejahtera, Berbudaya serta*

Berdaya Saing." Visi ini diwujudkan melalui misi yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan lokal, pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, pelestarian budaya dan pariwisata, serta percepatan reformasi birokrasi. Orientasi tersebut menegaskan ambisi Buton Selatan untuk menjadi motor pertumbuhan baru di kawasan, yang implikasinya akan sangat terasa bagi Kabupaten Buton sebagai daerah yang berbatasan langsung dan memiliki keterikatan sosial-budaya yang erat.

Sejumlah isu strategis yang diangkat dalam RPJMD Buton Selatan memiliki relevansi langsung dengan arah pembangunan Kabupaten Buton. Isu perubahan iklim, misalnya, menjadi ancaman bersama mengingat karakter wilayah kepulauan yang rentan terhadap kenaikan muka laut, abrasi, dan cuaca ekstrem. Kerja sama kedua daerah dalam mitigasi bencana pesisir, rehabilitasi hutan, dan penguatan ekosistem laut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi berbasis perikanan dan pariwisata. Demikian pula dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan integrasi prinsip ekonomi hijau dan biru, yang dapat dikolaborasikan dengan Kabupaten Buton melalui pengembangan sektor kelautan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan.

Digitalisasi menjadi isu penting lainnya. Buton Selatan melihat transformasi digital sebagai peluang untuk meningkatkan layanan publik dan memperluas inklusi ekonomi. Kabupaten Buton dapat bersinergi melalui integrasi sistem informasi, penerapan e-government, serta penguatan digitalisasi UMKM. Dengan begitu, kawasan Kepulauan Buton dapat membentuk ekosistem digital yang saling terhubung dan mendorong daya saing regional.

Dalam konteks geoekonomi dan geopolitik global, fluktuasi harga komoditas internasional berdampak pada nelayan dan petani kecil di Buton Selatan. Kabupaten Buton yang juga bergantung pada sektor serupa perlu menyiapkan strategi diversifikasi pasar dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Begitu pula dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membuka peluang besar. Buton Selatan diproyeksikan menjadi pemasok hasil laut dan pertanian tropis, sementara Kabupaten Buton dapat memperkuat posisi sebagai hinterland yang menopang rantai pasok dan logistik Kawasan Timur Indonesia.

Isu ketahanan energi dan pangan juga memperlihatkan keterkaitan erat. Buton Selatan menghadapi keterbatasan pasokan energi sekaligus menjadi salah satu lumbung pangan laut regional. Kabupaten Buton dapat berperan dalam pengembangan energi terbarukan serta bersama-sama memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan pengolahan pascapanen, distribusi, dan rantai dingin. Sinergi ini akan memastikan kawasan Kepulauan Buton lebih tangguh menghadapi ancaman krisis global.

Selain itu, posisi Pulau Sulawesi sebagai hub Kawasan Timur Indonesia mendorong Buton Selatan untuk menjadi simpul distribusi logistik regional. Hal ini secara otomatis memperluas peluang Kabupaten Buton untuk berperan dalam rantai pasok nasional maupun internasional. Begitu pula dengan arah kebijakan pengembangan industri hilir berbasis sumber daya hayati dan mineral, yang menuntut transformasi ekonomi dari komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah. Baik Buton Selatan maupun Kabupaten Buton memiliki potensi serupa dalam sektor kelautan, perikanan, dan pertanian yang dapat dikolaborasikan untuk memperkuat daya saing industri regional.

Dengan demikian, telaah RPJMD Kabupaten Buton Selatan memperlihatkan bahwa Kabupaten Buton tidak dapat melepaskan diri dari dinamika pembangunan di wilayah tetangga. Isu-isu strategis yang dihadapi Buton Selatan sesungguhnya juga menjadi isu bersama yang memerlukan kolaborasi. Oleh karena itu, Kabupaten Buton perlu mengintegrasikan arah pembangunan regional ke dalam dokumen perencanaannya,

dengan fokus pada penguatan ketahanan lingkungan, pangan, dan energi, transformasi digital, konektivitas logistik, serta pengembangan industri hilir. Sinergi ini akan memperkokoh posisi Kabupaten Buton dalam struktur kawasan Kepulauan Buton, sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.

5. Telaahan Rencana Induk dan Peta Jalan Penerapan Pembangunan Ekonomi Biru Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang berorientasi pada keberlanjutan, Kabupaten Buton perlu merespons secara strategis terhadap Rencana Induk dan Peta Jalan Penerapan Pembangunan Ekonomi Biru Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2045. Kabupaten Buton sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan biodiversitas laut yang tinggi, memiliki peran penting dalam implementasi ekonomi biru di kawasan tenggara Indonesia. Salah satu aset ekologis utama yang mendukung hal tersebut adalah Kawasan Konservasi Perairan Ombutai Sarano Liwu dengan luas mencapai 1.154,14 hektare, yang tidak hanya berfungsi sebagai wilayah perlindungan ekosistem laut, tetapi juga sebagai ruang edukasi, penelitian, dan pengembangan ekonomi berbasis konservasi.

Kabupaten Buton menghadapi sejumlah isu strategis dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu isu utama adalah aktivitas penambangan pasir dan pengambilan karang hidup yang terjadi di wilayah pesisir seperti Kecamatan Kapontori dan Pasar Wajo. Kegiatan ini tidak hanya merusak ekosistem Teluk Kapontori yang menjadi sumber penghidupan nelayan tradisional dan budidaya perikanan, tetapi juga mengancam kelestarian wilayah pesisir. Selain itu, praktik pengambilan karang hidup sebagai material pondasi rumah masih ditemukan di beberapa desa pesisir Kabupaten Buton, memperburuk kondisi lingkungan laut yang seharusnya dijaga sebagai kawasan konservasi.

Di sisi lain, melemahnya kekuatan kearifan lokal seperti sistem "Kaombo" di Desa Kondowa, Kecamatan Pasar Wajo, menunjukkan berkurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai adat dalam menjaga ekosistem laut. Eksploitasi kawasan konservasi adat oleh nelayan dari dalam maupun luar desa tanpa ada pelaporan kepada kepala adat, serta berkurangnya luas konservasi tersebut, mencerminkan lemahnya regulasi dan implementasi tata kelola desa dalam mempertahankan wilayah konservasi berbasis kearifan lokal.

Konflik antar nelayan juga menjadi permasalahan serius, terutama antara nelayan tradisional dan pengguna alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti pukat dan bom ikan. Di wilayah Pasar Wajo, nelayan lokal merasa dirugikan akibat praktik penangkapan destruktif oleh nelayan dari wilayah lain, termasuk dari Wakatobi, Sinjai, dan Banggai. Selain menciptakan ketegangan sosial, kondisi ini memperparah tekanan terhadap stok ikan dan ekosistem perairan.

Keterbatasan sarana rantai dingin juga menjadi kendala utama dalam pengelolaan hasil tangkapan di Kabupaten Buton, terutama saat musim ikan. Banyak ikan hasil tangkapan tidak terjual dan bahkan dibuang karena tidak tersedianya fasilitas penyimpanan dingin yang memadai, sehingga harga ikan anjlok dan merugikan nelayan. Keterbatasan ini juga menghambat pemasaran lintas wilayah, dan mengurangi nilai ekonomi tangkapan laut.

Lebih lanjut, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan nelayan, termasuk komunitas Bajo di Kabupaten Buton, menjadi tantangan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Meskipun telah ada inisiatif koperasi dan usaha olahan ikan oleh

rumah tangga nelayan, pengembangan teknologi produksi, pengemasan, dan pemasaran masih sangat terbatas. Produk olahan lokal seperti keripik sukun khas Desa Wisata Wabula memiliki potensi sebagai oleh-oleh khas, namun masih belum dikembangkan secara optimal untuk pasar yang lebih luas.

Berbagai isu strategis yang dihadapi Kabupaten Buton, seperti kerusakan ekosistem akibat penambangan pasir dan pengambilan karang hidup, melemahnya kearifan lokal seperti sistem konservasi adat Kaombo, konflik antar nelayan, serta keterbatasan sarana rantai dingin dan rendahnya kapasitas nelayan, menegaskan pentingnya penataan tata kelola kelautan dan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buton masih berada dalam tantangan transisi menuju pengelolaan sumber daya laut yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi biru wilayah kepulauan Wakatobi, Buton, Buton Selatan, dan Baubau tahun 2025–2045, Kabupaten Buton perlu memperkuat peran kelembagaan adat dan pemerintah, mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan, serta mengembangkan komoditas unggulan berbasis kearifan lokal. Dengan fokus pada penguatan regulasi, pemberdayaan SDM, dan hilirisasi produk perikanan secara adil dan berkelanjutan, Kabupaten Buton diharapkan dapat bertransformasi menuju wilayah pesisir yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam kerangka ekonomi biru yang menjunjung kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya pengembangan ekonomi biru ditetapkan arah kebijakan pertahapan dan rekomendasinya sebagai berikut.

Tabel 2.79. Arah Kebijakan Tahapan dan Rekomendasi Program Tahap I Pengembangan Wilayah

Kebijakan Prioritas	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025-2029)
	Tahap 1 (RPJMD 2025-2029)	Tahap 2 (RPJMD 2030-2034)	Tahap 3 (RPJMD 2035-2039)	Tahap 4 (RPJMD 2040-2045)	
Misi 1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan penerapan teknologi yang sistematis dan efektif dalam menunjang pembangunan ekonomi biru					
Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan SDA yang berbasis teknologi ekonomi biru yang inovatif dan berdaya saing	Penguatan kapasitas SDM berbasis IPTEK dalam mendukung pengembangan ekonomi biru yang inovatif dan berdaya saing	Percepatan peningkatan SDM yang berkualitas dalam pengelolaan SDA berbasis IT dalam penerapan ekonomi biru	Transformasi SDM yang berkualitas dalam pengelolaan SDA berbasis IT ekonomi biru yang inovatif dan berdaya saing	Terwujudnya SDM yang berkualitas alam pengelolaan SDA yang berbasis IT ekonomi biru yang inovatif dan berdaya saing	1. Program peningkatan kapasitas SDM berbasis IT 2. Program peningkatan Pendidikan non-formal dengan muatan local blue economy 3. Program penguatan daya saing pengembangan ekonomi biru
Penerapan dan peningkatan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi biru yang inklusif	Penguatan regulasi dalam mendukung ekonomi biru yang inklusif	Akselerasi penguatan regulasi dalam mendukung ekonomi biru yang inklusif	Optimalisasi penerapan regulasi dalam mendukung tata kelola ekonomi biru yang inklusif	Terwujudnya implementasi regulasi dalam mendukung ekonomi biru yang inklusif	1. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) 2. Program penetapan Kawasan pemanfaatan dan konservasi ekonomi Biru
Misi 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi biru berbasis komoditas unggulan melalui hilirisasi yang berkearifan, berkeadilan dan berkelanjutan					
Penguatan pusat ekonomi biru berbasis komoditas unggulan melalui hilirisasi yang berkelanjutan	Penguatan pusat ekonomi biru berbasis komoditas unggulan melalui hilirisasi	Percepatan pertumbuhan pasar ekonomi biru berbasis yang berkelanjutan	Transformasi teknologi dalam pemanfaatan sumber daya melalui hilirisasi	Terwujudnya pusat ekonomi biru berbasis komoditas berkeadilan dan berkelanjutan	1. Program peningkatan sarana dan prasarana pengelola Ekonomi Biru 2. Program pengelolaandanpemasaran
Peningkatan kemandirian pangan berbasis ekonomi biru yang berkeadilan dan kearifan lokal	Penguatan kemandirian pangan lokal berbasis ekonomi biru	Akselerasi kemandirian panan lokal berbassis ekonomi biru	Pemantapan pengembangan pangan lokal berbasis ekonomi biru	Tercapainya kemandirian pangan lokla berbasis berkeadilan dan berkedaulatan	1. Program pemanfaatan komoditas unggulan lokal 2. Program pengembangansentra ekonomi pangan local 3. Pengembangan destinasi pariwisata bahari

Sumber : Rencana Induk dan Peta Jalan Penerapan Pembangunan Ekonomi Biru Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045

Kabupaten Buton sebagai bagian dari wilayah pesisir Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru, khususnya di sektor kelautan, perikanan, dan wisata bahari. Untuk mendukung hal ini, sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah menjadi krusial, agar kebijakan nasional seperti UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan dapat diimplementasikan sesuai dengan konteks lokal. Di tingkat provinsi, regulasi seperti Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pengawasan sumber daya kelautan memberikan dasar hukum yang penting bagi daerah, termasuk Buton, untuk melindungi ekosistem laut secara berkelanjutan.

Dari aspek ekonomi, Buton dapat memanfaatkan potensi hasil laut melalui diversifikasi produk olahan perikanan, peningkatan keterampilan nelayan, dan perluasan pasar. Ekowisata berbasis kelautan juga menjadi peluang strategis untuk meningkatkan ekonomi lokal sekaligus menjaga lingkungan. Dukungan pendanaan untuk ekonomi biru dapat bersumber dari APBD, investasi swasta, kemitraan publik-swasta, serta dana hibah dan CSR, yang diarahkan untuk infrastruktur, pelatihan, serta pemberdayaan usaha kecil di sektor pesisir.

Kelembagaan pemerintah di Buton perlu diperkuat melalui pembentukan regulasi pendukung, peningkatan kapasitas aparatur, serta mekanisme koordinasi lintas sektor seperti pembentukan kelompok kerja ekonomi biru. Sementara itu, peran lembaga non-pemerintah seperti LSM, akademisi, dan koperasi lokal penting dalam edukasi, riset, pendanaan alternatif, dan pengawasan lingkungan. Nilai-nilai kearifan lokal seperti Kaombo, Pamali, dan gotong royong dalam tradisi seperti Mepuka dan Meboso dapat menjadi modal sosial dalam mendukung konservasi laut dan pembangunan berkelanjutan.

Akhirnya, tata kelola ekonomi biru di Kabupaten Buton perlu menekankan transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi pengelolaan sumber daya, agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Dengan pendekatan kolaboratif antar pemangku kepentingan, Kabupaten Buton berpeluang besar menjadi model penerapan ekonomi biru yang berbasis kearifan lokal dan berorientasi keberlanjutan.

6. Telaahan Rencana Induk Peta Jalan Inovasi Kabupaten Buton

Pemerintah Kabupaten Buton melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) telah menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025–2029 sebagai wujud komitmen membangun ekosistem riset dan inovasi yang terarah, inklusif, dan berbasis potensi daerah. Dokumen ini disusun untuk menjawab tantangan besar yang dihadapi daerah, mulai dari kemiskinan, ketimpangan wilayah, hingga keterbatasan kualitas tata kelola dan infrastruktur, dengan pendekatan pembangunan berbasis pengetahuan. Sejalan dengan amanat nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, peta jalan ini menjadi fondasi bagi integrasi riset ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Urgensi penyusunan peta jalan ini didasarkan pada kondisi nyata bahwa Kabupaten Buton memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Potensi seperti sektor perikanan tangkap dan budidaya, perkebunan mete dan kakao, tenun pewarna alami, hingga wisata berbasis budaya dan alam, memerlukan pendekatan inovatif agar memiliki daya saing dan nilai tambah ekonomi. Dalam konteks ini, peta jalan inovasi dirancang untuk mengarahkan pemanfaatan IPTEK dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*), mendorong hilirisasi produk unggulan, serta menciptakan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi lokal.

RPJMD Kabupaten Buton 2025–2029 memiliki keterkaitan langsung dengan peta jalan inovasi ini karena inovasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan misi daerah dalam membangun masyarakat industri dan berbudaya. Integrasi antara dokumen perencanaan makro (RPJMD) dengan agenda riset dan inovasi akan memperkuat efektivitas kebijakan pembangunan lintas sektor. Melalui RPJMD, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang mendukung kelembagaan BRIDA, memperluas jejaring pentahelix, dan mengarahkan pembiayaan pembangunan berbasis luaran riset dan inovasi, baik untuk sektor ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik. Meskipun demikian, tantangan pengembangan inovasi daerah masih cukup besar. Tantangan dan peluang tersebut terangkum pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.80. Tantangan dan Peluang Inovasi Kabupaten Buton

TANTANGAN DAN PELUANG INOVASI KABUPATEN BUTON	
TANTANGAN INOVASI	
1. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Daerah	1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan kebijakan oleh kepada daerah (policy based research)
	2. Belum terintegrasinya penataan data riset dan inovasi yang berbasis digital
	3. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur dasar riset dan inovasi di daerah
	4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan lahan milik daerah sebagai pusat riset, wisata edukasi, peningkatan pad dan pengembangan ekonomi dan umkm
	5. Belum optimalnya ketersediaan penganggaran dan skema penganggaran riset dan inovasi yang berdasarkan program priositas pembangunan daerah
	6. Belum optimalnya peran pemda/ brida dalam memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektula di daerah.
2. Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi	1. Belum optimalnya peran brida sebagai lembaga yang mengintegrasikan riset dan inovasi daerah
	2. Belum optimalnya jejaring stakeholder/ pentahelix dalam wadah kolaborasi yang berdasarkan prinsip partisipatif
	3. Belum memadainya kapasitas sdm peneliti brida
	4. Belum adanya arah yang jelas dalam pelaksanaan riset yang dilakukan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah
	5. Belum dimanfaatkannya hasil-hasil riset yang telah dilakukan sebagai nilai tambah dan inovasi di daerah
	6. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung riset dan penciptaan inovasi daerah
3. Kemitraan Riset Dan Inovasi	1. Belum terciptanya pola kerjasama pemda yang fleksibel dan berkelanjutan
	2. Belum tersosialisasikannya peran litbang/ brida sebagai bagian dari perangkat daerah
	3. Mitra daerah belum memahami pemanfaatan hasil riset dan inovasi
	4. Keterbatasan sumber daya riset dan inovasi yang dimiliki oleh daerah untuk penguatan sektor pertanian, mengharuskan pemerintah daerah untuk bermitra dengan berbagai pihak, baik akademisi, pelaku usaha maupun komunitas masyarakat.
4. Budaya Riset Dan Inovasi	1. Belum terbentuknya regulasi yang didasarkan atas *evidence based policy* berbasis data presisi
	2. Belum seluruh kelompok industri di kabupaten buton memiliki budaya kreatif dan inovatif yang dapat membantu peningkatan aspek pemasaran dan daya saing produk industri.
	3. Belum membudayanya apresiasi prestasi inovasi bagi pelaku riset dan inovasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi
	4. Belum terlaksananya pendampingan oleh brida kepada perusahaan pemula berbasis riset
	5. Belum terinventarisirnya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang dihasilkan oleh masyarakat oleh brida
5. Keterpaduan Riset Dan Inovasi	1. Belum terlaksananya implementasi inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah
	2. Belum sesuainya kebijakan program prioritas daerah dengan hasil identifikasi sektor unggulan daerah
	3. Belum optimalnya singkronisasi kebijakan program prioritas dari pusat – provinsi dan daerah yang berbasi keunggulan kompetitif daerah
	4. Belum terdapat model keterpaduan penguatan ekosistem riset dan inovasi yang dapat mengoptimalkan potensi perikanan, perindustrian dan hasil-hasil

TANTANGAN DAN PELUANG INOVASI KABUPATEN BUTON	
	perkebunan, sekaligus menangani tingginya biaya produksi dan distribusi produk
6. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global	1. Belum terarahnya perhatian terhadap fenomena- fenomena dan issue-issue global yang dapat diadopsi dalam program pembanguan daerah dengan pendekatan riset dan inovasi
	2. Belum terbangunnya akses ruang kerjasama internasional yang lebih luas, luwes dan berkelanjutan.
	3. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam upaya penyebarluasan pariwisata daerah kabupaten buton belum maksimal, disebabkan oleh faktor keterbatasan anggaran, peralatan dan sumber daya manusia.
PELUANG INOVASI	
1. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Daerah	1. Adanya regulasi yang dikeluarkan oleh brin terkait pemanfaatan hasil riset dan inovasi di daerah
	2. Adanya dukungan pemerintah daerah kabupaten buton terhadap riset dan inovasi melalui perubahan balitbang menjadi brida kab. Buton
	3. Adanya sistem teknologi digital yang dapat mengintegrasikan penaatan basis data riset dan inovasi
	4. Adanya infrastruktur pendunkung dan jaringan digital serta peran aktif dinas komunikasi dan informatika kabupaten buton untuk penyebarluasan hasil-hasil riset dan inovasi daerah
	5. Adanya dukungan kepada daerah dan tapd dalam menyediakan sumber penganggaran dan skema penganggaran riset dan inovasi daerah yang diperlukan dalam rangka menerapkan kebijakan berbasis riset
	6. Adanya dukungan pemda bagi fasilitasi dan perlindungan kekayaan intelektual di daerah berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kabupaten buton melalui website satu data kabupaten buton dan media sosial daerah, baik untuk pemasaran produk unggulan daerah maupun sebagai basis data untuk pelaksanaan riset dan inovasi terkait produk unggulan daerah.
2. Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi	1. Adanya kebijakan daerah melalui peran brida kab. Buton sebagai perangkat daerah pelaksana riset dan inovasi
	2. Terbentuknya forum pelaku riset dan jejaring stakeholder/ pentahelix yang aktif
	3. Meningkatnya kompepetsni sdm di brida kab. Buton secara berkala
	4. Kebijakan penyusunan program riset daerah berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dengan prinsip riset partisipatif berbasis masyarakat pelaku bisnis *(community based participatory research)*
	5. Adanya keunikan daerah khususnya pada sektor industri berbasis komoditi lokal, seperti olahan air nira, kelapa, ikan asap dan jambu mete, serta produk tenun berbahan dasar pewarna alami.
3. Kemitraan Riset Dan Inovasi	1. Adanya regulasi yang mendukung untuk kerjasama dibidang riset dan inovasi baik melalui sdm maupun pendanaan
	2. Diseminasi hasil riset dan inovasi yang dilakukan berkala dan melibatkan berbagai stakeholder
	3. Model kemitraan riset dan inovasi antara pemda dengan perguruan tinggi yang mendukung pengembangan sentra industri daerah kabupaten buton, seperti kerjasama pembinaan sentra tenun dengan unidayan, dan kerjasama pengolahan hasil laut dengan umb dan itk buton.
	4. Tingginya permintaan akan produk olahan ikm berbasis potensi lokal seperti tenun pewarna alami, ikan asap, anyaman nentu dan jambu mete
4. Budaya Riset Dan Inovasi	1. Adanya kebijakan pimpinan yang mengarahkan pengambilan kebijakan berbasis data presisi
	2. Dari sisi potensi pengembangan bisnis, pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, memiliki prospek yang menjanjikan sebaga inovasi berbasis sdgs dan memerlukan intervensi kebijakan oleh pemerintah daerah.
	3. Daerah memiliki inovasi yang mendukung kebijakan ketahanan pangan, melalui pemanfaatan sumber- sumber pangan lokal pengganti beras, yang diatur melalui perbup buton tentang penetapan harga pangan lokal yang tidak ditentukan oleh pemerintah pusat tahun 2019, dan perda kabupaten buton no. 7 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.
	4. Semakin meningkatnya jumlah kunjungan ke lokasi wisata yang mengandalkan pemandangan alam, serta ditetapkannya desa wasuemba sebagai peraih adwi 2024 semakin menggerakkan usaha bidang pariwisata, dan terus meningkatnya pendapatan pelaku umkm lokal yang memanfaatkan produk lokal
	5. Adanya forum umkm dan ikm sebagai inkubator inovasi daerah

TANTANGAN DAN PELUANG INOVASI KABUPATEN BUTON	
5. Keterpaduan Riset Dan Inovasi	1. Pengembangan dan promosi produk unggulan berdasarkan potensi daerah
	2. Peluang mitra kerjasama pemda dengan sekolah untuk mensosialisasikan pengolahan sampah menjadi ecobric di kalangan pelajar kabupaten buton.
	3. Terdapat pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, yang dijual dan dipergunakan oleh nelayan.
	4. Meningkatnya jumlah pelaku usaha bidang industri produk unggulan daerah, diantaranya adalah ikan asap, tenun pewarna alami, kerajinan anyaman, nentu dan produk olahan jambu mete.
	5. Terdapat peluang pengembangan bisnis industri lokal melalui kolaborasi yang pernah dilakukan antara pemkab buton dengan bpd dan perusahaan dalam bentuk csr.
	6. Kerja sama pembangunan rumah pangan kita (rpk) dengan masyarakat, dimana saat ini kabupaten buton memiliki 40 rpk yang tersebar di
	7 kecamatan. Rpk dilakukan untuk penanggulangan inflasi daerah.
	8. Adanya singkronisasi program prioritas nasional, program prioritas daerah, arah kebijakan riset nasional dan arah kebijakan riset daerah
6. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global	1. Adanya peningkatan literasi, informasi dan pengetahuan berkaitan dengan isu-isu strategis dilevel internasional yang relevan dengan program pembangunan daerah dan optimalisasi kolaborasi/ kemitraan riset
	2. Desa wisata wasuemba menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan jasa layanan paket wisata, yang dapat mendukung penguatan kapasitas masyarakat, umkm desa dan aparat desa, sekaligus mendukung dalam upaya pemasaran pariwisata desa.
	3. Kerja sama dengan kwt, untuk peningkatan ketahanan pangan keluarga. Kreasi dalam bentuk kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan, dengan menanam tanaman sayur-sayuran dan buah2an untuk menambah penghasilan keluarga.

Sumber: Rencana Induk Peta Jalan Inovasi Kabupaten Buton

Terlihat bahwa belum optimalnya infrastruktur dan penganggaran riset, rendahnya kapasitas SDM peneliti, lemahnya integrasi hasil riset ke dalam kebijakan, serta belum berkembangnya budaya inovatif di kalangan birokrasi dan pelaku usaha, menjadi hambatan utama. Namun, peluang juga terbuka luas melalui dukungan regulasi nasional, potensi kolaborasi dengan akademisi dan pelaku usaha lokal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya diversifikasi ekonomi dan digitalisasi. Keberadaan forum inovasi, pelaku UMKM berbasis lokalitas, serta model-model pengembangan seperti pengolahan sampah menjadi energi atau industri tenun, menunjukkan bahwa inisiatif inovasi sudah mulai tumbuh di tingkat akar rumput.

Dalam hal ini, RPJMD berperan strategis sebagai penggerak utama agenda inovasi daerah. Melalui perumusan tujuan dan sasaran yang mengarusutamakan inovasi, pengembangan program-program serta penguatan kapasitas BRIDA sebagai pusat koordinasi dan katalisator inovasi, Kabupaten Buton dapat membangun sistem inovasi daerah yang dinamis dan berdampak nyata. Dengan menjadikan riset dan inovasi sebagai basis transformasi, RPJMD Buton 2025–2029 dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat tata kelola, dan menjawab tantangan global secara adaptif dan progresif.

6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

a. Tujuan Penatan Ruang Kabupaten Buton

Penataan ruang wilayah Kabupaten Buton bertujuan untuk menciptakan integrasi pembangunan antar sektor, kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan peran, fungsi, dan posisi masing-masing entitas dalam kerangka wilayah yang lebih besar. Upaya penataan ruang di Kabupaten Buton bertujuan untuk : "**Mewujudkan tatanan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis sektor PERTANIAN, PERTAMBANGAN, KEHUTANAN serta**

PARIWISATA, guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan"

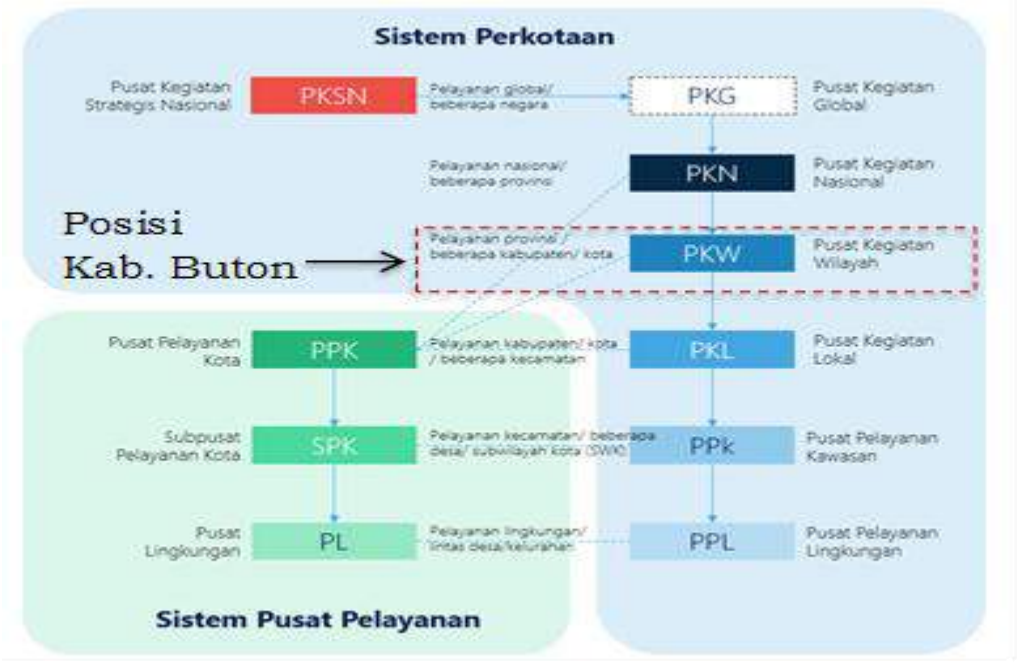
Dari kerangka tujuan RTRW di atas, pada dasarnya Kabupaten Buton menegaskan arahan pengembangan kewilayahannya ke arah pengembangan sektor pertanian, pertambangan, kehutanan, dan pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Buton.

b. Rencana Struktur Ruang dan Konstelasi Kabupaten Buton Secara Regional

Kabupaten Buton terletak secara geografis di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034, tersusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2043 :

1. PKN ditetapkan di Kota Kendari sebagai ibukota provinsi.
2. PKW ditetapkan di Kota Baubau, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna dan Kabupaten Konawe
3. PKL ditetapkan di 9 kabupaten, terdiri atas :
   a. Pasarwajo di Kabupaten Buton;
   b. Batauga di Kabupaten Buton Selatan;
   c. Labungkari di kabupaten Buton Tengah;
   d. Kulisusu di Kabupaten Buton Utara;
   e. Laworo di Kabupaten Muna Barat;
   f. Kasipute di Kabupaten Bombana;
   g. Langara di Kabupaten Konawe Kepulauan;
   h. Andolo di Kabupaten Konawe Selatan;
   i. Lasusua di Kabupaten Kolaka.



Secara umum konsekuensi dari kedudukan Regional Kabupaten Buton sebagai PKL antara lain:

1. (Pelabuhan Pengumpan Regional, yaitu Pelabuhan Banabungi di Pasarwajo; dan Pelabuhan Pengumpan Lokal, meliputi Pelabuhan Kamaru, Pelabuhan Dongkala/Kondowa, Pelabuhan Lasalimu, Pelabuhan Lasalimu Pantai, dan Pelabuhan Lawele/Nambo)
2. Trayek Angkutan Laut (Buton-Kolonodale-Bitung-Ternate-Sorong-Papua ; Buton-Makassar-Surabaya ; Buton-Maluku; Buton-Maluku Utara ; Buton-Muna-Kendari)
3. PLTD Buton di Kabupaten Buton;
4. Kawasan Cagar Alam Kakenauwe ditetapkan seluas 812 (delapan ratus dua belas) hektar yang terdapat di Kabupaten Buton.
5. Suaka Margasatwa Lambusango ditetapkan seluas 27.556 (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam ribu) hektar yang terdapat di Kabupaten Buton.
6. Kawasan Hutan Produksi ditetapkan seluas 923.494 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat) hektar yang terdapat di Kabupaten Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muda, Muna Barat dan Kota Baubau dan Kendari.
7. Kawasan Perikanan terdapat di Kabupaten Bombana. Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi, Kota Baubau dan Kendari.
8. Kawasan strategis industri pertambangan Peruntukkan Industri terdapat Kabupaten Bombana. Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Kota Baubau dan Kendari.
9. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi meliputi :
   - Kawasan industri pertambangan, terdapat di industri pertambangan kolaka di Kabupaten Kolaka, industri pertambangan konawe- konawe utara (kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara), industri pertambangan konawe selatan (Kabupaten Konawe Selatan), dan industri pertambangan Buton (Kabupaten Buton)
   - Kawasan strategis agropolitan terdapat di Kabupaten Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe dan Konawe Selatan)

Gambar 2.67. Peta Struktur Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara

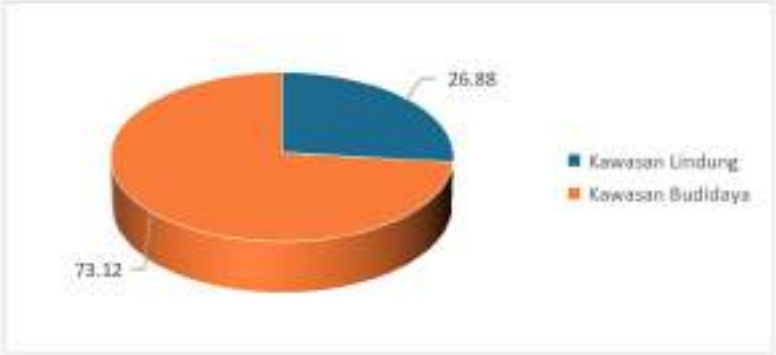


Sumber : Dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara

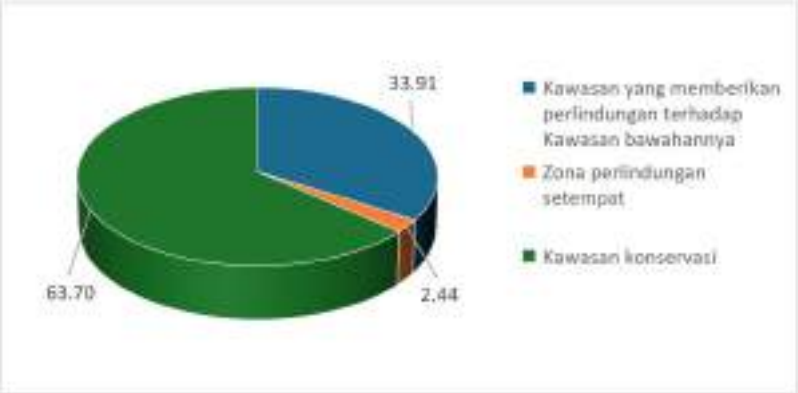
c. Rencana Pola Ruang Kabupaten Buton

Rencana pola ruang kabupaten adalah suatu kerangka konseptual yang menggambarkan cara pengaturan dan pemanfaatan ruang wilayah pada tingkat kabupaten. Teori rencana pola ruang ini erat kaitannya dengan konsep tata ruang dan pembangunan wilayah, dengan tujuan menciptakan struktur ruang yang terorganisir dan terpadu. Inti dari teori ini terfokus pada penetapan kebijakan terkait tata guna lahan, pengembangan sektor-sektor utama, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di wilayah kabupaten tersebut. Berikut merupakan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Buton.

Gambar 2.68. Perbandingan Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Buton



Gambar 2.69. Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Buton



Tabel 2.81. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Buton

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	Badan Air	97
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya	15.246
3	Zona perlindungan setempat	1.095
4	Kawasan konservasi	28.368
5	Kawasan ekosistem mangrove	155
Luas Kawasan Lindung		44.961

Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Buton 2023-2043

Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Buton, kawasan yang memiliki alokasi lahan terbesar adalah pada kawasan konservasi yaitu

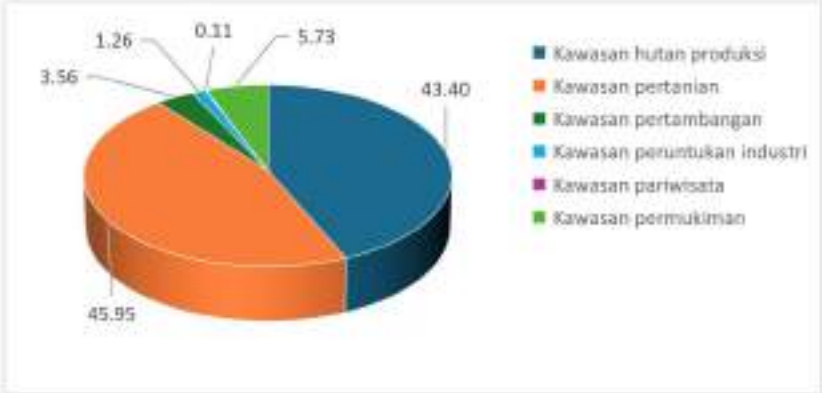
sebesar 28.368 Ha dan kemudian disusul oleh kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya yaitu sebesar 15.246 Ha.

Tabel 2.82. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Buton

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	Kawasan hutan produksi	53.066
2	Kawasan perkebunan rakyat	-
3	Kawasan pertanian	56.185
4	Kawasan pertambangan	4.352
5	Kawasan peruntukan industri	1.543
6	Kawasan pariwisata	129
7	Kawasan permukiman	7.004
8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	-
Luas Kawasan Budidaya		122.279

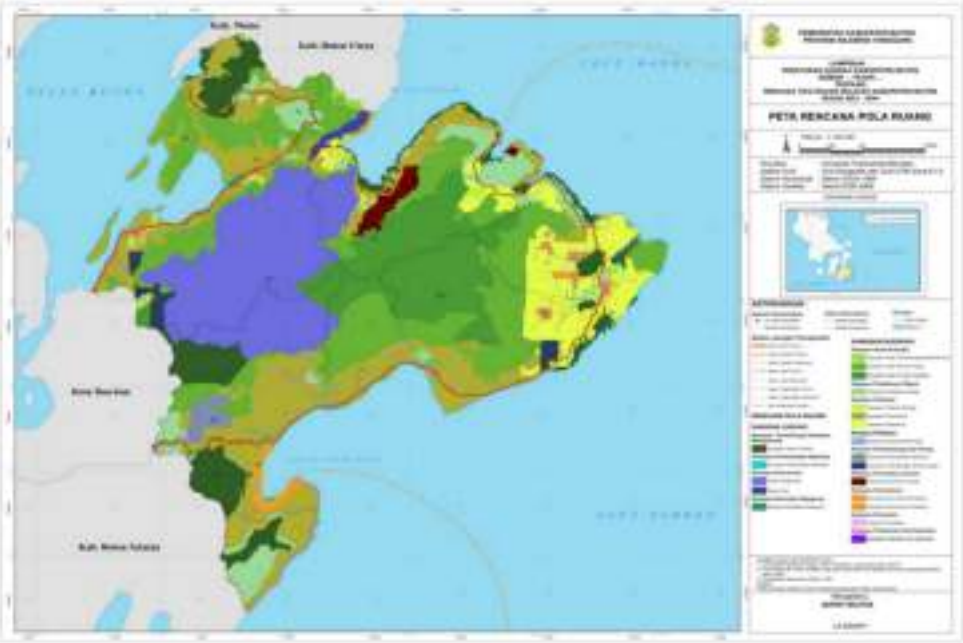
Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Buton 2023-2043

Gambar 2.70. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Buton



Sumber : Ranperda RTRW Kab. Buton 2023-2043

Gambar 2.71 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Buton



Sumber : Ranperda RTRW Kab. Buton 2023-2043

d. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Buton

Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Kabupaten Buton dalam hal ini memprioritaskan 2 kawasan strategis yaitu dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berikut ini merupakan rincian kawasan strategis kabupaten Buton:

Tabel 2.83. Kawasan Strategis Kabupaten Buton

Kawasan Strategis Kabupaten	Lokasi
Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	● Kawasan ekonomi khusus Lasalimu ● Kawasan strategis pertanian di Kecamatan Lasalimu Selatan ● Kawasan minapolitan di Kecamatan Pasarwajo
Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	● Kawasan strategis Suaka Margasatwa Lambusango; dan ● Kawasan strategis Cagar Alam Kakenauwe

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Buton yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Hilirisasi Pengelolaan Komoditas Unggulan Buton

Hilirisasi pengelolaan komoditas unggulan Aspal Buton (Asbuton) di Kabupaten Buton merupakan langkah strategis dalam pembangunan jangka menengah daerah. Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam lokal melalui berbagai inisiatif pengolahan dan pemanfaatan aspal buton, pertanian dan perikanan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, dengan adanya hilirisasi ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas infrastruktur yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan jangka menengah, Kabupaten Buton berfokus pada pengembangan infrastruktur pendukung industri pengolahan perikanan, pertanian dan Asbuton seperti pembangunan pabrik pengolahan dan fasilitas pendukung lainnya. Langkah ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk investor swasta dan pemerintah pusat, untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program hilirisasi ini. Dengan demikian, Kabupaten Buton tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga produsen produk akhir yang memiliki daya saing di pasar nasional dan internasional. Transformasi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi regional dan menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia.

2) Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Buton merupakan salah satu pilar utama dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen untuk mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, adopsi teknologi hijau, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Dengan memprioritaskan keberlanjutan, Kabupaten Buton berusaha menciptakan ekonomi yang tahan terhadap perubahan global dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam pembangunan jangka menengah, Kabupaten Buton juga menitikberatkan pada penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan industri berbasis komunitas dan peningkatan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional. Program-program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan serta pengembangan pariwisata berbasis lingkungan turut menjadi fokus utama. Semua ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan agar setiap langkah pembangunan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan sosial jangka panjang. Dengan strategi ini, Kabupaten Buton diharapkan mampu mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan daerah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

3) Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel

Pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi fondasi utama dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Buton. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh. Langkah-langkah yang diambil meliputi peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), penerapan sistem manajemen kinerja yang transparan, serta pengembangan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan birokrasi yang lebih profesional dan akuntabel, diharapkan pelayanan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Selain itu, Kabupaten Buton juga fokus pada penerapan prinsip-prinsip good governance dalam setiap aspek pemerintahan. Pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab, serta mekanisme pengawasan yang ketat menjadi prioritas untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik juga didorong untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan warga. Dengan demikian, pemerintahan yang profesional dan akuntabel tidak hanya menjadi katalisator bagi pembangunan daerah, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Buton yang berkelanjutan.

4) Mewujudkan SDM yang Cerdas, Sehat dan Unggul

Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat, dan unggul merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton. Pemerintah daerah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Program beasiswa, pelatihan guru, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah menjadi fokus utama. Selain itu, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta penguatan pendidikan vokasional dan keterampilan juga diutamakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan generasi muda Kabupaten Buton dapat memiliki pengetahuan

dan keterampilan yang mumpuni untuk bersaing di tingkat nasional dan global. Di bidang kesehatan, Kabupaten Buton berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta program-program pencegahan dan penanganan penyakit menjadi prioritas utama. Selain itu, kampanye hidup sehat dan peningkatan gizi masyarakat juga dijalankan secara intensif untuk memastikan masyarakat Buton tidak hanya bebas dari penyakit tetapi juga memiliki kondisi fisik yang prima. Dengan SDM yang cerdas, sehat, dan unggul, Kabupaten Buton berharap dapat menciptakan masyarakat yang produktif dan berdaya saing tinggi, yang pada akhirnya akan mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan.

5) Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat

Percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat menjadi agenda krusial dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton. Pemerintah daerah berfokus pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses layanan dasar. Salah satu inisiatif utama adalah peningkatan program bantuan langsung tunai dan subsidi bagi keluarga pra-sejahtera untuk memastikan kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Selain itu, pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM menjadi prioritas untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan strategi ini, diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam upaya mengurangi ketimpangan kesejahteraan, Kabupaten Buton juga mengimplementasikan kebijakan redistribusi pembangunan yang berkeadilan. Investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih di daerah terpencil menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, mendapatkan manfaat dari pembangunan. Selain itu, program-program pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu diintensifkan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif ini, Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

6) Meningkatnya Potensi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Buton, terlihat peningkatan potensi degradasi kualitas lingkungan hidup yang menjadi perhatian serius. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang pesat seringkali berdampak negatif pada ekosistem lokal. Perambahan hutan untuk pembangunan, peningkatan limbah industri, dan peningkatan aktivitas pertanian yang tidak berkelanjutan semakin memperburuk kondisi lingkungan hidup di wilayah tersebut. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan juga menjadi faktor utama dalam meningkatnya potensi degradasi. Kebutuhan akan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi semakin mendesak. Diperlukan langkah-langkah konkret seperti pengelolaan limbah yang lebih baik, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi, serta penerapan kebijakan yang memperhatikan aspek lingkungan secara lebih menyeluruh untuk mengatasi tantangan ini dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

7) Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Buton

Dalam konteks pembangunan jangka menengah di Kabupaten Buton, terjadi peningkatan yang signifikan dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kabupaten Buton kaya akan warisan budaya yang meliputi tradisi, kesenian, dan adat istiadat yang unik dan bernilai tinggi secara historis. Dalam rangka mempromosikan kekayaan budaya ini, pemerintah setempat telah mengambil langkah-langkah strategis, seperti mendukung pertunjukan seni tradisional atau event kebudayaan, penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah lintas sektor agar pembangunan kebudayaan dilakukan secara terpadu serta mengintegrasikan pendidikan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah. Peningkatan pelestarian dan pengembangan budaya Buton tidak hanya memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas lokal dan mempromosikan pariwisata budaya. Melalui upaya ini, generasi muda diberi kesempatan untuk memahami, menghargai, dan mewarisi warisan budaya yang kaya, sehingga memastikan keberlangsungan budaya Buton untuk masa depan. Dengan terus mendorong inisiatif ini dalam pembangunan jangka menengah, Kabupaten Buton dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal mereka.

8) Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Penataan Wilayah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton, percepatan pemerataan pembangunan dan penataan wilayah yang berkualitas serta ramah lingkungan menjadi fokus utama dalam pembangunan jangka menengah. Melalui kebijakan yang terarah, pemerintah setempat berupaya memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di daerah perkotaan, tetapi juga merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton. Hal ini dilakukan dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik yang mencakup daerah-daerah pedesaan yang sebelumnya terpinggirkan. Tak hanya itu, penataan wilayah yang ramah lingkungan juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Melalui penggunaan teknologi hijau, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan promosi penggunaan energi terbarukan, Kabupaten Buton berupaya membangun lingkungan yang berkelanjutan dan lestari. Dengan demikian, pembangunan jangka menengah di Kabupaten Buton bukan hanya bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Tabel 2.84. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspal Buton (Asbuton) sebagai komoditas unggulan nasional dan dunia dengan cadangan besar dan kandungan bitumen tinggi. Sektor perikanan tangkap dan budidaya dengan produksi tahunan yang terus meningkat. Pertumbuhan sektor pariwisata bahari dan budaya yang potensial menjadi motor ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis lokal.	Belum optimalnya transformasi ekonomi berbasis hilirisasi		Geopolitik dan Geoekonomi	Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif	Inklusivitas pertumbuhan ekonomi	Transformasi Ekonomi Berkelanjutan
			Industri 5.0	Rendahnya Produktivitas	Daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Tenggara	Hilirisasi Pengelolaan Komoditas Unggulan Buton
Penguatan Sistem Perencanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Kabupaten Buton telah memiliki dokumen perencanaan yang lengkap dan terintegrasi, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, serta laporan kinerja seperti LKPJ dan SAKIP. Capaian opini WTP atas laporan keuangan juga mencerminkan tingkat akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Pemda telah mengimplementasikan berbagai sistem digital seperti SIPD, e-Planning, dan e-Budgeting untuk memperkuat efisiensi dan	Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi dalam peningkatan kualitas tata kelola			Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel
	Belum optimalnya upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
transparansi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pemerintahan. Peningkatan kualitas pelayanan dan reformasi birokrasi pemerintah daerah menunjukkan kemajuan dalam reformasi birokrasi melalui peningkatan nilai SAKIP dan indeks pelayanan publik, serta mendorong koordinasi lintas OPD dan partisipasi masyarakat untuk memperkuat pelayanan yang responsif dan adaptif.						
Cakupan sanitasi dan air minum yang terus meningkat, mendukung kesehatan masyarakat. Potensi pengembangan pendidikan melalui perencanaan kawasan peruntukan pendidikan dalam tata ruang wilayah. Keberadaan kampung adat dan situs sejarah dapat didorong sebagai wahana edukasi budaya dan karakter	Masih kurangnya pembangunan SDM yang unggul	Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, pencapaian ketahanan pangan dan rendahnya pemenuhan gizi masyarakat		Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Mewujudkan SDM yang Cerdas, Sehat dan Unggul
Peningkatan ketahanan pangan dan penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari 20,76% (2022) menjadi 12,43% (2024).	Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat Buton	Masih tingginya angka kemiskinan akibat akses dan kualitas yang belum memadai di sektor pendidikan.		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara Ketimpangan antarkelompok dan antarwilayah	Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat
IKLH Kabupaten Buton meningkat dari 68,45 (2021) menjadi 77,03 (2023), mencerminkan perbaikan	Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup serta potensi kebencanaan yang tinggi	Kurangnya ketertersediaan permukiman inklusif, aman, dan	Dampak dan Perubahan Iklim Global	Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan	Mitigasi bencana menuju pembangunan keberlanjutan	Meningkatnya Potensi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
kualitas lingkungan. Kawasan hutan lindung dan suaka margasatwa Lambusango sebagai pusat konservasi keanekaragaman hayati. Terdapat kawasan rawan bencana dan sumber daya air yang strategis untuk penguatan adaptasi perubahan iklim		tangguh serta terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung akses terhadap air bersih Meningkanya alih fungsi lahan dan penurunan keanekaragaman hayati				
Warisan budaya berupa benteng-benteng tua dan situs sejarah tersebar di hampir seluruh kecamatan. Festival Budaya Tua Buton dan pesta adat tahunan sebagai potensi ekonomi budaya dan promosi pariwisata	Adanya ancaman penurunan implementasi nilai kebudayaan dalam kegiatan bermasyarakat di kalangan generasi muda	Belum tercapainya kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi			Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Buton
Potensi sungai-sungai besar untuk pengembangan PLTMH dan PLTA, seperti Sungai Winto dan Tondo. Tersedianya potensi panas bumi (geothermal) di lima titik strategis yang dapat dimanfaatkan untuk energi listrik. Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi sudah mencakup hampir seluruh rumah tangga di wilayah.	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan	Belum terbangunnya Infrastruktur yang Tangguh, kurangnya Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta kurangnya Inovasi.	Perkembangan Teknologi		Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur penunjang lainnya	Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Penataan Wilayah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

BAB III
VISI, MISI, DAN
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya Kabupaten Buton. Kabupaten Buton memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk potensi pertambangan, pertanian, perikanan dan pariwisata yang memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Buton dalam menyejahterakan masyarakat. Upaya pencapaian visi dan misi pembangunan ditindaklanjuti dengan perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan memiliki peran krusial dalam mengoperasionalkan visi dan misi ke dalam program pembangunan yang konkret. Penyusunan tujuan yang spesifik dan terukur akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

3.1.1.1. V i s i

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi, misi dan arah kebijakan Kabupaten/Kota harus mengacu pada visi, misi dan arah kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu, sebelum menjabarkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buton 2025-2029, terlebih dahulu dilakukan penelaahan terhadap visi dan misi serta penahapan pembangunan dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton 2025-2045. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan pembangunan dan keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah selama lima tahun kedepan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pembangunan Kabupaten Buton selama lima tahun kedepan akan mendukung dan menjadi bagian dari Pembangunan Nasional dengan mengoptimalkan semua kekuatan dan potensi yang dimiliki. Berikut Penyelarasan Visi pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Persandingan Visi Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

VISI NASIONAL	VISI PROVINSI SULAWESI TENGGARA	VISI KABUPATEN BUTON
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, **MAJU**, DAN **BERKELANJUTAN**	TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA **BERDAYA SAING, MAJU**, DAN **BERKELANJUTAN**	TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI KAWASAN INDUSTRI YANG **BERDAYA SAING, MAJU**, BERBUDAYA, DAN **BERKELANJUTAN**

Dengan memperhatikan visi nasional, provinsi dan visi rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Buton, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"

Dalam rumusan Visi Terwujudnya Masyarakat Buton yang Religius, Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan dengan *tagline* **BUTON BERSINAR,** terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Buton di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Buton dijelaskan sebagai berikut :

1. **Religius**, Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan ajaran, nilai dan norma-norma luhur dari masing-masing individu pemeluk agama dan kepercayaan untuk menciptakan suasana hubungan yang harmonis dengan sikap saling menghormati dan menghargai.
2. **Sejahtera,** Terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir atau batin secara adil dan merata. Beberapa indikator ukuran kesejahteraan masyarakat antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi secara merata dan berkualitas.
3. **Mandiri dan Berdaya Saing,** Suatu keadaan dimana pemerintah bersama masyarakat mampu mengelola, mendayagunakan dan menjaga potensi yang ada dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosial budaya dengan tidak tergantung dari sumberdaya dari luar. Kemampuan beradaptasi dan terbuka pada perubahan jaman dengan tetap berpegang teguh pada nilai dan norma luhur, budaya serta kearifan lokal sehingga tetap mempunyai jati diri sebagai masyarakat Kabupaten Buton. Sikap mandiri ditunjukkan juga dengan kebanggaan pemerintah dan masyarakat untuk menggunakan produk dan hasil budidaya lokal yang menjadi ciri khas daerah. Visi ini juga Mengandung makna kemampuan daerah (pemerintah dan masyarakat) dengan sumberdaya yang dimiliki mampu menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa, kualitas pelayanan, kondisi ekonomi, sosial dan budaya yang unggul dan mempunyai nilai sehingga dihargai karena memberikan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan

daya saing tersebut akan menjadi keunggulan daerah dibandingkan dengan daerah-daerah lain, sehingga keunggulan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

4. **Pembangunan Berkelanjutan,** Suatu keberlanjutan dimaknai kemampuan daerah untuk berpikir kedepan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Kemampuan dan kualitas dari sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian sumber daya yang dimiliki untuk keberlangsungan kehidupan dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang untuk menjadi lebih baik.

3.1.1.2. M i s i

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025-2029, akan dicapai melalui **4 (empat) Misi pembangunan** yang ditetapkan sebagai **CATUR CITA** sebagai berikut:

1) **MISI 1: Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya**, bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, saling menghormati dan menghargai, aman, dan tertib, dengan menjadikan nilai dan norma-norma luhur dari masing-masing individu pemeluk agama dan kepercayaan, dan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat identitas budaya daerah.

2) **MISI 2: Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat,** berfokus pada penguatan di bidang pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing. Di bidang kesehatan, misi ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas guna menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Penguatan kesetaraan gender menjadi kunci dalam menciptakan keadilan sosial dan kesempatan yang sama dalam berbagai sektor. Selain itu, upaya penurunan kemiskinan dilakukan melalui penguatan ketahanan pangan dan sistem sosial yang adaptif untuk memastikan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

3) **MISI 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,** Misi ini Diwujudkan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) berkualitas untuk mendukung aktivitas perekonomian yang mampu meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ekosistem lingkungan melalui upaya penurunan risiko bencana dengan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta dampak aktivitas ekonomi.

4) **MISI 4: Meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal,** misi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan keunggulan lokal. Kabupaten Buton memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan pariwisata, pertambangan dan industri pengolahan. Pengembangan potensi dapat menciptakan lapangan kerja baru dengan memberdayakan seluruh masyarakat Buton melalui peningkatan skill serta memberikan perlindungan pekerja. Hal ini mampu mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton bukan hanya berfokus pada pembangunan yang bersentral untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Buton, namun juga mempertimbangkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, misi yang ada pada RPJMD Kabupaten Buton 2025-2029 juga diselaraskan dengan misi pembangunan nasional Asta Cita, dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun gambaran keterkaitan antara Misi Kabupaten Buton dengan Misi RPJMN dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Gambar 3.1. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Buton dengan Misi RPJMN dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029



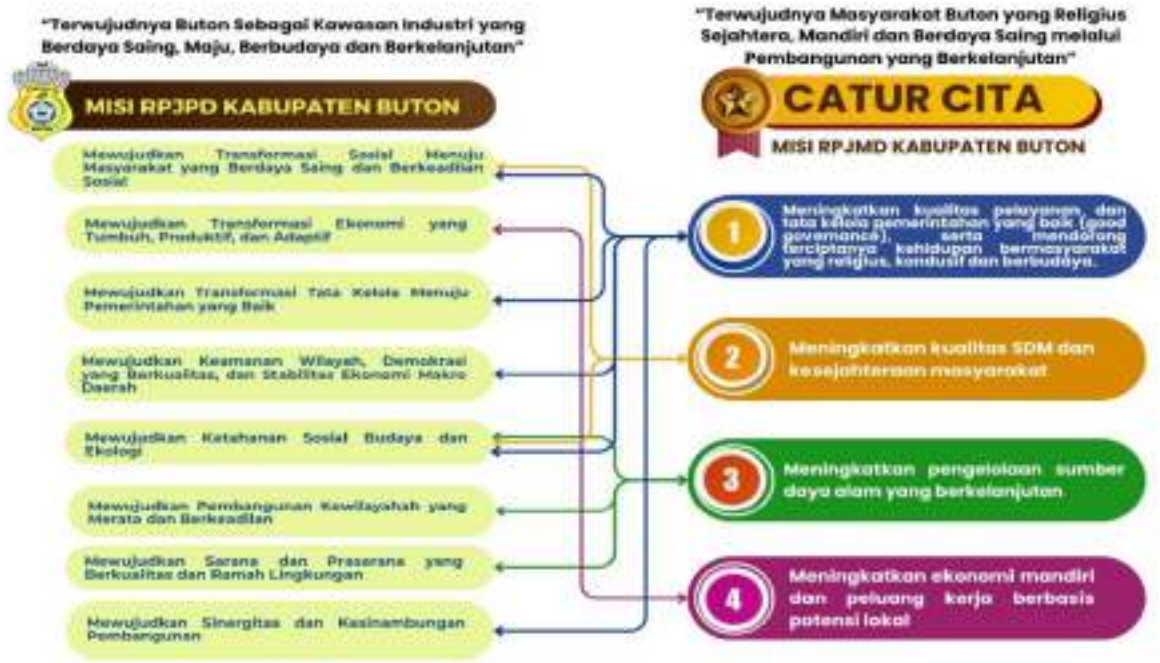
Secara garis besar, Misi Kabupaten Buton telah menyangkut muatan yang terkandung pada 8 (delapan) misi pembangunan nasional (Asta Cita) sehingga pembangunan di Kabupaten Buton diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan yang ada di tingkat nasional. Selain itu, visi dan misi RPJMD Kabupaten Buton juga dirumuskan secara selaras dengan visi dan misi yang ada pada RPJPD Kabupaten Buton sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pembangunan jangka menengah 2025-2029 merupakan tahap awal dari perencanaan jangka panjang sehingga memiliki peran yang sangat krusial sebagai

pondasi keberhasilan pembangunan di tahun 2045. Adapun keterkaitan Visi dan Misi RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Buton adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2. Keterkaitan Antara Visi RPJPD 2025-2045 dan Visi RPJMD Tahun 2025-2029

RPJPD KABUPATEN BUTON TAHUN 2025-2045	RPJMD KABUPATEN BUTON TAHUN 2025-2029
VISI : Terwujudnya Buton Sebagai Kawasan Industri Yang Berdaya Saing, Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan	VISI : Terwujudnya Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan

Gambar 3.2. Keterkaitan Misi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Buton



3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhaan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan

memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *SMART-C*. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030

VISI : **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"**				
MISI	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**TARGET PEMBANGUNAN**	
			2025	**2030**
MISI 1: Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya.	Tujuan 1: Meningkatkan Buton religius yang berpedoman pada nilai luhur keagamaan dan kebudayaan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat	Indeks Religius Buton	79,51	84,94
	Tujuan 2. Mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	62,04	68,09
MISI 2: Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat	Tujuan 3: Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,01	71,31
	Tujuan 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	PDRB per Kapita	44,38	49,24
MISI 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Tujuan 5: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tahan bencana	Penurunan Intensitas Emisi GRK	35,00	45,04
		Indeks Risiko Bencana	148,81	141,36
	Tujuan 6. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur Kabupaten Buton	65,22	73,495
MISI 4: Meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal	Tujuan 7. Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif guna meningkatkan pendapatan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	4,03	4,36
		Indeks Daya Saing Daerah	3,46	3,84

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Buton dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi

dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. **Tujuan 1: Meningkatkan Buton religius yang berpedoman pada nilai luhur keagamaan dan kebudayaan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat**
   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Buton, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
   - Meningkatnya kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama
   - Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan
   - Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
2. **Tujuan 2: Mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkualitas**
   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Buton, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
   - Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
3. **Tujuan 3: Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia**
   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Buton, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
   - Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan.
   - Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan
   - Meningkatnya kualitas keluarga yang sejahtera dan sesuai norma kehidupan masyarakat
   - Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
4. **Tujuan 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**
   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Buton, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
   - Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat
5. **Tujuan 5: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman berbasis lingkungan yang asri dan ketahanan bencana**
   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Buton, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
   - Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup
   - Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah
6. **Tujuan 6: Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan**
   Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Buton, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
   - Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas
   - Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah
7. **Tujuan 7: Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif guna meningkatkan pendapatan masyarakat**
   Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Buton, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
   - Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA
   - Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA
   - Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah
   - Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berkualitas

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025-2030

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"											
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**SATUAN**	**TARGET TAHUN**						**KET.**
					2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
MISI 1: Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya.	**Tujuan 1.** Meningkatkan Buton religius yang berpedoman pada nilai luhur keagamaan dan kebudayaan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat		Indeks Religius Buton	Poin	79,51	80,59	81,67	82,75	83,85	84,94	
		Sasaran 1.1 Meningkatnya kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	88,13	88,50	88,88	89,25	89,63	90,00	
		Sasaran 1.2 Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	53,40	54,01	54,61	55,22	55,82	56,43	
		Sasaran 1.3 Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	*Crime Rate*	Per 100,000 Pddk	80,00	78,00	76,00	74,00	72,00	70,00	
	Tujuan 2. Mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,04	63,25	64,46	65,67	66,88	68,09	
		Sasaran 2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton	Nilai SAKIP Kabupaten Buton	Poin	65,00	70,50	73,02	76,02	78,02	80,52	
MISI 2: Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat	**Tujuan 3.** Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,01	70,27	70,53	70,78	71,04	71,31	
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	78,11	78,20	78,36	78,45	78,58	78,70	
		Sasaran 3.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	77,81	77,97	78,14	78,30	78,46	78,62	

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"											
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**SATUAN**	**TARGET TAHUN**						**KET.**
					2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
		Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas keluarga yang sejahtera dan sesuai norma kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	61,1	62,4	63,6	64,9	66,2	67,5	
		Sasaran 3.4 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,459	0,448	0,438	0,427	0,417	0,407	
	Tujuan 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		PDRB per Kapita	Juta Rupiah/ Kapita	42,88	44,29	45,65	46,98	48,27	49,54	
		Sasaran 4.1 Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	**%**	13,04	13,00	12,65	11,86	11,47	11,08	
			Rasio Gini	Poin	0,312	0,311	0,310	0,309	0,308	0,307	
MISI 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	**Tujuan 5:** Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tahan bencana		Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	35,00	19,55	22,42	25,28	28,14	31,00	
			Indeks Risiko Bencana	Poin	148,81	147,32	145,83	144,34	142,85	141,36	
		Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	83,79	83,96	84,14	84,31	84,48	84,65	
		Sasaran 5.2 Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,38	0,39	0,40	0,45	0,54	0,57	
	Tujuan 6: Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan		Indeks Infrastruktur Kabupaten Buton	%	65,22	66,495	67,76	69,275	71,295	73,495	
		Sasaran 6.1 Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas	Indeks Infrastruktur Kawasan Permukiman	%	55,51	57,28	58,91	60,87	63,16	66,27	

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"											
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**SATUAN**	**TARGET TAHUN**						**KET.**
					2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
		Sasaran 6.2 Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	74,93	75,71	76,61	77,68	79,43	80,72	
MISI 4: Meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal	**Tujuan 7.** Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif guna meningkatkan pendapatan masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,03	4,09	4,15	4,22	4,24	4,36	
			Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,46	3,53	3,61	3,69	3,77	3,84	
		Sasaran 7.1 Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp.	3.346,59	3.528,89	3.710,16	3.891,46	4.071,33	4.251,07	
			Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	%	21,27	21,48	21,70	21,91	22,13	22,34	
			Indeks Ekonomi Biru	Poin	49,72	51,66	53,61	55,55	57,49	59,43	
		Sasaran 7.2 Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	2,89	3,05	3,21	3,36	3,52	3,68	
		Sasaran 7.3 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara	%	3,02	3,10	3,17	3,25	3,33	3,41	
		Sasaran 7.4 Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,83	2,40	2,38	2,36	2,34	2,32	

Memahami bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya ditingkat teknis melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.

Tabel 3.5. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Buton

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran OPD	Pelaksana
Meningkatkan Buton religius yang berpedoman pada nilai luhur keagamaan dan kebudayaan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat	Indeks Religius Buton	Meningkatnya kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Meningkatkan stabilitas kemasyarakatan	Persentase konflik Ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
				Meningkatnya pembinaan terhadap lembaga, tokoh adat, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya	Persentase pembinaan terhadap lembaga, tokoh adat, keagamaan, ormas dan LSM	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
				Meningkatnya pemahaman politik masyarakat	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
		Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian warisan budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	Dinas Kebudayaan
				Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Crime rate	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja
				Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja
				Meningkatnya penegakkan perda/perkada	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Satuan Polisi Pamong Praja
Mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton	SAKIP Kab. Buton	Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	survey penilaian integritas	Inspektorat Daerah
				Meningkatnya kualitas pengendalian intern pemerintah daerah	Indeks maturitas SPIP	Inspektorat Daerah
					Level kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah
					Indeks manajemen resiko	Inspektorat Daerah
					Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari pihak eksternal	Inspektorat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran OPD	Pelaksana
					Persentase SAKIP OPD minimal B	Inspektorat Daerah
				Meningkatkan kualitas tata kelola manajemen ASN di setiap perangkat daerah	Indeks merit sistem	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Indeks profesionalitas ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Meningkatnya kesesuaian kompetensi ASN dengan jabatan/tupoksi yang dijalankan	Indeks merit sistem	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Indeks profesionalitas asn	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan pembangunan	Persentase konsistensi program RPJMD dengan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas ekonomi daerah	Nilai LPPD	Sekretariat Daerah
					Indeks pelayanan publik	Sekretariat Daerah
				Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	Sekretariat Daerah
					Indeks reformasi hukum	Sekretariat Daerah
				Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	Sekretariat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran OPD	Pelaksana
				Meningkatnya capaian pelaksanaan administrasi umum	Persentase pelaksanaan kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Sekretariat Daerah
				Meningkatnya kinerja BUMD yang optimal	Return on Aset (ROA) BUMD	Sekretariat Daerah
				Meningkatkan kemandirian keuangan dan kualitas pengelolaan aset daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah Indeks pengelolaan aset daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Rasio efisiensi belanja terhadap APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase SILPA terhadap APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Proporsi PDRB jasa keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Aset dana pensiun/PDRB (%)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Total dana pihak ketiga/PDRB (%)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Meningkatkan kemandirian pembangunan daerah	Derajat fiskal otonomi daerah	Badan Pendapatan Daerah
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat pertumbuhan PAD	Badan Pendapatan Daerah
					Rasio pajak daerah terhadap pdrb	Badan Pendapatan Daerah
				Meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentasse ketersediaan jaringan telekomunikasi	Dinas Kominfo dan Persandian
				Meningkatnya kualitas pemerintahan berbasis teknologi	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dinas Kominfo dan Persandian
				Meningkatnya kualitas data statistik	Indeks pembangunan statistik	Dinas Kominfo dan Persandian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran OPD	Pelaksana
				Meningkatkan tata kelola administrasi kependudukan daerah	Indeks kepuasan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik .	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Rasio kepemilikan KK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya kepemilikaan dokumen pencatatan sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkaan terhadap yang dilaporkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase akta perkawinan yang ditertibkan bagi yang mela porkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks kepuasan anggota dewan terhadap layanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
				Meningkatnya layanan/ dukungan terhadap penyelesaian produk hukum oleh DPRD	Persentase PROLEGDA yang berhasil diselesaikan	Sekretariat DPRD
					Persentase keputusan dan peraturan yang dihasilkan DPRD	Sekretariat DPRD
				Meningkatkan tata kelola arsip daerah dan meningkatkan budaya literasi	Persentase pengelolaan arsip secara baku	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
				Meningkatnya kualitas arsip	Tingkat ketersediaan arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
				meningkatkan penyelenggaraan pelayanan tingkat kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Kecamatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran OPD	Pelaksana
				Meningkatnya hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan
				Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam mewujudkan inovasi pembangunan	Indeks inovasi daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
				Meningkatnya kualitas inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase kemanfaatan inovasi daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
					Indeks kapabilitas inovasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah
				Meningkatnya pemanfaatan kajian atau penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	Persentase penelitian yang termanfaatkan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia*	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang merata	Harapan lama sekolah	Dinas Pendidikan
					Rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya akses PAUD yang bermutu dan terjangkau	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	Dinas Pendidikan
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama	Dinas Pendidikan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran OPD	Pelaksana
				Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya literasi dan numerasi peserta didik	Literasi : SD SMP	Dinas Pendidikan
					Numerasi : SD SMP	Dinas Pendidikan
				Meningkatkan tata kelola arsip daerah dan meningkatkan budaya literasi	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
				Meningkatnya kegemaran membaca oleh masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
				Meningkatnya kunjungan perpustakaan daerah	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
				Meningkatnya kualitas dan daya saing pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda Indeks Pembangunan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	Pertumbuhan wirausaha muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi tingkat propinsi/nasional/internasional	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan
				Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup	Angka Kesakitan	Dinas Kesehatan
					Angka Kematian Bayi	Dinas Kesehatan
					Angka Kematian Ibu	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran OPD	Pelaksana
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan nasional	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Dinas Kesehatan
				Meningkatnya mutu sarana, prasarana kesehatan	Persentase puskesmas dengan akreditasi minimal paripurna	Dinas Kesehatan
					Persentase RS dengan akreditasi paripurna	Dinas Kesehatan
				Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan Kesehatan	Indeks kepuasan Masayarakat	Rumah Sakit Umum Daerah
				Meningkatnya mutu dan pelayanan rumah sakit	Persentase jenis pelayan kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Rumah Sakit Umum Daerah
		Meningkatnya kualitas keluarga sesuai yang sejahtera dan sesuai norma kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Meningkatkan kualitas hidup keluarga yang harmonis dan sejahtera	Persentase keluarga sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Meningkatnya perencanaan keluarga	TFR (*total fertility rate*)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
					Indeks perlindungan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
				Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
				Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi	Capaian nilai kabupaten layak anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
					Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran OPD	Pelaksana
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	PDRB per Kapita	Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan Rasio Gini	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
				Meningkatnya kecukupan pangan masyarakat	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Dinas Ketahanan Pangan
				Meningkatnya konsumsi pangan yang berkualitas	Skor pola pangan harapan	Dinas Ketahanan Pangan
				Mewujudkan kawasan transmigrasi berkembang	Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi (IPKT)	Dinas Transmigrasi
				Meningkatnya Kemandirian Transmigran	Persentase perkembangan kawasan transmigrasi	Dinas Transmigrasi
				Menurunkan jumlah PPKS di Kabupaten Buton	Tingkat penurunan jumlah PPKS	Dinas Sosial
				Meningkatnya kemandirian PPKS	Persentase PPKS mandiri	Dinas Sosial
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tahan bencana	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningakatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana daerah	Indeks ketahanan daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Rata-rata tingkat waktu tanggap (*response time rate*) penanganan bencana alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Persentase desa tangguh bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran OPD	Pelaksana
				Meningkatkan kualitas penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran dan non kebakaran	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur Kabupaten Buton	Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas	Indeks infrasrtuktur Kawasan permukiman	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan rakyat	Rasio rumah layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penurunan permukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Meningkatnya kualitas dan kuantitas PSU hunian layak	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatkan kapasitas dan kualitas konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Dinas Perhubungan
				Meningkatnya konektivitas wilayah dan keamanan transportassi	Persentase kecamatan/ wilayah yang terkoneksi transportasi	Dinas Perhubungan
					Tingkat penurunan jumlah kecelakaan	Dinas Perhubungan
				Meningkatkan kualitas infrastruktur pekerjaan umum daerah	Indeks kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan daerah	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya kualitas drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya akses air minum yang terstandar	Pesentase rumah tangga pengguna air minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran OPD	Pelaksana
					Kapasitas air baku (m3/detik)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya akses sanitasi aman	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya kualitas tenaga terampil konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya kualitas sistem irigasi daerah	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya kualitas pembangunan yang berbasis tata ruang wilayah	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap PBG	Rasio kepatuhan PBG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif guna meningkatkan pendapatan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi Indeks Daya saing Daerah	Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian	Meningkatkan kualitas pertanian Kabupaten Buton	Indeks produksi pertanian LPE subkategori perkebunan LPE subkategori peternakan	Dinas Pertanian
			Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	Meningkatnya mutu dan produksi pertanian	Produktivitas tanaman pertanian	Dinas Pertanian
				Meningkatnya mutu dan produksi perkebunan	Produktivitas tanaman perkebunan	Dinas Pertanian
				Meningkatnya mutu dan produksi peternakan	Produksi hasil peternakan	Dinas Pertanian
			Indeks Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas sektor ekonomi pada komoditas perikanan	Kontribusi PDRB subkategori perikanan	Dinas Perikanan
				Meningkatnya mutu dan produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	Dinas Perikanan
					Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Meningkatnya kontribusi industri pengolahan pada struktur ekonomi daerah	Rasio PDRB industri pengolahan	Dinas Perindustrian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran OPD	Pelaksana
				Meningkatnya kontribusi IKM dalam perekonomian daerah	Persentase peningkatan kualitas kontribusi IKM	Dinas Perindustrian
					Persentasse pertumbuhan IKM	Dinas Perindustrian
				Meningkatkan kapasitas UMKM dan Koperasi daerah	Persentase UMKM yang naik skala usaha Persentase koperasi aktif	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Optimalisasi kinerja koperasi dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Meningkatnya pertumbuhan Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan usaha kecil menengah baru	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level kabupaten	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Meningkatnya kewirausahaan daerah	Rasio kewirausahaan daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Meningkatnya status kemandirian desa	Persentase desa mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa	Persentase BUMDES yang aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara**	Meningkatkan peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian	Pertumbuhan nilai investasi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Meningkatnya realisasi investasi daerah dan nilai tambah dalam pembangunan ekonomi wilayah	Pertumbuhan proyek investasi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Pembentukan modal tetap bruto	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran OPD	Pelaksana
				Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum	Dinas Pariwisata
					Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	Dinas Pariwisata
				Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata
				Meningkatnya Unit Usaha Ekonomi Kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata
				Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok dan pertumbuhan sektor perdagangan wilayah	LPE kategori perdagangan besar dan eceran	Dinas Perdagangan
					PDRB subsektor jasa perdagangan	Dinas Perdagangan
				Terkendalinya harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah	Persentase komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga	Dinas Perdagangan
					Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat kabupaten	Dinas Perdagangan
				Meningkatnya daya saing perdagangan daerah	Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	Dinas Perdagangan
				Meningkatnya sarana perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Dinas Perdagangan
		Meningkatkan produktivitas tenaga kerja berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka**	Meningkatkan penyerapan dan kesetaraan tenaga kerja yang produktif dan berkualitas	Persentase penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
					Tingkat produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Meningkatnya kesetaraan masyarakat dalam dunia kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
					Proporsi penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Dinas Tenaga Kerja
					Persentase pekerja lulusan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi	Dinas Tenaga Kerja
				Meningkatnya pembinaan hubungan industrial perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial	Dinas Tenaga Kerja

3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan selama lima tahun ke depan. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang matang memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, sementara arah kebijakan menjadi panduan normatif yang memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai sinergi antar-sektor, efisiensi alokasi sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Perencanaan strategis yang dilakukan bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja selama lima tahun yang akan datang. Pengimplementasian tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana dalam melaksanakan transformasi reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan pelayanan kepada masyarakat.

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirancang dengan jelas dapat menjadi upaya dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang terfokus dan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, strategi dirancang untuk menjembatani antara misi yang bersifat jangka panjang dengan kebijakan dan program konkret yang dapat diimplementasikan, sehingga setiap langkah pembangunan berjalan terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pada pembangunan jangka menengah, Kabupaten Buton memiliki fokus dalam meningkatkan penguatan fondasi transformasi. Hal ini dilakukan dengan memfokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, perekonomian, infrastruktur, serta tata kelola di Kabupaten Buton. Strategi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6. Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buton Tahun 2025-2029

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN		
MISI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya.		
Tujuan 1 : Meningkatkan Buton religius yang berpedoman pada nilai luhur keagamaan dan kebudayaan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama	Penguatan peran lembaga keagamaan dan sosial serta penguatan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama
	Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan	Meningkatkan pelestarian terhadap nilai budaya dan kearifan lokal
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Penguatan kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 : Mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkualitas	Sasaran 2.1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan
		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi berbasis inovasi dan digitalisasi
MISI 2 : Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat		
Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia	Sasaran 3.1 : Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan menuju masyarakat berkehidupan layak
	Sasaran 3.2 : Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Meningkatkan kualitas kesehatan menuju masyarakat berkehidupan layak
	Sasaran 3.3 : Meningkatnya kualitas keluarga yang sejahtera dan sesuai norma kehidupan masyarakat	Penguatan komunikasi dan keharmonisan keluarga
	Sasaran 3.4 : Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Penguatan pengharusutamaan gender
Tujuan 4 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Sasaran 4.1 : Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	Penuntasan kemiskinan dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial adaptif integratif
MISI 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan		
Tujuan 5 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman berbasis lingkungan yang asri dan ketahanan bencana	Sasaran 5.1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup
	Sasaran 5.2 : Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	
Tujuan 6 : Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan	Sasaran 6.1 : Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas	Peningkatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik
	Sasaran 6.2 : Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	
MISI 4 : Meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal		
Tujuan 7 : Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif guna meningkatkan pendapatan masyarakat	Sasaran 7.1 : Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA	Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat
	Sasaran 7.2 : Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA	
	Sasaran 7.3 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah	Peningkatan kualitas pendampingan kewirausahaan daerah berbasis sektor UMKM baik pemberdayaan, permodalan, pengembangan produk hingga pemasaran
	Sasaran 7.4 : Meningkatkan produktivitas tenaga kerja berkualitas	Peningkatan tenaga kerja yang produktif dan sesuai kondisi pasar kerja

Penjabaran strategi pembangunan dalam mendukung pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton akan dijabarkan sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya.

a. Penguatan peran lembaga keagamaan dan sosial serta penguatan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama

Pembangunan Manusia dibidang keagamaan sangat penting dari segala pelaksanaan bidang-bidang lainnya, hal ini merupakan kodrat dalam kehidupan manusia sebagai arah tujuan kehidupan manusia di dunia. Salah satu manivestasi kehidupan yang mendukung kehidupan antar manusia tentu harus didasarkan pada ahlak, keimanan dan ketaqwaan serta nilai-nilai agama untuk mendukung kehidupan dunia yang hakiki. Pentingnya pembinaan pelayanan kehidupan beragama selain merupakan hal yang didasarkan untuk meingkatkan kualitas hidup beragama, juga merupakan kesadaran dari masinng-masing individu dalam meningkatkan kualitas beragama. Selain itu juga pemerintah harus ikut memberikan perhatian khusus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, melaksanakan program religius keagamaan baik disekolah, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan ruang-ruang komunitas, maupun menunjang sarana dan prasarana keagamaan sebagai wujud dari peran pemerintah utuk mendukung kualitas pelayanan kehidupan beragama. Strategi ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang kondusif, yang ditandai dengan suasana aman, harmonis, dan penuh rasa saling menghormati dalam keberagaman. Dengan adanya sinergi ini, masyarakat dapat bersatu dalam keragaman dan mencapai keadilan bagi semua.

b. Meningkatkan pelestarian terhadap nilai budaya dan kearifan lokal

Strategi pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal memiliki peran krusial dalam mewujudkan masyarakat yang religius, kondusif, dan berbudaya karena nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai fondasi moral, menjaga keharmonisan sosial, memperkuat identitas, dan menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik. Untuk meningkatkan pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, seperti Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial, penguatan pendidikan budaya dan revitalisasi nilai budaya, dan pegelolaan warisan budaya melalui peningkatan sarana dan fasilitasi kegiatan seni budaya masyarakat, serta penguatan peran lembaga adat/tokoh adat/lembaga kesenian dan masyarakat dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya sangatlah penting untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan kekayaan budaya lokal. Selain itu, pelestarian terhadap benda cagar budaya sebagai bagian dari warisan budaya harus dilakukan, karena benda cagar budaya memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan

c. Penguatan kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas. Upaya menjaga ketertiban, ketenteraman di Kabupaten Buton selalu menjadi perhatian penting bagi masyarakat dalam mewujudkan perlindungan dan kenyamanan masyarakat. Kondisi yang aman dan tenteram akan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan untuk memiliki kesamaan pandangan dan kepentingan bersama dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu. Koordinasi yang dilakukan meliputi : upaya menjaga keamanan wilayah tetap kondusif dalam kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan tetap menjaga norma-norma dalam masyarakat serta norma hukum yang berlaku. Upaya lain yang harus dilakukan yaitu menekan kriminalitas dan aksi-aksi lain yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga dengan situasi yang kondusif dapat menciptakan iklim yang sejuk, rasa aman, kehidupan masyarakat yang harmonis, perlindungan terhadap hak-hak sipil terjaga dan program-program pembangunan di Kabupaten Buton dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target.

d. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan, strategi utama yang dapat diterapkan adalah optimalisasi sinkronisasi dan integrasi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan adanya koordinasi yang kuat, Pemerintah Kabupaten Buton mampu menghindari tumpang tindih program serta memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan tepat sasaran. Langkah ini juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan prinsip relevansi pembangunan yang mengedepankan kebutuhan nyata masyarakat.

e. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi berbasis inovasi dan digitalisasi

Strategi Kabupaten Buton dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik diarahkan pada percepatan pembangunan pusat pemerintahan yang terintegrasi dan berbasis digital, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif. Arah kebijakan yang mendukung strategi ini mencakup pengembangan *smart government* melalui penguatan kapasitas aparatur dan lembaga daerah dalam manajemen data, keamanan informasi, serta pengelolaan aset secara digital, disertai peningkatan kompetensi SDM ASN di bidang teknologi informasi. Transparansi juga diperkuat melalui digitalisasi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa, serta pelayanan perizinan yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, strategi ini mendorong penguatan integritas partai politik sebagai pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel, sehingga secara keseluruhan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih inovatif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

MISI 2 : Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat

a. Meningkatkan kualitas pendidikan menuju masyarakat berkehidupan layak

Arah pembangunan harus berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, karena investasi pada manusia merupakan modal utama untuk mendorong kemajuan daerah. Dalam sektor pendidikan di Kabupaten Buton perlu difokuskan pada penyediaan layanan dasar yang merata dan berkualitas, terutama di wilayah terpencil dan kurang terjangkau. Karena itu, pemerataan akses pendidikan berkualitas, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan sarana prasarana pendidikan melalui dipandang sangat penting untuk melahirkan generasi yang cerdas dan berdaya saing

Disamping itu pula peningkatan kualitas pemuda dan olahraga berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pelatihan, pendidikan, serta kegiatan olahraga yang terstruktur, yang melibatkan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi.

b. Meningkatkan kualitas Kesehatan menuju masyarakat berkehidupan layak

Pembangunan dibidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitaannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pentingnya kesehatan harus mulai disadari oleh masyarakat, karena dengan kondisi kesehatan yang prima masyarakat akan mampu melakukan segala aktivitas dengan optimal. Selain itu, kesadaran yang tinggi tentang kesehatan akan menggiring masyarakat pada pola hidup sehat, yang akan berdampak pada produktivitas kerja masyarakat. Sejalan dengan itu, layanan kesehatan juga harus diperluas secara merata, terutama di wilayah terpencil, dengan menambah tenaga medis, memperbaiki fasilitas, serta menguatkan program promotif dan preventif agar masyarakat memperoleh hak dasar kesehatan secara optimal.

c. Penguatan komunikasi dan keharmonisan keluarga

Strategi penguatan komunikasi dan keharmonisan keluarga diarahkan pada peningkatan peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dimana Keluarga memainkan peran fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat dengan membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual, memberikan pendidikan awal dan dukungan emosional, serta mengajarkan keterampilan praktis yang membentuk pribadi individu yang lebih baik. Melalui fungsi-fungsi ini, keluarga menciptakan fondasi bagi SDM yang bermoral, produktif, dan mandiri, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

d. Penguatan pengharusutamaan gender

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak, yang merupakan generasi penerus, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan pelindungannya. Secara umum, pembangunan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mewujudkan kemampuan disegala bidang. Pada hakekatnya sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan, selain itu perempuan ini

adalah pencetak generasi penerus bangsa. Dengan sumber daya perempuan yang berkualitas akan menciptakan generasi/anak-anak yang berkualitas.

e. Pengentasan kemiskinan dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial adaptif integratif

Strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Buton perlu diarahkan pada penerapan satu sistem pendataan yang terintegrasi dan akurat melalui pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), yang sebelumnya menggunakan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK). Sistem ini menjadi landasan penting untuk merancang kebijakan berbasis data yang tepat sasaran, sehingga program perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan memanfaatkan DTSEN, pemerintah daerah dapat menghindari duplikasi bantuan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memperluas cakupan penerima manfaat. Sistem ini juga mendukung perencanaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat, sehingga pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan perlu diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Selain itu, program perlindungan sosial harus mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi darurat maupun perubahan sosial, seperti bencana alam, pandemi, atau gejolak ekonomi. Integrasi program bantuan sosial lintas sektor mulai dari bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi akan menciptakan ekosistem perlindungan yang holistik dan inklusif. Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Langkah ini juga dipandang penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh Kabupaten Buton.

MISI 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

a. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup

Strategi optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Buton harus dimulai dengan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan program daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap proyek pembangunan, baik infrastruktur maupun ekonomi, dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang ketat dan diterapkan secara konsisten.

Disamping itu penguatan regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, seperti penebangan hutan, penambangan, atau reklamasi pantai, menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekologis. Pendekatan ini tidak hanya melindungi kekayaan alam Kabupaten Buton, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan yang asri dan lestari secara partisipatif menjadi bagian penting dari strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Melalui edukasi dan pelatihan tentang praktik ramah lingkungan, seperti pertanian organik, pengelolaan sampah terpadu, dan konservasi sumber daya air, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian

lingkungan sekitarnya. Pemerintah daerah juga dapat mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan di sektor publik dan swasta, termasuk penggunaan energi terbarukan dan sistem transportasi yang efisien.

b. Peningkatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik

Strategi peningkatan aksesibilitas pembangunan di Kabupaten Buton harus difokuskan pada penguatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan transportasi umum yang terintegrasi. Dengan memperluas dan memperbaiki jaringan transportasi, mobilitas masyarakat dan distribusi barang akan menjadi lebih efisien, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di kawasan-kawasan perekonomian baru dan daerah terpencil.

Pemerintah daerah juga dapat mendorong kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung pengembangan pariwisata, perdagangan, perikanan dan pertanian berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman dan infrastruktur pelayanan publik, menjadi komponen penting untuk menciptakan lingkungan hidup yang layak dan sehat bagi masyarakat. Pembangunan perumahan yang memadai, sistem air bersih dan sanitasi yang baik, serta akses terhadap listrik dan layanan publik lainnya harus dilakukan secara merata, khususnya di wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah. Pemerintah Kabupaten Buton juga perlu mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam setiap pembangunan permukiman, seperti penggunaan material ramah lingkungan dan penataan ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim.

MISI 4 : Meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal

a. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat

Strategi peningkatan hilirisasi potensi sumber daya alam (SDA) unggulan di Kabupaten Buton merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi lanjutan yang sebelumnya kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan ekonomi dasar, dan kurang memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai momentum pertumbuhan yang tinggi, maka perlu pula dilakukan langkah-langkah strategis, yaitu : menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dengan menggali potensi sektor-sektor unggulan daerah khususnya sektor pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, meningkatkan kapasitas produksi melalui optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana produksi, dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah.

Peningkatan hilirisasi potensi unggulan SDA di Kabupaten Buton harus mengedepankan pendekatan inovatif yang selaras dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini, pengembangan sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, pariwisata dan hasil tambang harus diarahkan pada pengolahan yang berbasis teknologi bersih guna meningkatkan nilai tambah produk tanpa merusak lingkungan. Pemerintah daerah perlu mendorong investasi pada sektor hulu dan hilir melalui kemitraan dengan pelaku usaha lokal dan pelatihan kepada masyarakat agar mampu terlibat aktif dalam rantai produksi. Dalam hal ini pemerintah mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis kluster dengan dukungan teknologi digital.

Selain menciptakan lapangan kerja, strategi ini juga akan memperkuat kemandirian ekonomi lokal dan menjaga keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Di sisi lain, keberhasilan hilirisasi SDA juga sangat bergantung pada penerimaan sosial masyarakat terhadap transformasi ekonomi yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kearifan lokal, pola kehidupan tradisional, serta struktur sosial budaya yang telah mengakar. Pemerintah Kabupaten Buton dapat memfasilitasi dialog terbuka antara pelaku industri, tokoh adat, dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

b. Peningkatan kualitas pendampingan kewirausahaan daerah berbasis sektor UMKM baik pemberdayaan, permodalan, pengembangan produk hingga pemasaran

Untuk mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi dan penciptaan peluang kerja berbasis potensi unggulan daerah, maka potensi kelautan, perikanan, pertanian, dan sumber daya lokal lainnya harus dioptimalkan melalui pendekatan ekonomi biru, hilirisasi produk, serta penguatan industri pengolahan. UMKM dan koperasi diposisikan sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan yang perlu diperkuat dengan pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, meningkatkan kontribusi sektor produktif terhadap PDRB, sekaligus membuka lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat Buton.

Strategi Kabupaten Buton dalam meningkatkan kualitas pendampingan kewirausahaan daerah difokuskan pada penguatan sektor UMKM secara menyeluruh, mulai dari pemberdayaan masyarakat, akses permodalan, pengembangan produk, hingga perluasan jangkauan pemasaran. Strategi ini bertujuan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan lokal yang kompeten dan mandiri, melalui program-program peningkatan kapasitas dan keterampilan kewirausahaan. Arah kebijakan yang mendasarinya mencakup peningkatan keterkaitan UMKM dengan rantai nilai industri domestik dan global, dengan memberikan kemudahan akses terhadap sumber daya produktif, termasuk pembiayaan, teknologi, serta penguatan kemitraan usaha. Dengan demikian, diharapkan UMKM di Kabupaten Buton dapat berkembang secara berkelanjutan, berdaya saing tinggi, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

c. Peningkatan tenaga kerja yang produktif dan sesuai kondisi pasar kerja

Strategi Kabupaten Buton dalam peningkatan tenaga kerja yang produktif dan sesuai dengan kondisi pasar kerja diarahkan pada pengembangan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang selaras dengan potensi wilayah serta kebutuhan dunia usaha. Melalui peningkatan keterampilan, pelatihan berbasis kompetensi, dan fasilitasi sertifikasi kerja, pemerintah daerah berupaya menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan memiliki daya saing tinggi. Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan akses dan mutu pelatihan kerja yang relevan dengan perkembangan sektor unggulan daerah, sehingga mendorong terciptanya lapangan kerja yang produktif serta memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

3.2.1. Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Tahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahapan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Tahapan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Buton pada tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.7. Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029

TAHAP 1 TAHUN 2026	TAHAP 2 TAHUN 2027	TAHAP 3 TAHUN 2028	TAHAP 4 TAHUN 2029	TAHAP 5 TAHUN 2030
Pembangunan Infrastruktur dan Pemerataan Akses Layanan Dasar Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau	Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan	Perwujudan MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Penahapan pembangunan Kabupaten Buton dilakukan secara bertahap sesuai dengan fokus tahunan. Fokus kebijakan pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut :

Tahap 1 (Tahun 2026) : Pembangunan Infrastruktur dan Pemerataan Akses Layanan Dasar Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Tahun 2026 fokus pembangunan diarahkan pada akselerasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pemerataan serta akses terhadap layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Langkah ini menjadi fondasi utama agar seluruh wilayah Kabupaten Buton memiliki akses yang setara terhadap kebutuhan dasar pembangunan.

Tahap 2 (Tahun 2027) : Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah

Memasuki tahun 2027, pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan produktif. Dengan adanya pemerataan infrastruktur pada tahun sebelumnya, maka masyarakat memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, yang kemudian mendukung lahirnya SDM yang berkualitas. Tahap ini juga menekankan produktivitas masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Tahap 3 (Tahun 2028) : Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau

Pada tahun 2028, tema pembangunan difokuskan pada penguatan tata kelola kelembagaan pemerintah untuk mendorong pelayanan publik yang lebih berkualitas dan terjangkau. Setelah infrastruktur dan SDM diperkuat, maka kelembagaan pemerintah perlu ditata secara efektif agar pelayanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tahap 4 (Tahun 2029) : Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan

Pada tahun 2029, arah pembangunan lebih luas dengan menitikberatkan pada perluasan cakupan perekonomian daerah berbasis hilirisasi sumber daya alam dan penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari penguatan tata kelola sebelumnya, di mana pemerintahan yang kuat dan SDM yang produktif menjadi penggerak tumbuhnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tahap 5 (Tahun 2030) : Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan

Pada tahun 2030, seluruh rangkaian tahapan pembangunan bermuara pada perwujudan Masyarakat Buton yang Religius, Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan. Pada tahapan ini mencerminkan cita-cita jangka panjang daerah, yaitu menghadirkan masyarakat yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai religiusitas, kemandirian, dan keberlanjutan lingkungan serta sosial.

3.2.2. Pengembangan Wilayah

A. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton

Tindak lanjut kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton diarahkan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dengan penekanan pada pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, kehutanan, dan pariwisata. Kebijakan ini didesain tidak hanya untuk mengatur pemanfaatan ruang secara optimal, tetapi juga untuk mengintegrasikan pembangunan antar sektor, antar wilayah kecamatan, serta antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Arahan tersebut terwujud melalui penetapan kawasan budidaya dan kawasan lindung secara seimbang, dengan luas kawasan budidaya mencapai ± 112 ribu hektar dan kawasan lindung ± 43 ribu hektar, guna memastikan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

Sebagai bagian dari struktur ruang regional, Kabupaten Buton ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Pasarwajo. Hal ini membawa konsekuensi strategis dalam pengembangan pelabuhan pengumpan, integrasi trayek laut nasional, dan konektivitas infrastruktur pendukung seperti PLTD dan jaringan logistik kawasan timur Indonesia. Pemerintah Kabupaten Buton telah merespons status tersebut melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis prioritas seperti Kawasan Ekonomi Khusus Lasalimu, kawasan minapolitan di Pasarwajo, serta pertanian unggulan di Lasalimu Selatan. Di sisi lain, penguatan kawasan konservasi seperti Suaka Margasatwa Lambusango dan Cagar Alam Kakenauwe menegaskan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Keseluruhan kebijakan ini menjadi acuan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah serta pengembangan program pembangunan yang berbasis spasial, guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun arah pengembangan dan pusat pertumbuhan wilayah menjadi acuan dalam menentukan pengembangan kawasan secara terintegrasi khususnya dalam mendukung pengembangan kegiatan ekoonmi dalam upaya menciptakan pemerataan pembangunan, yaitu :

Tabel 3.8. Potensi dan Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Buton

Arah Pengembangan Wilayah			Lasalimu	Lasalimu Selatan	Siontapina	Pasarwajo	Wolowa	Wabula	Kapontori
Pelabuhan pengumpan regional (Banabungi)						√			
Pelabuhan pengumpan lokal (Nambo)			√						
Pelabuhan pengumpan lokal (Lasalimu)			√						
Pelabuhan perikanan (PPI)			√			√			
Kawasan Suaka Margasatwa Lambusango									√
Kawasan Cagar Alam Kakenauwe			√						
Kawasan Strategis Provinsi PKIP Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU)			√						√
Rencana perwilayahan sebagai PKL Pasarwajo						√			
Kawasan peruntukan pariwisata			√	√	√	√	√	√	√
Kawasan peruntukan hutan produksi			√	√	√	√	√		√
Kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan)			√	√	√	√			√
Kawasan peruntukan pertanian (tanaman hortikultura)			√	√	√				
Kawasan peruntukan pertanian (tanaman perkebunan)			√	√	√	√	√	√	√
Kawasan pertambangan dan energi							√		√
Kawasan peruntukan industri			√			√		√	√
Kawasan cagar budaya				√		√		√	
PLTD Buton						√			
A. Rencana Peruntukan Indutri Besar :									
1. Rencana kawasan industri pengolahan aspal			√			√			
2. Rencana kawasan industri pertambangan (PKIP)			√						√
B. Rencana Peruntukan Industri Menengah dan Kecil :									
1. Industri Pengelolaan hasil pertanian									
a. Industri pengolahan padi			√	√	√				√
b. Industri pengolahan jagung						√	√		√
c. Industri pengolahan kacang kedelai (tahu tempe)				√	√				√
2. Industri Pengolahan hasil perkebunan :									
a. Industri pengolahan jambu mete			√	√	√	√	√	√	√
b. Industri minyak kelapa			√		√	√		√	√
c. Industri kopra			√	√	√	√	√		√
d. Industri pengolahan kopi						√	√		
3. Rencana pengolahan hasil laut :									
a. Industi pengeringan rumput laut									√
b. Industri pengolahan dan pengepakan ikan			√		√	√			√
c. Industri mutiara									√
d. Industri pengeringan dan pengasapan ikan						√			√
4. Industri Pengolahan hasil hutan :									
a. Industri pengolahan rotan mentah			√				√		√
b. Industri penggergajian kayu			√	√	√	√			√
5. Industri pengolahan hasil pertambangan :									
a. Industri pengolahan batu pecah (split)						√			
b. Industri pengolahan/pengambilan pasir dan kerikil				√	√				
c. Industri batako						√			
d. Industri batu bata merah									√
Destinasi Pariwisata Daerah Teluk Pasarwajo dan sekitarnya	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pasarwajo dan sekitarnya	a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Wolowa				√	√		
		b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Siotapina			√	√			
	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Wabula dan sekitarnya	a. Desa Wasuamba adat kaombo perlindungan laut						√	
		b. Komunitas budaya dan adat kerajinan tenun						√	
		c. Snorkling wilayah lautwabula						√	

Arah Pengembangan Wilayah			Lasalimu	Lasalimu Selatan	Siontapina	Pasarwajo	Wolowa	Wabula	Kapontori
Destinasi Pariwisata Daerah Kapontori dan sekitarnya	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kapontori dan sekitarnya	a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Lasalimu	√						√
		b. KPPD Lasalimu Selatan		√					√

Sumber: RPJPD Kabupaten Buton, 2025-2045

2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Buton Pada RPJMN Tahun 2025-2029

Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan menempatkan Kabupaten Buton sebagai salah satu lokasi prioritas dalam Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara sebagai ekonomi biru berkelanjutan di Kabupaten Buton. Intervensi strategis yang diarahkan pemerintah pusat meliputi :

a. Pengelolaan sarana prasarana perikanan tangkap.
b. Penguatan logistik dan sistem rantai dingin.
c. Peningkatan kapasitas usaha kelautan
d. Pengembangan klaster ikan nila salin dan revitalisasi tambak.

Secara lengkap arah pembangunan ini menekankan pada penguatan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Buton, seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata, yang akan dikembangkan dengan pendekatan berkelanjutan dan berbasis pada potensi lokal. Adapun arahan tersebut tergambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9. Highlight Indikasi Intervensi Nasional Terhadap Kabupaten Buton

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
Kabupaten Buton sebagai Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap** *Output:* • Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan • Pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan (Eco Fishing Port) **Penguatan Logistik, Pemasaran, dan Sistem Rantai Dingin Produk Perikanan** *Output:* • Sarana penyimpanan produk kelautan dan perikanan • Sarana distribusi logistik produk kelautan dan perikanan • Gudang beku beserta kelengkapannya **Peningkatan Kapasitas Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan** *Output:* • UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha • Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina • UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi dalam inkubasi bisnis • Pelaku usaha yang difasilitasi pengembangan diversifikasi produk bernilai tambah

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	• Eksportir kelautan dan perikanan baru yang ditumbuhkan • Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usahanya **Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern, dan Berkelanjutan** *Output:* • Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan • Pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang diperbarui • Pelabuhan perikanan UPT pusat dan pelabuhan perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur **Pengembangan Klaster Ikan Nila Salin** *Output:* • Ikan konsumsi air tawar hasil budidaya yang diproduksi • Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat • Benih ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat **Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng** *Output:* • Klaster kawasan revitalisasi tambak udang dan bandeng • Benih udang yang disalurkan ke masyarakat • Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif • Sarana budidaya ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat

Sumber: RPJMN. Tahun 2025-2029

Kabupaten Buton, dengan kekayaan sumber daya alam perikanannya, memiliki peran penting dalam mendukung arah pembangunan kawasan perikanan tangkap Sulawesi Tenggara. Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor perikanan, Kabupaten Buton dapat berkontribusi dalam pengelolaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dengan menyediakan alat penangkapan ikan yang modern dan ramah lingkungan, serta mengembangkan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*Eco Fishing Port*). Selain itu, Buton dapat meningkatkan kapasitas usaha kelautan dan perikanan dengan memfasilitasi UMKM lokal melalui akses pembiayaan, kemitraan usaha, serta inkubasi bisnis, untuk mendorong pertumbuhan wirausaha dan pelaku usaha di sektor perikanan. Pengembangan klaster ikan nila salin, revitalisasi tambak udang dan bandeng, serta peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi peluang besar bagi Kabupaten Buton dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanannya, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi daerah dan ketahanan pangan nasional.

3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Buton Pada RPJMD Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

Pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2029 dalam arah kebijakan kewilayahan provinsi di Kabupaten Buton menempatkan Kabupaten Buton berada pada tiga kawasan pengembangan, yaitu :

a. Kawasan Minapolitan Buton
   Mengembangkan sistem pusat kegiatan ekonomi berbasis perikanan dalam rangka mendukung keterkaitan fungsional keruangan dengan sistem perkotaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.
b. Kawasan Industri Pertambangan
   Peningkatan nilai dan kompleksitas industri pengolahan berbasis pertambangan batubara (aspal) di Kabupaten Buton.
c. Pengembangan kawasan pariwisata Pulau Buton
   Pengembangan kawasan pariwisata pendukung pariwisata prioritas Wakatobi di Kota Baubau, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan.

Tabel 3.10. Highlight Indikasi Intervensi Sulawesi Tenggara Terhadap Kabupaten Buton

No.	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
1.	Wilayah Kepulauan : Kabupaten Buton	**Pengembangan Kawasan Minapolitan Buton** Mengembangkan sistem pusat kegiatan ekonomi berbasis perikanan dalam rangka mendukung keterkaitan fungsional keruangan dengan sistem perkotaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir	**Hilirisasi Perikanan** ✧ Menetapkan kawasan sentra produksi perikanan tangkap di wilayah perairan Pulau Buton. ✧ Mengembangkan sarana penunjang industri perikanan yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan di Kota Baubau. ✧ Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan, melalui penyiapan sarana penyimpanan produk kelautan perikanan, sarana distribusi logistik produk kelautan perikanan, serta gudang beku dan kelengkapannya. ✧ Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan: pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi ✧ Mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran. ✧ Mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Wilayah darat, pesisir dan Pulau Kecil yang dapat berpotensi menyebabkan penurunan fungsi ekosistem laut sebagai kawasan perikanan tangkap. ✧ Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap melalui penyediaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, pengembangan pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan (Eco Fishing Port). ✧ Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan, melalui fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelautan perikanan,

No.	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
			pembinaan wirausaha kelautan perikanan, peningkatan kapasitas eksportir dan kelembagaan usaha kelautan perikanan, promosi usaha dan investasi kelautan perikanan.
2.	Kabupaten Buton	**Kawasan Industri Pertambangan** Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis Pertambangan batubara (aspal) di Kabupaten Buton Pengembangan industri pertambangan didukung dengan kawasan pertambangan di Kabupaten Buton	✧ Pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil tambang yang terintegrasi dengan kawasan pertambangan ✧ Pengembangan pelabuhan khusus/terminal khusus mendukung kegiatan pokok industri pertambangan ✧ Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan khusus, sistem pengolahan air baku dan penataan kawasan permukiman di sekitar kawasan pertambangan ✧ Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan potensial pertanian dan menjaga fungsi kawasan lindung yang ada di sekitar kawasan ✧ Fasilitasi dalam rangka peningkatan investasi ✧ Penguatan struktur industri dalam negeri
3.	Kabupaten Buton	**Pengembangan Kawasan Pariwisata Pulau Buton** Pengembangan kawasan pariwisata pendukung pariwisata prioritas Wakatobi di Kabupaten Buton	✧ Mengembangkan kawasan yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata: ➢ Pengembangan destinasi wisata di Pulau Buton untuk mendukung koridor atau jejaring pariwisata Sulawesi Tenggara ✧ Mengembangkan konsep pariwisata yang mengedepankan perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau kecil ✧ Pemasaran Pariwisata: ➢ Publikasi ➢ Promosi terpadu ➢ Konten promosi wisata minat khusus ➢ Jejaring promosi wisata minat khusus ✧ Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata ✧ Mengembangkan infrastruktur penunjang Kawasan pariwisata: ➢ Peningkatan kualitas jaringan jalan ➢ Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata ✧ Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Pulau Buton: ➢ Fasilitasi akses pembiayaan digital ➢ Pembiayaan startup, pembiayaan pasar modal, dan pembiayaan pariwisata berkualitas ➢ Rantai pasok industri pariwisata dan ekonomi kreatif ➢ Advokasi dan pendampingan peningkatan realisasi investasi ➢ Promosi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif ➢ Transformasi digital industri pariwisata dan ekonomi kreatif

No.	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
4.	Provinsi Sulawesi Tenggara	**Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut**	✧ Jaminan ketersediaan bahan baku rumput laut yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas sektor hulu: ➢ Rekomendasi tata kelola bidang budidaya rumput laut. ➢ Penyaluran bibit rumput laut kultur jaringan ke masyarakat. ➢ Penyaluran sarana budidaya rumput laut ke masyarakat. ➢ Pembangunan infrastruktur kawasan budidaya rumput laut –'Ocean for Prosperity-Infrastructure for Coral Reefs Areas. ➢ Pembangunan klaster rumput laut berbasis kawasan oleh masyarakat. ✧ Pengembangan industri hilir rumput laut: ➢ Fasilitasi investasi industri rumput laut bernilai tinggi (Karagenan/polisakarida, agar, kosmetik, biofuel, dan bioplastik) ➢ Pengembangan Biostimulan berbasis rumput laut ✧ Peningkatan rantai nilai rumput laut: ➢ Memperkuat koperasi rumput laut untuk memperkuat posisi tawar petani rumput laut ➢ Pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut ✧ Peningkatan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut: ➢ Pelatihan dan pendanpingan pengolah rumput laut terkait praktik produksi dan pelatihan manajemen usaha rumput laut dengan memprioritaskan peran perempuan ✧ Peningkatan dukungan finansial bagi pembudidaya rumput laut: ➢ Insentif fiskal bagi petani yang menggunakan bibit berkualitas dan menerapkan teknik ramah lingkungan dan penyediaan skema kredit mikro dengan bunga rendah bagi petani dan pelaku usaha rumput laut

Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

4. Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Buton Tahun 2025-2029

Arah pengembangan kewilayahan Kabupaten Buton Tahun 2025–2029 secara lebih operasional dijabarkan melalui penentuan lokasi-lokasi prioritas pengembangan wilayah yang mencerminkan karakteristik dan potensi unggulan di setiap kawasan. Berdasarkan hasil integrasi antara RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2029, pengembangan wilayah diarahkan pada empat kawasan utama, yaitu Kawasan Minapolitan Buton, Kawasan Industri Pertambangan, Kawasan Pariwisata Pulau Buton, dan Kawasan Pertanian. Keempat kawasan ini menjadi poros strategis yang merepresentasikan transformasi ekonomi daerah menuju basis kelautan, industri, dan pariwisata berkelanjutan.

Pada Kawasan Minapolitan Buton, pengembangan wilayah difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang mencakup kegiatan hilirisasi hasil perikanan, peningkatan kapasitas SDM nelayan, dan pengembangan budidaya

perikanan laut maupun air tawar di berbagai desa seperti Talaga Baru, Pasarwajo, Wasuamba, dan Karya Jaya. Intervensi yang dilakukan meliputi riset dan penerapan teknologi perikanan, pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan pendaratan ikan, cold storage, pabrik pakan, hingga revitalisasi unit pengolahan ikan skala mikro. Pengembangan kawasan ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan menciptakan rantai nilai ekonomi biru yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, Kawasan Industri Pertambangan diarahkan untuk mendorong hilirisasi sumber daya aspal Buton yang menjadi keunggulan daerah, melalui penguatan tata ruang, peningkatan konektivitas jalan, serta penyediaan sistem air minum berkelanjutan untuk mendukung kawasan industri Kapontori–Lasalimu. Adapun Kawasan Pariwisata Pulau Buton difokuskan pada pengembangan destinasi wisata bahari, budaya, dan agrowisata di wilayah Wabula, Pasarwajo, dan Kapontori dengan konsep pariwisata berbasis komunitas, konservasi, dan ekonomi kreatif lokal. Sedangkan Kawasan Pertanian difokuskan pada pengembangan komoditas pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan, di Kecamatan Pasarwajo, Siotapina, Lasalimu Selatan, Lasalimu dan Kapontori. Selain itu, terdapat pula arah pengembangan kewilayahan Kabupaten Buton yang akan dilaksanakan di tujuh wilayah kecamatan. Adapun seluruh arah pengembangan kewilayahan Kabupaten Butontersaji secara lebih lengkap dalam tabel di bawah ini, yang menjadi panduan implementatif bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Buton tahun 2025–2029.

Tabel 3.11. Matriks Arah Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Buton Tahun 2025-2029

Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
Desa Talaga Baru Kec. Lasalimu, Kel. Pasarwajo Kec. Pasarwajo	Sentra Industri Perikanan (Hilirisasi perikanan) : ✧ Kabupaten Buton sebagai Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara ✧ Pengembangan Kawasan Minapolitan Buton	✧ Kegiatan riset dasar dalam rangka pemetaan potensi perikanan Kab. Buton berdasarkan Kawasannya ✧ Kajian dan aplikasi teknologi perikanan sesuai dengan jenis usaha/kegiatan perikanan yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi perikanan. ✧ Optimalisasi bantuan sarpras bagi pelaku perikanan dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha/kegiatan perikanan dan merangsang munculnya usaha/kegiatan perikanan yang baru ✧ Mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran. ✧ Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan, melalui penyiapan sarana penyimpanan produk kelautan perikanan, sarana distribusi logistik produk kelautan perikanan, serta gudang beku dan kelengkapannya. ✧ Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan, melalui fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelautan perikanan, pembinaan wirausaha kelautan perikanan, peningkatan kapasitas eksportir dan kelembagaan usaha kelautan perikanan, promosi usaha dan investasi kelautan perikanan.

Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
		✧ Peningkatan SDM melalui kegiatan kampanye/sosialisasi/seminar/pelatihan /bimtek dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu hasil perikanan ✧ Penguatan kelembagaan perikanan melalui manajeman aplikasi informasi dan teknologi dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pengelolaan perikanan ✧ Kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah maupun swasta dalam rangka perluasan jejaring dan promosi perikanan Kab. Buton (Investasi) ✧ Pembangunan sentra industri (Pelabuhan Pendaratan Ikan, Cold Storage, Tuna Loin, Pabrik Pakan, Pabrik Rumput Laut, dll) menuju perikanan berskala industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir (hilirisasi) ✧ Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan: pengembangan pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan.
Desa Bajo Bahari Kec. Wabula Desa Holimombo Jaya Kec. Pasarwajo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Desa Bahari Makmur Kec. Siotapina Desa Manuru Kec. Siotapina Desa Sampuabalo Kec. Siotapina Desa Kumbewaha Kec. Siotapina Desa Balimu Kec. Lasalimu Selatan Desa Wasuamba Kec. Lasalimu Desa Talaga Baru Kec. Lasalimu	Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon Tuna)
Desa Holimombo Jaya Kec. Pasarwajo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Desa Sampuabalo Kec. Siotapina Desa Kumbewaha Kec. Siotapina Desa Lasalimu Kec. Lasalimu Selatan	Industri perikanan skala mikro	Revitalisasi Unit Pengolahan Ikan skala mikro (Pengolahan Tuna Loin) untuk meningkatkan mutu, nilai tambah, daya saing, efisiensi produksi dan mendukung industrialisasi perikanan serta ekspor
Desa Karya Jaya Kec. Siotapina Desa Lasalimu Kec. Lasalimu Selatan	Pengembangan budidaya rumput laut	✧ Optimalisasi bantuan sarpras dalam rangka mendukung peningkatan produksi rumput laut
		✧ Pengembangan kebun bibit rumput laut dalam rangka mendukung keberlanjutan kegiatan usaha budidaya rumput laut
		✧ Pembangunan Laboratorium kultur jaringan dalam rangka peningkatan kualitas komoditas rumput laut
Desa Wakalambe Kec. Kapontori	Pengelolaan Pabrik Pengolahan Rumput Laut	Pemanfaatan pabrik pengolahan rumput laut dalam bentuk sewa maupun kerjasama pemanfaatan
Desa Boneatiro, Desa Tuangila Kec. Kapontori, Desa Umalaoge Kec. Lasalimu Selatan, Desa Kancinaa Kec. Pasarwajo	Pengembangan budidaya ikan nila	Pembangunan pabrik pakan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan budidaya ikan nila
Desa Wasuamba Kec. Lasalimu Desa Bonelalo Kec. Lasalimu Desa Waoleona Kec. Lasalimu Kel. Pasarwajo Kec. Pasarwajo	Pengembangan budidaya keramba jaring apung	✧ Optimalisasi bantuan sarpras dalam rangka peningkatan produksi KJA ✧ Pembangunan Hatchery/Pembibitan Skala Rumah Tangga dalam rangka mendukung keberlanjutan kegiatan KJA

Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
		✧ Pembangunan pabrik pakan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan budidaya
Desa Wakalambe Desa Boneatiro Kel. Watumotobe Desa Tuangila Kec. Kapontori Desa Lasembangi Kec. Lasalimu	Pengembangan budidaya ikan air tawar	✧ Kajian analisis kesesuaian lahan untuk komoditas air tawar yang sesuai ✧ Optimalisasi bantuan sarpras dalam rangka mendukung peningkatan produksi budidaya air tawar
Desa Umalaoge Lasalimu Selatan Desa Siomanuru Kec. Lasalimu Selatan Desa Kancinaa Kec. Pasarwajo		✧ Pembangunan BBI untuk mendukung ketersediaan bibit ikan air tawar ✧ Pembangunan pabrik pakan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan budidaya
Desa Wakalambe Kec. Kapontori Desa Boneatiro Kec. Kapontori Kel. Watumotobe Kec. Kapontori	Pengembangan budidaya kepiting bakau	Budidaya udang vaname (Optional)
Desa Wasuamba Kec. Lasalimu Desa Karya Jaya Kec. Siotapina	Pengembangan budidaya kepiting bakau	Budidaya Kepiting bakau system silvofishery (optional)
Desa Nambo, Suandala, Lawele Kec. Lasalimu, Kec. Pasarwajo-Kapontori Kecamatan Pasarwajo, Kec. Lasalimu, Kec. Lasalimu Selatan, Kec. Kaponori	Pengembangan Kawasan Industri Pertambangan	✧ Penyusunan dan penetapan RDTR Pemetaan Kawasan strategis provinsi peruntukan Kawasan industri pertambangan (PKIP) yaitu Kapontori-Lasalimu yang berpusat di Kecamatan Lasalimu. ✧ Pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil tambang yang terintegrasi dengan kawasan pertambangan. ✧ Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan seperti : jaringan jalan khusus untuk mendukung kawasan wilayah pertambangan rekonstruksi jalan), penyusunan dokumen studi kelayakan instalasi pengolahan air minum, perluasan system penyediaan air minum jaringan perpipaan, sistem pengolahan air baku, infrastruktur ketenagalistrikan, penataan kawasan permukiman di sekitar kawasan pertambangan. ✧ Pengembangan pelabuhan husus/terminal khusus mendukung kegiatan pokok industri pertambangan. ✧ Optimalisasi distribusi komoditas unggulan daerah melalui Pengembangan pelabuhan Nambo sebagai simpul utama distribusi Aspal Buton ✧ Mendukung industri aspal berskala nasional dan internasional melalui Pembangunan pelabuhan utama untuk ekspor aspal melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ✧ Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan potensial pertanian dan menjaga fungsi kawasan lindung yang ada di sekitar kawasan ✧ Fasilitasi dalam rangka peningkatan investasi. ✧ Penguatan struktur industri dalam negeri
KSPD Teluk Pasarwajo (Banabungi dan Kaongke Ongkea)	Pengembangan Kawasan Pariwisata Pulau Buton : ✧ Pengembangan kawasan wisata bahari, budaya, kuliner, dan agrowisata unggulan sebagai gerbang utama pariwisata Pulau Buton serta simpul konektivitas Penyanggah KSPN Wakatobi.	Pengembangan destinasi dan atraksi wisata: • Optimalisasi fungsi Dive Center Banabungi dan Tourism Information Center (TIC) sebagai pusat layanan wisata bahari. • Penataan Teluk Pasarwajo dan Kali Lakua sebagai koridor wisata bahari-kuliner. • Pengembangan agrowisata kopi Kaongke

Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
		Ongkea yang tematik dan sustainable (tur edukasi,Plantation, roasting, produk kopi local, café edukasi). Ekonomi kreatif dan OVOP: Pengembangan produk khas kawasan Ekraf (kuliner,, kriya, dan Fashion) berbasis konsep *One Village One Product (OVOP).* Pemasaran dan promosi: • Branding Teluk Pasarwajo sebagai poros wisata bahari dan maratim • Promosi digital dan event tahunan Infrastruktur dan amenitas: • Revitalisasi kawasan kuliner pendukung teluk Pasarwajo, • pembangunan ruang publik, serta fasilitas dasar dan sarana prasarana destinasi wisata. SDM dan kelembagaan: • Pelatihan pemandu wisata, Pelatihan Kuliner dan Hospitality • Penguatan UMKM kuliner dan ekraf melalui digital marketing dan jejaring antar-KSPD. • Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di sekitar destinai wisata.
KSPD Wabula (Wabula dan Wasuemba)	✧ Pengembangan kawasan wisata bahari dan budaya berbasis masyarakat dan konservasi laut sebagai destinasi unggulan penyangga DSP Wakatobi.	Pengembangan destinasi dan atraksi wisata: • Penataan Lanskap kali topa dan Pantai Lahonduru. • Pengembangan wisata budaya lokal: ritual adat Pidoano Kuri, tenun tradisional, dan festival budaya. Ekonomi kreatif dan OVOP: Pengembangan produk khas desa (tenun Wabula, kriya, kuliner tradisional) berbasis prinsip OVOP. Pemasaran dan promosi: Promosi digital dan paket wisata bahari–budaya berbasis komunitas. Infrastruktur dan amenitas: Peningkatan fasilitas dasar destina wisata dan sarana prasarana dan Spot Foto/interpretasi budaya. SDM dan kelembagaan: • Pelatihan pemandu wisata, penyelam, dan hospitality pelatihan management Homestay dan pelatihan ekraf • Pengembangan desa wisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif lokal. • Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di sekitar destinai wisata.
KSPD Kapontori (Mambulugo dan Boneatiro Barat)	✧ Pengembangan kawasan ekowisata alam dan bahari berbasis konservasi dengan fokus pada Hutan Lambusango, Teluk Ora, Air Terjun Kandawu ndawuna, dan Pulau Pendek.	Pengembangan destinasi dan produk wisata: • Pengembangan ekowisata Hutan Lambusango (trekking, bird watching, wisata edukasi konservasi). • Pengembangan wisata bahari di Teluk Ora dan Pulau Pendek. • Pengembangan paket wisata terintegrasi. Ekonomi kreatif dan OVOP: Pengembangan produk kreatif lokal berbasis OVOP untuk memperkuat ekonomi desa wisata. Pemasaran dan ekraf: • Promosi Paket Wisata Alam dan Konservasi • Promosi paket “Lambusango Green Adventure”.

Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
		Infrastruktur dan amenitas: • Peningkatan akses ke lokasi wisata • Penataan fasilitas dasar destinasi wisata dan sarana prasarana tematik wisata alam dan konservasi (shelter, papan informasi, jalur wisata, dll). SDM dan kelembagaan: • Pelatihan pemandu wisata (alam dan konservasi, Pelatihan Homestay dan minat khusus) • Pengembangan ekraf local • Penguatan kelompok pengelola wisata berbasis komunitas.
Sinergi Antar-Kawasan (KSPD Teluk Pasarwajo - Wabula - Kapontori)	✧ Pengembangan koridor wisata bahari–budaya–alam Pulau Buton yang terintegrasi dalam jejaring destinasi penyangga DSP Wakatobi.	Branding dan promosi lintas kawasan: Pulau Buton-Gerbang Penyangga Wakatobi. Ekonomi kreatif dan OVOP lintas kawasan: Pengembangan kopi, tenun, kuliner, kriya, dan event budaya dalam satu jaringan OVOP Pulau Buton. Kelembagaan dan jejaring: • Pembentukan forum koordinasi antar-KSPD • kolaborasi promosi lintas kawasan, serta pelibatan swasta dan investor wisata bahari. • Penyusunan paket wisata terintergrasi antar KSPD Infrastruktur konektor: Peningkatan jalan wisata, dermaga, signage terpadu serta sarana prasarana destinasi wisata
Kec. Lasalimu Selatan, Kec. Lasalimu Selatan, Kec. Lasalimu, Kec. Kapontori, Kec. Siontapina, Kec. Pasarwajo	Hilirisasi Sektor Pertanian: ✧ Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	✧ Menetapkan peraturan kepala daerah tentang penetapan lahan pengembangan tanaman pertanian. ✧ Menetapkan lahan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura. ✧ Menetapkan wilayah pengembangan agrowisata. ✧ Penerapan teknologi dan penyediaan sarana input produksi : penggunaan benih unggul bersertifikat, penyediaan sarana prasarana budidaya, pengembangan pupuk organik dan pestisida nabati. ✧ Mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran, dan rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi tersier. ✧ Peningkatan produksi dan pasca panen pangan nabati: alat dan mesin pertanian, sarana pengolahan dan pasca panen, ✧ Penguatan pangan lokal: sarana pengolahan hasil tanaman pangan dan sarana pascapanen tanaman pangan. ✧ Penguatan logistik dan distribusi logistik produk : pemasaran dan sistem rantai produksi. ✧ Penguatan SDM pertanian dan pengembangan praktik pertanian berkelanjutan: SL-GAP, pembinaan penangkar benih, rekomendasi perlindungan LP2B dan alih fungsi lahan pertanian, dan antisipasi gangguan hama dan penyakit tanaman.

Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
		✧ Peningkatan kapasitas usaha dan investasi pertanian melalui fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembinaan wirausaha pertanian, peningkatan kapasitas eksportir dan kelembagaan usaha, promosi usaha dan investasi pertanian. ✧ Pembangunan industri pengolahan pertanian skala mikro. ✧ Penguatan kelembagaan pemasaran, kemitraan, pengendalian inflasi ✧ Pembangunan tampungan air : embung pertanian
Kec. Lasalimu, Kec. Siotapina	✧ Pengembangan Tanaman Perkebunan	✧ Penerapan teknologi dan penyediaan sarana input produksi, sarana pasca panen dan pengolahan tanaman perkebunana, serta prasarana pasca panen dan pengolahan tanaman perkebunan. ✧ Mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran. ✧ Penguatan SDM pertanian dan pengembangan praktik pertanian berkelanjutan: SL-GAP, antisipasi gangguan hama dan penyakit tanaman. ✧ Penguatan logistik dan distribusi logistik produk : pemasaran dan sistem rantai produksi. ✧ Peningkatan kapasitas usaha dan investasi pertanian melalui fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembinaan wirausaha pertanian, peningkatan kapasitas eksportir dan kelembagaan usaha, promosi usaha dan investasi pertanian.
Kecamatan Siontapina	Pengembangan Peternakan	✧ Penyusunan dokumen rencana penetapan lahan pengembangan pengembalaan. ✧ Peningkatan produksi ternak serta bibit ternak berkualitas. ✧ Pengelolaan lahan penggembalaan umum : pengadaan bibit ternak sapi unggul dan kelengkapannya ✧ Pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum : pembangunan pagar dan kandang perlindungan ternak. ✧ Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani: pengembangan ekonomi petani, fasilitasi dan pembinaan lembaga peternakan, fasilitasi dan pembinaan nilai tambah dan daya saing peternakan.
Kabupaten Buton	Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman (air minum, sanitasi aman dan pengelolaan persampahan)	✧ Pemenuhan akses air minum aman terintegrasi dari hulu ke hilir. ✧ Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan SPAM. ✧ Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk berkelanjutan dan berketahanan iklim masyarakat. ✧ Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif. ✧ Penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah.
	Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman	✧ Fasilitasi dan penyaluran subsidi/bantuan pembiayaan perumahan, peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah Baru.

Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
		✧ Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. ✧ Pembangunan atau bantuan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). ✧ Penanganan perumahan kuhun dan permukiman kumuh.
	Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan	✧ Penyediaan dan penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan digital. ✧ Pegembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, termasuk untuk menekan angka kematian ibu dan anak. ✧ Peningkatan produksi dan pemerataan SDM kesehatan. ✧ Penguatan intervensi spesifik dan sensitif Stunting. ✧ Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta). ✧ Revitalisasi sarana dan prasarana kesehatan.
	Penguatan pendidikan, pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal	✧ Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berbasis teknologi. ✧ Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik. ✧ Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah pendidikan dasar. ✧ Peningkatan kapasitas kepemudaan dan olahraga. ✧ Pelatihan vokasi berbasis unggulan daerah yang didukung penjaminan mutu pendidikan. ✧ Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja, serta job fair.
	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan	✧ Pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar wilayah, sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran.
		✧ Penataan perkotaan Pasarwajo sebagai ibukota kabupaten.
		✧ Penguatan infrastruktur telekomunikasi.
		✧ Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet.
		✧ Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat.
	Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi	✧ Penyediaan perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail)
		✧ Pembangunan tambatan perahu.
		✧ Pembangunan/pengembangan dermaga.
		✧ Pengembangan pelabuhan sesuai Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang telah ditetapkan.
		✧ Pembangunan dan perluasan jaringan penerangan jalan umum (PJU)
		✧ Pengadaan dan pembangunan jembatan timbang.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mencapai strategi pembangunan, juga sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini disusun berdasarkan misi dan mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Buton. Fokus utama Arah Kebijakan meliputi : peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh 0PD yang terlibat di dalamnya.

Keselarasan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan dalam mendukung pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton dijabarkan sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya.

a. Strategi penguatan peran lembaga keagamaan dan sosial serta penguatan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama

   Arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

   1) Meningkatkan sinergi antar pemerintah daerah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dalam membangun keharmonisan sosial dan kerukunan hidup antar umat beragama melalui penguatan dan fasilitasi forum komunikasi antar umat beragama (FKUB).
   2) Penguatan pendidikan IMTAK yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama melalui program religius.
   3) Pemberian bantuan keagamaan lintas agama melalui program harmonisasi kehidupan beragama dan program religius.
   4) Penguatan integritas partai politik.

b. Strategi meningkatkan pelestarian terhadap nilai budaya dan kearifan lokal

   Arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

   1) Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial.
   2) Penguatan peran lembaga adat/tokoh adat/lembaga kesenian dalam pelestarian budaya lokal.
   3) Penguatan pendidikan budaya dan revitalisasi nilai budaya.
   4) Penguatan pegelolaan warisan budaya melalui peningkatan sarana prasarana, fasilitasi kegiatan seni/festival budaya dan revitalisasi cagar budaya.

c. Strategi penguatan kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat

   Arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut :

   1) Penyusunan dan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
   2) Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal di Kabupaten Buton.
   3) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kesadaran hukum dan forum komunikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

4) Meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendukung keamanan wilayah dan iklim investasi daerah.

d. Strategi peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan

Arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

1) Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga, dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
2) Penerapan sistem manajemen talenta ASN, pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
3) Penguatan forum satu data melalui *integrated single database.*
4) Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah.
5) Peningkatan penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal, serta penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.
6) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan transfer ke daerah (TKD).
7) Pengembangan skema pembiayaan kreatif, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau dana bergulir untuk sektor produktif.
8) Penyiapan regulasi dan insentif fiskal lokal untuk mendorong investasi swasta pada sektor ekonomi biru dan pariwisata.
9) Pemetaan aset daerah dan penyusunan skema pemanfaatan komersial (sewa, kerja sama, atau BUMD) terhadap aset-aset strategis.
10) Penguatan pengembangan dan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.
11) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

e. Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi berbasis inovasi dan digitalisasi

Arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

1) Akselerasi pembangunan pusat pemerintahan dan perwujudan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi berbasis digital melalui penguatan Mall Pelayanan Publik.
2) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
3) Akselerasi proses transformasi desa berbasis teknologi digital dalam meningkatkan pelayanan publik, mendorong ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui digitalisasi desa.
1) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi melalui transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
4) Pengembangan sistem perencanaan berbasis e-Planning untuk memastikan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.

MISI 2 : Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat

a. Strategi meningkatkan kualitas pendidikan menuju masyarakat berkehidupan layak
Arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:
   1) Peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan.
   2) Peningkatan kreativitas tenaga pendidik dan siswa.
   3) Penguatan sarana dan prasarana pendidikan.
   4) Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi masyarakat melalui literasi numerasi berbasis inklusi sosial, serta taman baca terintegratif.
   5) Penguatan bantuan bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi siswa miskin atau siswa berprestasi.
   6) Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya.
   7) Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi.
   8) Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan potensi unggulan wilayah seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, konstruksi, perkebunan, perikanan dan pariwisata.
   9) Pengembangan pendidikan tinggi/politeknik sesuai dengan potensi unggulan wilayah seperti pertanian, pertambangan, perikanan, pariwisata.
   10) Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan internet of things (IoT).
   11) Penguatan kapasitas SDM berbasis IPTEK dalam mendukung pengembangan ekonomi biru yang inovatif dan berdaya saing
   12) Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
   13) Peningkatan kualitas pendidikan kepemudaan dan olahraga.

b. Strategi meningkatkan kualitas Kesehatan menuju masyarakat berkehidupan layak
Arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut :
   1) Peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang merata diseluruh wilayah..
   2) Penguatan sarana dan prasarana kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang merata diseluruh wilayah.
   3) Pembangunan rumah sakit type D untuk melayani masyarakat yang jauh dari ibukota kabupaten.
   4) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
   5) Percepatan penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular di daerah endemis, melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor.
   6) Penyediaan pelayanan rujukan serta pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*), khususnya untuk daerah kepulauan dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam.
   7) Pelayanan kesehatan untuk semua (*Health For All*) untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpencil, mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.
   8) Penguatan kolaborasi sistem kesehatan berbasis kearifan lokal dengan layanan kesehatan modern.

c. Strategi penguatan komunikasi dan keharmonisan keluarga
Arah kebijakan pada strategis ini sebagai berikut :
1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
2) Penguatan kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

d. Strategi penguatan pengarusutamaan gender
Arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut :
1) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Kabupaten Buton
2) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
3) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

e. Strategi pengentasan kemiskinan dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial adaptif integratif
Arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:
1) Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).
2) Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
3) Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.
4) Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.
5) Penguatan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT)-online untuk memudahkan masyarakat miskin dan rentan dalam mengakses berbagai layanan perlindungan dan rehabilitasi sosial.
6) Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
7) Penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi lokal, pemberian bantuan sosial untuk rumah tangga miskin (RTM)/kaum difabel/kelompok lansia, dan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dari layanan dasar.

8) Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah seperti BAZNAS, dalam penuntasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui intervensi program lintas sektor yang terukur dan tepat sasaran.

MISI 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

a. Strategi optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah

Arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

1) Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dalam mendukung pelestarian lingkungan untuk mendukung ekonomi hijau.
2) Penguatan antisipasi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan dan ketahanan bencana.
3) Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan non struktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta adopsi perubahan iklim (penggenangan pesisir) dan pemulihan terhadap bencana.
4) Penguatan program peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah melalui penataan taman/taman terbuka hijau (RTH) dan lokasi pedagang kaki lima, pengelolaan sampah terpadu, pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA)/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)/tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R)/tempat penampungan sementara (TPS), pembangunan bank sampah, dan gerakan lingkungan bersih.

b. Strategi peningkatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik

Arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

1) Peningkatan konektivitas, jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan.
2) Pemanfaatan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.
3) Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan daerah untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan).
4) Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk penanganan *backlog.*
5) Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
6) Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
7) Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif khususnya dalam pemenuhan layanan dasar.
8) Penguatan penataan wilayah khususnya pada wilayah perkotaan sebagai pusat pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat melalui penyusunan masterplan penataan/perluasan kawasan, pembangunan penataan/perluasan kawasan perkotaan, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur wilayah perkotaan.

9) Penguatan program percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perekonomian (kawasan pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata), infrastruktur kawasan rawan bencana dna tangguh bencana, dan infrastruktur pelayanan publik.
10) Optimalisasi pemanfaatan kawasan industri Laguna dan Kapolimu (Kapontori, Lasalimu), Lasalimu Selatan, Pasarwajo, dan Wabula sebagai wadah industri pengolahan potensi unggulan daerah dalam mendukung perekonomian daerah.

MISI 4 : Meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal

a. Strategi peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat

Arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:

1) Hilirisasi produk unggulan sektor perikanan dan pertanian.
2) Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.
3) Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana sektor perikanan seperti pangkalan pendaratan ikan, industri pengolahan rumput laut dan industri pengolahan ikan sebagai pusat hilirisasi perikanan budidaya dan perikanan tangkap untuk mendukung hilirisasi sektor perikanan.
4) Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana sektor pertanian untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian.
5) Pengembangan logistik dan rantai dingin untuk hasil perikanan dan pertanian guna menurunkan biaya distribusi dan meningkatkan akses pasar luar daerah
6) Optimalisasi kolaborasi kemitraan dalam peningkatan dan pengembangan hilirisasi potensi SDA unggulan daerah (sektor perikanan, sektor pertanian, sektor pariwisata, dan sektor pertambangan).
7) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
8) Penguatan regulasi dalam mendukung ekonomi biru yang inklusif, Penguatan pusat ekonomi biru berbasis komoditas unggulan melalui hilirisasi, Penguatan kemandirian pangan lokal berbasis ekonomi biru.
9) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif.
10) Modernisasi perikanan tangkap dan budidaya serta pertanian berbasis teknologi tepat guna dan praktik ekonomi biru dan ekonomi hijau.
11) Pengembangan kawasan HKM Lasalimu dan Kapontori sebagai sentra agrowisata serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan dengan teknologi tepat guna.
12) Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif.
13) Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, pertanian, wisata bahari, dan industri kemaritiman).
14) Optimalisasi peran pusat-pusat pertumbuhan baru untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah.
15) Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism).
16) Pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat.

17) Penataan dan promosi kawasan ekowisata pesisir berbasis daya tarik lokal dan desa wisata rintisan.
18) Pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata lokal untuk memperkuat ekonomi masyarakat di sektor jasa wisata.
19) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan.
20) Peningkatan peran PMA/PMDN terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi baru melalui pemberian kemudahan investasi.
21) Peningkatan produktivitas BUMD.

d. Strategi peningkatan kualitas pendampingan kewirausahaan daerah berbasis sektor UMKM baik pemberdayaan, permodalan, pengembangan produk hingga pemasaran
Arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:
1) Percepatan program pemulihan ekonomi masyarakat melalui pembentukan klaster UMKM berbasis potensi unggulan wilayah, optimalisasi gerakan *one vilage one product*, pengembangan ekonomi kreatif, pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, pelatihan start-up wirausaha muda, dan kemudahan perizinan untuk berusaha.
2) Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan melalui penyediaan pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan bisnis bagi pelaku.
3) Penguatan ekosistem UMKM digital melalui pelatihan digital marketing, dan pengembangan platform e-commerce terutama kelompok kaum muda dan perempuan.
4) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
5) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
6) Penguatan sertifikasi produk unggulan daerah dan pengembangan inkubator bisnis berbasis potensi lokal untuk meningkatkan daya saing.

e. Strategi peningkatan tenaga kerja yang produktif dan sesuai kondisi pasar kerja
Arah kebijakan pada strategi ini sebagai berikut:
1) Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha.
2) Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian dan pariwisata.
3) Menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri dan pasar kerja lokal.
4) Penguatan proyek padat karya yang memanfaatkan tenaga kerja lokal dalam pembangunan infrastuktur skala kecil untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
5) Meningkatkan pembinaan kelompok petani/nelayan termasuk wirausaha muda dan petani/nelayan milenial untuk terlibat aktif dalam sektor pertanian dan perikanan modern, mendorong regenerasi petani, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
6) Meningkatkan kerja sama antara sekolah, perguruan tinggi, dan industri dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai.

7) Memperkuat kemitraan antara sektor pendidikan dan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar.
8) Memfasilitasi program rekruitmen tenaga kerja lokal melalui job fair dan bursa tenaga kerja daerah.
9) Memperkuat program magang dan link-and-match antara dunia pendidikan dan industri melalui magang dan penyaluran tenaga kerja baru.
10) Memberikan sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja lokal agar lebih kompetitif melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja.
11) Pembangunan ekosistem riset dan inovasi berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

Tabel 3.12. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Buton
Tahun 2026-2030

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	Tema II (2027)	Tema III (2028)	Tema IV (2029)	Tema V (2030)
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau	Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan	Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan
MISI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya.	Penguatan peran lembaga keagamaan dan sosial serta penguatan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama	Meningkatkan sinergi antar pemerintah daerah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dalam membangun keharmonisan sosial dan kerukunan hidup antar umat beragama melalui penguatan dan fasilitasi forum komunikasi antar umat beragama (FKUB).	V	V	V	V	V
		Penguatan pendidikan IMTAK yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama melalui program religius.	V	V	V		
		Pemberian bantuan keagamaan lintas agama melalui program harmonisasi kehidupan beragama dan program religius.	V	V	V	V	V
		Penguatan integritas partai politik.			V	V	
	Meningkatkan pelestarian terhadap nilai budaya dan kearifan lokal	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial.	V	V	V		
		Penguatan peran lembaga adat/tokoh adat/lembaga kesenian dalam pelestarian budaya lokal.	V	V	V		
		Penguatan pendidikan budaya dan revitalisasi nilai budaya.	V	V	V		
		Penguatan pegelolaan warisan budaya melalui peningkatan sarana prasarana, fasilitasi kegiatan seni/festival budaya dan revitalisasi cagar budaya.	V	V	V		

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	**Tema II (2027)**	**Tema III (2028)**	**Tema IV (2029)**	**Tema V (2030)**
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	**Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah**	**Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau**	**Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan**	**Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan**
	Penguatan kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Penyusunan dan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.	V	V	V	V	V
		Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal di Kabupaten Buton.	V	V	V	V	V
		Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kesadaran hukum dan forum komunikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.	V	V	V	V	V
		Meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendukung keamanan wilayah dan iklim investasi daerah.	V	V	V	V	V
	Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan	Pengembangan smart government serta penguatankapasitas aparatur daerah dan lembaga dalamhal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	V	V	V		
		Penerapan sistem manajemen talenta ASN, Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	V	V	V		
		Penguatan forum satu data melalui *integrated single database.*	V	V	V	V	V
		Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.	V	V	V	V	V
		Peningkatan penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal, serta penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.	V	V	V		

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	Tema II (2027)	Tema III (2028)	Tema IV (2029)	Tema V (2030)
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau	Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan	Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan transfer ke daerah (TKD).	V	V	V	V	V
		Pengembangan skema pembiayaan kreatif, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau dana bergulir untuk sektor produktif.		V	V	V	
		Penyiapan regulasi dan insentif fiskal lokal untuk mendorong investasi swasta pada sektor ekonomi biru dan pariwisata.	V	V	V	V	
		Pemetaan aset daerah dan penyusunan skema pemanfaatan komersial (sewa, kerja sama, atau BUMD) terhadap aset-aset strategis.	V	V	V		
		Penguatan pengembangan dan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.	V	V	V		
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	V	V	V	V	V
	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi berbasis inovasi dan digitalisasi	Akselerasi pembangunan pusat pemerintahan dan perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital.	V	V	V		
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	V	V	V		

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	Tema II (2027)	Tema III (2028)	Tema IV (2029)	Tema V (2030)
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau	Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan	Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan
		Akselerasi proses transformasi desa berbasis teknologi digital dalam meningkatkan pelayanan publik, mendorong ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui digitalisasi desa.	V	V	V	V	
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi Transparansi proses perencanaan, penganggaran, danpengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	V	V	V	V	V
		Pengembangan sistem perencanaan berbasis e-Planning untuk memastikan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.	V	V	V	V	
MISI 2 : Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kualitas pendidikan menuju masyarakat berkehidupan layak	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan.	V	V	V	V	V
		Peningkatan kreativitas tenaga pendidik dan siswa.	V	V	V	V	V
		Penguatan sarana dan prasarana pendidikan.	V	V	V	V	V
		Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi rmasyarakat melalui literasi berbasis inklusi sosial, serta taman baca terintegratif	V	V	V	V	V
		Penguatan bantuan bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi siswa miskin atau siswa berprestasi	V	V	V	V	V
		Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untukmeningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya	V	V	V	V	V

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	Tema II (2027)	Tema III (2028)	Tema IV (2029)	Tema V (2030)
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau	Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan	Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan
		Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi.	V	V	V	V	V
		Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan potensi unggulan wilayah seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, konstruksi, perkebunan, perikanan dan pariwisata.	V	V			
		Pengembangan pendidikan tinggi/ politeknik sesuai dengan potensi unggulan wilayah seperti pertanian, pertambangan, perikanan, pariwisata.	V	V	V	V	
		Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi padaberbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Internet of Things (IoT).	V	V	V		
		Penguatan kapasitas SDM berbasis IPTEK dalam mendukung pengembangan ekonomi biru yang inovatif dan berdaya saing.	V	V	V		
		Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.		V	V	V	
		Peningkatan kualitas pendidikan, kepemudaan dan olahraga.	V	V	V	V	V

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	**Tema II (2027)**	**Tema III (2028)**	**Tema IV (2029)**	**Tema V (2030)**
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	**Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah**	**Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau**	**Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan**	**Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan**
	Meningkatkan kualitas Kesehatan menuju masyaakat berkehidupan layak	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang merata diseluruh wilayah.	V	V	V	V	V
		Penguatan sarana dan prasarana kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang merata diseluruh wilayah, termasuk pembangunan rumah sakit rujukan	V	V	V	V	V
		Pembangunan rumah sakit type D untuk melayani masyarakat yang jauh dari ibukota kabupaten.					V
		Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	V	V			
		Percepatan penanganan stunting serta percepataneliminasi penyakit menular di daerah endemis, melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor.	V	V	V	V	V
		Penyediaan pelayanan rujukan serta pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), khususnya untuk daerah kepulauan dengan modayang sesuai dengan karakteristik alam	V	V	V	V	V
		Pelayanan kesehatan untuk semua (*Health For All*) untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpencil, mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.	V	V	V	V	V

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	Tema II (2027)	Tema III (2028)	Tema IV (2029)	Tema V (2030)
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau	Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan	Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan
		Penguatan kolaborasi sistem kesehatan berbasis kearifan lokal dengan layanan kesehatan modern.	V	V	V	V	V
	Penguatan komunikasi dan keharmonisan keluarga	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	V	V	V		
		Penguatan kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.	V	V	V		
	Penguatan pengarusutamaan gender	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Kabupaten Buton.	V	V	V		
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	V	V	V		
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilankeputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	V	V	V		
	Pengentassan kemiskinan dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial adaptif integratif	Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaandan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif dan data tunggal sosial ekonomi nasional.	V	V	V	V	V
		Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.	V	V	V	V	V

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	Tema II (2027)	Tema III (2028)	Tema IV (2029)	Tema V (2030)
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau	Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan	Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan
		Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukanpenerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.	V	V	V	V	V
		Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusi.	V	V	V	V	V
		Penguatan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT)-online untuk memudahkan masyarakat miskin dan rentan dalam mengakses berbagai layanan perlindungan dan rehabilitasi sosial.	V	V	V	V	V
		Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	V	V	V	V	V

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	Tema II (2027)	Tema III (2028)	Tema IV (2029)	Tema V (2030)
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau	Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan	Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan
		Penguatan perlindungan sosial bagi kelompk rentan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi lokal, pemberian bantuan sosial untuk rumah tangga miskin (RTM)/kaum difabel/kelompok lansia, dan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dari layanan dasar.	V	V	V	V	V
		Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah seperti BAZNAS, dalam penuntasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui intervensi program lintas sektor yang terukur dan tepat sasaran.	V	V	V	V	V
MISI 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dalam mendukung pelestarian lingkungan	V	V	V	V	
		Penguatan antisipasi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan dan ketahanan bencana.	V	V	V	V	
		Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan non struktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta adopsi perubahan iklim (penggenangan pesisir) dan pemulihan terhadap bencana.	V	V	V	V	V
		Penguatan program peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah melalui penataan taman/taman terbuka hijau (RTH) dan lokasi	V	V	V	V	V

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	Tema II (2027)	Tema III (2028)	Tema IV (2029)	Tema V (2030)
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau	Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan	Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan
		pedagang kaki lima, pengelolaan sampah terpadu, pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA)/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)/tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R)/tempat penampungan sementara (TPS), pembangunan bank sampah, dan gerakan lingkungan bersih.					
	Peningkatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik	Peningkatan konektivitas, jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan.	V	V	V	V	V
		Pemanfaatan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagiantimur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.	V	V	V	V	
		Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (meningkatkan konektivitas antar wilayahdan menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan)	V	V	V	V	
		Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk penanganan backlog	V	V	V	V	
		Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	V	V	V	V	
		Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.	V	V	V	V	

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	Tema II (2027)	Tema III (2028)	Tema IV (2029)	Tema V (2030)
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau	Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan	Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan
		Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.	V	V	V	V	
		Penguatan penataan wilayah khususnya pada wilayah perkotaan sebagai pusat pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat melalui penyusunan masterplan penataan/perluasan kawasan, pembangunan penataan/ perluasan kawasan perkotaan, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur wilayah perkotaan.	V	V	V	V	
		Penguatan program percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perekonomian seperti kawasan pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata, infrastruktur kawasan rawan bencana, dan infrastruktur pelayanan publik.	V	V	V	V	
		Optimalisasi pemanfaatan kawasan industri Laguna dan Kapolimu (Kapontori, Lasalimu), Lasalimu Selatan, Pasarwajo, dan Wabula sebagai wadah industri pengolahan potensi unggulan daerah dalam mendukung perekonomian daerah.	V	V	V	V	
MISI 4 : Meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal	Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat	Hilirisasi produk unggulan sektor perikanan dan pertanian.	V	V	V	V	V
		Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.	V	V	V	V	V

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	Tema II (2027)	Tema III (2028)	Tema IV (2029)	Tema V (2030)
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau	Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan	Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan
		Optimalisasi penyediaan sarana prasarana sektor perikanan pangkalan pendaratan ikan, industri pengolahan rumput laut dan industri pengolahan ikan sebagai pusat hilirisasi perikanan budidaya dan perikanan tangkap untuk mendukung hilirisasi sektor perikanan.	V	V	V	V	V
		Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian.	V	V	V	V	V
		Pengembangan logistik dan rantai dingin untuk hasil perikanan dan pertanian guna menurunkan biaya distribusi dan meningkatkan akses pasar luar daerah	V	V	V	V	V
		Optimalisasi kolaborasi kemitraan dalam peningkatan dan pengembangan hilirisasi potensi SDA unggulan daerah (sektor perikanan, sektor pertanian, sektor pariwisata, dan sektor pertambangan).	V	V	V	V	V
		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	V	V	V	V	
		Penguatan regulasi dalam mendukung ekonomi biru yang inklusif.	V		V	V	
		Penguatan kemandirian pangan lokal berbasis ekonomi biru.	V	V	V	V	V
		Modernisasi perikanan tangkap dan budidaya berbasis teknologi tepat guna dan praktik ekonomi biru.	V	V	V	V	V

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	Tema II (2027)	Tema III (2028)	Tema IV (2029)	Tema V (2030)
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau	Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan	Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan
		Pengembangan kawasan HKM Lasalimu dan Kapontori sebagai sentra agrowisata serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan dengan teknologi tepat guna.	V	V	V	V	V
		Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif.	V	V	V	V	V
		Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, wisata bahari, dan industri kemaritiman).	V	V	V	V	V
		Optimalisasi peran pusat-pusat pertumbuhan baru untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah.	V	V	V	V	V
		Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism).	V	V	V	V	V
		Pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat.	V	V	V	V	V
		Penataan dan promosi kawasan ekowisata pesisir berbasis daya tarik lokal dan desa wisata rintisan.		V	V	V	
		Pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata lokal untuk memperkuat ekonomi masyarakat di sektor jasa wisata.	v	V	V	V	
		Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan.		V	V	V	V

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	**Tema II (2027)**	**Tema III (2028)**	**Tema IV (2029)**	**Tema V (2030)**
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	**Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah**	**Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau**	**Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan**	**Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan**
		Peningkatan peran PMA/PMDN terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi baru.	V	V	V	V	V
		Peningkatan produktivitas BUMD.	V	V	V	V	
	Peningkatan kualitas pendampingan kewirausahaan daerah berbasis sektor UMKM baik pemberdayaan, permodalan, pengembangan produk hingga pemasaran	Percepatan program pemulihan ekonomi masyarakat melalui pembentukan klaster UMKM berbasis potensi unggulan wilayah, optimalisasi gerakan *one vilage one product*, pengembangan ekonomi kreatif, pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, pelatihan start-up wirausaha muda, dan kemudahan perizinan untuk berusaha.	V	V	V	V	V
		Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan melalui penyediaan pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan bisnis bagi pelaku.	V	V	V	V	V
		Penguatan ekosistem UMKM digital melalui pelatihan digital marketing, dan pengembangan platform e-commerce terutama kelompok kaum muda dan perempuan.	V	V	V	V	V
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	V	V	V	V	V
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dankelembagaan, serta adopsi teknologi.	V	V	V	V	V

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	**Tema II (2027)**	**Tema III (2028)**	**Tema IV (2029)**	**Tema V (2030)**
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	**Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah**	**Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau**	**Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan**	**Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan**
		Penguatan sertifikasi produk unggulan daerah dan pengembangan inkubator bisnis berbasis potensi lokal untuk meningkatkan daya saing.	V	V	V	V	V
	Peningkatan tenaga kerja yang produktif dan sesuai kondisi pasar kerja	Peningkatan kualitas serta kuantitas Sumber DayaManusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha.	V	V	V	V	V
		Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian dan pariwisata.	V	V	V	V	V
		Menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri dan pasar kerja lokal.	V	V	V	V	
		Penguatan proyek padat karya yang memanfaatkan tenaga kerja lokal dalam pembangunan infrastuktur skala kecil untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.	V	V	V	V	V
		Meningkatkan pembinaan kelompok petani/nelayan termasuk wirausaha muda dan petani/nelayan milenial untuk terlibat aktif dalam sektor pertanian dan perikanan modern, mendorong regenerasi petani, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah.	V	V	V	V	V
		Meningkatkan kerja sama antara sekolah, perguruan tinggi, dan industri dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai.	V	V	V	V	

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tema RPJPD Tahap I "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan"				
			Tema I (2026)	**Tema II (2027)**	**Tema III (2028)**	**Tema IV (2029)**	**Tema V (2030)**
			Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	**Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah**	**Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau**	**Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan**	**Perwujudan Masyarakat Buton Yang Religius, Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Yang Berkelanjutan**
		Memperkuat kemitraan antara sektor pendidikan dan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar.	V	V	V	V	
		Memfasilitasi program rekruitmen tenaga kerja lokal melalui job fair dan bursa tenaga kerja daerah.	V	V	V	V	V
		Memperkuat program magang dan *link-and-match* antara dunia pendidikan dan industri.	V	V	V	V	
		Memberikan sertitikasi keahlian bagi tenaga kerja lokal agar lebih kompetitif.	V	V	V	V	V

3.2.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Program dalam mencapai strategi pembangunan jangka menengah daerah merupakan rangkaian langkah konkret yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Program-program ini disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada berbagai sektor prioritas seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data guna memastikan efektivitas pelaksanaannya serta dampak yang maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memperkuat daya saing daerah Kabupaten Buton.

Tabel 3.13. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton
Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN						
MISI 1: Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya.	Tujuan 1. Meningkatkan Buton religius yang berpedoman pada nilai luhur keagamaan dan kebudayaan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat			Indeks Religius Buton		
		Meningkatkan kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
			Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
		Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan		Indeks Pembangunan Kebudayaan		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat		*Crime Rate*		
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamomg Praja
	Mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkualitas			Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton		Nilai SAKIP Kab. Buton		
			Meningkatnya tata kelola organisasi Pemerintah Daerah	Indeks kematangan organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Capaian MCP KPK	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Program Penyelenggaran Pengawasan	Inspektorat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Ketersediaan layanan publik berkualitas dan berbasis digital di kabupaten Buton	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Tercapainya kolaborasi, Integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase keselarasan RPJMD dengan RENSTRA		
			Meningkatnya upaya ekstentifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya Tata Kelola Aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Presentase perencanaan kebutuhan yang sesuai formasi	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbinan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya produk inovasi yang dimanfaatkan	Rasio produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan badan usaha milik daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya hasil penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan	Cakupan pengelolaan kebijakan administrasi perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
MISI 2: Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia		
		Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan		Indeks Pendidikan		
			Meningkatnya kualitas mutu pendidikan di Satuan Pendidikan	1. Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun 2. Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun 3. Tingkat partisipasi warga negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini 4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Cakupan Satuan Pendidikan yang melaksanakan pengembangan kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar 2. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (SNP)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (SNP)	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya pembinaan atlit	Persentase atlit yang masuk pelatda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan		Indeks Kesehatan		
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	1. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 2. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat 3. Prevalensi Obesitas > 18 tahun 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan 6. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 7. Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional 8. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 9. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar 10. Persentase lanjut usia yang mandiri	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				11. Cakupan penemuan kasus TB 12. Prevelansi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita		
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan	1. Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi 2. Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar 3. Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Program Peningkatan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman dan Pangan olahan	1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial 2. Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar 3. Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan 4. Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan 5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1. Persentase Posyandu menerapkan ILP pelayanan siklus hidup 2. Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. Persentase Pustu/Polindes/Poskes des menerapkan ILP pelayanan siklus hidup		
		Meningkatnya kualitas keluarga yang sejahtera dan sesuai norma kehidupan masyarakat		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		
			Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Kekuarga Berencana
			Meningkatnya persentase KB aktif per pasangan usia subur (PUS)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ Modern Contraseptive (mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Kekuarga Berencana
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*)		
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan		Indeks Ketimpangan Gender		
			Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaran PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak (forum anak kabupaten forum anak kecamatan, forum anak desa/kelurahan)	Program Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat			PDRB per Kapita		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat		1. Tingkat Kemiskinan 2. Rasio Gini		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Meningkatnya jumlah PPKS yang memiliki usaha sendiri dan dapat memberikan nilai ekonomi	Persentase PPKS yang mendapat peningkatan pemberdayaan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Meningkatnya program rehabilitasi sosial	Persentase PPKS di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Meningkatnya peranan ekonomi kerakyatan	1. Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal 2. Pertumbuhan wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Menurunnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan permukiman guna mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan utilitas umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			,Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum adat dalam pembangunan	Kemasyarakatan Desa (LKD)	Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
			Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah Rentan rawan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
MISI 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tahan bencana			Penurunan Intensitas Emisi GRK		
				Indeks Risiko Bencana		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks kualitas air 2. Indeks kualitas udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya pengelolaan sampah yang efektif, partisipatif, dan ramah lingkungan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase luas RTH terhadap luas pemukiman	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase luas permukiman yang tertata	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah		Indeks Ketahanan Daerah		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya penannganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 4: Meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan			Indeks Infrastruktur Kabupaten Buton		
		Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas		Indeks Infrastruktur Kawasan Permukiman		
			Meningkatnya Penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan utilitas umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Menurunnya perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan permukiman guna mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		
			Meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan daerah	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya akses air minum yang terstandar	Pesentase rumah tangga terakses air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi dan air	Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase kawasan/ lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas darat 2. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Program penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
	Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif guna meningkatkan pendapatan masyarakat			1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Daya Saing Daerah		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA		1. Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian 2. Kontribusi PDRB Kategori Pertanian 3. Indeks Ekonomi Biru		
			Meningkatnya hilirisasi produk pertanian	Kontribusi PDRB subsektor pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan produksi tanaman pangan 2. Peningkatan produksi hortikultura 3. Peningkatan produksi komoditas peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasaran pertanian	Luas lahan pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Tingkat pengendalian penyakit hewan menular (PHMS) 2. Persentase unit usaha pangan asal hewani yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (nomor kontrol veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan 2. Persentase unit usaha pangan kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Persentase penanganan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		
			Meningkatnya hilirisasi produk perikanan	Kontribusi PDRB subsektor perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA		Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan		
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
			Meningkatnya peranan ekonomi kerakyatan	1. Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal 2. Pertumbuhan wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentasse meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatnya daya saing ekonomi daerah		Kontribusi PDRB Kabupaten Buton		
		berbasis potensi unggulan daerah		Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara		
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Meningkatnya kemudahan Berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata prioritas yang aktif dan produktif	Program Peningkatan Daya Tairk Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah yang terfasilitasi oleh pemerintah daerah	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yan aktif dan tervalidasi	Proses Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang efisien	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Program Perizinan dan Pendaftaraan Perusahaan	Dinas Perdagangan
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan
		`	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang stok kebutuhan barang pokok penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berkualitas		Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja/pencari kerja yang ditempatkan difasilitasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja

3.2.5.1. Program Unggulan Kepala Daerah

Program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Buton dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan Masyarakat Buton yang Religius, Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan, Maka Bupati dan Wakil Bupati Buton akan dicapai melalui 10 (sepuluh) Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas Utama yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

-

Tabel 3.14. Program Unggulan Kepala Daerah Dalam Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buton Tahun 2025-2029

NO.	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (PROGRAM NOMENKLATUR)	
			PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1.	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Digitalisasi desa	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Integrated single database	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
			Program Penyelenggaran Pengawasan	Inspektorat
		Mall pelayanan publik (MPP)	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah
2.	HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA	Bantuan tempat ibadah / lembaga keagamaan.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Bantuan kesejahteraan guru honorer, guru madrasah diniyah (MADIN)/taman pendidikan Qur'an (TPQ)/pondok ppesantren	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Beasiswa penghapal /hafiz Al – Qur'an.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Penguatan dan fasilitasi forum kerukunan umat beragama (FKUB)	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
3.	PROGRAM RELIGIUS	Program literasi Al-Qur'an	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Pembiasan perilaku religi (P3R) di sekolah dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan baik	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan

NO.	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (PROGRAM NOMENKLATUR)	
			PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Program santunan duka pemerintah kabupaten (Pemkab) Buton	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
4.	PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH	Penataan taman/taman terbuka hijau (RTH) dan lokasi pedagang kaki lima (PKL)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengelolaan sampah terpadu	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Tempat pembuangan akhir (TPA)/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)/tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R)/tempat penampungan sementara (TPS)	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Bank sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Gerakan lingkungan bersih	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan

NO.	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (PROGRAM NOMENKLATUR)	
			PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Program beasiswa pendidikan Dokter per kecamatan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Ajang/lomba kreatifitas guru dan siswa berprestasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Beasiswa bagi masyarakat/siswa miskin	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat daerah
		Literasi berbasis inklusi sosial	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Taman baca integratif	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Percepatan penanganan stunting	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (PROGRAM NOMENKLATUR)	
			PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Revitalisasi posyandu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
6.	PENGEMBANGAN DAN INOVASI	Fasilitasi dewan riset daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Penelitian untuk hilirisasi komoditas	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Ajang kreasi dan inovasi daerah	Program Riset dan Inovasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Expo produk unggulan daerah	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah

NO.	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (PROGRAM NOMENKLATUR)	
			PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
7.	PENATAAN WILAYAH	Penyusunan masterplan penataan/perluasan kawasan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Lomba/sayembara desain penataan/perluasan kawasan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan penataan/perluasan kawasan perkotaan	Program Penataaan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
			Program Pelayaran	Dinas Perhubungan
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
8.	PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	Jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jaringan irigasi terpadu usaha tani (JITUT)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Jalan usaha tani (JUT)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Embung pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Rehabilitasi tanggul sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penataan trotoar dan drainase kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (PROGRAM NOMENKLATUR)	
			PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Sistem penyediaan air minum (SPAM)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sarana dan prasarana/utilitas obyek wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT	Kemudahan investasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanama Modal
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Pembentukan klaster usaha menengah kecil mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Gerakan "*one village one product*"	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
		Pengembangan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
			Proses Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Pelatihan start-up wirausaha Muda	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO.	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (PROGRAM NOMENKLATUR)	
			PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok kaum muda dan perempuan.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
		Kemudahan perijinan untuk berusaha	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Hilirisasi produk unggulan sektor perikanan dan pertanian	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			Program Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
			Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian

NO.	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (PROGRAM NOMENKLATUR)	
			PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
10.	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Magang dan penyaluran tenaga kerja baru	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrialisasi	Dinas Tenaga Kerja
		Bursa lowongan kerja (*job fair*) dan informasi pasar tenaga kerja *on- line*	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrialisasi	Dinas Tenaga Kerja
		Pembinaan kelompok petani/nelayan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Perikanan
		Bantuan sosial untuk rumah tangga miskin (RTM)/ kaum difabel/kelompok lansia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Proyek padat karya	Program Penempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
		Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)/ rumah korban bencana.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) – *online.*	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

3.2.5.2. Dukungan Kabupaten Buton Terhadap Arahan Nasional dan Provinsi

A. Arahan Nasional

Dalam arah kebijakan kewilayahan dalam RPJMN 2025–2029 menempatkan Kabupaten Buton sebagai lokasi prioritas dalam pengembangan kawasan perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Tenggara. Intervensi strategis yang diarahkan pemerintah pusat meliputi pengelolaan sarana prasarana perikanan tangkap, penguatan logistik dan sistem rantai dingin, peningkatan kapasitas usaha kelautan, serta pengembangan klaster ikan nila salin dan revitalisasi tambak. Menyadari peran penting ini, Pemerintah Kabupaten Buton telah mengakomodir berbagai agenda nasional tersebut ke dalam RPJMD 2025–2029 melalui program dan proyek strategis lintas sektor. Adapun Kabupaten Buton terhadap arahan RPJMN sebagai berikut :

Tabel 3.15. Dukungan Program Daerah Terhadap Arahan RPJMN Tahun 2025-2029

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Dukungan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
1.	Kabupaten Buton sebagai Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara	- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap		
		Output:		
		Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan (*Eco Fishing Port*)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		·Penguatan Logistik, Pemasaran, dan Sistem Rantai Dingin Produk Perikanan		
		Output:		
		Sarana penyimpanan produk kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Sarana distribusi logistik produk kelautan dan perikanan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
			Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		Gudang beku beserta kelengkapannya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		· Peningkatan Kapasitas Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan		
		Output:		
		UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina		
		UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi dalam inkubasi bisnis		
		Pelaku usaha yang difasilitasi pengembangan diversifikasi produk bernilai tambah	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Dukungan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
		Eksportir kelautan dan perikanan baru yang ditumbuhkan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan
		Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usahanya	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		· Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern, dan Berkelanjutan		
		Output:		
		Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang diperbarui		
		Pelabuhan perikanan UPT pusat dan pelabuhan perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur		
		· Pengembangan Klaster Ikan Nila Salin		
		Output:		
		Ikan konsumsi air tawar hasil budidaya yang diproduksi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat		
		Benih ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat		
		· Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng		
		Output:		-
		Klaster kawasan revitalisasi tambak udang dan bandeng	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Benih udang yang disalurkan ke masyarakat	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sarana budidaya ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025–2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seluruh pemerintah daerah diwajibkan

untuk mengakomodasi dan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan Program Strategis Nasional.

Program Strategis Nasional merupakan bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan dan program prioritas yang termuat dalam dokumen RPJMN dan RKP. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pemerataan pembangunan, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia, serta menjaga stabilitas keamanan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Buton juga mendukung Direktif Presiden, Kegiatan Prioritas Utama dan Proyek Strategis Nasional. Adapun dukungan Kabupaten Buton pada arahan ini sebagai berikut:

Tabel 3.16. Dukungan Kabupaten Buton Terhadap *Direktif* Presiden

Program Direktif Presiden	Highlight Intervensi	Dukungan Program Perangkat Daerah	
		Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
Makanan Bergizi Gratis	Pemberian **Makanan Bergizi** bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Daerah Rawan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Peredaran Mutu Hewan	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
Sekolah Rakyat	Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan **output pembangunan Sekolah Rakyat** yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Barang Milik daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan
Digitalisasi Pendidikan	**Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran** dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan.	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Daerah
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Penyediaan sarana dalam mendukung **digitalisasi pembelajaran**	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Program Direktif Presiden	Highlight Intervensi	Dukungan Program Perangkat Daerah	
		Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
Peningkatan ekonomi lokal melalui **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**	Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi desa/kelurahan Merah Putih dengan *output*: 1. Peningkatan kapasitas usaha koperasi; 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengentasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan melalui kartu usaha afirmatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Kesejahteraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

Tabel 3.17. Dukungan Kabupaten Buton Terhadap Arahan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029

Arahan Pelaksanan Program Strategis Nasional		Dukungan Kabupaten Buton	
Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian

Arahan Pelaksanan Program Strategis Nasional		Dukungan Kabupaten Buton	
Program Strategis Nasional	**Proyek/Kegiatan**	**Program Perangkat Daerah**	**Perangkat Daerah**
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi
	Sekolah rakyat	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan
	Pembangunan 3 juta rumah	Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ketahanan pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian

Arahan Pelaksanan Program Strategis Nasional		Dukungan Kabupaten Buton	
Program Strategis Nasional	**Proyek/Kegiatan**	**Program Perangkat Daerah**	**Perangkat Daerah**
	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/ lumbung pangan/*food estate*)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
Kesehatan untuk semua dengan proyek/kegiatan	Jaminan kesehatan nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Makan bergizi gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Pendidikan	DInas Pendidikan
		Program Pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Perluasan akses pendidikan	Pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
Pertumbuhan ekonomi dengan proyek/kegiatan	Pengendalian inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	Percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Arahan Pelaksanan Program Strategis Nasional		Dukungan Kabupaten Buton	
Program Strategis Nasional	**Proyek/Kegiatan**	**Program Perangkat Daerah**	**Perangkat Daerah**
	Kemudahan perizinan di daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Badan Pendapatan Daerah
	Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)		
	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan -
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
		Program Pelayanan Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

Arahan Pelaksanan Program Strategis Nasional		Dukungan Kabupaten Buton	
Program Strategis Nasional	**Proyek/Kegiatan**	**Program Perangkat Daerah**	**Perangkat Daerah**
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.18. Dukungan Kabupaten Buton Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Nasional

No.	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Dukungan Program Perangkat Daerah	
		Program Perangkat Daerah	**Perangkat Daerah**
1.	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
3.	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.	Pengembangan Pangan Hewani	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
5.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan
6.	Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sdm Kesehatan	Dinas Kesehatan
7.	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
8.	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
9.	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
10.	Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
11.	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12.	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Dukungan Program Perangkat Daerah	
		Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
13.	Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Peningkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (e.g. Pelatihan, in Service Training), Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan

3.2.5.2. Arahan Provinsi Sulawesi Tenggara

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Buton disusun dengan mengacu pada potensi unggulan daerah serta arahan pembangunan kewilayahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton memiliki keunggulan geografis dan sumber daya yang mendukung pengembangan sektor-sektor strategis seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri pengolahan, serta pertambangan ramah lingkungan. Potensi ini tersebar di berbagai kecamatan dengan karakteristik ekosistem dan sosial budaya yang khas, sehingga menjadi basis penting dalam perencanaan kawasan budidaya dan kawasan strategis lainnya. Salah satu fokus pengembangan wilayah yang sejalan dengan arahan provinsi adalah pengembangan Kawasan Pusat Kegiatan Industri Primer (PKIP) Kapontori–Lasalimu (KAPOLIMU) yang berlokasi di Kecamatan Lasalimu. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pelayanan yang meliputi Pulau Buton dan Pulau Muna. Posisi strategis kawasan ini menjadikannya simpul penting bagi pengembangan kegiatan industri berbasis sumber daya lokal, seperti perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, serta sentra komoditas pertanian dan perkebunan.Adapun dukungan program Kabupaten Buton terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara:

Tabel 3.19. Dukungan Kabupaten Buton Terhadap Kebijakan Kewilayahan Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Dukungan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
Pengembangan Kawasan Minapolitan Buton	Hilirisasi Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Dukungan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
Mengembangkan sistem pusat kegiatan ekonomi berbasis perikanan dalam rangka mendukung keterkaitan fungsional keruangan dengan sistem perkotaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir	Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan, melalui penyiapan sarana penyimpanan produk kelautan perikanan, sarana distribusi logistik produk kelautan perikanan, serta gudang beku dan kelengkapannya.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
	Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan: pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
	Mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Wilayah darat, pesisir dan Pulau Kecil yang dapat berpotensi menyebabkan penurunan fungsi ekosistem laut sebagai kawasan perikanan tangkap.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap melalui penyediaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, pengembangan pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan (Eco Fishing Port)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan -
	Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan, melalui fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelautan perikanan, pembinaan wirausaha kelautan perikanan, peningkatan kapasitas eksportir dan kelembagaan usaha kelautan perikanan, promosi usaha dan investasi kelautan perikanan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan

Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Dukungan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
Kawasan Industri Pertambangan			
Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis pertambangan batubara (aspal) di Kabupaten Buton	Pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil tambang yang terintegrasi dengan kawasan pertambangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pengembangan industri pertambangan didukung dengan kawasan pertambangan di Kabupaten Buton	pengembangan pelabuhan khusus/terminal khusus mendukung kegiatan pokok industri pertambangan	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan khusus, sistem pengolahan air baku dan penataan kawasan permukiman di sekitar kawasan pertambangan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan potensial pertanian dan menjaga fungsi kawasan lindung yang ada di sekitar kawasan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
	Fasilitasi dalam rangka peningkatan investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Penguatan struktur industri dalam negeri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian
Pengembangan Kawasan Pariwisata Pulau Buton			
Pengembangan kawasan pariwisata pendukung pariwisata	a. Mengembangkan kawasan yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata:		
	Pengembangan destinasi wisata di Pulau Buton untuk mendukung koridor atau jejaring pariwisata Sulawesi Tenggara	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Program Riset Dan Inovasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi	Dukungan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan
	Mengembangkan konsep pariwisata yang mengedepankan perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau kecil	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemasaran Pariwisata: -Publikasi - Promosi terpadu -Konten promosi wisata minat khusus -Jejaring promosi wisata minat khusus	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
	Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DInas Perindustrian
		Program Pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
	Mengembangkan infrastruktur penunjang Kawasan pariwisata: - Peningkatan kualitas jaringan jalan -Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
	Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Pulau Buton: - Fasilitasi akses pembiayaan digital - Pembiayaan startup, pembiayaan pasar modal, dan pembiayaan pariwisata berkualitas -Rantai pasok industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah -
		Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Buton 2025–2029 secara nyata telah mengakomodasi arah kebijakan kewilayahan RPJMN melalui berbagai program unggulan daerah. Integrasi ini mencerminkan keselarasan antara agenda pusat dan daerah dalam membangun kemandirian ekonomi lokal, mempercepat pemulihan sosial, serta memperkuat daya saing wilayah secara berkelanjutan.

-

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Bagian ini membahas struktur pendanaan pembangunan daerah serta program kerja perangkat daerah di Kabupaten Buton dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas keuangan daerah yang tersedia, sementara belanja daerah menunjukkan alokasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan selama periode tersebut. Indikasi program mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah, sedangkan pagu indikatif memberikan gambaran mengenai ketersediaan dana bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang program dan kegiatan tahunan.

Penetapan target kinerja program pada setiap sektor pemerintahan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan serta pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Buton, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. Melalui perencanaan yang sistematis dan terarah, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Buton. Selain itu, kerangka pendanaan yang terstruktur juga menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Program perangkat daerah secara rinci terjabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2026-2030

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR**														
1.01	**URUSAN PENDIDIKAN**					**226,782,650,892**		**242,163,750,369**		**288,467,795,283**		**334,224,019,317**		**372,960,736,370**	**DINAS PENDIDIKAN**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	100	100	155,152,271,792	100	153,186,050,807	100	153,523,295,283		153,679,519,317		154,056,241,274	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
	Meningkatnya kualitas mutu pendidikan di Satuan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	%	92.76	100	68,480,379,100	100	77,677,699,562	100	90,464,500,000	100	99,464,500,000	100	122,824,495,096	
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	%	87.38	100		100								
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Anak Usia Dini	%	94.46	100		100		100		100		100		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	19,80	100		100		100		100		100		
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM														
	Cakupan Satuan Pendidikan yang melaksanakan pengembangan kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum muatan lokal	%	75	77	100,000,000	77	4,000,000,000	77	12,900,000,000	77	30,000,000,000	77	40,000,000,000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	rasio	10.49	10.53	2,250,000,000	10.55	6,600,000,000	10.57	25,500,000,000	10.59	45,000,000,000	10.61	50,000,000,000	
		Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	24.33	45,50		55.78		68,90		85.95		,95,90		
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN														
	Meningkatnya satuan pendidikan yang memiliki izin operasional	Persentase Satuan Pendidikan yang telah memiliki izin operasional	%	100	100	400,000,000	100	700,000,000	100	6,080,000,000	100	6,080,000,000	100	6,080,000,000	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA														
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Bahasa dan Sastra	Persentase berkembangnya kualitas dan kuantitas produk bahasa dan sastra pada satuan pendidikan	%		56,95	400,000,000	75.88	400,000,000	80.55	500,000,000	86.95	500,000,000	95,50	500,000,000	
1.02	**URUSAN KESEHATAN**					**150,720,510,958**		**167,665,145,761**		**194,767,657,986**		**208,291,953,829**		**288,035,828,711**	**DINAS KESEHATAN**
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	100	100	61,886,826,635	100	74,326,445,282	100	74,426,445,282	100	74,326,445,282	100	74,426,445,282	
1.02.02	PROGRAM PEMEBUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	2	5	83,530,460,000	7	83,592,382,923	9	95,294,895,148	11	98,826,759,642	20	140,993,697,080	
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	8.42	50		60		70		90		95		
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	20.6	20.6		20.6		20.6		20.6		30		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	20.00	26.67		33.33		40.00		46.67		53.33		
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	65	76.6		80		86.6		90		96.6		
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	79.4	44		50		56		62		65		
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	75	94		95		96		98		98		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	33.33	33.33		60		60		60		60		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	75	95		95		95		95		95		
		Persentase lanjut usia yang mandiri		72,5	20		30		40		50		60		
		Cakupan penemuan kasus TB	%	58.61	60		65		70		75		78		
		Prevelansi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	SSGI (%)	15.30	14		13		12		10		10		
			E-PPGBM (%)	10.10	10		9		9		8		8		
		Cakupan puskesmas memiliki dokumen perencanaan	%	10	15		50.5		55.5		56.5		65.5		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	100.000 penduduk	763.75	763.86	3,973,995,164	765.50	7,700,000,000	766.32	20,000,000,000	767.14	30,000,000,000	767.95	32,000,000,000	
		Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	65	72		75		80		85		89		
		Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	12.5	25.0		37.5		50.0		62.5		75.0		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman dan Pangan olahan	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial	%	97.7	97.7	835,315,407	97.9	1,027,708,117	98.2	3,027,708,117	98.7	3,066,981,998	98.9	35,015,331,097	
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	37.14	28.14		29.50		30.20		40.5		50		
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	71.4	72		72.5		74		76		80		
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	96.7	97		97.5		97.8		98.5		98.9		
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	50.0	51.5		52		55.5		60.5		65.5		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Posyandu menerapkan ILP pelayanan siklus hidup	%	2.29	17.1	493,913,752	28.5	1,018,609,439	40	2,018,609,439	57	2,071,766,907	60	5,600,355,252	
		Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	%	57	19		21		23		25		30		
		Persentase Pustu/ Polindes/ Poskesdes menerapkan ILP pelayanan siklus hidup	%	3.66	30.5		42.7		54.9		67.1		67.9		
1.02	**URUSAN KESEHATAN**					**64,340,469,122**		**70,706,526,549**		**79,718,182,659**		**82,286,080,250**		**92,451,431,735**	**BLUD RSUD**
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	100	100	48,589,217,765	100	29,165,316,617	100	29,265,316,617	100	29,165,316,617	100	29,265,316,617	
1.02.02	PROGRAM PEMEBUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di rumah sakit	Persentase penduduk yang memanfaatkan pelayanan di rumah sakit	%	0.012	0.013	15,751,251,357	0.014	41,541,209,932	0.015	50,452,866,042	0.016	53,120,763,633	0.017	63,186,115,118	
1.03	**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					**53,319,890,868**		**60,930,084,554**		**72,283,729,883**		**89,968,119,369**		**97,170,702,368**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	89.28	100	4,416,878,627	100	5,034,598,797	100	5,134,598,797	100	5,034,598,797	100	5,134,598,797	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														
	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi dan air	Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota	%	66	66.83	17,207,456,492	66	16,431,190,185	68.5	16,661,716,018	70.18	20,899,319,999	71.01	21,144,301,264	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
	Meningkatnya akses air minum yang terstandar	Pesentase rumah tangga terakses air minum	%	86.07	86.77	1,074,120,812	87.3	2,088,086,677	88.18	3,102,476,520	89.09	11,117,308,194	89.59	12,132,600,371	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL														
	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	%	0	0	-	100	635,366,767	100	748,398,148	100	861,829,650	100	1,000,000,000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	85.5	86.38	168,692,738	86.93	2,804,691,658	87.7	2,841,783,438	88.48	2,880,014,098	89.02	4,919,431,769	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE														
	Meningkatnya kualitas drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	85	85.5	138,959,905	86.3	2,140,766,681	85	142,628,307	90.49	5,144,547,093	90	2,146,525,455	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN														
	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase luas permukiman yang tertata	%	100	100	3,022,719,337	85	400,000,000	85	400,000,000	85	400,000,000	100	4,475,678,183	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG														
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap PBG	Rasio kepatuhan PBG	%	8	18.1	550,000,000	18.97	550,000,000	19.83	550,000,000	20.69	550,000,000	21.55	550,000,000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA														
	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungannya	%	100	100	2,856,508,450	100	2,893,649,162	100	2,931,917,397	100	2,971,360,634	100	3,012,028,530	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN														
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan daerah	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	51.62	53.08	23,501,719,968	54.85	26,863,922,421	56.87	38,477,270,273	58.9	38,610,913,663	60.9	40,851,860,372	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
	Meningkatnya kualitas tenaga terampil konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	25	125,063,915	25	326,690,013	25	428,365,476	25	530,092,384	100	731,872,909	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														
	Meningkatnya kualitas pembangunan yang berbasis tata ruang wilayah	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW	%	79	80	257,770,624	82.5	761,122,193	85	864,575,509	87.5	968,134,857	90	1,071,804,718	
1.04	**URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**19,289,761,631**		**21,244,891,684**		**25,274,123,603**		**27,953,658,646**		**36,307,425,871**	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	100	100	2,866,834,505	100	2,958,389,096	100	3,058,389,096	100	2,958,389,096	100	3,058,389,096	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	85.83	100	916,427,126	100	1,041,226,834	100	866,500,000	100	866,500,000	100	866,500,000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	39	100	5,405,000,000	40	2,020,275,754	41	3,642,734,507	78	3,427,269,550	129	8,531,036,775	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH														
	Menurunnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan permukiman guna mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha	%		50	2,000,000,000	100	7,105,000,000	170	8,605,000,000	210	10,600,000,000	260	13,750,000,000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														
	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase rumah tangga yang terakses PSU dasar	%	66.55	100	8,100,000,000	68	8,100,000,000	78	9,100,000,000	88	10,100,000,000	88	10,100,000,000	
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU	%	0	0	1,500,000	1	20,000,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	
1.05	**URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**5,335,942,444**		**12,999,065,102**		**14,118,462,573**		**14,038,455,630**		**15,159,069,444**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	99.54	99.55	3,036,509,181	99.60	9,982,327,134	99.60	9,982,327,134	99.60	9,982,327,134	99.60	9,982,327,134	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
	Meningkatnya Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	%	60	65	2,299,433,263	70	3,016,737,968	75	4,136,135,439	80	4,056,128,496	85	5,176,742,310	
	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	55	60		65		70		75		80		
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	%	20	25		27		30		33		35		
	Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PolPP yang memiliki kualitas sebagai PPNS	%	1	1.5		2		2.5		3		3.5		
1.05	**URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**4,057,881,583**		**6,975,474,667**		**8,196,173,708**		**8,364,747,201**		**9,803,272,471**	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN**
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	100	100	3,760,281,583	100	4,508,717,910	100	4,508,717,910	100	4,508,717,910	100	4,508,717,910	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebarakan dan non kebakaran	%	33.49	43.03	297,600,000	43.03	2,466,756,757	43.03	3,687,455,798	43.03	3,856,029,291	43.03	5,294,554,561	
1.05	**URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**5,031,747,004**		**6,337,565,296**		**7,471,482,077**		**7,628,266,328**		**9,742,817,372**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	100	100	3,429,272,674	100	3,077,640,590	100	3,077,640,590	100	3,077,640,590	100	3,077,640,590	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	100	100	1,602,474,330	100	3,259,924,706	100	4,393,841,487	100	4,550,625,738	100	6,665,176,782	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100		100		100		100		100		
	Meningkatnya penannganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100		100		100		100		100		
1.06	**URUSAN SOSIAL**					**6,164,614,623**		**8,700,913,713**		**12,419,536,780**		**14,807,323,541**		**24,773,280,899**	**DINAS SOSIAL**
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	100	100	3,288,774,283	100	2,590,779,876	100	2,590,779,876	100	2,590,779,876	100	2,590,779,876	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														
	Meningkatnya jumlah PPKS yang memiliki usaha sendiri dan dapat memberikan nilai ekonomi	Persentase PPKS yang mendapat peningkatan pemberdayaan sosial	%	100	100	825,000,000	100	1,431,578,300	100	1,802,087,900	100	2,624,762,500	100	5,549,693,500	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN														
	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan	%	0	4	2,840,340	95	200,000,000	95	200,000,000	95	200,000,000	95	300,000,000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
	Meningkatnya program rehabilitasi sosial	Persentase PPKS di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	4.96	10.2	348,000,000	12,47	1,138,597,637	12.80	1,500,368,604	13.27	2,031,791,556	14.77	5,076,237,820	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	1,150,000,000	100	1,365,335,200	100	2,690,768,000	100	3,543,254,809	100	6,187,482,003	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	550,000,000	100	1,974,622,700	100	3,635,532,400	100	3,816,734,800	100	5,069,087,700	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR**														
2.01	**URUSAN TENAGA KERJA**					**3,500,413,457**		**5,544,111,779**		**7,722,803,567**		**9,810,658,639**		**13,631,780,958**	**DINAS TENAGA KERJA**
2.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	100	100	1,838,413,457	100	2,297,066,299	100	2,598,666,299	100	2,600,266,299	100	2,901,866,299	
2.01.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	%	18,29	18,29	120,000,000	18,29	120,000,000	18,29	120,000,000	18,29	120,000,000	18,29	120,000,000	
2.01.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	100	100	815,000,000	100	1,904,045,480	100	3,581,137,268	100	5,467,392,340	100	9,031,914,659	
2.01.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja/pencari kerja yang ditempatkan difasilitasi	%	52	52	607,000,000	51	557,000,000	54	657,000,000	56	757,000,000	53	712,000,000	
2.01.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, struktur skala upah,terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	59	59	120,000,000	70	666000000	80	766,000,000	90	866,000,000	90	866,000,000	
2.02	**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					**3,478,549,411**		**5,370,850,037**		**5,918,880,908**		**6,314,949,430**		**7,526,995,096**	**DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
2.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	80	85	2,048,000,000	90	2,685,495,096	90	2,685,495,096	90	2,585,495,096	90	2,685,495,096	
2.02.02	PROGRAM PENGHARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaran PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentse anggaran responsif gender	%	83.33	83.53	245,549,411	83.63	830,000,000	83.73	853,885,812	83.83	1,029,454,334	83.93	1,220,000,000	
2.02.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan	%	0.008	0.003	310,000,000	0.002	295,000,000	0.0008	370,000,000	0.0008	410,000,000	0.0008	670,000,000	
2.02.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA														
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standar	%	12.5	25	250,000,000	37.5	352,000,000	37.5	320,000,000	50	434,000,000	62.5	437,000,000	
2.02.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														
	Meningkatnya pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah yang mengembangkan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	%	39.47	44.74	325,000,000	50	135,000,000	55.26	350,000,000	60.53	400,000,000	65.79	500,000,000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.02.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak (forum anak kabupaten forum anak kecamatan, forum anak desa/kelurahan)	%	7.77	9.71	105,000,000	11.65	236,500,000	13.59	344,500,000	15.53	353,000,000	17.48	562,000,000	
2.02.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase kekerasan terhadap anak	%	0.065	0.043	195,000,000	0.037	836,854,941	0.032	995,000,000	0.026	1,103,000,000	0.020	1,452,500,000	
2.03	**URUSAN PANGAN**					**3,344,337,333**		**4,370,992,469**		**5,507,346,682**		**6,940,499,210**		**8,828,992,552**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
2.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	100	100	2,057,591,919	100	1,951,529,414	100	2,051,529,414	100	1,851,529,414	100	1,951,529,414	
2.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		-												
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan (%)	%	57.29	60	36,583,080	65	558,975,480	65	758,992,875	70	759,113,839	75	1,059,238,576	
2.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan	skor	78.30	87.5	931,190,849	89.5	1,110,487,575	92.5	1,320,971,656	94	2,751,003,220	95	3,735,571,825	
2.03.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	8.42	7.37	258,835,825	5.26	450,000,000	4.21	746,352,737	3.16	845,852,737	2.11	1,048,352,737	
2.03.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			-											
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	N/A	77	60,135,660	80	300,000,000	82	629,500,000	85	733,000,000	87	1,034,300,000	
2.11	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**					**6,512,997,309**		**8,518,835,504**		**9,601,983,280**		**10,098,153,878**		**12,688,920,635**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	100	100	2,077,987,547	100	3,155,457,377	100	3,255,457,377	100	3,055,457,377	100	3,155,457,377	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan hidup untuk memitigasi dampak KRP	Persentase ketersediaan dokumen instrumen perencanaan lingkungan	%	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
	Menurunya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase kenaikan kualitas air	%	13.64	5	337,000,000	6	337,000,000	7	573,753,323	8	534,647,116	9	535,552,529	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase luas RTH terhadap luas pemukiman	%	10	10	250,000,000	15	215,000,000	20	215,000,000	25	385,301,144	30	555,000,000	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	25	30	10,000,000	35	56,488,209	40	206,573,196	45	306,659,955	50	506,748,541	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	60	65	30,000,000	70	30,421,825	75	130,820,391	80	231,227,349	85	331,642,969	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	Persentase peningkatan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup melalui mekanisme penghargaan lingkungan	Persentase peningkatan jumlah individu, kelompok, atau lembaga masyarakat penerima penghargaan lingkungan hidup	%	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
	Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	1%	100	100	10,000,000	100	55,824,754	100	128,712,717	100	205,978,179	100	206,056,919	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														
	Meningkatnya pengelolaan sampah yang efektif, partisipatif, dan ramah lingkungan	Persentase sampah yang terkelola	%	43.15	44	3,688,009,762	45	4,558,643,339	46	4,981,666,276	47	5,018,882,758	48	7,038,462,300	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.12	**URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					**4,206,465,417**		**5,314,820,974**		**6,688,209,273**		**8,728,401,524**		**10,220,737,859**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesektariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	100	100	1,966,659,145	100	2,927,138,915	100	3,027,138,915	100	2,827,138,915	100	2,927,138,915	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN														
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	85.00	85.00	836,650,702	86.00	933,672,810	86.50	1,676,616,461	86.50	2,237,262,710	86.50	3,037,180,527	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
	Meningkatanya kualitas pelayanan administrasi Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	97,79	98.04	788,404,243	98.50	839,257,922	99.00	1,269,313,150	99.50	2,148,655,442	99.60	3,040,863,966	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														
	Meningkatanya kualitas data kependudukan Yang dipergunakan dalam pelayanan publik	Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	%	100	100	412,685,676	100	412,685,676	100	513,020,565	100	1,013,195,752	100	913,376,337	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														
	Meningkatnya pengolahan dan penyajian data kependudukan	Persentase tersedianya profile kependudukan sesuai peraturan	%	100	100	202,065,651	100	202,065,651	100	202,120,182	100	502,148,705	100	302,178,114	
2.13	**URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					**4,351,039,774**		**9,273,700,646**		**11,668,173,873**		**12,298,735,157**		**14,570,770,039**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesektariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	100	100	2,748,768,838	100	5,587,556,895	100	5,924,801,371	100	5,981,025,405	100	6,357,747,362	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA														
	Meningkatnya penataan desa	Presentase desa yang terfasilitasi penataan desanya	%	100	100	501,650,399	100	901,672,008	100	1,001,694,120	100	1,001,716,911	100	1,001,740,410	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA														
	Meningkatnya peningkatan kerjasama desa	Presentase desa yang mengadakan kerjasama antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga	%	100	100	151,830,356	100	300,606,835	100	700,614,860	100	800,623,132	100	800,631,660	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
	Meningkatnya administrasi pemerintahan desa	Presentase desa yang menyelengarakan adminitrasi pemerintahan	%	100	100	509,578,459	100	1,437,642,282	100	2,387,617,153	100	2,644,555,832	100	3,842,081,979	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan ,Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum adat dalam pembangunan	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat	%	100	100	439,211,722	100	1,046,222,626	100	1,653,446,369	100	1,870,813,877	100	2,568,568,628	
2.14	**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					**6,116,671,230**		**6,041,525,262**		**8,475,678,746**		**7,838,180,402**		**11,651,046,426**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	93,43	93,80	2,298,016,533	94,10	2,750,662,189	94,40	2,850,662,189	94,70	2,650,662,189	95	2,750,662,189	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														
	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/* ASFR 15-19)	%	28.4	27.2	151,331,279	26.6	125,067,173	26.0	573,843,206	25.4	631,227,527	24.8	2,149,334,779	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
	Meningkatnya persentase KB aktif per pasangan usia subur (PUS)	Angkap prevalensi kontrasepsi modern/*Modern Contraceptive* (mCPR)	%	52.3	52.70	2,045,964,697	52.90	1,504,369,463	53.10	3,223,604,270	53.30	2,545,964,697	53.50	3,545,964,697	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	12.0	11.4		11.1		10.8		10.5		10.2		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	59,92	62,40	1,621,358,721	63,60	1,661,426,437	64,90	1,827,569,081	66,20	2,010,325,989	67,50	3,205,084,761	
2.15	**URUSAN PERHUBUNGAN**					**7,990,124,617**		**12,464,940,110**		**14,678,945,283**		**16,143,146,835**		**22,532,793,352**	**DINAS PERHUBUNGAN**
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatkan kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	100	100	3,808,852,161	100	4,224,396,808	100	4,224,396,808	100	4,024,396,808	100	4,224,396,808	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat	Ratio	0.64	0.7	2,885,500,000	0.74	6,940,543,302	0.79	9,154,548,475	0.83	10,818,750,027	0.87	15,008,396,544	
		Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	30	45		60		75		85		90		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN														
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas laut	Ratio	0.67	0.73	1,295,772,456	0.76	1,300,000,000	0.8	1,300,000,000	0.8	1,300,000,000	0.84	3,300,000,000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.16	**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**5,909,644,484**		**5,881,896,560**		**9,032,018,347**		**8,427,054,883**		**10,415,785,060**	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	100	100	2,806,899,091	100	2,639,435,842	100	2,739,435,842	100	2,539,435,842	100	2,639,435,842	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Presentase tingkat kepuasan terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (Survei)	%	NA	72	2,444,515,966	73	1,016,515,021	74	2,827,313,355	5	2,838,443,244	76	3,349,918,702	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA														
	Meningkatnya Ketersediaan layanan publik berkualitas dan berbasis digital di kabupaten Buton	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	2.44	75	318,824,500	78	1,032,934,933	80	1,713,656,233	83	1,472,401,588	95	2,674,301,465	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**														**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL														
	Tercapainya kolaborasi, Integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	2.62	75	192,995,000	80	600,959,845	82	1,181,151,814	82	959,266,995	85	1,031,120,394	
2.16	**URUSAN BIDANG PERSANDIAN**														**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI														
	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	22.22	35	146,409,927	50	592,050,920	60	570,461,104	70	617,507,214	80	721,008,657	
2.17	**URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**					**6,048,822,230**		**7,437,759,811**		**9,123,488,924**		**11,120,226,392**		**14,793,071,250**	**DINAS KOPERASI DAN UKM**
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	87,5	87,5	2,273,822,230	90	2,342,575,699	90	2,442,575,699	87,5	2,242,575,699	90	2,342,575,699	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM														

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase program pelayanan izin usaha simpan pinjam	%	12.19	5,17	220,000,000	5,17	220,000,000	5,17	220,000,000	5,17	220,000,000	5,17	220,000,000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI														
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasana koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	17.88	23,68	225,000,000	23,68	230,000,000	35,26	335,000,000	35,78	340,000,000	36,31	345,000,000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP														
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi sehat	%	17,88	21,05	200,000,000	22,10	210,000,000	23,15	220,000,000	34,73	330,000,000	35,78	340,000,000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN														
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	58.53	4,73	315,000,000	4,73	315,000,000	6,31	415,000,000	6,31	415,000,000	7,89	515,000,000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	17.88	10,13	635,000,000	10,32	660,000,000	12,76	895,000,000	15,19	910,000,000	14,73	875,000,000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
	Meningkatnya peranan ekonomi kerakyatan	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	%	4,10	6,50	1,755,000,000	7,30	2,460,184,112	7,48	3,495,913,225	7,50	4,670,000,000	10,25	6,155,495,551	
		Pertumbuhan wirausaha	%	1,07	4,02		4,70		4,73		4,73		5,22		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Unit Usaha	N/A	2,13	425,000,000	4,21	1,000,000,000	4,35	1,100,000,000	6,35	1,992,650,693	12,83	4,000,000,000	
2.18	**URUSAN PENANAMAN MODAL**					**4,049,381,735**		**5,405,686,762**		**7,742,686,762**		**9,277,205,151**		**13,292,686,762**	**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU**
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	98	90	3,054,207,065	90	2,737,736,762	90	2,937,736,762	90	2,637,736,762	90	2,737,736,762	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	%	52	50	518,950,000	55	793,950,000	60	1,383,950,000	65	1,631,950,000	75	3,183,950,000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL														
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	%	N/A	2.71	240,000,000	3.5	560,000,000	4.7	1,140,000,000	5.5	1,803,518,389	6.75	3,070,000,000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL														
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	100	97	89,525,500	98	649,500,000	98	1,346,500,000	100	2,049,500,000	100	3,046,500,000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL														

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Presentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	73	70	112,000,000	73	442,000,000	78	612,000,000	80	882,000,000	83	982,000,000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL														
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Presentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	100	100	34,699,170	100	222,500,000	100	322,500,000	100	272,500,000	100	272,500,000	
2.19	**URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					**12,765,575,048**		**10,887,140,270**		**11,722,406,205**		**12,009,912,687**		**23,964,505,681**	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	85	87	2,030,000,000	90	2,449,547,415	92	2,549,547,415	94	2,349,547,415	95	2,449,547,415	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN														
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	53.85	59	950,000,000	62	956,763,640	68	1,011,105,958	70.46	3,047,570,162	73.99	5,047,570,162	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN														
	Meningkatnya pembinaan atlit	Persentase atlit yang masuk pelatda	%	0.65	0.72	9,185,575,048	0.75	6,970,576,465	0.83	7,651,500,082	0.85	6,102,542,360	0.9	15,957,135,354	
	Meningkatnya pembudayaan olahraga	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi dan olahraga masyarakat	%	4.77	5.25		5.52		6.07		6.25		6.56		
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN														
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	31.25	34.37	600,000,000	36	510,252,750	40	510,252,750	40.89	510,252,750	42.93	510,252,750	
2.22	**URUSAN KEBUDAYAAN**					**4,317,436,957**		**5,469,166,217**		**6,109,412,586**		**6,390,608,205**		**12,002,150,910**	**DINAS KEBUDAYAAN**
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Tercapainya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	89	90	1,964,164,967	92	2,398,456,395	93	2,498,456,395	94	2,298,456,395	95	2,398,456,395	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN														
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	45	47	1,561,175,750	50	1,813,175,750	53	2,137,422,119	55	2,601,034,235	70	6,112,576,940	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL														
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	35	38	186,636,903	42	497,416,497	46	512,416,497	50	560,000,000	65	1,580,000,000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH														
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase sejarah lokal yang diajarkan disekolah	%	NA	5	180,117,575	15	190,117,575	25	295,117,575	35	295,117,575	50	295,117,575	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%	8	11	365,341,762	14	510,000,000	19	616,000,000	24	616,000,000	32	1,581,000,000	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN														
	Meningkatrnya tata kelola museum	Tingkat kunjungan wisatawan ke museum	%	NA	NA	60,000,000	7	60,000,000	15	50,000,000	20	20,000,000	30	35,000,000	
2.23	**URUSAN PERPUSTAKAAN**					**3,082,311,956**		**6,068,339,441**		**7,846,448,071**		**8,393,313,249**		**10,276,416,641**	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Persentase kepuasan layanan kesekretariatan	%	100	100	2,091,011,956	100	2,124,839,393	100	2,224,839,393	100	2,024,839,393	100	2,124,839,393	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN														
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (SNP)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (SNP)	%	69.42	74.92	616,300,000	81.42	2,985,716,557	88.92	3,586,000,832	100	3,582,386,975	100	4,501,321,106	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO														
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	%	N/A	15	-	17	100,000,000	20	200,000,000	22	250,000,000	25	500,000,000	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**														
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP														
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase pengelolaan arsip dinamis dan statis	%	25	25	300,000,000	50	655,616,020	70	1,533,411,711	75	2,033,861,201	75	2,600,000,000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP														
	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	%	6	8	75,000,000	10	202,167,471	12	302,196,135	14	502,225,680	16	550,256,142	
3	**URUSAN PILIHAN**														
3.25	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**17,189,567,718**		**24,184,143,998**		**22,993,527,998**		**63,454,428,998**		**80,867,843,998**	**DINAS PERIKANAN**
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	100	100	3,601,170,718	100	3,712,851,998	100	3,812,851,998	100	3,562,851,998	100	3,812,851,998	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
	Meningkatnya hilirisasi produk perikanan	Kontribusi PDRB subsektor perikanan	%		21.48	8,008,919,000	21.7	13,073,497,000	21.91	13,816,481,000	22.13	51,298,737,000	22.34	71,381,147,000	
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	19317	19699		19908		20133		20381		20656		
		Nilai Tukar Nelayan	%	99.28	103.26		104.21		105.05		105.38		105.84		
		Frekuensi kapal nelayan yang melakukan bongkar muat di TPI	Frekuensi	960	1800		2100		2280		2400		2400		
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
	Meningkatnya hilirisasi produk perikanan	Kontribusi PDRB subsektor perikanan	%		21.48	3,729,853,000	21.7	5,248,170,000	21.91	3,214,070,000	22.13	6,792,715,000	22.34	3,873,720,000	
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	1909	1962		1996		2034		2078		2126		
		Nilai tukar pembudidaya	%	87.22	102.35		103.45		104.44		105.32		106.06		
		Luas lahan kawasan budidaya	Hektar	16.3	18.67		20.71		22.73		24.25		25.78		
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN														
	Meningkatnya pengawasan SDA kelautan dan perikanan daerah	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	%	N/A	50	200,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
	Meningkatnya hilirisasi produk perikanan	Kontribusi PDRB subsektor perikanan	%		21.48	1,649,625,000	21.7	1,649,625,000	21.91	1,650,125,000	22.13	1,300,125,000	22.34	1,300,125,000	
	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	2787	2910		2978		3051		3129		3212		
3.26	**URUSAN PARIWISATA**					**5,717,073,602**		**6,807,684,608**		**9,222,611,537**		**12,517,089,615**		**15,133,897,545**	**DINAS PARIWISATA**
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	72.18	100	1,901,507,141	100	3,239,507,472	100	3,339,507,472	100	3,189,507,472	100	3,339,507,472	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata prioritas yang aktif dan produktif	%	33.33	66.67	1,731,000,000	83.33	2,116,562,023	100	4,049,287,804	100	6,733,299,216	100	9,960,884,726	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	8	15	593,000,000	20	344,263,237	25	654,848,614	30	1,245,451,965	35	1,246,074,049	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
	Meningkatnya kapasitas SDM dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yan aktif dan tervalidasi	%	5	100	565,000,000	100	503,639,232	100	503,733,647	100	503,830,962	100	503,931,298	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
	Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah yang terfasilitasi oleh pemerintah daerah	%	0	15	926,566,461	20	603,712,644	25	675,234,000	30	845,000,000	35	83,500,000	
3.27	**URUSAN PERTANIAN**					**25,595,676,704**		**26,941,285,634**		**35,520,242,221**		**41,660,794,633**		**45,331,567,471**	**DINAS PERTANIAN**
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	100%	100%	8,165,746,704	100%	7,608,201,361	100%	7,708,201,361	100%	7,458,201,361	100%	7,708,201,361	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
	Meningkatnya hilirisasi produk pertanian	Kontribusi PDRB subsektor pertanian	%	20,34	21.48	9,240,680,000	21.7	7,967,084,273	21.91	10,236,151,000	22.13	8,248,833,272	22.34	10,867,854,110	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	-12	1		1,25		1,5		1,75		2		
		Peningkatan produksi hortikultura	%	-20	1		1,25		1,5		1,75		2		
		Peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	-25	1		1,25		1,5		1,75		2		
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	%	-47	1		1,25		1,5		1,75		2		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
	Meningkatnya hilirisasi produk pertanian	Kontribusi PDRB subsektor pertanian	%	20,34	21.48	6,130,500,000	21.7	7,984,000,000	21.91	14,320,889,860	22.13	20,579,760,000	22.34	22,798,712,000	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Luas lahan pertanian	Ha	15,25	15,35		15,40		15,45		15,50		15,55		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular (PHMS)	%	10	12	204,350,000	13	402,000,000	14	482,400,000	15	578,880,000	16	694,656,000	
		Persentase unit usaha pangan asal hewani yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (nomor kontrol veteriner)	%	N/A	1		2		3		4		5		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	%	4	6	73,200,000	7	198,000,000	8	237,600,000	9	285,120,000	10	342,144,000	
		Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	15	17		18		19		20		21		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN														

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	N/A	5	1,781,200,000	10	2,782,000,000	15	2,535,000,000	20	4,510,000,000	25	2,920,000,000	
		Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	%	50,2	50,4		50,5		50,6		50,7		50,8		
3.30	**URUSAN PERDAGANGAN**					**5,066,942,123**		**5,950,241,165**		**7,127,872,196**		**9,581,276,836**		**12,469,368,577**	**DINAS PERDAGANGAN**
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	100	95	1,463,510,775	98	1,860,592,647	100	1,960,592,647	96	1,760,592,647	98	1,860,592,647	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN														
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	11.53	12.00	12,400,412	13	113,182,855	14	113,357,197	15	113,536,892	20	213,722,166	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN														
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang efisien	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	100	96	3,317,809,147	95	3,055,089,566	97	3,929,674,023	98	6,580,003,899	100	9,155,339,379	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING														
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang stok kebutuhan barang pokok penting	%	100	95	162,221,789	97	463,784,929	98	565,895,523	99	568,005,569	100	579,767,158	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN														
	Peningkatan standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	46,500,000	100	75,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	0	2	64,500,000	3	382,591,168	4	458,352,806	5	459,137,829	6	559,947,227	
3.31	**URUSAN PERINDUSTRIAN**					**4,418,773,067**		**5,195,930,889**		**6,701,916,100**		**10,821,555,123**		**13,939,408,923**	**DINAS PERINDUSTRIAN**
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	99.06	100	3,416,953,713	100	3,413,673,365	100	3,513,673,365	100	3,313,673,365	100	3,413,673,365	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	%	18.94	3.5	802,110,000	3.5	1,205,000,000	3.7	2,212,048,474	3.9	6,007,314,569	4	8,872,339,440	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan Indikator Pembangunan Indsutri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	90	100		100		100		100		100		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI														
	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	%	94.98	100	71,039,790	100	433,858,909	100	732,360,528	100	1,156,285,016	100	1,308,651,581	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINas)														
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	1.38	1.5	128,669,564	2.0	143,398,615	2.5	243,833,733	3	344,282,173	3.5	344,744,537	
3.32	**URUSAN TRANSMIGRASI**					**1,699,277,380**		**2,139,686,389**		**2,440,546,824**		**2,641,175,227**		**2,538,691,930**	**DINAS TRANSMIGRASI**
3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan.	Cakupan pelayanan kesekretariatan	%	100	100	1,573,357,676	100	1,493,836,054	100	1,593,836,054	100	1,493,836,054	100	1,493,836,054	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
	Terlaksananya perencanaan Kawasan transmigrasi	Persentase tersedianya dokumen perencanaan kawasan	%	%	100	60,000,000	100	226,759,189	100	313,126,302	100	488,504,687	100	325,763,609	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
	Terlaksananya pembangunan Kawasan transmigrasi	Persentase tersedianya Kawasan transmigrasi siap bangun.	%	100	100	35,919,704	100	369,091,146	100	458,584,468	100	533,834,486	100	594,092,267	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
	Terlaksananya pengembangan kawasan transmigrasi.	Persentase terciptanya kawasan transmigrasi berkembang	%	100	100	30,000,000	100	50,000,000	100	75,000,000	100	125,000,000	100	125,000,000	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**32,103,836,837**		**32,708,926,056**		**35,317,215,957**		**37,448,937,553**		**40,266,278,186**	**SEKRETARIAT DAERAH**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan.	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	100	100	25,433,399,587	100	20,469,706,199	100	22,978,319,971	100	23,150,540,063	100	24,899,074,445	
		Persentase pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		Fasilitasi kedinasan dan publikasi bagi kepala daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		Cakupan penataan organsisasi yang tepat fungsi dan ukuran sesuai peraturan yang berlaku	%	100	100		100		100		100		100		
	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks kematangan organisasi	Skor	28.8	32.5		34.45		36.65		37.52		39.6		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	100	100	5,087,826,300	100	7,475,447,342	100	7,560,181,145	100	8,619,777,328	100	9,607,208,475	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														
	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan	Cakupan pengelolaan kebijakan administrasi perekonomian	%	100	100		100	4,763,772,515	100	4,778,714,841	100	5,678,620,162	100	5,759,995,266	
		Cakupan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan daerah	%	100	100	1,582,610,950	100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan pengadaan barang dan jasa	%	100	100		100		100		100		100		
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**					**29,538,452,716**		**31,746,144,406**		**32,120,758,847**		**35,832,834,731**		**37,774,416,636**	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan.	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	100	100	16,389,103,702	100	17,978,105,300	100	18,136,514,603	100	20,299,787,764	100	20,468,130,335	
4.02.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kinerja DPRD	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	%	100	100	13,149,349,014	100	13,768,039,106	100	13,984,244,244	100	15,533,046,967	100	17,306,286,301	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5.01	**PERENCANAAN**					**5,870,156,410**		**6,457,172,051**		**7,425,747,858**		**7,997,035,251**		**9,196,590,539**	**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan.	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	100	100	3,554,116,585	100	3,566,121,601	100	4,066,121,601	100	3,885,306,910	100	4,366,121,601	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH														
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	90	92	1,732,791,697	93	1,590,202,650	94	1,699,330,515	95	2,108,738,644	96	2,718,438,884	
		Persentase keselarasan RPJMD dengan RENSTRA PD	%	90	92		93		94		95		96		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan RENJA PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	90	92	293,863,699	93	623,257,816	94	831,290,296	95	876,923,554	96	896,923,554	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan RENJA PD pada bidang perekonomian dan sumber daya alam	%	90	92	96,089,410	93	262,947,500	94	338,705,446	95	432,262,500	96	465,262,500	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan RENJA PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	90	92	193,295,019	93	414,642,484	94	490,300,000	95	693,803,643	96	749,844,000	
5.02	**KEUANGAN**					**5,716,759,859**		**6,288,435,845**		**7,631,701,222**		**7,997,035,251**		**9,615,943,540**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	100	100	4,606,499,109	100	3,575,403,705	100	3,706,701,222	100	3,725,403,705	100	3,725,403,705	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
	Meningkatnya upaya ekstentifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	4.35	4.5	1,110,260,750	4.75	2,713,032,140	5	3,925,000,000	5.25	4,271,631,546	5.5	5,890,539,835	
	Meningkatnya ekstentifikasi dan intensifikasi PBB-P2 dan BPHTB	Persentase PBB-P2 dan BPHTB terhadap pendapatan daerah	%	0.12	0.12		0.15		0.17		0.2		0.22		
	Meningkatnya ekstentifikasi dan intensifikasi pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB	Persentase pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB terhadap pendapatan daerah	%	0.42	0.8		1		1.2		1.35		1.5		
5.02	**KEUANGAN**					**133,303,474,551**		**149,626,940,348**		**165,482,719,326**		**184,593,652,893**		**203,697,277,134**	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	100	100	6,788,051,870	100	4,714,207,513	100	4,834,697,314	100	4,994,207,514	100	5,317,889,698	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang di alokasikan melalui TKD	%	36.61	36.55	123,235,043,771	36.50	139,084,553,925	36.40	154,619,843,102	36.20	173,071,266,469	36.00	191,351,208,526	
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan dan akuntansi	Persentase penurunan SILPA	%	13	10	1,658,200,000	8	2,006,000,000	6	2,006,000,000	4	2,206,000,000	2	2,406,000,000	
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	Nilai	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	%	4	4.2	1,622,178,910	4.4	3,822,178,910	4.6	4,022,178,910	4.8	4,322,178,910	5	4,622,178,910	
5.03	**KEPEGAWAIAN**					**32,552,757,441**		**30,855,396,081**		**31,432,396,081**		**31,482,396,081**		**31,582,396,081**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	39	100	30,907,147,381	100	25,861,075,081	100	25,861,075,081	100	25,911,075,081	100	26,011,075,081	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Presentase perencanaan kebutuhan yang sesuai formasi	%	40	100	1,645,610,060	100	4,244,321,000	100	4,821,321,000	100	4,821,321,000	100	4,821,321,000	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**														**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														
	Meningkatnya kualitas tata kelola manajemen ASN di setiap perangkat daerah	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	%	NA	100	0	100	750,000,000	100	750,000,000	100	750,000,000	100	750,000,000	
	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase realsiasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	%	NA	100	0	100	167,000,000	100	167,000,000	100	167,000,000	100	167,000,000	
	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta seryifikais kompetensi	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	NA	100	0	100	175,000,000	100	175,000,000	100	175,000,000	100	175,000,000	
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	NA	100	0	100	408,000,000	100	408,000,000	100	408,000,000	100	408,000,000	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**4,455,165,668**		**5,076,879,213**		**6,502,678,526**		**7,811,209,910**		**9,757,772,497**	**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	85	85	2,587,665,668	90	2,863,596,676	90	3,063,596,676	95	3,063,596,676	100	3,063,596,676	
5.05.02	PROGRAM PENELITAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														
	Meningkatnya hasil Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	33	50	1,287,500,000	50	1,252,500,000	67	1,829,081,850	67	2,387,613,234	75	3,297,500,000	
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH														
	Meningkatnya produk inovasi yang dimanfaatkan	Rasio produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan badan usaha milik daerah	%	100	100	580,000,000	100	960,782,537	100	1,610,000,000	100	2,360,000,000	100	3,396,675,821	
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbinan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	%	100	100		100		100		100		100		
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					**4,922,983,598**		**5,415,281,958**		**7,227,574,251**		**7,588,952,964**		**9,865,638,853**	**INSPEKTORAT**
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**														

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	100	100	3,382,534,790	100	3,043,413,275	100	3,043,413,275	100	3,043,413,275	100	3,043,413,275	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	%	70	72	1,048,595,843	75	1,434,831,259	78	2,381,832,677	80	2,731,404,258	82	3,896,226,905	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Capaian MCP KPK	%	55	57	491,852,965	60	937,037,424	62	1,802,328,299	64	1,814,135,431	65	2,925,998,673	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN PASARWAJO**					**10,182,357,503**		**6,236,012,217**		**7,011,012,217**		**7,011,012,217**		**7,011,012,217**	**KECAMATAN PASARWAJO**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	100	100	4,373,984,617	100	4,296,012,217	100	4,596,012,217	100	4,596,012,217	100	4,596,012,217	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang tepat waktu	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pablik	%	100	100	689,801,272	100	50,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	100	100	5,033,072,807	100	1,800,000,000	100	2,250,000,000	100	2,250,000,000	100	2,250,000,000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindakl lanjuti	%	100	100	30,498,807	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemrintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemrintahan umum	%	91	93	26,000,000	94	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	91	93	29,000,000	94	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	
7.02	**KECAMATAN WABULA**					**1,765,224,323**		**1,359,790,863**		**1,459,790,863**		**1,459,790,863**		**1,459,790,863**	**KECAMATAN WABULA**
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	91	93	1,615,803,873	94	1,229,790,863	95	1,329,790,863	96	1,329,790,863	97	1,329,790,863	
7.02.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang tepat waktu	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pablik	%	91	93	47,000,000	94	30,000,000	95	30,000,000	96	30,000,000	97	30,000,000	
7.02.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	91	93	5,124,350	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	
7.02.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindakl lanjuti	%	91	93	10,248,700	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	
7.02.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemrintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemrintahan umum	%	91	93	66,550,000	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	
7.02.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	91	93	20,497,400	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	
7.03	**KECAMATAN WOLOWA**					**1,785,140,981**		**1,632,190,947**		**1,582,190,947**		**1,482,190,947**		**1,482,190,947**	**KECAMATAN WOLOWA**
7.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	91	93	1,723,190,981	92	1,502,190,947	91	1,452,190,947	96	1,352,190,947	90	1,352,190,947	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
7.03.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang tepat waktu	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pablik	%	91	93	14,588,000	94	30,000,000	95	30,000,000	96	30,000,000	97	30,000,000	
7.03.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	91	93	9,898,000	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	
7.03.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindakl lanjuti	%	91	93	13,102,000	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	
7.03.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemrintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemrintahan umum	%	91	93	15,140,000	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	
7.03.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	91	93	9,222,000	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	
7.04	**KECAMATAN SIOTAPINA**					**2,309,080,927**		**1,486,181,524**		**1,486,181,524**		**1,486,181,524**		**1,486,181,524**	**KECAMATAN SIOTAPINA**
7.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	91	93	2,206,080,927	94	1,346,181,524	95	1,346,181,524	96	1,346,181,524	97	1,346,181,524	
7.04.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang tepat waktu	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pablik	%	91	93	19,000,000	94%	40,000,000	95	40,000,000	96	40,000,000	97	40,000,000	
7.04.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	91	93	15,000,000	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	
7.04.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindakl lanjuti	%	91	93	21,000,000	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
7.04.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemrintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemrintahan umum	%	91	93	16,500,000	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	
7.04.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	91	93	31,500,000	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	
7.05	**KECAMATAN LASALIMU SELATAN**					**1,893,435,728**		**1,617,721,413**		**1,617,721,413**		**1,617,721,413**		**1,617,721,413**	**KECAMATAN LASALIMU SELATAN**
7.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	91	93	1,760,335,728	94	1,477,721,413	95	1,477,721,413	96	1,477,721,413	97	1,477,721,413	
7.05.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang tepat waktu	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pablik	%	91	93	26,620,000	94	40,000,000	95	40,000,000	96	40,000,000	97	40,000,000	
7.05.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	91	93	26,620,000	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	
7.05.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindakl lanjuti	%	91	93	26,620,000	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	
7.05.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemrintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemrintahan umum	%	91	93	26,620,000	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	
7.05.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	91	93	26,620,000	94	25,000,000	95	25,000,000	96	25,000,000	97	25,000,000	
7.06	**KECAMATAN LASALIMU**					**2,290,262,251**		**2,280,717,817**		**2,280,717,817**		**2,280,717,817**		**2,280,717,817**	**KECAMATAN LASALIMU**
7.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	91	93	1,829,762,251	94	1,890,717,817	95	1,890,717,817	96	1,890,717,817	97	1,890,717,817	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
7.06.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang tepat waktu	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pablik	%	91	93	26,000,000	94	50,000,000	95	50,000,000	96	50,000,000	97	50,000,000	
7.06.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	91	93	357,500,000	94	250,000,000	95	250,000,000	96	250,000,000	97	250,000,000	
7.06.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindakl lanjuti	%	91	93	22,000,000	94	30,000,000	95	30,000,000	96	30,000,000	97	30,000,000	
7.06.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemrintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemrintahan umum	%	91	93	26,000,000	94	30,000,000	95	30,000,000	96	30,000,000	97	30,000,000	
7.06.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	91	93	29,000,000	94	30,000,000	95	30,000,000	96	30,000,000	97	30,000,000	
7.07	**KECAMATAN KAPONTORI**					**2,835,332,800**		**2,922,212,296**		**3,022,212,296**		**3,022,212,296**		**3,022,212,296**	**KECAMATAN KAPONTORI**
7.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	91	93	2,171,667,070	94	2,382,212,296	95	2,382,212,296	96	2,382,212,296	97	2,382,212,296	
7.07.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang tepat waktu	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pablik	%	91	93	15,730,000	94	50,000,000	95	50,000,000	96	50,000,000	97	50,000,000	
7.07.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	91	93	621,315,730	94	400,000,000	95	500,000,000	96	500,000,000	97	500,000,000	
7.07.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindakl lanjuti	%	91	93	26,620,000	94	30,000,000	95	30,000,000	96	30,000,000	97	30,000,000	
7.07.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemrintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemrintahan umum	%	91	93		94	30,000,000	95	30,000,000	96	30,000,000	97	30,000,000	
7.07.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	91	93		94	30,000,000	95	30,000,000	96	30,000,000	97	30,000,000	
8.01	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					**3,953,849,563**		**4,899,234,519**		**5,951,619,697**		**26,287,071,582**		**6,400,161,970**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**														
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Cakupan pelayanan kesektariatan	%	100	100	2,328,149,563	100	2,883,979,302	100	2,892,115,684	100	2,904,793,579	100	2,923,535,874	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN														
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	35	62	726,100,000	60	599,746,227	63	806,355,324	65	1,013,167,348	66	1,022,002,073	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai	%	40	60	447,600,000	55	344,774,922	58	417,978,662	80	21,483,741,131	62	458,879,686	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	40	42	25,000,000	55	100,000,000	55	100,000,000	65	200,000,000	55	100,000,000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA														
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	35	39	81,000,000	55	544,135,630	60	1,104,252,356	63	s	65	1,355,784,737	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	20	40	346,000,000	45	426,598,438	50	630,917,671	55	685,369,524	52	539,959,600	
	TOTAL					**945,882,821,833**		**1,057,601,393,776**		**1,226,114,582,779**		**1,427,428,943,480**		**1,679,598,299,420**	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Pada bagian ini selain menyajikan Indikator Kinerja Utama Daerah, juga menyajikan Indikator Makro Pembangunan yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator makro pembangunan ini diharapkan mampu menggambarkan pencapaian pembangunan Kabupaten Buton pada akhir periode pembangunan tahun 2029. Target capaian kinerja makro pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2. Penetapan Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,20	4,03	4,09	4,15	4,22	4,24	4,36
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,95	2,83	2,40	2,38	2,36	2,34	2,32
3	Tingkat Kemiskinan	%	13,39	13,04	13,00	12,65	11,85	11,47	11,09
4	Rasio Gini	Poin	0,328	0,312	0,311	0,310	0,309	0,308	0,307
5	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,72	70,01	70,27	70,53	70,78	71,04	71,31
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	16,69	35,00	19,55	22,42	25,28	28,14	31,00

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Buton tahun 2025-2029.

Tabel 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Buton Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
INDIKATOR TUJUAN								
1	Indeks Religius Buton	Poin	79,51	80,59	81,67	82,75	83,85	84,94
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,04	63,25	64,46	65,67	66,88	68,09
3	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,01	70,27	70,53	70,78	71,04	71,31
4	PDRB per Kapita	Juta Rupiah/ Kapita	44,38	45,35	46,33	47,30	48,27	49,24
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	35,00	19,55	22,42	25,28	28,14	31,00
6	Indeks Risiko Bencana	Poin	148,81	147,32	145,83	144,34	142,85	141,36
9	Indeks Infrastruktur Kabupaten Buton	%	65,22	66,495	67,76	69,275	71,295	73,495
10	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,03	4,09	4,15	4,22	4,24	4,36
11	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,46	3,53	3,61	3,69	3,77	3,84
INDIKATOR SASARAN								
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	88,13	88,50	88,88	89,25	89,63	90,00
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	53,40	54,01	54,61	55,22	55,82	56,43
2	Crime rate	Per 100.000 Pddk	80,00	78,00	76,00	74,00	72,00	70,00
3	Nilai SAKIP Kabupaten Buton	Poin	65,00	70,50	73,02	76,02	78,02	80,52
4	Indeks Pendidikan	Poin	78,11	78,20	78,36	78,45	78,58	78,70
5	Indeks Kesehatan	Poin	77,81	77,97	78,14	78,30	78,46	78,62
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	61,1	62,4	63,6	64,9	66,2	67,5
7	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,459	0,448	0,438	0,427	0,417	0,407
8	Tingkat Kemiskinan	%	13,04	13,00	12,65	11,86	11,47	11,08
9	Rasio Gini	Poin	0,312	0,311	0,310	0,309	0,308	0,307
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	83,79	83,96	84,14	84,31	84,48	84,65
11	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,38	0,39	0,40	0,45	0,54	0,57
12	Indeks Infrastruktur Kawasan Permukiman	%	55,51	57,28	58,91	60,87	63,16	66,27
13	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	74,93	75,71	76,61	77,68	79,43	80,72
14	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian	%	3.346,59	3.528,89	3.710,16	3.891,46	4.071,33	4.251,07
15	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	%	21,27	21,48	21,70	21,91	22,13	22,34
16	Indeks Ekonomi Biru	Poin	49,72	51,66	53,61	55,55	57,49	59,43
17	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	2,89	3,05	3,21	3,36	3,52	3,68
18	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara	%	3,02	3,10	3,17	3,25	3,33	3,41
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,83	2,40	2,38	2,36	2,34	2,32

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Dimana Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Buton mengacu pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, maupun urusan pilihan. Setiap IKK dirancang untuk menggambarkan tingkat capaian pembangunan secara lebih fokus dan relevan terhadap karakteristik serta prioritas daerah.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buton diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	73,83	75,06	76,30	77,53	78,77	80,00
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	13,29	12,35	11,40	10,46	9,52	8,76
3	Jumlah RT Pengguna Listrik	Ruta	23.158,30	23.797	24.436	25.075	25.713,90	26.353
4	Kapasitas air baku	m3/ detik	0,47	0,52	0,58	0,63	0,69	0,74
5	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum	%	86,17	86,77	87,30	88,18	89,09	89,59
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	83,79	83,96	84,14	84,31	84,48	84,65
7	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	85,50	85,99	86,48	86,98	87,47	87,96
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/ Kg	46,68	48,51	50,34	52,18	54,01	55,84
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	33,50	34,00	34,50	35,00	35,50	36,00
10	Persentase Penurunan Emisi GRK							
	a) Kumulatif	%	9,73	11,00	12,27	13,54	14,81	16,08
	b) Tahunan	%	16,69	19,55	22,42	25,28	28,14	31,00
11	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO_2 Eq.	13.914,38	15.781,27	17.990,35	20.578,83	23.226,72	26.217,59
12	Indeks Risiko Bencana	Poin	148,81	147,32	145,83	144,34	142,85	141,36
13	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,38	0,39	0,40	0,45	0,54	0,57
14	Jumlah Penduduk	Jiwa	123,85	125,65	127,47	129,29	131,09	132,86
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,49	1,45	1,45	1,43	1,39	1,35
16	Rasio Penduduk	Poin	101,87	101,78	101,66	101,54	101,43	101,32

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Kepadatan Penduduk	Jiwa/ m2	75,15	76,24	77,35	78,45	79,54	80,62
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,03	4,09	4,15	4,22	4,24	4,36
2	Tingkat Kemiskinan	%	13,04	13,00	12,65	11,86	11,47	11,08
3	PDRB Per Kapita	Juta Rp./ Kapita	44,38	45,35	46,33	47,30	48,27	49,24
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,83	2,40	2,38	2,36	2,34	2,32
5	Rasio Gini	Poin	0,312	0,311	0,310	0,309	0,308	0,307
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,01	70,27	70,53	70,78	71,04	71,31
7	Indeks Kesehatan	Poin	77,81	77,97	78,14	78,30	78,46	78,62
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,58	70,60	70,87	70,90	71,00	71,30
	Kesehatan Ibu dan Anak:							
9	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	259,91	247,86	235,82	223,77	211,73	199,68
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (SSI/SKI)	%	25,88	22,96	20,04	17,12	14,20	13,36
11	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (E-PPGBM)	%	19,90	18,47	17,05	15,62	14,20	13,36
12	Penanganan Tuberkulosis:							
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	59,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,50
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	88,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,50
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	93,24	94,93	96,62	98,31	100,00	100,00
14	Jumlah kematian ibu	Org	5	4	3	2	1	0
15	Jumlah kematian balita	Org	14	10	5	3	2	0
16	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	3,60	46,00	55,00	61,00	70,00	70,00
17	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	100	100	100	100	100	100
18	Persentase hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00
19	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%						
20	Indeks Pendidikan	Poin	78,11	78,20	78,36	78,45	78,58	78,70
21	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		20,00	23,00	25,00	27,00	30,00	35,00
	i) Literasi :							
	-SD	%	64,09	65,41	66,73	68,05	69,37	70,69
	-SMP	%	64,26	65,24	66,23	67,21	68,20	69,19
	ii) Numerasi							
	-SD	%	43,35	44,24	45,14	46,03	46,92	47,82
	-SMP	%	59,14	59,74	60,34	60,94	61,54	62,14
22	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,68	8,70	8,76	8,84	8,91	9,00
23	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,95	13,99	14,03	14,07	14,11	14,15

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
24	Proporsi angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terhadap total angkatan kerja	%	15,46	16,40	16,89	17,00	17,40	18,46
25	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja	%	62,77	63,28	63,79	64,30	64,81	65,31
26	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	31,08	33,47	35,86	38,26	40,65	43,04
27	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	%	55,80	56,60	57,40	58,20	59,00	59,80
28	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Pemerintahan	%	15,00	16,50	18,00	19,50	21,00	22,50
29	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	53,40	54,01	54,61	55,22	55,82	56,43
30	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	1,87	2,25	2,62	3,00	3,75	4,12
31	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	88,13	88,50	88,88	89,25	89,63	90,00
32	Indeks Religius Buton	Poin	79,51	80,59	81,67	82,75	83,85	84,94
33	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	61,1	62,4	63,6	64,9	66,2	67,5
34	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,459	0,448	0,438	0,427	0,417	0,407
35	Indeks Perlindungan Anak	Poin	52,49	52,57	52,65	52,73	52,81	52,89
36	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	66,23	69,55	73,02	76,67	80,51	84,53
37	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,360	0,396	0,416	0,437	0,450	0,463
38	Persentase Kebutuhan RTH	%	1,72	3,13	4,54	5,96	7,37	8,79
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Angka Ketergantungan	%	53,40	53,01	52,76	52,60	52,47	52,33
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,89	3,05	3,21	3,36	3,52	3,68
3	Pengembangan Pariwisata :							
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	695	720	745	770	795	820
4	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD :							
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	%	11,55	11,78	12,00	12,23	12,45	12,68
	Persentase Pertumbuhan IKM	%	3,82	4,32	4,81	5,31	5,80	6,30
	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,53	1,80	2,07	2,33	2,60	2,87
	Persentase Koperasi Aktif	%	73,31	74,05	74,79	75,54	76,28	77,03
	Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,83	2,96	3,10	3,23	3,37	3,50
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	58,51	59,10	59,68	60,27	60,85	61,44
6	Indeks Inovasi Daerah	Poin	51,43	51,99	52,55	53,10	53,66	54,22
7	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	%	21,27	21,48	21,70	21,91	22,13	22,34
8	Kontribusi PDRB Subkategori Perikanan	%	12,34	12,46	12,58	12,70	12,84	12,90
9	Indeks Ekonomi Biru	Poin	49,72	51,66	53,61	55,55	57,49	59,43
10	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau :							
	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	80,80	80,80	80,80	80,80	80,80	84,16

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp.	3.346,59	3.528,89	3.710,16	3.891,46	4.071,33	4.251,07
11	Persentase Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi	%	80,55	81,35	82,17	82,99	83,82	84,66
12	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	%	7,91	7,77	7,62	7,48	7,33	71,9
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	31,89	31,59	31,28	30,98	30,67	30,37
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	0,21	0,22	0,23	0,25	0,26	0,27
14	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan :							
	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara	%	3,02	3,10	3,17	3,25	3,33	3,41
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	72,09	72,82	73,55	74,29	75,02	75,75
16	Persentase Desa Mandiri	%	59,83	59,93	60,12	60,45	60,83	60,90
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,69	1,84	1,99	2,14	2,29	2,44
18	Tingkat Inflasi	%	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1
19	Tingkat IPH Kab. Buton	%	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
20	Indeks Infrastruktur Kabupaten Buton	%	65,22	66,495	67,76	69,275	71,295	73,495
21	Indeks Infrasrtuktur Kawasan Permukiman	%	55,51	57,28	58,91	60,87	63,16	66,27
22	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	74,93	75,71	76,61	77,68	79,43	80,72
23	Total Kredit/PDRB	%	22,5	24,76	26,89	29,10	32,30	33,50
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	55,81	57,02	58,23	59,44	60,65	61,86
2	Indeks Reformasi Hukum	Poin	78,20	78,60	79,20	80,10	82,11	82,35
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,09	2,23	2,38	2,52	2,67	2,82
4	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,30	3,32	3,34	3,36	3,38	3,40
5	Indeks Maturitas SPIP	Level	II	III	III	III	III	III
6	Nilai SAKIP Kab. Buton	Poin	65,00	70,50	73,02	76,02	78,02	80,52
7	Survei Penilaian Integritas	Poin	72,53	73,26	73,99	74,73	75,48	76,23
8	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100
9	Crime Rate	per 100.000 Pddk	80,00	78,00	76,00	74,00	72,00	70,00
10	Persentase pemilih pilkada dan pileg	%	78,94	79,42	79,90	80,37	80,85	81,33
11	Jumlah Kerja sama Daerah	Kerja sama	11	11	11	11	11	11
12	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,46	3,53	3,61	3,69	3,77	3,84
	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan							
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	21,40	22,91	24,41	25,92	27,43	28,93
	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23
13	Proporsi PDRB Jasa keuangan	%	0,75	0,77	0,78	0,80	0,82	0,84
14	Indeks akses keuangan daerah (IKAD)	Nilai	5,85	5,85	5,86	5,87	5,87	5,88
15	Indeks Zakat Nasional	Nilai	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
INDIKATOR KINERJA KUNCI								
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar								
a) Pendidikan								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpar-tisipasi dalam PAUD	%	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100	100
b) Kesehatan								
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	51,62	57,3	62,97	68,65	74,32	80
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	67,21	71,77	76,33	80,89	85,44	90
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	95,14	96,11	97,09	98,06	99,03	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	77,09	79,67	82,26	84,84	87,42	90
7	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	47,86	54,29	60,71	67,14	73,57	80
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	25,67	30,53	35,4	40,27	45,13	50
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	73,71	74,97	76,23	77,48	78,74	80
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	83,27	86,61	89,96	93,31	96,65	100
I4	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	93,6	94,88	96,16	97,44	98,72	100
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	11,83	12,43	13,02	13,61	14,20	14,79
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	25,58	27,91	29,07	30,23	40,70	41,86
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	66,42	66,83	67,67	68,50	70,18	71,01
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	86,17	86,77	87,30	88,18	89,09	89,59
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	85,85	86,38	86,93	87,70	88,48	89,02
6	Rasio kepatuhan PBG kab/ kota	%	17,24	18,10	18,97	19,83	20,69	21,55
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	52,42	53,08	54,85	56,87	58,9	60,89
8	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	25	25	25	25	100	100
9	Jumlah sertifikasi tenaga konstruksi	Orang	25	25	25	25	100	100
10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	0	0	0	0
d) Perumahan Rakyat								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	88	89	89	90	90	90
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	5,50	9,30	12,00	17,00	25,00	30,00
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	29,00	28,00	27,00	25,00	24,00	23,00
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00	88,00
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	8,15	16,31	32,62	48,92	65,23	81,54
4	Jumlah warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	8,15	16,31	32,62	48,92	65,23	81,54
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	47	53	60	67	73	80
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban non kebakaran	%	85	87	90	92	93	95
8	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	40	35	33	32	30	29
f) Sosial								
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar								
a) Tenaga Kerja								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	9	10	11	12	13	14
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	%	6,15	12,15	12,39	13,14	13,39	15,15
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp.	63,21	73,15	76,25	74,11	75,14	75,14

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	90	90	95	95	100	100
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	56,41	78,09	70,27	79,67	62,68	82,68
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	7,03	6,16	4,93	3,69	2,46	1,23
c) Pangan								
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00
d) Pertanahan								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	2,5	5	10	15	20	25
2	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100	100	100	100	100	100
3	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	5	5	5	5	5	5
4	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100
e) Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	83,79	83,96	84,14	84,31	84,48	84,65
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	43,60	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	60	65	70	75	80	85
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Presentase kepemilikan KTP elektronik	%	99,30	99,52	99,64	99,73	99,85	99,95
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	44,06	55,67	61,05	65,25	75,25	80,05
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,15	98,12	98,49	98,89	99	99,25

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	%	13,14	25,19	35,87	49,36	55,15	65,43
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	51,28	53	55	58	60	62
h) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,6	2,59	2,59	2,58	2,58	2,58
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	52,5	52,7	52,9	53,1	53,3	53,5
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,7	11,4	11,1	10,8	10,5	10,2
i) Perhubungan								
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	Rasio	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85	0,85
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	Rasio	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
j) Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	40	84,44	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	70	75	78	80	83	85
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	81,53	83,22	84,92	86,61	88,31	90
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	0,07	0,10	0,13	0,15	0,18	0,21
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	0,05	0,09	0,14	0,19	0,24	0,29
l) Penanaman Modal								
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	0,30	0,30	0,32	0,35	0,37	0,42
m) Kepemudaan dan Olahraga								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	11,49	12,06	12,66	13,3	13,96	14,66
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	11,25	11,81	12,4	13,02	13,67	14,35
3	Peningkatan prestasi olahraga	Orang	5	8	11	14	17	20
n) Statistik								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	74	75	80	82	82	85

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	74	75	80	82	82	85
o) Persandian								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	20	35	50	60	70	80
p) Kebudayaan								
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	25	30	35	40	45	50
q) Perpustakaan								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	69,42	74,92	81,42	88,92	100	100
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	62, 71	72,71	79,21	86,71	100	100
r) Kearsipan								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	50,25	60,75	70,25	80,75	90,25	100
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	5,00	7,00	9,00	10,00	12,00	12,00
Urusan Pilihan								
a) Kelautan dan Perikanan								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	21.433	21.661	21.904	22.167	22.459	22.782
b) Pariwisata								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	84	84	84	84	84	84
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	29	29	29	29	29	29
3	Tingkat hunian akomodasi	%	10	12,5	15	17,5	20	22,5
4	Kontribusi sektor pariwisata Lerhadap PDRB harga berlaku	%	0,17	0,22	0,27	0,32	0,37	0,42
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,99	1,04	1,1	1,15	1,21	1,27
c) Pertanian								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	54,91	56,29	57,41	58,55	59,72	60,91
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100	100	100	100	100	100
d) Perdagangan								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan	%	25,75	35	44	57	65	75

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)							
2	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	45	52	58	67	70	78
e) Perindustrian								
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	3,2	3,5	3,5	3,7	3,9	4,00
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	95	95	97	97	97	97
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	95	95	96	96	97	97
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	90	100	100	100	100	100
f) Transmigrasi								
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kwsn	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	SP	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	SP	1	1	1	1	1	1
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
a) Perencanaan dan Keuangan								
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
2	Rasio PAD	%	6,41	8,32	8,28	8,50	8,33	8,12
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	3	3	4	4	4
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	3	3	3	3	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
b) Pengadaan								
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan clengan metode kompetitif	%	56,3	56,6	57	57,3	57,6	58

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	86,3	86,6	87	87,3	87,6	88
c) Kepegawaian								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	420	450	480	510	550	580
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	15	20	23	26	30	33
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	14	17	23	26	29	35
d) Manajemen Keuangan								
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	%	5	5	5	5	5	5
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	2	2	2	2	2	2
3	Manajemen Aset	-	4	4	4	4	4	4
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	5	4,5	4	3,5	3	2,5
e) Transparansi dan Partisipasi Publik								
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia unluk pelayanan	%	100	100	100	100	100	100
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari milestone pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Buton lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Buton serta kerjasama dengan stakeholders pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runtut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Pemerintah Daerah.

5.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Buton maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.

3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Buton serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2021-2030. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Buton Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh OPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
4. Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Buton yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka RPJMD dapat dirubah terhadap nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Dalam upaya menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton melaksanakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dengan data yang akurat. Pengendalian ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen resiko yang dilakukan pada setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian ini dilakukan untuk menghadapi kemungkinan adanya risiko-risiko dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan nasional dan daerah. Pengendalian ini terbagi menjadi dua tahapan yaitu tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

8. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton serta melaporkan hasilnya kepada Bupati; dan
9. Sinergi pendanaan pembangunan, yang diwujudkan melalui pemanfaatan beragam sumber pendanaan, antara lain APBD murni Kabupaten, belanja Kementerian/Lembaga, transfer ke daerah dan dana desa termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pinjaman atau hibah luar negeri (PHLN), investasi swasta, serta sumber lainnya yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Setiap sumber pendanaan dikelola berdasarkan kebijakan yang berlaku sehingga terjamin keselarasan dan efektivitas pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan wilayah. Upaya ini juga menekankan pentingnya kerjasama multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur non-pemerintah, termasuk sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, maupun mitra pembangunan, guna memastikan keberlanjutan dan keterpaduan pembangunan daerah. Dengan demikian, keberadaan kerangka pendanaan dalam kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buton menjadi landasan penting untuk memperkuat arah pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan RPJMD memperhatikan konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah. Sedangkan jika terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BUPATI BUTON

ttd

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

FAKHARUDDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196810051994011002